



PENDIDIKAN TERBUKA UNTUK INDONESIA EMAS

Tian Belawati (Ed)

Dewan Guru Besar Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA
2020



UNIVERSITAS TERBUKA

PENDIDIKAN TERBUKA UNTUK INDONESIA EMAS

Tian Belawati (Ed)

Dewan Guru Besar Universitas Terbuka

**UNIVERSITAS TERBUKA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020**

PENDIDIKAN TERBUKA UNTUK INDONESIA EMAS

Editor:

Prof. Tian Belawati, Ph.D.

ISBN: 978-602-392-944-3 E- ISBN: 978-602-392-945-0

Kontributor:

1. Prof. Dr. Ginta Ginting
2. Prof. Dr. Karnedi
3. Prof. Daryono, Ph.D.
4. Prof. Dr. Chanif Nurcholis
5. Prof. Ojat Darajat, Ph.D
6. Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring
7. Prof. Dr. Ali Muktiyanto
8. Prof. Suciati, Ph.D.

Perancang Kover:

1. Prof. Tian Belawati, Ph.D.
2. Bangun Asmo Darmanto, S.Des.

Penata Letak:

1. Bangun Asmo Darmanto, S.Des.

Foto pada Cover dan Isi:

pxfuel.com

cottonbro - Pexels

Penerbit:

Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan- 15437, Banten- Indonesia
Telp.: (021) 7490941 (*hunting*); Fax.: (021) 7490147;
Laman: www.ut.ac.id

Edisi kedua

Cetakan pertama, September 2020

©2020 oleh Universitas Terbuka

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang ada pada
Penerbitan Universitas Terbuka
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Buku ini dibawah lisensi *Creative commons* Atribut Nonkomersial
BerbagiSerupa 4.0 Internasional oleh Universitas Terbuka, Indonesia.
Kondisi lisensi dapat dilihat pada <http://creativecommons.org/id/>

Universitas Terbuka: Katalog Dalam Terbitan (Versi RDA)

Nama: Universitas Terbuka

Judul: Pendidikan Terbuka untuk Indonesia Emas (BNBB) / editor, Prof. Tian Belawati, Ph.D. ; kontributor, Prof. Dr. Ginta Ginting, Prof. Dr. Karnedi, Prof. Daryono, Ph.D., Prof. Chanif Nurcholis, Prof. Ojat Darajat, Ph.D., Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, Prof. Suciati, Ph.D. ; perancang kover, Prof. Tian Belawati, Ph.D., Bangun Asmo Darmanto, S.Des.; penata letak, Bangun Asmo Darmanto, S.Des.

Edisi: 2 | Cetakan: 1

Deskripsi: Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020 | 287 halaman; 22,5 cm (termasuk daftar referensi)

ISBN: 978-602-392-944-3

E- ISBN: 978-602-392-945-0

Subyek: 1. Pendidikan Tinggi – Pendidikan Terbuka

2. Higher Education - Open Education

Nomor klasifikasi: 371.35 [23]

20200082



*Seharusnya...
“setiap orang menjadi guru,
setiap rumah menjadi sekolah”*

~ Ki Hadjar Dewantara ~

Daftar Isi

	Hal.
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR Rektor Universitas Terbuka	v
1. PENDAHULUAN: PENDIDIKAN TERBUKA DAN MODAL INSANI INDONESIA	1
1. Potret Modal Insani Indonesia 2020 <i>Prof. Dr. Ginta Ginting</i>	3
2. Konsep Pendidikan Terbuka dan Keterbukaan Pendidikan di Era Digital <i>Prof. Tian Belawati, Ph.D.</i>	20
3. Etimologi dan Perkembangan Terminologi Pendidikan Terbuka <i>Prof. Dr. Karnedi</i>	35

2.	PENDIDIKAN TERBUKA DAN Keadilan Sosial	61
1.	Dimensi Pendidikan Tinggi Terbuka <i>Prof. Daryono, Ph.D.</i>	63
2.	<i>Creative “Knowledge” Commons:</i> Tata Kelola Ilmu Pengetahuan untuk Semua <i>Prof. Daryono, Ph.D.</i>	81
3.	Model Pendidikan Terbuka: OERs dan MOOCs <i>Prof. Tian Belawati, Ph.D.</i>	95
3.	PENDIDIKAN TERBUKA SEBAGAI LAYANAN Publik	115
1.	Model Pelayanan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh sebagai Bentuk Pelayanan Publik <i>Prof. Dr. Chanif Nurcholis</i>	117
2.	Universitas Terbuka sebagai Layanan Publik untuk Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi <i>Prof. Ojat Darajat, Ph.D.</i>	136
4.	PENDIDIKAN TERBUKA DAN DEMOKRATISASI Pendidikan	155
1.	Tinjauan Sistem dan Manajemen Pendidikan Terbuka secara Makro <i>Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring</i>	157
2.	Manajemen Pendidikan Tinggi Terbuka: Model Universitas Terbuka <i>Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring</i>	173

5.	PENDIDIKAN TERBUKA DAN Keadilan EKONOMI	191
1.	Tinjauan Ekonomi Pendidikan Jarak Jauh <i>Prof. Tian Belawati, Ph.D.</i>	193
2.	Anggaran Publik untuk Pendidikan Tinggi <i>Prof. Dr. Ali Muktiyanto</i>	206
6.	TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN TERBUKA	221
1.	Paradigma Pendidikan Tinggi Menuju Pedagogi Terbuka <i>Prof. Suciati, Ph.D.</i>	223
2.	Tren Menuju Kurikulum Terbuka <i>Prof. Suciati, Ph.D.</i>	243
7.	PENUTUP: PENDIDIKAN TERBUKA UNTUK INDONESIA EMAS 2045	255
1.	Sistem Pendidikan Tinggi Terbuka Terpadu: Suatu Gagasan <i>Prof. Tian Belawati, Ph.D.</i>	257
	PROFIL EDITOR DAN KONTRIBUTOR	267
	Profil Editor	269
	Profil Kontributor	270

Kata Pengantar

Rektor Universitas Terbuka

Konsep pendidikan terbuka bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Para pendiri bangsa sangat memahami bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap orang dan telah dijabarkan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayai serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan yang dapat memenuhi amanat UUD 1945 tersebut tentu suatu sistem pendidikan yang inklusif dan dapat menjangkau setiap warga negara, sistem pendidikan yang dapat memfasilitasi demokratisasi layanan pendidikan, sistem pendidikan yang egaliter, serta sistem pendidikan yang berkeadilan bagi semua warga negara di mana pun mereka berada.

Universitas Terbuka (UT) didirikan Pemerintah pada tahun 1984 diantaranya adalah untuk memenuhi kewajiban Pemerintah dalam jenjang pendidikan tinggi. UT dirancang sebagai perguruan tinggi yang bersifat terbuka dan menerapkan metode pembelajaran jarak jauh. Keterbukaan sistem UT ditunjukkan dengan fleksibilitas dalam hal usia,

lama studi, serta latar belakang pendidikan peserta didik yang tidak menerapkan berbagai ‘kriteria lazim’ yang biasanya diterapkan oleh perguruan tinggi konvensional yang telah ada sebelumnya. Konsep dan rancangan UT sangat inovatif pada masanya, mendrobrak tatanan sistem pendidikan tinggi yang telah ada yang bersifat elitis. Dengan keterbukaan sistem UT, Pemerintah ingin membuka kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Setelah berjalan lebih dari 35 tahun, konsep pendidikan terbuka yang diimplementasikan oleh UT terbukti mampu menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem Pendidikan tinggi konvensional yang berbasis tatap muka dan ‘terbatas’ dalam hal usia dan lama studi. Sistem pendidikan terbuka yang diterapkan UT telah mampu mengejawantahkan amanat UUD 1945 serta menunaikan kewajiban Pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan tinggi bagi semua.

Dalam konteks penyiapan sumberdaya manusia Indonesia menjelang satu abad kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2045, kebutuhan akselerasi penerapan konsep pendidikan terbuka secara lebih luas menjadi sangat signifikan. Dengan APK pendidikan tinggi yang masih sekitar 35%, Indonesia memerlukan terobosan untuk dapat menjangkau kelompok usia 19-23 tahun yang masih belum terjangkau oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada sekarang. Perguruan tinggi perlu didorong untuk melebarkan layanannya dengan menerapkan sistem terbuka agar dapat meningkatkan APK ini. Perkembangan teknologi yang didukung oleh infrastruktur teknologi yang baik merupakan peluang yang harus dimanfaatkan.

Kata Pengantar

Sehubungan dengan hal inilah buku ini disusun. Buku ini menuliskan kajian tentang konsep, model, dan implementasi sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka ditinjau dari berbagai perspektif, khususnya pendidikan terbuka sebagai alat untuk membangun sumberdaya insani Indonesia, untuk menghadirkan keadilan sosial, untuk memberikan pelayanan publik, untuk mendemokratisasikan pendidikan, dan untuk menciptakan keadilan ekonomi; yang pada akhirnya adalah untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.

Buku ini ditulis oleh para profesor Universitas Terbuka yang telah berpengalaman dalam bidang pendidikan terbuka, baik sebagai praktisi maupun sebagai ilmuwan. Semoga buku ini memberikan tambahan wawasan kepada pembaca dalam memaknai konsep pendidikan terbuka dan potensinya untuk mempersiapkan SDM Indonesia.

Tangerang Selatan, Agustus 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a horizontal stroke extending to the right.

Prof. Ojat Darajat, Ph.D.

1 PENDAHULUAN: PENDIDIKAN TERBUKA DAN MODAL INSANI INDONESIA

Prof. Dr. Ginta Ginting

POTRET MODAL INSANI INDONESIA 2020

POTRET MODAL INSANI INDONESIA 2020

Manusia dengan segala kemampuannya menjadi modal utama pembangunan. Dalam diri manusia terkandung berbagai modal yang menjadi aset tidak berwujud penentu kualitas yang dapat menjadi modal utama dalam memajukan suatu negara. Teori modal manusia yang diperkenalkan oleh Schultz (1961), menegaskan ada 6 komponen modal insani yang ada pada manusia yaitu: intelektual, mental, spiritual, talenta, *relationship* dan pengalaman. Keberadaan modal insani yang berkualitas secara empiris telah terbukti mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi (pertumbuhan dan pendapatan perkapita) (Lincoln, 2018).

Jumlah penduduk Indonesia yang besar, yang pada tahun 2019 mencapai 267 jiwa merupakan modal insani yang sangat potensial jika dikelola dengan baik. Populasi penduduk Indonesia diprediksi terus mengalami pertumbuhan dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2062 sebanyak 324,76 juta jiwa dengan asumsi *medium fertility variant*. Angka tersebut menempatkan Indonesia berada di urutan keenam sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar dunia.

Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi. Bonus demografi sudah terjadi sejak tahun 2010 dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dan tahun 2030. Bonus demografi merupakan *window opportunity* yang dinikmati suatu negara karena besarnya proporsi penduduk usia produktif (rentang 15-64 tahun) (BPS, 2019). Fenomena bonus demografi terjadi karena proses transisi demografi dampak dari keberhasilan menurunkan tingkat fertilitas, meningkatnya kualitas kesehatan dan suksesnya program-program pembangunan. Jumlah penduduk usia yang sangat produktif mencapai 34,45% (15-34 tahun).

Besarnya jumlah penduduk usia muda produktif dapat menjadi *engine of growth* yang jika dikelola dengan baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih pesat lagi. Kemajuan China dan India tidak terlepas dari keberhasilannya mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa keemasan bonus demografi. Oleh karena itu, kesempatan seabad sekali ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas modal insani. Siapa kelompok usia produktif yang akan berperan mengendalikan Indonesia pada saat puncak bonus demografi (2030-2035), jawabannya adalah penduduk yang saat ini berusia **15 tahun (millennial muda)**, yang pada saat puncak bonus demografi usia mereka 30 tahun. Di rentang usia tersebut angkatan kerja berada pada puncak karir dan mempunyai semangat tinggi berkarya untuk bangsa.

Selain fenomena bonus demografi, pembangunan modal insani di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Menurut data UNDP (2019), indeks pembangunan manusia Indonesia (IPM) mencapai 71,92 lebih tinggi dari IPM 2018 (71,39). Angka IPM 2019 meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh

0,75% dibandingkan tahun 2018. Peringkat IPM dihitung menggunakan tiga komponen: kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Intinya capaian IPM 2019 mengindikasikan empat hal penting: (1) bayi yang lahir tahun 2019 dapat memiliki harapan hidup hingga 71,34 tahun, (2) anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,95 tahun (mencapai jenjang Diploma I), (3) penduduk usia 25 tahun keatas pada tahun 2019, secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun, dan (4) pada tahun 2019, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp.11,30 juta/thn, meningkat Rp. 240 ribu dibandingkan pengeluaran tahun 2018.

Peningkatan IPM 2019 sebesar 71,92, menunjukkan kualitas hidup Indonesia berada di urutan **111 dari 189 negara**. Norwegia memiliki kualitas hidup terbaik dunia, diikuti Swiss dan Irlandia. Salah satu kendala besar yang harus dihadapi Indonesia untuk meningkatkan kualitas modal insani (IPM) adalah permasalahan *inequality* (kesenjangan) pada berbagai aspek yaitu: akses teknologi, fasilitas kesehatan dan pendidikan antara wilayah kota dan pedesaan. Kemudian dari segi indeks daya saing global, pada tahun 2019 Indonesia mengalami kenaikan berada di posisi 85 dari posisi 50 di tahun 2018. Posisi yang dicapai Indonesia merupakan posisi dua terendah se-ASEAN. Posisi tertinggi dikuasai dua negara tetangga kita yaitu Singapura dan Malaysia. Menurut Brodjonegoro (2020) rendahnya indeks daya saing global dan indeks inovasi global Indonesia disebabkan karena kurangnya kemampuan SDM Indonesia yang berkapasitas inovasi dan memanfaatkan IT.

Dari berbagai pemaparan mengenai kondisi modal insani, maka urgensi penting yang menjadi pekerjaan rumah penting saat ini adalah pembangunan SDM terutama di sektor pendidikan.

SISTEM DAN PENDIDIKAN INDONESIA 2020

Pengembangan kualitas modal insani tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan dimaknai sebagai investasi masa depan karena pendidikan itu sendiri memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Pendidikan bukan saja akan melahirkan SDM berkualitas (memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi), tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu ciri Negara maju adalah tingginya tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi, oleh karena itu melalui pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas SDM yang berdaya saing, kompeten, kreatif, berwawasan luas dan mempunyai integritas tinggi yang dibutuhkan oleh berbagai sektor usaha, sektor industri dan lainnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yaitu 32,55% (2018) dan 35% (2019) menunjukkan masih rendahnya jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi karena kualitas layanan pemerintah dalam memberikan akses menempuh pendidikan tinggi. Artinya pemenuhan pendidikan di perguruan tinggi belum mencapai sepertiga dari populasi dengan usia aktif (19-23 tahun). Target pemerintah APK bisa mencapai 60-70% pada tahun 2045. Intinya rendahnya APK mengindikasikan kualitas layanan pemerintah belum optimal terutama dalam memberikan akses menempuh pendidikan tinggi mencakup 4 aspek penting yaitu kesenjangan mutu, keterbatasan program vokasi, ketidaksiapan menghadapi revolusi 4.0 dan keterbatasan kolaborasi dengan dunia industri dan usaha.

A. Kesenjangan Mutu

Dalam dunia pendidikan, masalah terbesar yang harus menjadi prioritas penyelesaian adalah kualitas.

Kualitas meliputi sistem dan metode pendidikan, dosen, kesejahteraan tenaga pendidik, metode mengajar, dan infrastrukturnya. Dalam banyak hal patut dicermati, peningkatan kualitas pendidikan adalah titik penentu yang mempertinggi kesempatan orang terdidik memperoleh pekerjaan. Saat ini masih terjadi Kesenjangan mutu pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Secara garis besar, ada 3 faktor utama penghambat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu Kurikulum pendidikan, kurangnya tenaga pendidikan berkualitas dan Pemerataan pendidikan.

Indikasi masih terjadinya kesenjangan mutu pendidikan bisa dilihat dari hasil akreditasi PT dan Program Studi, Data BAN PT tahun 2019 menunjukkan dari 2.547 perguruan tinggi di Tanah Air, baru 95 perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A, 888 perguruan tinggi terakreditasi B, 1.454 perguruan berakreditasi C. Sementara itu, dari 19.281 program studi, baru 2.512 program studi yang memiliki akreditasi A, akreditasi B sebanyak 10.005 dan akreditasi C sebanyak 5.472. Penyebab rendahnya mutu akreditasi adalah kurangnya sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, riset, keterlibatan mahasiswa, publikasi, dosen, dan lainnya.

Fakta masih tidak meratanya akreditasi PT, berbanding lurus dengan tingginya angka pengangguran lulusan PT yang semakin memicu tingginya pengangguran terbuka. Saat ini terdapat sekitar 11,4 % pengangguran lulusan PT (Sarjana 9,7% dan Diploma 2,7%). Fenomena ini semakin menambah persoalan PT di Indonesia, yang bukannya mengatasi masalah pengangguran tapi malah menambahnya. Tidak terserapnya lulusan PT masuk dunia kerja disebabkan berbagai faktor, antara lain, kompetensi

keahlian tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, lulusan program studi sudah jenuh di masyarakat, atau tidak memiliki keahlian apa pun untuk bersaing di dunia kerja.

B. Keterbatasan Program Vokasi

Paradigma pendidikan di Indonesia, masih bercirikan akademik (S1, S2, S3), sehingga mayoritas perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta masih berbasis akademik. Tuntutan program vokasi yang bercirikan kewirausahaan harus menjadi salah satu prioritas dalam membangun generasi muda berkualitas. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi setara sarjana untuk penguasaan keahlian terapan (*skill-based*).

Melalui pendidikan vokasi, lulusan PT diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan membuka lapangan kerja untuk orang lain. Secara logis, seorang sarjana harus mampu berpikir konstruktif, kreatif, dan inovatif. Sarjana harus menjadi pelopor, tidak hanya mampu menunggu kesempatan.

Pendidikan vokasi ini penting untuk dilaksanakan, bahkan presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pendidikan kedepan akan difokuskan ke vokasi. *Road map* pendidikan dan pelatihan vokasi telah selesai disusun yang berfokus pada 4 hal penting yaitu: (a) mendorong pemenuhan tenaga kerja untuk enam sektor prioritas seperti agribisnis, pariwisata, e-commerce, manufaktur, healthcare, dan ekspor tenaga kerja, (b) mendorong pemenuhan tenaga kerja untuk program prioritas pemerintah. (c) fokus pada lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan (d) memperbaiki lembaga pendidikan, meningkatkan standar kompetensi, meningkatkan kualitas pemagangan,

meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan pendanaan, serta meningkatkan koordinasi.

C. **Ketidaksiapan Menghadapi Revolusi Industri 4.0**

Kesiapan PT menghadapi Revolusi Industri 4.0 masih beragam. Belum semua PT dapat mengakomodasinya melalui perubahan kurikulum yang menjadi penciri kultur akademik PT abad 21. Perubahan kurikulum merupakan fase yang tidak dapat diabaikan dengan munculnya gelombang Revolusi Industri 4.0 (*big data, internet of things, cloud, 3d printing dan augmented reality*) dan sekarang sudah mulai memasuki *society 5.0 (artificial intelligence)*. Situasi ini belum mampu ditangkap oleh masyarakat kampus sebagai peluang untuk meningkatkan layanan akademiknya. Hal ini menjadikan APK PT tak pernah naik secara signifikan karena belum semua PT siap untuk melaksanakan *disruptive curriculum* yang inovatif dan menantang sesuai dengan tantangan zaman.

Seiring dengan berbagai perubahan-perubahan yang dipicu teknologi bersifat eksponensial karena kecepatannya merubah tantangan konvensional yang selama ini dibangun, memunculkan pertanyaan yaitu **Apakah kita siap menghadapinya?** Kunci jawabannya adalah harus ada upaya keras untuk mengembangkan SDM yang menguasai literasi baru (teknologi, data dan humanities) baik dari segi kualitas, kuantitas dan distribusi SDM berkualitas. Informasi dari *skill outlook* (The World Economic Forum, 2015 sd 2020) menunjukkan ada beberapa skill penting yang harus dimiliki oleh seseorang yaitu *complex problem solving, critical thinking, creativity, active learning dan learning strategy, leadership, system analysis* serta evaluasi. Menurut Brodjonegoro (2020) skill SDM yang diperlukan industri di masa depan adalah

complex problem solving, social skill, process skill, system skill dan cognitive ability.

Pendidikan menjadi salah satu *driver factor* peningkatan SDM. Tantangan dunia pendidikan adalah menciptakan lingkungan kondusif bagi peserta didik, akademisi dan praktisi untuk mendobrak halangan, berinovasi, menciptakan, dan berkolaborasi. Menghadapi *new culture*, tidak terlepas dari urgensi pengembangan modal insani ditinjau dari 3 aspek yaitu kualitas, kuantitas dan distribusi SDM berkualitas. SDM yang kompetitif dalam era disrupsi (4.0 menuju 5.0) yang *output*-nya mampu menguasai literasi baru yaitu: (1) literasi data, yaitu kemampuan membaca dan menganalisis serta memanfaatkan informasi *big data* dalam dunia digital; (2) literasi teknologi, yaitu memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence dan engineering principles*); dan (3) literasi manusia, *humanities*, komunikasi dan desain.

D. Keterbatasan Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Rendahnya APK PT di Indonesia, antara lain dipicu oleh rendahnya kolaborasi antara PT dengan DUDI, sehingga peserta didik belum dapat mengembangkan kompetensi karena keterbatasan praktik nyata. Selain itu hasil riset PT belum dapat dimanfaatkan untuk mendorong industri kreatif melalui inovasi. Ada 2 faktor penyebab yaitu: (a) pihak industri belum yakin bahwa PT mampu menghasilkan produk atau desain berbasis sains dan teknologi yang dapat diaplikasikan di dunia industri, dan (b) desain PT belum *link and match* dengan kebutuhan industri. Yang perlu dikaji lebih dalam adalah bagaimana dapat menutup gap minimnya kolaborasi antara PT dan dunia industri sehingga dapat dihasilkan output yang

langsung dimanfaatkan industri dan masyarakat. Etkowitz et. Al (2007) melalui artikelnya berjudul *“The Triple Helix Model of Innovation and Action”* menegaskan *“university is not only critical to the commercial transformation of knowledge, but also to create space for knowledge, assembling and innovation”*.

Triple helix merupakan sinergi tiga kekuatan yaitu pemerintah, industri dan perguruan tinggi (akademisi). Kolaborasi tiga aktor diharapkan dapat tercipta sinergi yang menguntungkan dan seimbang dan masing-masing dapat memainkan perannya secara optimal untuk mewujudkan industri yang maju (Leydesdorff, 2012)

TANTANGAN UNTUK MENYIAPKAN MODAL INSANI 2045

A. Membangun Generasi Muda Berkualitas

Jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 267 juta memerlukan pengelolaan modal insani yang tepat. Untuk mampu berdiri sejajar dengan negara-negara yang mampu mengelola modal insani seperti China dan India, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk dapat membangun generasi muda berkualitas (Milenial dan Neo Milenial). Generasi muda ini harus dapat menjadi *engine of growth* yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi utamanya di masa keemasan bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030. Pada era keemasan ini jumlah penduduk usia produktif mencapai angka lebih dari 2 kali lipat usia tidak produktif. Pada puncak bonus demografi, penduduk usia 15 - 25 tahun akan berusia 35-45 tahun, dan merekalah yang akan mengendalikan negeri ini. Generasi muda merupakan perwajahan modal insani Indonesia yang harus dipersiapkan sebaik mungkin agar pada saat tiba waktunya mereka dapat menjadi manusia

hebat yang mampu membawa Indonesia mencapai kejayaannya. Untuk itu harus ada **urgensi nasional** mempersiapkan generasi muda hebat guna memenuhi tahun-tahun emas bonus demografi.

Peningkatan kualitas generasi muda dimasa depan, harus seiring dan sejalan dengan capaian target APK pemerintah di tahun 2045 menjadi 60% - 70%. Peningkatan APK ini tidak hanya secara statistik saja, tetapi lebih jauh dari itu mampu melahirkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan mumpuni yang siap berpartisipasi mengisi pembangunan bangsa. Dengan semakin meningkatnya generasi muda untuk mengenyam pendidikan tinggi, akan memberikan kesempatan kepada mereka mempersiapkan diri menghadapi berbagai perubahan yang sangat cepat terutama perubahan TI. Era revolusi industri yang secara kasat mata harus dihadapi, pasti membutuhkan kompetensi-kompetensi yang sangat kompleks.

Bonus demografi adalah kesempatan yang terjadi sekali dalam sejarah sebuah bangsa, sehingga perlu disongsong dengan membangun sebuah **model pendidikan** yang dapat mengubah generasi muda menjadi generasi pencipta yang mampu menghasilkan inovasi yang berdampak positif terhadap kemajuan dunia industri/ usaha dan masyarakat. Beberapa ahli (Ahmad et al, 2019, Bayraktar & Atac, 2018; Hecklau et al., 2016) menegaskan diperlukannya pendekatan holistik untuk mengelola SDM di era revolusi industri 4.0, khususnya untuk menghadapi berbagai tantangan seperti ekonomi, sosial, teknik, lingkungan dan politik/hukum (Gambar 1). Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan empat kompetensi inti yaitu: (a) kompetensi teknis: pemahaman terhadap *information technology* (IT), (b) kompetensi

metodologi: pemecahan masalah, kreatifitas, berpikir kritis, berorientasi kewirausahaan, (c) kompetensi sosial: bahasa, kepemimpinan, membangun jejaring, dan (d) kompetensi personal: motivasi, fleksibilitas, kemampuan bekerja dibawah tekanan.

Harus ada terobosan untuk *re-design future ready curricula* yaitu kurikulum yang mengakomodasi permintaan *skill* di pasar - *global citizenship skill*. Kementerian Ristek dan Dikti (2018) dalam “Mempersiapkan Indonesia di Era 4.0” mewajibkan beberapa poin penting untuk dimasukkan dalam kurikulum baru PT yaitu *co-extra curricular*; *cognitive skills (critical thinking dan entrepreneurship)*; *lifelong learning* dan *new literacies (data, teknologi dan human)*. Tantangan dunia pendidikan adalah menciptakan lingkungan kondusif bagi peserta didik, akademisi dan praktisi untuk mendobrak halangan, berinovasi, menciptakan, dan berkolaborasi (Ahmad & Noor, 2019).

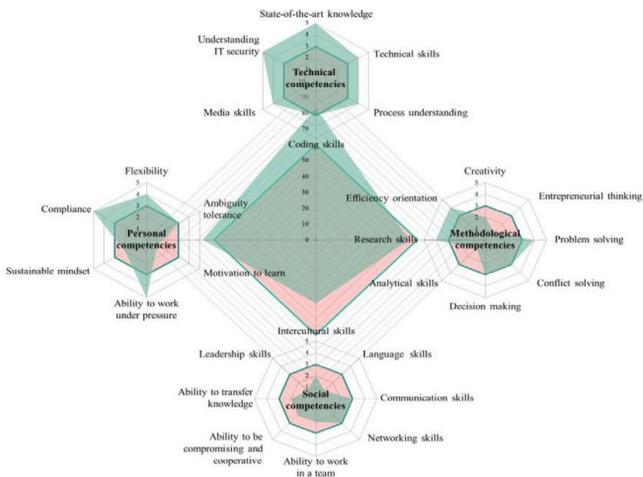


Figure 2: Visualized competence model

Gambar 1. Four Competency in the Era 4.0

Sumber: Hecklau et al, 2016, P.5. Holistic Approach for Human resource Management in Industry 4.0. Procedia. Science Direct.

Fokus pada pendidikan vokasi melalui magang dan training menjadi prioritas pembangunan generasi muda berkualitas Indonesia di masa depan. Pendidikan vokasi ini penting untuk memecahkan permasalahan *link and match* dan pengangguran terbuka saat ini yang harus dicari solusi secara konstruktif agar tidak menyebabkan *bottleneck* dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan berbasis vokasi ini penting untuk menghasilkan lulusan dengan tingkat kemandirian dan semangat kewirausahaan tinggi. Diharapkan lulusan vokasi ini dapat mencetak generasi masa depan yaitu seorang sarjana yang dapat menciptakan pekerjaan sendiri dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Generasi masa depan adalah lulusan PT yang mampu berpikir konstruktif, kreatif dan inovatif. Selain itu pendidikan vokasi merupakan investasi SDM yang disesuaikan dengan dunia industri. Kesuksesan pengembangan pendidikan vokasi adalah terimplementasinya *triple helix* yaitu kolaborasi pemerintah, PT dan dunia industri. Menurut Brodjonegoro (2020), sinergi *Triple Helix* dibutuhkan untuk mendukung ekosistem inovasi agar dapat mendorong sebuah ide inovatif menjadi produk yang siap dikomersialisasi. Sinergi tiga pemangku kepentingan harus dapat dioptimalkan yaitu akademisi (PT, lembaga Litbang), industri (masyarakat, BUMD, BUMN, investor) dan pemerintah (Kementerian Keuangan, Bapenas, Kementerian Teknis).

B. Peran Pendidikan Terbuka Membangun Generasi Muda Berkualitas

Kunci keberhasilan pembangunan modal insani di masa depan adalah ***“a new deal on open education”***. Konsep Pendidikan Terbuka yang menekankan pada keluwesan sistem yang dapat membebaskan individu untuk belajar tanpa restriksi (kuantitas, tempat, waktu, usia dan keadaan

ekonomi) (Belawati, 2002). Pendidikan terbuka dapat menjadi model pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan kompetensi, pengetahuan dan skill bagi generasi muda sekaligus menjadi solusi untuk meningkatkan APK. Keterbukaan sistem pendidikan dalam memberikan akses dan kualitas harus didukung oleh teknologi sehingga dapat memberikan kemudahan akses (interaksi) bagi generasi muda untuk meningkatkan *knowledge* dan pengembangan profesionalitas (*upgrade* kualifikasi dan kompetensi).

Dukungan teknologi (pemanfaatan TIK) akan semakin mengokohkan keberadaan pendidikan terbuka untuk menghasilkan SDM kompetitif yang *output*-nya mampu menguasai literasi baru yaitu: (1) literasi data, yaitu kemampuan membaca dan menganalisis serta memanfaatkan informasi *big data* dalam dunia digital; (2) literasi teknologi, yaitu memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi (*coding*, *artificial intelligence* dan *engineering principles*); dan (3) literasi manusia, *humanities*, komunikasi dan desain. *The World Economic Forum (2017)* dalam tulisan "*realizing human potential in the Fourth Industrial Revolution-Shape the Future of Education*", menyatakan ada beberapa area yang harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan sumber daya insani (*transforming education ecosystem*) diantaranya yaitu keterbukaan terhadap pendidikan dan inovasi serta *lifelong learning*.

Pendidikan Terbuka dapat mengakomodasi kebutuhan menjadi *lifelong learner*. Generasi muda Indonesia harus menjadi pembelajar aktif (formal, informal dan nonformal). Generasi muda yang mampu menjadi *lifelong learner* sejati akan menjadi manusia berkualitas yang

memiliki pola berpikir tertata, mampu membangun jejaring, mampu beradaptasi secara fleksibel, penuh rasa ingin tahu, dan menjadi sumber belajar (Haydar & Alsai, 2012). Menurut Aminuddin et. al (2019) *empowering lifelong learning* melalui *open and distance education* berperan penting mengakomodasi kebutuhan *learners* dengan memberikan kesempatan kepada *working students beyond the traditional college age population*. Ada beberapa *tools lifelong learning* yang akan menjadi tren kedepan dan semakin banyak diminati masyarakat yaitu MOOCs (*Massive Open Online Courses*), OER (*Open Education Resources*), OEP (*Open Education Practice*) dan *online learning*.

PENUTUP

Kemajuan Indonesia di masa depan, tidak terlepas dari urgensi nasional mempersiapkan generasi muda hebat guna memenuhi tahun-tahun emas bonus demografi. Mengelola modal insani secara tepat merupakan *window opportunity* untuk meningkatkan IPM yang saat ini di urutan 111 dari 189 negara dan indeks daya saing global yang saat ini di posisi 85 (nomor 2 terendah di ASEAN). Pembangunan SDM terutama di sektor pendidikan berperan penting untuk melakukan akselerasi menciptakan generasi muda berkualitas. Generasi masa depan yang didominasi generasi muda produktif harus dapat menjadi *engine of growth* yang jika dikelola dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih pesat lagi.

Dari berbagai pemaparan mengenai kondisi modal insani, maka urgensi penting yang menjadi pekerjaan rumah penting saat ini adalah pembangunan SDM di sektor pendidikan. Kemajuan sektor pendidikan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, melainkan harus mendapatkan dukungan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama dapat memfasilitasi generasi muda mendapat pengetahuan dan ketrampilan yang mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja. Peningkatan APK menjadi salah satu faktor penting agar semakin banyak generasi muda yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Harus ada perubahan paradigma mengembangkan model pendidikan yang dapat memberikan akses untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Perlu adanya *transforming education ecosystem* yaitu keterbukaan terhadap pendidikan serta inovasi.

Di masa mendatang, *open education* semakin berperan penting untuk dapat mengakomodasi kebutuhan generasi muda meningkatkan *knowledge*, *skill*, kompetensi dan profesionalism dengan memberikan akses (interaksi dan kualitas pendidikan) agar dapat menjadi pembelajar aktif dan *longlife learner*. Dukungan teknologi (pemanfaatan IT) akan semakin mengokohkan keberadaan pendidikan terbuka untuk menghasilkan SDM yang kompetitif (kuantitas dan kualitas). Kedepan diharapkan muncul generasi muda berkualitas yang dapat melakukan *disruption of innovation* sehingga mampu berkompetisi di tingkat dunia.

REFERENSI

- Ahmad, N. A, Shamsuddin dan Noor, A. (2019). Industry 4.0 implications on human capital: A review. *Journal for Studies in Management and Planning ISSN: 2395-0463 Vol-4, Special Issue-13*
- Zuhairi, Aminudin; Hsueh, Amy Ching-Tsu, & Chiang, I-Chin Nonie. (2020). *Empowering lifelong learning through open universities in Taiwan and Indonesia*. Diunduh dari repository.ut.ac.id
- Badan Akreditasi Nasional PT. (2019). Akreditasi PT di Indonesia.
- Bayraktar, O. & C. Atac. (2018). *The effects of industry 4.0 on human resources management*. Diunduh dari <https://www.researchgate.net/publication/32970673>
- Belawati, Tian (2002). *Perkembangan pemikiran pendidikan terbuka dan jarak jauh*. Dalam T. Belawati dkk. Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (hal 30-44). Jakarta: Universitas Terbuka. Tersedia pada repository.ut.ac.id/4017/1/UTPTJJ-ALL.pdf
- BPS. (2010). Hasil Sensus Penduduk.
- Brodjonegoro, Bambang. (2020). *Inovasi nasional untuk Indonesia Maju*. Ristek-BRIN.
- Etzkowitz, Benner (2017). *The Triple Helix model on innovation and action*. November 2008 DOI: 10.3152/030234208X389701
- Haydar, Ates. & Kadir Alsai. (2012). The importance of lifelong learning has been increasing. *Social and Behavioral Sciences*, 46 (2012), 4092 – 4096 Procedia.
- Hecklau, F., Galeitzke, M., & Flaschs, S. (2016). *Holistic approach for human resource management in Industry 4.0*. 6th CLF - 6th CIRP Conference on Learning Factories.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2018). Mempersiapkan SDM Indonesia di Era Industri 4.0.

- Leydesdorff, Loet. (2012). *The triple helix University – Industry – Government relations*. SSRN-id 996760.pdf.
- Lincoln, Arsyad. (2018). *Modal insani (human capital) dan pembangunan ekonomi*. Paper disampaikan pada University Research Colloquium (URECOL) di STIKES Muhammadiyah Surakarta, Sabtu, 10 Februari 2018
- Schultz, Theodore W. (1961). *Investment in human capital*. American Economic Association, Vol. 5,1.
- UNDP (2019). *Human development report: Inequalities in human development in the 21st Century*. Briefing note for countries on the 2019 Human Development Report. Indonesia.
- World Economic Forum*. (2017). *Realizing human potential in the fourth industrial revolution. An agenda for leaders to shape the future of education, gender and work*.

Prof. Tian Belawati, Ph.D.

KONSEP PENDIDIKAN TERBUKA DAN KETERBUKAAN PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL

PENDIDIKAN DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Tujuan kemerdekaan bagi sebuah bangsa tidak hanya untuk berdaulat secara politik. Hal ini sangat tegas disampaikan dalam pembukaan UUD negara kita yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia utamanya untuk: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, dan (3) mencerdaskan kehidupan bangsa. Para pendiri bangsa kita sangat memahami bahwa pendidikan merupakan hal terpenting dalam memajukan suatu masyarakat dan bangsa. Oleh karena itulah, susunan negara Republik Indonesia didasarkan kepada PANCASILA yang salah satu silanya adalah untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui pendidikan kita meneruskan dan mewariskan kekayaan pengetahuan untuk menyiapkan generasi penerus

kepemimpinan, inovasi, dan produktivitas masyarakat. Plato, salah seorang filsuf pertama yang memikirkan makna pendidikan mempercayai bahwa pada hakekatnya pendidikan merupakan *the well-being of human society*, dan oleh karena hal itu merupakan kegiatan terpenting manusia maka pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah (Turan, 2011). Sistem pendidikan suatu pemerintahan harus diciptakan untuk memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk membangun kehidupannya dengan baik, menjadikan mereka warganegara yang produktif dan kontributif terhadap upaya kemajuan masyarakat dan bangsanya.

Pemahaman akan falsafah pendidikan sebagai hak dasar setiap orang telah dirangkum dalam Deklarasi Universal PBB tentang hak azasi manusia yang menyatakan bahwa “*everyone has the right to education*”, dan di Indonesia telah dijabarkan dalam Pasal 31 UUD 45, khususnya ayat (1)-(3) yang menyatakan bahwa: (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ketiga ayat ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk merancang dan mengembangkan suatu sistem pendidikan yang



dapat memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sistem pendidikan seperti apa yang dapat memenuhi amanat dari Deklarasi Hak Azasi Manusia serta UUD 45 tersebut? Tentu suatu sistem pendidikan yang inklusif dan dapat menjangkau setiap warga negara, sistem pendidikan yang dapat memfasilitasi demokratisasi layanan pendidikan, sistem pendidikan yang egaliter, serta sistem pendidikan yang berkeadilan bagi semua warga negara di mana pun mereka berada.

KONSEP PENDIDIKAN TERBUKA

Pendidikan Terbuka (*open education*) adalah suatu konsep yang menekankan pada keterbukaan akses, inklusivitas sistem, dan transparansi. Bates (1995) mendefinisikan *open education* sebagai suatu kondisi ideal sistem pendidikan yang dapat diakses oleh setiap orang tanpa kendala atau dengan kendala minimal. Sehingga dalam konsep pendidikan terbuka, fleksibilitas sistem untuk menghilangkan kendala yang disebabkan oleh usia, waktu, lokasi tempat tinggal dan keadaan ekonomi seseorang menjadi sangat sentral.

Sebagai suatu paradigma, pendidikan terbuka telah ada jauh sebelum lahirnya gerakan-gerakan (*movements*) keterbukaan lain seperti *open source software*, *open courseware*, ataupun *open educational resources*. Peters (2008) menyebutkan bahwa awal sejarah pendidikan terbuka dapat ditelusuri dari suatu percobaan yang dilakukan pada sebuah sekolah khusus di awal abad ke-20. Percobaan tersebut diinspirasi oleh teori politik dan psikologi kontemporer yang berupaya untuk memberikan jalur alternatif dari *mainstream* yang umumnya berafiliasi dengan masyarakat atau institusi yang didukung secara politis. Gagasan awal ini jelas berhubungan dengan *freedom of movement* dan keinginan untuk menjembatani 'jarak' yang mulai menjadi *concern* di akhir abad ke-19.

Konsep 'jarak' ini kemudian berkembang tidak hanya pada jarak fisik, tetapi juga jarak sosial. Eric Hoffer (1955), seorang filsuf Amerika, menggambarkan tentang arti kata 'kaya atau berada'. Menurutnya,

"The real "haves" are they who can acquire freedom, self-confidence, and even riches without depriving others of them. They acquire all of these by developing and applying their potentialities. On the other hand, the real "have nots" are they who cannot have aught except by depriving others of it. They can feel free only by diminishing the freedom of others, self-confident by spreading fear and dependence among others, and rich by making others poor".

Keinginan untuk menjembatani 'jarak' inilah yang kemudian melahirkan berbagai inisiatif global yang saling berkaitan, terkadang seperti tumpang tindih, namun pada akhirnya saling menunjang dan menguatkan. Pendidikan Terbuka sebagai suatu konsep menjadi sangat kompleks dan terdiri dari berbagai dimensi. Model penyelenggaraan seperti sekolah terbuka dan universitas terbuka, serta berbagai gagasan, inisiatif, dan *movements* seperti *open movements (source software, open content, open courseware, open licensing, dan open educational resources movements)* telah secara langsung maupun tidak langsung mempercepat akselerasi pengenalan dan adopsi konsep Pendidikan Terbuka oleh masyarakat global. Walaupun kompleks, konsep pendidikan terbuka berhasil mendapatkan tempat di hati para tokoh pendidikan dan para pengambil keputusan di seluruh dunia.

Walaupun sistem pendidikan jarak jauh telah mulai sejak pertengahan abad 19 (Belawati, 2019), pendidikan jarak jauh sebagai sistem implementasi Pendidikan Terbuka mulai dikenal secara luas sejak pendirian universitas terbuka pertama di

Inggris yang bernama *The Open University* (awalnya dikenal sebagai The British Open University dan United Kingdom Open University) pada tahun 1969. Model penyelenggaraan *The Open University (OU)* ini dinilai sukses membuka akses pendidikan tinggi secara masal dan kemudian banyak ditiru oleh negara lain termasuk Indonesia yang mendirikan Universitas Terbuka (UT) pada tahun 1984. Konsep universitas terbuka adalah meniadakan kendala masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan tinggi, khususnya dalam hal kendala ekonomi, sosial, jarak/tempat tinggal, usia, dan lama studi.

PENDIDIKAN TERBUKA DAN KOMITMEN KETERBUKAAN PENDIDIKAN

Komitmen dunia terhadap kebijakan Pendidikan Terbuka dideklarasikan dalam berbagai format, diantaranya misalnya "*Cape Town Open Education Declaration*" yang ditandatangani oleh kurang lebih 2915 praktisi pendidikan yang melakukan pertemuan di Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 2007. Deklarasi ini menyatakan komitmen para praktisi pendidikan untuk mempromosikan akses terbuka terhadap pendidikan dan penggunaan sumber pembelajaran terbuka, serta mendorong pemerintah-pemerintah untuk menerapkan praktik kebijakan terbuka bagi produk-produk pendidikan yang dibiayai oleh dana publik. Komitmen ini juga dikukuhkan menjadi salah satu *goal* dari *Millenium Development Goals* (2000-2015) dan kemudian dari *Sustainable Development Goals* (2015-2030).

Secara khusus, tujuan keempat *Sustainable Development Goals* (SDGs) dirumuskan untuk memastikan tersedianya sistem pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil, serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Tujuan itu diturunkan menjadi 10 target khusus yang harus dicapai pada tahun 2030. Seiring dengan SDG ini, kurang lebih 1600 peserta World Education Forum pada tahun 2015 kemudian



membuat Deklarasi Icheon yang menegaskan komitmen negara-negara dan komunitas global terhadap agenda tunggal pendidikan yang baru, *Education 2030 Framework for Action* yang kemudian diadopsi oleh UNESCO pada November 2030. Komitmen dalam *Education 2030* itu

diantaranya menekankan bahwa:

- ... commit to **quality education** and to improving learning outcomes.
- ... commit to promoting quality lifelong learning opportunities for all the provision of flexible learning pathways, as well as the recognition, validation and accreditation of the knowledge, skills and competencies acquired through non-formal and informal education, is important. Information and communication **technologies (ICTs) must be harnessed** to strengthen education systems, knowledge dissemination, information access, quality and effective learning, and more effective service provision.

Komitmen ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintahan secara global sangat khawatir dengan fakta ketimpangan akses terhadap pendidikan ini. Data menunjukkan, bahkan tiga tahun setelah SDG dirumuskan, masih ada 263 juta anak, remaja, dan orang dewasa, hampir 20% dari populasi kelompok usianya, yang masih belum dapat diberi akses terhadap pendidikan formal (UNESCO, 2018). Oleh

karena itu, komitmen yang didukung oleh teknologi saja belum cukup untuk dapat mencapai target-target SDG. UNESCO kemudian merekomendasikan pengadopsian *Ljubljana Open Educational Resources (OERs) Action Plan 2017* sebagai upaya untuk mencapai target *Education 2030 Agenda* (UNESCO, 2019). OERs adalah salah satu bentuk dan dimensi Pendidikan Terbuka yang oleh UNESCO didefinisikan sebagai:

“...learning, teaching and research materials in any format and medium that reside in the public domain or are under copyright that have been released under an open license that permit no-cost access, re-use, re-purpose, adaptation and redistribution by others.”

Komitmen dalam *Education 2030* sangat selaras dengan pemahaman *open education* yang disampaikan oleh Bates (1995) di atas. Dan untuk mengimplementasikan komitmen tersebut, *Open Education Consortium* menyebutkan kuncinya ada pada satu kata, yaitu *sharing* atau berbagi.

Open education encompasses resources, tools and practices that employ a framework of open sharing to improve educational access and effectiveness worldwide (OEC, 2017).

Masyarakat global menyadari bahwa tanpa mengadopsi dan mengimplementasikan konsep pendidikan terbuka maka Agenda *Education 2030* tidak akan tercapai.

PENDIDIKAN TERBUKA DAN ERA DIGITAL

Perkembangan konsep dan aksi implementasi Pendidikan Terbuka sangat dipengaruhi oleh perkembangan TIK. Dimensi perkembangan TIK yang paling berpengaruh adalah TIK yang memfasilitasi kolaborasi dalam jejaring Internet yang

dimulai di era WWW 2.0 yang bersifat interaktif. Hal ini telah memungkinkan terjadinya suatu inisiatif global untuk mengembangkan dan membagikan aplikasi-aplikasi komputer dan konten secara terbuka.

Suatu gerakan global pertama yang signifikan adalah *free software movement* dan *Open Source Software (OSS)* yang telah melahirkan aneka aplikasi komputer yang dapat digunakan dan dimodifikasi oleh penggunanya secara terbuka (dan pada umumnya tanpa biaya).

“... the users have the freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software...” (GNU.org in Belawati, 2014)

Walaupun tidak semua OSS tanpa biaya, namun OSS *movement* telah melahirkan banyak aplikasi gratis, termasuk aplikasi untuk bidang pendidikan (Belawati, 2019).

Perkembangan OSS juga telah mendorong pengguna Internet untuk menciptakan konten dan membagikannya melalui Internet, sehingga pengguna Internet menjadi produsen sekaligus konsumen konten-konten yang dibagikan melalui Internet. Hal ini telah melahirkan paradigma - paradigma berbagi (*sharing paradigm*) dimana setiap orang menjadi termotivasi untuk membagi hasil ciptaannya dan menjadikan konten ciptaannya sebagai konten yang bersifat terbuka atau *open content* yang didefinisikan oleh David Wiley sebagai konten yang dipublikasikan dengan:

“Give permission to 5R: Retain, Reuse, Revise, Remix, dan Redistribute” (Wiley in Belawati, 2014)

Inilah yang kemudian melahirkan berbagai *open content*, diantaranya yang disebut dengan *learning object* (LO), *learning object material* (LOM), dan *open courseware* (OCW). The Massachusetts Institute of Technology (MIT) merupakan institusi pendidikan tinggi pertama yang secara eksplisit pada tahun 2001 mendeklarasikan semua bahan perkuliahannya sebagai materi terbuka yang dikenal sebagai “MIT Open Courseware (MIT-OCW)”.

Inisiatif MIT ini lalu banyak diikuti oleh berbagai institusi di seluruh dunia, baik institusi pendidikan formal maupun institusi lainnya. UNESCO pada tahun 2002 kemudian memperkenalkan istilah ***Open Educational Resources*** (OER) pada forum *the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries*, yang didefinisikan sebagai sumber belajar, alat pembelajaran, dan hasil penelitian yang diterbitkan melalui ruang publik atau yang telah mendapat ijin untuk dapat digunakan secara bebas untuk keperluan lain oleh siapapun yang akan menggunakan. OER meliputi berbagai bentuk seperti materi perkuliahan utuh, bahan ajar matakuliah, modul, buku teks, video streaming, tes, perangkat lunak, serta berbagai alat, materi, ataupun teknik yang digunakan untuk dapat mengakses pengetahuan (Hewlett Foundation, 2014).

Perkembangan TIK dan paradigma keterbukaan baik dalam hal perangkat lunak (yang melahirkan OSS) maupun materi ilmu pengetahuan (yang melahirkan OER) merupakan dua hal yang melahirkan dan sekaligus meningkatkan perkembangan pendidikan terbuka. Inisiatif-inisiatif yang lahir kemudian seiring dengan perkembangan gerakan global *open content* seperti *open textbook*, *open research*, *open data*, dan *open licensing movements* meningkatkan arti kata ‘terbuka’ secara lebih luas dan substansial. Inisiatif-inisiatif ini mengaktualisasikan filosofi bahwa ‘pengetahuan’ merupakan

milik publik dan oleh karena itu seharusnya dibagi kepada masyarakat secara mudah dan bebas biaya.

Dasar dari berbagai *open movements* tersebut sekali lagi adalah paradigma berbagi (*sharing paradigm*) yang diakselerasi penyebarannya oleh kemajuan TIK yang interaktif dan transparan.

Scheme for sharing without violating the copy right such as GNU Public License (GPL), Apache Public License, Mozilla Public License, Creative Commons (Belawati, 2014)

Selaras dengan OEC, Wiley dalam cuitannya di Twitter pada 14 Januari 2017 mengatakan bahwa pengertian paling komprehensif akan kata ‘pendidikan’ adalah *sharing*. Lebih jauh Wiley (2017) menyatakan bahwa sesungguhnya “*Ideas, knowledge, skills, and attitudes are public goods*” yang artinya “... nonrivalrous and nonexcludable” sehingga mudah untuk dibagikan. Ketika gagasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap itu dituangkan dalam suatu bentuk/artifak fisik seperti buku misalnya, maka berubah menjadi barang privat dan sulit untuk dibagi. Namun jika kemudian, artifak tersebut diubah formatnya ke format digital, maka sebetulnya hal ini mengubah lagi sifat artifak kembali menjadi barang publik yang mudah dibagikan.

Di era digital ini, biaya untuk mereplika dan menyalin ilmu pengetahuan digital hampir mendekati nol. Kombinasi antara *internet* yang bersifat terbuka dengan *open licensing* (lisensi



konten terbuka) merupakan teknologi yang dapat kita gunakan untuk secara bebas mendistribusikan ilmu pengetahuan.

Konsep berbagi pengetahuan berbeda dengan berbagi barang secara fisik. Ketika kita berbagi pengetahuan, kita masih tetap memiliki pengetahuan tersebut dan dapat memanfaatkannya. Pengetahuan berkembang seiring penggunaannya. Jadi jika kita menempatkan pengetahuan secara ‘terbuka’ sebagai suatu sistem, maka pengetahuan tersebut dapat menjadi sesuatu yang berkelanjutan dan dapat dilipatgandakan.

Kebebasan digital (*digital freedom*) merupakan sebuah ekspresi yang menyiratkan spirit/semangat untuk berkolaborasi yang sekarang dimungkinkan dengan adanya internet yang bersifat terbuka. Hal terpenting dalam kebebasan digital adalah kolaborasi dengan prinsip berbagi (*sharing*), menggabungkan (*remix*), dan mengembangkan lebih jauh karya seseorang untuk manfaat yang lebih tinggi.

Namun demikian, pada kenyataannya, saat ini kebanyakan materi/ilmu pengetahuan terkunci oleh konsep ‘Hak Cipta’ yang sangat restriktif, sehingga ilmu pengetahuan tersebut menjadi tidak dapat diakses orang banyak dan terlalu mahal bagi mayoritas masyarakat di negara-negara berkembang. Disamping itu, konsep Hak Cipta juga sebenarnya sudah tidak terlalu sesuai dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital sekarang ini. Konsep lisensi terbuka seperti *Creative Commons (CC)* menawarkan cara melindungi hak karya ciptaan dengan lebih fleksibel. Secara umum, CC memberikan enam (6) alternatif lisensi yang dapat diadopsi oleh seorang pencipta (penulis) karya, mulai dari yang paling bebas hingga yang paling restriktif. Penggunaan CC ini tidak bertentangan dengan konsep Hak Cipta konvensional, karena semua alternatif CC tetap wajib memberikan pengakuan

(atribusi) kepada pencipta aslinya. Secara singkat keenam lisensi CC disajikan pada Tabel 1 sedangkan penjelasan komprehensif mengenai hal ini akan dibahas pada Bab lain buku ini.

Tabel 1. Lisensi Terbuka *Creative Commons*

JENIS LISENSI	LAMBANG
ATRIBUSI: CC BY	
ATRIBUSI-BERBAGISERUPA: CC BY-SA	
ATRIBUSI-TANPATURUNAN: CC BY-ND	
ATRIBUSI-NONKOMERSIAL: CC BY-NC	
ATRIBUSI-NONKOMERSIAL-BERBAGISERUPA: CC BY-NC-SA	
ATRIBUSI-NONKOMERSIAL-TANPATURUNAN: CC BY-NC-ND	

Sumber: *Creative Commons Indonesia*

Lisensi terbuka CC juga menyediakan alat domain publik CC yang memungkinkan pencipta/penulis/pemilik hak cipta untuk mendedikasikan karya mereka ke domain publik di seluruh dunia, dan memfasilitasi pelabelan dan penemuan karya yang sudah bebas dari batasan hak cipta yang diketahui. Perhatikan bahwa domain publik bukan lisensi, tetapi dedikasi oleh penulis untuk melepaskan hak kekayaan intelektual atas karya tersebut (Tabel 2).

Tabel 2. Label CC untuk Karya Publik

PENJELASAN	LABEL
Singkatan CC0 memungkinkan pencipta untuk melepaskan semua hak dan menempatkan sebuah karya di domain publik.	
Untuk suatu karya yang sudah ada dalam domain publik, 'Tanda Domain Publik' (" <i>Public Domain Mark</i> ") dapat digunakan untuk "menandai" suatu karya sebagai berada dalam domain publik.	

Perangkat lisensi terbuka ini memungkinkan dilakukannya aktivitas *sharing* secara transparan dan tanpa melanggar etika akademis maupun hukum Hak Cipta. Tanpa perangkat pendukung seperti CC tentu akan sulit konsep Pendidikan Terbuka dilakukan secara legal walaupun teknologi digital telah mampu memfasilitasinya dengan baik.

Perangkat-perangkat pendukung aktivitas pendidikan terbuka terus berkembang dan diadopsi oleh masyarakat global. Sekarang ini telah umum dilakukan proses pendidikan terbuka yang dapat memberikan 'sertifikasi' sebagai bentuk pengakuan pencapaian hasil belajar secara digital, baik yang bersifat terbuka seperti *open badges* maupun yang bersifat lebih formal.

PENUTUP

Berbagai perangkat yang dihasilkan oleh *open movements* global telah memungkinkan terjadinya paradigma *sharing* yang mendasari beragam upaya implementasi konsep pendidikan terbuka. Dengan pendidikan terbuka, negara dan Pemerintah dapat merancang sistem pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan kepada semua orang, tanpa terkecuali, dengan tetap menjaga dan memelihara etika akademik serta

kepemilikan hak cipta seseorang. Disamping itu, Pendidikan Terbuka sebagai suatu filosofi dan konsep sangat relevan untuk Indonesia karena dapat mengejawantahkan amanat Konstitusi serta aspirasi dalam Dasar Negara Pancasila untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya adalah keadilan dalam memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk menjadi warga negara yang sejahtera, bermartabat, dan berakhlak mulia. Seperti kata Ki Hadjar Dewantara,

“Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa ilmu, dan dengan ilmu kita menuju kemuliaan”

REFERENSI

- Belawati, T. (2019). Massive open online courses. The state of practice in Indonesia. Dalam K. Zhang, C.J. Bonk, T.C. Reeves, T.H. Reynolds, *MOOCS and Open Education in The Global South. Challenges, Successes, and Opportunities* (hal 63-71). New York: Routledge.
- Creative Commons Indonesia. (2016). *Tentang lisensi*. Tersedia pada URL <https://creativecommons.or.id/lisensi-cc-bahasa-indonesia/>
- Databoks.katadata. (2018). *100 tahun Indonesia merdeka jumlah penduduk mencapai 319 juta jiwa*. Diunduh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/03/100-tahun-indonesia-merdeka-jumlah-penduduk-mencapai-319-juta-jiwa>.
- Kompas.com. (2019). *Menyiasati Naiknya Angka Partisipasi Kuliah dengan Kuliah Online*”, Dibaca pada <https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/18/20564831/menyiasati-naiknya-angka-partisipasi-kuliah-dengan-kuliah-online>.

- Turan, Selahattin. (2011). Plato's concept of education in 'Republic' and Aristotle's concept of education in 'Politics'. *Education and Science*, 36(162), pp. 31-38
- UNESCO. (2018). *One in five children, adolescents and youth is out of school*. UIS/GEM Report Fact Sheet 48, p.5. Diunduh pada tanggal 29 Januari 2020 dari <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf>
- UNESCO. (2019). *UNESCO recommendation on open educational resources*. Diunduh pada tanggal 29 Januari 2020 dari <https://en.unesco.org/news/unesco-recommendation-open-educational-resources-oeer>

Prof. Dr. Karnedi

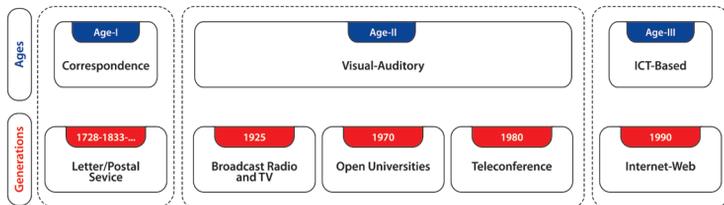
ETIMOLOGI DAN PERKEMBANGAN TERMINOLOGI PENDIDIKAN TERBUKA

PENDAHULUAN

Era Postmodern telah mengubah persepsi dunia terhadap pendidikan yang ditandai dengan munculnya Gerakan Pendidikan Terbuka (*open movement*), perubahan dalam masyarakat yang begitu cepat, dan kemajuan di bidang teknologi (pendidikan). Pendidikan Terbuka (*Open Education/ Open Learning*) merupakan respons terhadap situasi dunia yang terus berubah dan beragam tersebut (Edwards, 1995).

Dalam konteks ini, istilah ‘Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh/ PTJJ’ (*Open and Distance Learning*) dan Pendidikan Jarak Jauh/PJJ (*Distance Education*) mengadopsi pendekatan yang berbeda. PJJ lebih berorientasi pada moda pembelajaran massal untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dalam sebuah segmen pasar yang sangat luas; pendidikan lebih didasarkan pada sebuah kurikulum standar. Sementara itu, PTJJ lebih dititikberatkan pada upaya mengakomodasi kebutuhan akan pendidikan pada tingkat lokal dan cenderung beragam (Edwards, 1995).

Sebagian ahli, peneliti dan praktisi Pendidikan Terbuka (PT) lebih menyoroti dimensi pedagogis dan interaksi antara pembelajar dan tutor menggunakan perangkat (*platfom*) teknologi pendidikan sampai pada desain instruksional (*instructional systems design*) berupa pengembangan kurikulum dengan segala tahapannya (*course design*) dan berbagai upaya pemutakhiran bahan ajar (termasuk pengelolaannya) menggunakan kecanggihan teknologi pendidikan (Suparman, 2009), strategi pembelajaran, *delivery system* serta sistem penjaminan mutu PT (Rogers, dkk, 2009). Dengan kata lain, narasi terkait PT lebih dominan mengkaji dari sisi teori¹, konfigurasi teknologi pendidikan, manajemen berupa praktik baik (*best practices*) PT dari berbagai belahan dunia, termasuk Universitas Terbuka (UT) sebagai institusi pelopor PT di Indonesia selama hampir lebih dari 35 tahun terakhir. Bahkan, berdasarkan jumlah mahasiswa, UT termasuk kategori *mega-university* (Daniel, 1996; Moore dan Kearsley, 2012) karena selama perkembangannya memiliki jumlah mahasiswa sampai ratusan ribu mahasiswa.



Gambar 1. Era dan Generasi PJJ

Jika PT lebih mengacu pada kebijakan politik yang mencerminkan visi politik (Bates, 1995; Belawati, 1999), maka PJJ secara umum lebih bicara tentang metodologi belajar-mengajar secara jarak jauh (Pannen, 1999). Diskursus

1 Generasi teori PT meliputi *cognitive-behaviourism* (Jonassen, 1992; Ertmer & Newby, 1993), *social-constructivism* (Wilson, 1996), *connectivism* (Siemens, 2004;2005).

seputar PJJ dalam berbagai literatur dan forum sejauh ini telah menyoroti dari berbagai perspektif. Secara historis, PJJ telah mengalami tahapan perkembangan yang cukup pesat dari satu Era (*Age*) pada level makro dan dari satu Generasi PJJ ke Generasi berikutnya pada level mikro hingga sekarang sudah memasuki Era ke-3 dan Generasi ke-5 PJJ (Taylor 2001; Moore & Kearsley, 2005/2012; Casey, 2008; Bozkurt, 2019) , seperti yang terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 3.

Berbagai versi batasan tentang PTJJ kemudian diusulkan oleh beberapa institusi atau otoritas terkait, misalnya *Departemen of Education* (1997), *Commonwealth of Learning* (1999), UNESCO (2002), dan *Open and Distance Learning Quality Council* (2012). Prinsip-prinsip PTJJ yang diusung antara lain meliputi *learner-centred, lifelong learning, open access, recognition of prior learning (RPL), learner support system, institutional accreditation, mixed-media course, computer-based learning, synchronous/asynchronous communication/learning, openness, flexibility, e-learning, blended learning, open learning centre, face-to-face tutorial*. Semua konsep tentang PTJJ tersebut melahirkan beragam istilah dan variannya yang kemudian dihimpun dalam terminologi bidang PTJJ.

Bagi para ahli teori dan praktisi PTJJ, penggunaan istilah-istilah khusus PTJJ sudah menjadi bagian dari diksi dalam komunikasi bidang terkait. Namun, tidak bagi masyarakat secara umum, apalagi tren PT dan PJJ di Indonesia semakin populer. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk lebih memasyarakatkan terminologi bidang PTJJ sehingga dunia atau sistem pendidikan tersebut akan semakin dikenal oleh semua pemangku kepentingan.

Tidak banyak tulisan yang menyoroti aspek linguistik/kebahasaan PT dan PJJ berbasis bukti-bukti empiris sehingga

secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Secara spesifik, tulisan ini lebih menyoroti dimensi etimologis (*etymology*) dan perkembangan terminologi (*terminology*), yaitu istilah-istilah bidang PT dan PJJ yang sering digunakan dalam berbagai literatur dan forum diseminasi PTJJ mengingat aspek historis PJJ dalam perkembangannya selama lima Generasi yang tidak cukup dibahas secara komprehensif hanya dalam satu bab (*book chapter*).

Namun, sebelumnya marilah kita lihat sejenak tentang definisi kata *etimologi* dan *terminologi* itu sendiri dari kacamata ilmu Linguistik. Dalam kamus *Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics* (Richards, Platt & Platt, 1992:130), kata etimologi sebagai sebuah lema (*entry*) didefinisikan sebagai “*the study of the origin of words, and of their history and changes in their meaning*”. Berdasarkan batasan tersebut, setidaknya ada dua unsur yang perlu dicermati dalam konteks PT pada khususnya, yaitu tentang sejarah awal mula terbentuknya kata-kata kunci (*key words*) dalam literatur PT dan perubahan makna yang terjadi sepanjang sejarahnya. Misalnya kata *correspondence* yang muncul dalam beberapa struktur frasa seperti *correspondence courses*² dan *correspondence schools*³, *correspondence education* yang menjadi karakteristik linguistik literatur PT pada Generasi awal (lihat Tabel 3) selain kata *e-learning* yang digunakan secara masif dalam literatur PT pada Generasi ke-5 PJJ (lihat Tabel 7).

Selain definisi kata *etymology*, batasan kata *terminology* juga diberikan dalam Richards, Platt, dan Platt (1992:376), yaitu “*the special lexical items which occur in a particular discipline*

2 “*correspondence course. A course of study conducted by a correspondence school*” (Neilson, 1952:598).

3 *correspondence school. A school that teaches by correspondence, the interaction being based on instruction sheets and papers written by the student in answer to the questions or requirements of these sheets*” (Neilson, loc.cit.)

or subject matter". Dalam konteks PT, melalui tulisan ini dikaji kata-kata kunci berbasis korpus/*database* teks PTJJ berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia yang menjadi ciri khas literatur PTJJ (lihat bagian 3 tulisan ini).

Seperti halnya kata-kata kunci dalam berbagai disiplin ilmu, kata-kata kunci dalam bidang PT biasanya muncul dalam konteks spesifik. Bahkan, dengan menggunakan pendekatan korpus (*corpus-based approach*), kemunculan kata-kata kunci PT lintas generasi yang seringkali dalam pola bahasa (*language patterns*) juga dapat diekstrak (lihat Tabel 2). Dengan demikian, akan dapat diidentifikasi pola-pola bahasa berbasis kata kunci dalam literatur/korpus/*database* teks PT serta maknanya dalam konteks tertentu (lihat bagian 3).

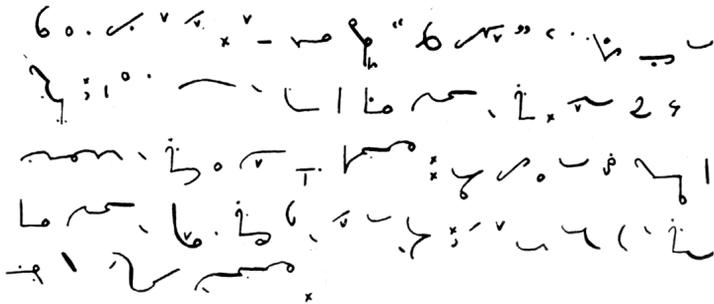
Bahkan, realisasi pola-pola bahasa dalam literatur PT dapat ditelusuri sampai pada tahap generasi PT tertentu yang ditanda dengan penggunaan sejumlah kata kunci, istilah-istilah khusus PTJJ yang muncul secara reguler atau sistemik dalam berbagai konstruksi bahasa, pada tataran frasa berupa kombinasi kata-kata kunci dengan kata-kata tertentu (*semi/fixed expessions*), klausa hingga tataran kalimat yang dapat memberikan makna kontekstual yang lebih luas terhadap penggunaan istilah-istilah khusus PTJJ (lihat bagian 3).

Konsep dan praktik PT di berbagai negara dan institusi pendidikan tinggi sering kali diasosiasikan dengan dua konsep lainnya, yaitu PTJJ dan PJJ sebagai bidang interdisipliner dimana teknologi berperan sebagai katalis dan keduanya telah menjadi elemen dalam *mainstream* pendidikan. Dengan kata lain, pada bagian berikut, pembahasan tentang aspek historis PT secara praktis juga mengacu pada berbagai moda yang digunakan dalam sistem PJJ.

ETIMOLOGI PT DAN PJJ

Secara etimologis, sistem PTJJ dapat dikaji dari berbagai sudut, baik dari aspek sejarah asal mula munculnya PT dan PJJ, perkembangannya, jenis-jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan kelompok-kelompok mahasiswa yang mengikuti program PJJ di berbagai lembaga pendidikan tinggi.

“Embrio” terbentuknya PJJ dapat ditelusuri ke belakang hingga pertengahan abad ke-19, tepatnya pada tahun 1840 ketika seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama Sir Issac Pitman menemukan sebuah sistem simbol berupa tulisan tangan dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan nama *Shorthand* menggunakan alat tulis seperti pulpen dan pensil. Sistem tersebut menggunakan huruf fonetik berupa simbol-simbol yang menggambarkan bunyi kata-kata yang diucapkan, seperti yang terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pitman Shorthand

Salah satu ciri sistem bunyi tersebut adalah fonem/bunyi yang tidak bersuara dan bersuara secara berpasangan (*unvoiced and voiced pairs of sounds*), misalnya bunyi /p/ dan /b/ atau /t/ dan /d/. Penanda bunyi tersebut dibedakan berdasarkan keras-lunaknya ketukan; ketukan pelan menunjukkan bunyi bernada rendah (*light sound*), seperti bunyi /p/ and /t/;

sementara ketukan keras menandakan bunyi bernada keras (*heavy sound*) seperti bunyi/b/and/d/.

Sistem bunyi yang tercermin dalam bentuk simbol berupa tulisan tangan tersebut dianggap sebagai sebuah terobosan pada saat itu untuk menyampaikan instruksi kepada sejumlah orang secara terbatas yang kemudian dikenal dengan “program studi/kuliah yang diselenggarakan melalui surat-menyurat” (*correspondence courses by mail*) (Phillips, 1998). Hanya dalam hitungan tahun, metode atau sistem tersebut sudah digunakan sebagai media pembelajaran melalui korespondensi. Bahkan, dalam beberapa dekade kemudian, metode pembelajaran secara jarak jauh tersebut diadopsi ke dalam berbagai program pembelajaran secara luas di berbagai belahan dunia (Curran, 1997), seperti di Eropa (Inggris, Jerman), Amerika Serikat, Asia (Jepang). University of Chicago di Amerika Serikat (1900-an), misalnya, merupakan sebuah universitas yang pertama kali membentuk *Department of Correspondence Teaching*, diikuti oleh University of Queensland di Australia dengan membentuk *Department of External Studies* (1911).

Perkembangan sistem PJJ pada fase pertama tersebut berlangsung hingga sebelum tahun 1969 yang ditandai dengan pengintegrasian konsep PT sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi di banyak negara sebelum fase kedua dimulai. Fase berikutnya ditandai dengan pendirian Open University Inggris pada tahun 1969, sebuah institusi pendidikan tinggi yang mengadopsi konsep PT (*openness in education*) sebagai nilai inti pendidikan (*core value*) dengan menyediakan kesempatan belajar yang fleksibel bagi masyarakat melalui PJJ, atau PTJJ dengan syarat-syarat pendaftaran yang sangat ringan, bahkan tanpa persyaratan sama sekali pada saat registrasi pertama.

Proses pembelajaran pada fase kedua dilakukan melalui pemanfaatan berbagai media audio-visual, surat-menyurat melalui pos (*mail*), faksimili, radio, televisi, siaran melalui satelit (*satellite broadcast*), *videotape*, *teleconferencing* dalam pengajaran (Hall, 1996). Ciri distingtif kebahasaan generasi tersebut dalam literatur PTJJ meliputi penggunaan berbagai istilah, seperti *satellite broadcast*, *satellite navigation*, *satellite telephone service*, *satellite network*, *facsimile machine*, *radio education*, *radio station*, *community radio*, *radio programme*, dan lain-lain (lihat bagian 4).

Pengayaan bahan ajar juga dilakukan melalui berbagai program siaran radio dan televisi. Paket-paket bahan ajar dikirimkan ke mahasiswa menggunakan jasa pos, yang tercermin dari penggunaan berbagai istilah khusus PTJJ pada Generasi ke-2, seperti *snail mail*⁴, *postal mail*, *mail and telephone* (lihat bagian 4 dari tulisan ini). Interaksi tutor dengan mahasiswa dilakukan secara individual melalui telepon selain melalui kelompok-kelompok diskusi pada malam hari dan akhir pekan mengingat para mahasiswa yang menempuh jalur PT pada umumnya adalah mereka yang sudah bekerja.

Dengan berbagai kendala pada saat itu, proses tata kelola PTJJ yang sama dalam memberikan layanan kepada para mahasiswa (*student support*) juga dilakukan oleh Universitas Terbuka (UT) pada masa-masa awal perkembangannya pada dekade 80-an mengikuti perkembangan PT pada tataran internasional (Keegan, 1986). UT didirikan oleh Pemerintah pada tahun 1984 sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di tanah air dengan mengadopsi Sistem Pendidikan Jarak Jauh (SPJJ).

4 Secara etimologis, *snail mail* diasosiasikan dengan siput (*snail*) berupa hewan kecil yang berjalan sangat lambat (*Collins Cobuild English Dictionary*, 1995). Dalam konteks PT pada Generasi awal, kondisi pengiriman bahan ajar kepada para mahasiswa menggunakan jasa pos yang masih relatif lambat. Berdasarkan pengalaman UT pada awal perkembangannya, bahan ajar sering kali diterima oleh mahasiswa agak terlambat, bahkan tidak jarang dikembalikan oleh pihak Pos ke UT karena alamat yang dituju tidak ditemukan.

Sejak awal kehadiran UT di tanah air memang dimaksudkan untuk menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Upaya pembentukan profil PT yang dipelopori oleh Open University Inggris dan didukung oleh sejumlah universitas terbuka lainnya di dunia (Curran, 1997) telah mengangkat eksistensi PT menjadi bagian dari sistem pendidikan tinggi di tanah air.

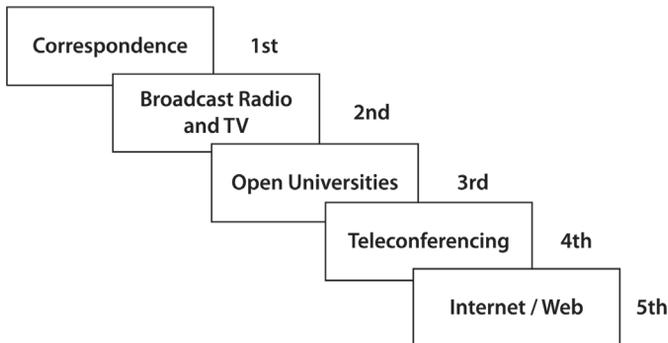
Kehadiran PJJ pada jenjang pendidikan tinggi di semua negara, termasuk Indonesia, adalah untuk membuka akses dan memperluas kapasitas universitas konvensional (*traditional university*) dan juga untuk membantu dalam mengatasi universitas konvensional dari sisi jumlah yang cenderung relatif eksklusif, bukan inklusif (Hall, 1995). Selain itu, kehadiran PJJ pada jenjang pendidikan tinggi adalah untuk “mendongkrak” Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia yang tidak mampu dipenuhi oleh universitas konvensional yang ada (Renstra Kemendikbud, 2020-2024). Dengan kata lain, nilai-nilai filosofis PTJJ yang juga diemban oleh UT selama ini adalah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat yang juga sejalan dengan moto UT “*Making Higher Education Open to All*”.

PERKEMBANGAN TERMINOLOGI PT DAN PJJ

Sebagai sebuah disiplin ilmu baru (Moore dan Anderson, 2003), PJJ dalam perkembangannya, seperti yang telah disinggung pada bagian Pendahuluan, telah melewati lima tahapan Generasi (Moore dan Kearsley, 2005/2012), yaitu *Correspondence Study* (Generasi Pertama), *Broadcasting* (Generasi Kedua), *System Approach* (Generasi Ketiga), *Teleconferencing* (Generasi Keempat), dan *Computer- and Internet-based Virtual Classess* (Generasi Kelima), seperti yang terlihat pada Gambar 3 (Moore dan Kearsley, 2012:24).

Salah satu aspek yang membedakan antara kelima generasi PJJ tersebut, dari perspektif ilmu Linguistik, adalah penggunaan terminologi yang khas pada setiap generasi. Fenomena kebahasaan yang digunakan pada jamannya mencerminkan tren teoretis, pedagogis (termasuk desain instruksional), dan manajemen PJJ (termasuk tata kelola pemanfaatan teknologi).

Bagi masyarakat umum, bahkan di kalangan komunitas PTJJ di Indonesia sekali pun, penggunaan terminologi yang dimaksud belum tersosialisasikan secara luas. Sebagai pengguna (*target user*) dalam berbagai peristiwa komunikasi, penggunaan istilah-istilah khusus (terminologi) dalam bidang PTJJ, terutama ketika kita sekarang berada pada Generasi ke-5 PJJ yang penuh dengan jargon-jargon PTJJ, perlu secara terus-menerus diperkenalkan kepada para *stakeholders* PT di Indonesia (institusi/otoritas, praktisi, sivitas akademika, masyarakat umum). Dengan demikian, diharapkan PT tidak hanya diterima dari sisi kebijakan pendidikan nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi di Indonesia melainkan juga pada tataran “akar rumput” yang tercermin dari penggunaan terminologi PTJJ yang semakin luas oleh para pemangku kepentingan.



Gambar 3. Lima Generasi PJJ

Pada bagian selanjutnya (lihat bagian 1-5 dari tulisan ini), pembahasan difokuskan pada penggunaan terminologi PTJJ lintas generasi. Dengan menerapkan pendekatan korpus⁵, sejumlah data empiris terkait kata-kata kunci dalam korpus PTJJ berupa pola-pola bahasa (*language pattern*) dalam setiap Generasi PJJ akan dianalisis dari sisi historis-etimologis PT.

PENERAPAN PENDEKATAN KORPUS DALAM PTJJ

Pendekatan korpus lazim digunakan dalam riset bidang Korpus Linguistik. Sebuah perangkat lunak komputer (*WordSmith Tools 7.0*) digunakan untuk mengidentifikasi kata-kata kunci berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam korpus bidang PTJJ dengan memanfaatkan *British National Corpus* (BNC) sebagai korpus pembanding (*referent corpus*). Berdasarkan kata-kata kunci tersebut (terutama nomina) sebagai *Search Word* (SW) kemudian dijaring sejumlah pola-pola bahasa (*patterns*) dalam korpus bidang PTJJ (*Key Words in Context/ KWIC*).

Secara metodologis, dua set *Wordlist* diproses, yaitu (a) *Wordlist* pertama yang diekstrak dari korpus PTJJ sebagai *study corpus* yang berjumlah sekitar 5 juta kata (*token/running word*) (tepatnya 5.268.464 kata) yang bersumber dari berbagai literatur PTJJ berbahasa Inggris; (b) *Wordlist* kedua yang diekstrak dari *British National Corpus* (BNC) sebagai *referent corpus* yang berjumlah sekitar 25 juta (tepatnya 25.987.870 kata) kata. Perbandingan ini mengikuti rasio 1:5 sesuai petunjuk teknis *software* tersebut yang juga diterapkan dalam berbagai riset bidang Korpus Linguistik. Tabel 1 menyajikan sejumlah kata kunci yang sering digunakan dalam konteks komunikasi di bidang PTJJ.

⁵ Pendekatan korpus (*corpus-based approach*) merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian kebahasaan menggunakan *electronic database (corpus/corpora)*, yaitu kumpulan teks dalam jumlah yang sangat besar yang bersumber dari berbagai literatur bidang terkait yang diproses dengan menggunakan sebuah perangkat lunak (*software*) Korpus Linguistik (Oakes, 1998; Scott, 2001; Stubbs, 2001; Tognini-Bonelli, 2000b/2001).

Data dalam kolom 6 pada Tabel 1 mencerminkan seberapa penting sebuah kata dalam sebuah disiplin ilmu (*Keyness*). Semakin tinggi indeks tersebut, maka semakin penting kata tersebut dalam literatur terkait. Misalnya kata *LEARNING*⁶ memiliki indeks tertinggi (154.825,19), dibandingkan dengan indeks kata kunci yang lain, seperti *STUDENT* (89.243,78), *EDUCATION* (59.504,66), *DISTANCE* (44.573,63), *LEARNER* (43.040,95) dan *COURSE* (26.505,00).

Tabel 1. Daftar *Keyword* dalam Korpus PTJJ

KEY WORD	FREQ.	%	RC. FREQ.	RC. %	KEYNESS
Learning	49634	0,889632463	2453		154825,1875
Students	24269	0,434993953	3218	0,012192509	66207,49219
Student	9294	0,166584283	1887		23036,28906
Education	25632	0,459424168	6576	0,024915457	59504,65625
Distance	16258	0,291405976	2095		44573,63281
Learners	9174	0,16443342	191		30253,19727
Learner	4193	0,075154707	255		12787,75684
Course	17669	0,316696525	11902	0,045094855	26430,95703
Courses	8836	0,158375159	1878		21637,03711
Technology	9089	0,16290988	2992	0,01133623	19369,19141
Technologies	3437	0,061604276	263		10205,87891
Content	7471	0,133909091	1621		18191,04883
Web	6551	0,117419153	1183		16716,15039
University	9737	0,174524546	6437	0,024388809	14733,70215
Universities	3537	0,063396662	718		8764,533203
Knowledge	7985	0,143121958	3906	0,014799236	14330,27441
Internet	3940	0,070619978	0		13759,48145
Moocs	3518	0,063056111	0		12285,53027
Mooc	3069	0,0550083	0		10717,33203

6 Penggunaan huruf kapital secara otomatis sudah diset oleh pengembang *software*.

1. Pendidikan Terbuka dan Modal Insani Indonesia

KEY WORD	FREQ.	%	RC. FREQ.	RC. %	KEYNESS
Information	10096	0,18095921	9339	0,03538404	11930,32813
Development	8610	0,154324368	7239	0,027427463	10994,44922
Design	6232	0,111701444	3335	0,012635805	10672,17969
Resources	5338	0,095677517	2370		10038,31641
Assessment	4546	0,081481829	1387		9955,036133
Study	6550	0,117401227	4521	0,017129377	9635,321289
Materials	4960	0,088902302	2081		9571,352539
Instructor	3042	0,054524358	175		9330,818359
Classroom	3260	0,058431756	417		8944,033203

Bahkan, jika indeks kata kunci EDUCATION dan DISTANCE yang lazim muncul dalam struktur frasa *Distance Education* (sekitar 104.078,29), maka indeks kata kunci LEARNING masih jauh lebih tinggi. Salah satu interpretasi yang dapat diberikan dalam fenomena ini adalah bahwa konsep '*learning*'⁷ yang menekankan proses pembelajaran (*learning proses*) menjadi isu sentral dalam literatur atau diskursus dalam disiplin ilmu PJJ dan bidang PT dan PJJ sebagai komponen PTJJ. Hal ini dapat dimengerti bahwa konsep tersebut selalu diusung sepanjang sejarah PT sejak kelahiran Open University di Inggris pada akhir 1960-an sebagai pelopor, dan kemudian diikuti dengan pendirian sejumlah *open university* di banyak negara, termasuk gerakan atau model *Open and Distance Learning*.

Selain itu, melalui penerapan pendekatan korpus dalam tulisan ini berbasis korpus PTJJ, terbukti bahwa pola-pola bahasa atau sanding kata (*collocation*), seperti *open learning* dan *distance learning*, termasuk *online learning*, antara lain mencerminkan karakteristik yang sangat menonjol dari PT dan PJJ (lihat Tabel 2).

⁷ Kata *learning* dalam *Collins Cobuild English Dictionary* (1995) didefinisikan sebagai berikut: "*learning is the **process** of gaining knowledge through studying*".

Dewasa ini, implementasi PT semakin mendapat respons yang sangat positif di berbagai belahan dunia, termasuk praktik *online learning*, *e-learning*, *web-based learning*, *Internet-based learning* dan sejenisnya yang semakin luas pada masa pandemi Covid-19 di tanah air dimana *working from home* (WfH), atau *learning from home/learning at a distance* menjadi salah satu trend atau praktik pada Generasi k-5 PT.

Dalam perkembangan terminolgi PTJJ dari satu generasi ke generasi berikutnya, kata kunci *LEARNING* sebagai *node* (SW) telah mengalami perluasan makna melalui penambahan sejumlah adjektiva dan/atau nomina sebelum (*Span*: L1, L2, L3, dst) dan sesudah (*Span*: R1, R2, R3, dst) kata kunci tersebut dalam berbagai konstruksi kalimat sehingga membentuk sanding kata atau pola-pola kolokasi (*collocational pattern*)⁸ yang menjadi unsur-unsur pembentukan terminologi PT. Fenomena kebahasaan ini tergambar pada Tabel 2 yang diekstrak dari korpus literatur PTJJ.

Kombinasi kata kunci (*node*) dengan sejumlah adjektiva dan nomina pada Tabel 2 membentuk terminologi (kumpulan istilah-istilah khusus) bidang PT, terutama yang mencerminkan tren Generasi ke-5 yang ditandai dengan penggunaan frasa *distance learning*, *online learning*, *open learning*, *learning tool*, *learning application*, *learning platform* dsb yang secara dominan mencerminkan dimensi *open pedagogy*, sarana teknologi dan jenis pembelajaran yang menjadi ciri khas Generasi ke-5 PJJ.

8 "Collocation is the way words combine in a language to produce natural-sounding speech and writing." "Combination of words in a language can be ranged on a cline from totally free – see a man/car/book to the totally fixed and idiomatic –not see the wood for the trees" (*Oxford Collocations Dictionary for Students of English*).

Tabel 2. Daftar Pola Kolokasi Kata Kunci LEARNING dalam Korpus PTJJ

Node: LEARNING	
Span: L1, L2, L3, dst	Span: R1, R2, R3, dst
<i>distance, online, open, -based, student, blended, collaborative, new, virtual, lifelong, social, effective, different, asynchronous, interactive, active, group, traditional, classroom, mobile, flexible, individual, adult, distributed, digital, cognitive, constructivist, professional, electronic, formal, informal, global, team, specific, dsb.</i>	<i>strategy, principle, tool, context, application, task, project, practice, library, group, software, standard, situation, programme, technique, instructor, idea, mode, platform, readiness, centre, preference, problem, method, society, situation, institute, goal, component, event, initiative, program, space, setting, design, dsb.</i>

1. *Language Patterns* pada Generasi Pertama PJJ

Pada Tabel 3 disajikan sejumlah istilah khusus PT pada Generasi pertama yang lebih terpusat pada *correspondence* sebagai kata kunci. Misalnya frasa *correspondence course(s)* dan *correspondence study* (yaitu model perkuliahan pada masa Generasi awal PJJ melalui surat-menyurat antara mahasiswa dan tutor atau pengelola) memiliki frekuensi kemunculan yang cukup tinggi dibandingkan terminologi yang lain.

Tabel 3. Terminologi pada Generasi ke-4 PJJ

correspondence correspondence course(s) correspondence study correspondence education correspondence school(s) correspondence college(es) correspondence university(es) correspondence teaching correspondence model
--

2. *Language Patterns* pada Generasi Kedua PJJ

Secara terminologis, fenomena kebahasaan yang berkembang pada fase Generasi ke-2 PJJ terpusat pada sejumlah istilah khusus, seperti yang dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Terminologi pada Generasi ke-4 PJJ

<i>broadcasting</i> <i>radio broadcasting</i> <i>educational broadcasting</i> <i>public broadcasting</i> <i>broadcasting corporation</i> <i>broadcasting service(s)</i> <i>broadcasting system(s)</i> <i>broadcasting technology(s)</i> <i>broadcasting station(s)</i>	<i>radio</i> <i>community radio</i> <i>radio instruction</i> <i>radio learning</i> <i>radio school(s)</i> <i>radio station(s)</i> <i>radio broadcast(s)</i> <i>radio project(s)</i>
<i>television</i> <i>broadcast television course(s)</i> <i>broadcast television production system</i> <i>instructional television station</i> <i>instructional television system</i> <i>instructional television classroom</i> <i>instructional television production</i> <i>interactive television (satellite, compressed video)</i> <i>television university(s)</i> <i>satellite television broadcast(s)</i> <i>satellite television instruction</i> <i>satellite television consortia</i> <i>television program/me(s)</i> <i>television broadcast(s)</i> <i>cable television</i>	<i>telecourse(s)</i> <i>telecourse student(s)</i> <i>telecourse faculty</i> <i>cable television line</i> <i>cable television service</i> <i>cable television connection</i> <i>cable television infrastructure</i> <i>cable modem(s)</i> <i>cable transmission</i> <i>cable system(s)</i>

3. *Language Patterns* pada Generasi Ketiga PJJ

Generasi ke-3 PJJ ditandai dengan penerapan *Systems Approach*⁹, pengembangan *Articulated Instructional Media Project* (AIM), pendirian Open University Inggris, seperti yang terlihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Terminologi pada Generasi ke-4 PJJ

AIM ... AIM Project AIM research AIM model	systems approach instructional systems approach educational systems approach systems approach systems-approach model
Open University/OU Open University student(s) Open University course(s) Open University tutor(s) Open University student(s)	study guide(s) printed study guide(s) interactive study guide(s) correspondence tutoring radio boardcast television broadcast recorded audiotape(s) telephone conference(s) kit(s) local library resource(s)

4. *Language Patterns* pada Generasi Keempat PJJ

Penggunaan terminologi bidang PTJJ pada Generasi ke-4 mengacu pada konsep *teleconferencing* dengan turunannya dalam bentuk *audio-conferencing*, *satellite*, *interactive video-conferencing*, *business TV*, *two-ways video-conferencing* (Moore dan Kearsley, 2005/2012), seperti yang terlihat pada Tabel 6.

⁹ *Systems approach* adalah sebuah pendekatan dalam dunia instruksional pendidikan dengan melibatkan beberapa tahapan dalam sebuah proses yang sistematis yang saling terintegrasi dalam mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi sebuah proses instruksional PTJJ sehingga diperoleh hasil yang maksimal (Dick, Carey & Carey, 2008).

Tabel 6. Terminologi pada Generasi ke-4 PJJ

teleconferencing audio teleconferencing teleconferencing video teleconferencing technology(s) teleconferencing network graphic teleconferencing audiographic teleconferencing teleconferencing model teleconferencing facility(es)	video(s) videoconferencing videoconference video clip(s) streaming video lecture video lecture content lecture video digital video interactive video video lecture(s) video stream(s)
satellite satellite television satellite broadcast(s) satellite TV satellite communication(s) satellite system(s) satellite technology(s) satellite system(s) satellite network(s) satellite discussion(s) satellite transmission satellite campus(es) satellite navigation(s)	

5. *Language Patterns* pada Generasi Kelima PJJ

Generasi ke-5 PJJ ditandai dengan penggunaan sejumlah istilah khusus (terminologi) yang berkaitan dengan penggunaan komputer dan Internet berupa kelas-kelas virtual, termasuk *web-based education* (Moore dan Kearsley, 2005/2012), seperti yang terlihat dalam Tabel 7.

Tabel 7. Terminologi pada Generasi ke-5 PJJ

<p>distance education online distance education distance education programs distance education programs distance education technology(es) distance education course(s) distance education institution(s) distance education systems(s) distance education environment(s)</p>	<p>computer-based education computer-based educational game(s) computer-based educational application(s) computer-based educational environment(s) computer-based educational program(s) computer-based educational resource(s)</p>
<p>distance-learning distance-learning student(s) distance-learning course(s) distance-learning program(s) distance-learning environment(s) distance-learning instructional design(s) distance-learning system(s)</p>	<p>computer-based assessment computer-based assessment(s) computer-based assessment system(s) computer-based assessment tool(s) computer-based assessment strategy(es) computer-based assessment tutoring strategie(s) computer-based assessment tutoring approach(es)</p>
<p>computer-based learning computer-based learning environment(s) computer-based learning material(s) computer-based tutorial system(s) computer-based learning resource(s) computer-based tutoring package(s) computer-based learning system(s) computer-based learning package(s) computer-based learning technology(s)</p>	<p>Internet-based learning Internet-based learning market Internet-based learning system(s) Internet-based learning environment(s) Internet-based learning space(s) Internet-based learning community(es)</p>

<p>computer-based learning shift(s) computer-based learning Unit(s) computer-based learning product(s) computer-based learning space(s) computer-based learning platform(s) computer-based learning instruction(s) computer-based learning program(s) computer-based learning initiative(s)</p>	<p>Internet-based learning assessment Internet-based learning program(s) Internet-based learning network(s) Internet-based learning module(s) Internet-based learning centre(s) Internet-based learning style(s) Internet-based learning activity(s) Internet-based learning medium Internet-based learning platform(s)</p>
<p>computer-based training computer-based training program(s) computer-based training system(s) computer-based training tutorial(s)</p>	<p>Internet-based distance education Internet-based spatial decision Internet-based technology(es) Internet-based course(s)</p>
<p>computer-based instruction computer-based instructional management system(s) computer-based instructional design computer-based instructional technology computer-based instructional methodology(es) computer-based instructional program(s) computer-based instructional strategy(es) computer-based instructional tutorial(s)</p>	<p>virtual virtual learning virtual environment(s) virtual team(s) virtual community(s) virtual university(s) virtual world(s) virtual campus(es) virtual classroom(s) virtual education virtual team(s) virtual reality virtual mobility virtual reality virtual space</p>

1. Pendidikan Terbuka dan Modal Insani Indonesia

computer-based instructional designer(s) computer-based instructional concept(s) computer-based instructional development	e-learning e-learning system(s) e-learning design(s) e-learning course(s) e-learning content e-learning environment e-learning technology(es) e-learning readiness(s) e-learning material(s) e-learning resource(s) e-learning program(s) e-learning experience(s)
Internet-based classroom(s) Internet-based learning Internet-based teaching Internet-based instruction(s) Internet-based environment(s) Internet-based setting(s) Internet-based course(s) Internet-based teacher(s) Internet-based practice Internet-based management Internet-based experience(s) Internet-based activity(s) Internet-based community(s) Internet-based training	Web-based (freq.:) Web-based learning Web-based education Web-based course(s) Web-based instruction(s) Web-based teaching Web-based training Web-based distance education Web-based tool(s) Web-based technology(s) Web-based resource(s) Web-based survey(s) Web-based material(s) Web-based delivery Web-based application(s)

PENUTUP

PT dan PJJ merupakan dua istilah yang menjadi bagian integral dari sistem PTJJ meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Sebagai bagian dari sebuah sistem, keduanya mendapat porsi masing-masing dari para pemangku kepentingan, dan secara utuh menjadi komponen pembentuk satu bentuk pendidikan, yaitu PTJJ.

Rekognisi terhadap status PT sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi merupakan hasil dari upaya sinergis kolaboratif antar *stakeholders* sepanjang sejarah PJJ (Generasi 1-5) yang melibatkan institusi dan otoritas pendidikan tinggi, asosiasi PJJ, peneliti, praktisi, dan pelaku bisnis. Dengan kata lain, eksistensi, fungsi, dan kontribusinya tidak lagi bersifat marginal (*peripheral*) melainkan sudah berada di zona *mainstream*. Perkembangan tersebut akan semakin meluas meskipun terdapat tantangan bagi institusi penyelenggara PT seperti UT dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi terbaru untuk memfasilitasi proses pembelajaran sehingga menghasilkan para lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja (*link-and-match*).

Keberhasilan agenda PT ke depan untuk semakin memperluas pengakuan sistem PTJJ oleh masyarakat luas juga tergantung antara lain pada bagaimana terminologi PT, yaitu istilah-istilah khusus bidang PT dengan semua bentuk derivasinya, dapat semakin diperkenalkan kepada semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, melalui upaya yang terus-menerus dari semua pihak, termasuk melalui tulisan kali ini, diharapkan terminologi PT akan semakin dikenalkan dan digunakan secara lebih luas oleh para pemangku kepentingan dalam berbagai forum diseminasi dan dalam berbagai konteks situasi komunikasi bidang PT.

Dilihat dari konstruksi terminologis, konsep *Open Learning* lebih mendapatkan penekanan dibandingkan dengan istilah *Distance Learning*; bahkan terlihat sebagai komponen yang utama karena muncul lebih awal dalam struktur frasa *Open and Distance Learning*. Penggabungan keduanya telah menghasilkan berbagai istilah bidang PTJJ yang terus berkembang, berevolusi, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Secara historis, sepanjang sejarahnya akan terus diliputi dengan pembentukan istilah-istilah yang dinamis.

Para pemangku kepentingan bidang PTJJ dituntut responsif terhadap perkembangan terminologi di bidang tersebut serta familiar dalam penggunaannya.

Literatur bidang ilmu seperti PJJ tidaklah terlepas dari konteksnya, termasuk tren perkembangan PTJJ di Indonesia yang dipelopori oleh UT. Dewasa ini sudah semakin banyak perguruan tinggi konvensional yang mulai mengadopsi *open learning* sebagai sebuah filosofi pendidikan yang memberi kebebasan kepada pembelajar untuk memilih sendiri media pembelajaran, waktu dan tempat belajar, strategi belajar, fasilitas bantuan belajar. *Open access*, disamping adanya keterbatasan infrastruktur atau preferensi kebijakan PTN/PTS konvensional, antara lain telah melahirkan berbagai program *online learning (virtual campus)*, di samping model *blended learning*.

Salah satu tantangan ke depan adalah bahwa dunia PTJJ akan terus berevolusi dari Generasi ke Generasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cenderung semakin cepat berubah. Sejalan dengan itu pula, terminologi PTJJ bersifat dinamis yang juga sejalan dengan perkembangan literatur PJJ yang menjadi sumber pembentukan korpus dinamis PTJJ (*dynamic corpus of ODL*).

REFERENSI

- Bates, A.W. (1995). *Techology, Open Learning, Distance Education*. New York: Routledge.
- Belawati, T. (1999). 'Perkembangan Pemikiran tentang Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh'. Dalam T. Belawati, dkk (Eds) *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 30-44. Jakarta Universitas Terbuka.

- Bozkurt, A. (2019). From Distance Education to Open and Distance Learning: A Holistic Evaluation of History, Definitions, and Theories. Dalam S. Sisman-Ugur, & G. Kurubacak (Eds.), *Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism* (pp. 252-273). Hershey, PA: IGI Global. (1) (PDF) *From Distance Education to Open and Distance Learning: A Holistic Evaluation of History, Definitions, and Theories*.
- Casey, D.M. (2008). A Journey to Legitimacy: The Historical Development of Distance Education through Technology. *TechTrends: Linking Research and Practice to Improve Learning*, 52(2), 45-51. doi:10.1007/11528-008-0135-z
- Curran, C. (1997). 'ODL and traditional universities: dichotomy or convergence?' *European Journal of Education*, 32 (4), 335-346.
- Daniel, J. (1996). *Mega-universities and knowledge: Technology strategies for higher education*. London: Koan Page.
- Department of Education. (1997). *Education White Paper 3: A Programme for the Transformation of Higher Education*. Pretoria: General Notice 1196 of 1997.
- Dick, W., Carey, L. & Carey, J.O. (2008). *The systemic design of instruction* (7th Ed). Boston: Allyn & Bacon.
- Edwards, R. (1995). Different discourses, discourses of different: Globalization, distance education, and open learning. *Distance Education*, 16(2), 241-255. Doi:1080/0158791950160206.
- Ertmer, P.A. & Newby, T.J. (1993). *Behaviorism, Cognitivism, Constructivism: Comparing Critical Features from an Instructional Design Perspective*. Purdue University.
- Hall, P. (1996). 'Distance education and electronic networking.' *Information Technology for Development*, 7 (2), 75-89.

- Jonassen, D. H. (1992). Evaluating constructivistic learning. Dalam T. M. Duffy & D. H. Jonassen (Eds.), *Constructivism and the technology of instruction: A conversation* (pp. 137-148). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Keegan, D. (1986). *The Foundations of Distance Education*. Michigan: Croom Helm.
- Moore, M.G. & Anderson, W.G. (2003). *Handbook of Distance Education*. London: Routledge.
- Moore, M.G. & Kearsley, G. (2012). *Distance Education: A Systems View of Online Learning* (3rd Ed). USA: Wadsworth.
- Neilson, W.A. (1952). *Webster's New International Dictionary of English Language* (2nd Ed). USA: G. & C. Merriam Co.
- Oakes, M. P. (1998). *Statistics for Corpus Linguistics*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Open and Distance Learning Quality Council* (2012)
- Pannen, P. (1999). 'Pengertian Sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh'. Dalam T. Belawati, dkk (Eds) *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 11-29. Jakarta Universitas Terbuka.
- Phillips, V. (1998). 'Virtual classrooms, real education.' *Nation's Business*, 86 (5), 41-44.
- Renstra Kemendikbud 2020-2024.
- Richards, J.C., Platt, J., & Platt, H. (1992). *Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*. London: Longman
- Rogers, P. et al (2009). *Encyclopedia of Distance Learning* (2nd Ed). USA: Information Science Reference.
- Scott, M. (2001). Comparing corpora and identifying key words, collocations, freq. distributions through the wordsmith tools suite of computer programs. Dalam Ghadessy M., Henry, A., & Roseberry, L. (Eds.). *Small Corpus Studies and ELT*, 47-67. Amsterdam: Benjamins.

- Siemens, G. (2004). A learning theory for the digital age. Diakses dari <http://www.elearnspace.org/articles/connectivism.htm>.
- Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology & Distance Learning*. Diakses dari http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm.
- Stubbs, M. (2001). *Words and Phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics*. Oxford: Wiley-Blackwel.
- Suparman, M.A. (2002). *Desain Instruksional Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Taylor, J. C. (2001). Fifth generation distance education. *e-Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST)*, 4(1), 1-14.
- The Commonwealth of Learning. (1999). *Planning and Management of Open and Distance Learning*. Vancouver, Canada: The Commonwealth of Learning. Retrieved from http://www.col.org/Publication-Documents/pub_Planning_Management_03_web.pdf
- Tognini-Bonelli, E. (2001). *Corpus Linguistics at Work*. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.
- Tognini Bonelli, E. (2000b). *Corpus theory and practice*. Birmingham: TWC.
- Tomei, L.A. (2010). *Lexicon of Online and Distance Learning*. New York: Rowman & Littlefield Publishers. Inc.
- UNESCO. (2002). *Open and Distance Learning: trends, policy and strategy consideration*. Paris: UNESCO.
- Wilson, B. G. (Ed.). (1996). *Constructivist Learning Environments: Case Studies in Instructional Design*. Educational technology Publications. Englewood Cliffs NJ.

2

PENDIDIKAN
TERBUKA DAN
KEADILAN
SOSIAL

Prof. Daryono, Ph.D.

DIMENSI PENDIDIKAN TINGGI TERBUKA

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi sering diklaim sebagai sebuah entitas yang tidak membumi sudah belangsung sejak lama, tidak hanya di Indonesia namun juga di berbagai belahan dunia. Klaim ini didasarkan pada berbagai realitas yang menjadi bagian dari pendidikan tinggi itu sendiri yang membatasi orang untuk menjadi bagian dari entitas masyarakat yang elitis. Tidak mengherankan apabila lulusan perguruan tinggi sering diklaim tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Mereka yang masuk dalam entitas perguruan tinggi adalah orang yang diseleksi sebagai “terpilih” baik dari aspek intelektualnya dan khususnya aspek finansial. Di berbagai daerah bahkan latar belakang seseorangpun juga menjadi pertimbangan untuk dapat belajar di perguruan tinggi. Kondisi ini diperparah dengan adanya kemajuan teknologi yang mempengaruhi dunia pendidikan. Sehingga saat ini ketimpangan akses terhadap pendidikan tinggi tidak hanya disebabkan oleh faktor klasik yaitu sosial, ekonomi, politik dan budaya, namun juga faktor literasi teknologi.

Lahirnya pendidikan tinggi terbuka membuka sebuah asa untuk mengeliminasi konsepsi pendidikan tinggi yang sudah mapan dan berbagai ketimpangan tersebut dengan menghilangkan berbagai rintangan akses seperti latar belakang seseorang, waktu, biaya, letak geografis dan infrastruktur teknologi (Belawati, 2014). Pendidikan tinggi terbuka yang memiliki prinsip fleksibilitas, terjangkau dan aktual telah menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat. Khususnya dengan terjadinya pandemi Covid-19, banyak diantara konsepsi tentang perguruan tinggi tatap muka yang telah mapan dipertanyakan. Konsepsi pendidikan tinggi terbuka dengan berbagai fleksibilitasnya dan khususnya terkait dengan sistem dan metode pembelajarannya banyak mendapatkan apresiasi saat ini meskipun UT sudah didirikan lebih dari tiga dasawarsa yang lalu. Disamping itu dengan diperkenalkannya kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar, konsep pendidikan tinggi terbuka menjadi sangat relevan dan menjadi aktual.



Sumber: <https://unesco.ijs.si/project/open-education-for-a-better-world/>

Namun demikian permasalahan keadilan dan kesetaraan terus mendorong pembuat kebijakan untuk mengurangi kesenjangan partisipasi antara yang kaya, kelas menengah dan yang miskin juga antara populasi perdesaan dan perkotaan. Demikian pula, permasalahan kualitas juga menyita perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah. Tantangan akses, kesetaraan dan kualitas di satu sisi dan perkembangan dunia

digital yang menjanjikan populisme pendidikan terbuka di masa depan telah mendorong perubahan lanskap pendidikan tinggi yang berbeda khususnya peran pendidikan terbuka yang fleksibel, terjangkau dan aktual.

Keberadaan pendidikan tinggi terbuka merupakan suatu keniscayaan dan aset yang sangat penting untuk menjamin kebijakan pendidikan tinggi yang *inclusive* dan mendorong prinsip “*equity*”. Disparitas kondisi infrastruktur, SDM dan modalitas masyarakat (mahasiswa), antara Jawa dan luar Jawa dan antar perkotaan dan perdesaan menjadikan pendidikan tinggi terbuka menjadi semakin relevan untuk dapat mengatasi berbagai keterbatasan dalam rangka berkontribusi menjadikan manusia Indonesia yang cerdas, produktif, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia. Artikel ini membahas terkait dengan dimensi pendidikan tinggi terbuka yang berimplikasi pada berkembangnya berbagai praktik *Open Access*, *Open Data*, *Open Educational Resources*, *Open Admission* dan *Open Registration* serta kebutuhan *Open Pedagogy* dan kontekstualisasinya melalui *community of practices*.

PENDIDIKAN TINGGI TERBUKA DAN ROAD MAP MAKING INDONESIA

Pendidikan tinggi di Indonesia telah lama disibukkan oleh isu-isu jangka yang tidak ada habisnya terkait dengan akses, kesetaraan dan kualitas. Dalam satu dekade terakhir, akses pendidikan tinggi telah meningkat secara progresif dengan meningkatnya tingkat partisipasi pendidikan tinggi kurang lebih 30% tahun 2019 dari 25% pada tahun 2015¹.

1 Tingkat partisipasi kasar perguruan tinggi dari provinsi ke provinsi sangat berbeda dari 21% hingga 79%. Disparitas ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan perguruan tinggi yang berkualitas. Lihat <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/07/11/1522/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi-2015-2016.html>

Perubahan ini tampaknya belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 35% pada tahun 2019². Kenaikan ini dikarenakan salah satunya adalah kebijakan pendidikan untuk mengalokasikan dua puluh persen dari anggaran negara ke sektor pendidikan untuk meningkatkan daya tampung perguruan tinggi.

Kebijakan progresif tersebut, bagaimanapun, belum menyelesaikan permasalahan kualitas dan kesetaraan antara Pulau Jawa di mana lembaga pendidikan tinggi berkualitas tinggi berada dan diluiri Pulau Jawa di mana terdapat kelangkaan sumber daya pendidikan tinggi yang berkualitas. Hal ini juga diperburuk oleh kondisi geografis di mana sumber daya pendidikan tinggi tidak terdistribusi dengan baik.



Mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas yang terdiri dari lebih dari tujuh belas ribu pulau, kesenjangan sumber daya perguruan tinggi dan kapasitas sumber daya manusia merupakan realitas yang

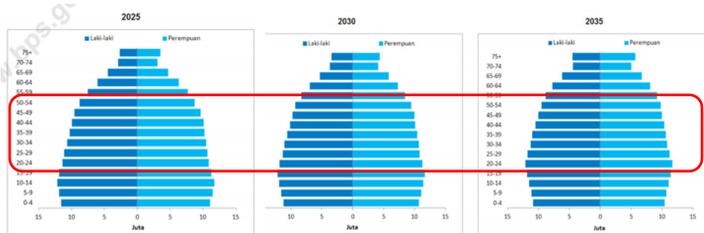
telah terjadi selama ini. Sebagian besar pendidikan tinggi yang memiliki kualitas baik terletak di Jawa. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia juga terpusat di Pulau Jawa. Disisi lain, infrastruktur Internet telah berkembang pesat, meliputi pulau-pulau besar di Indonesia dan bahkan di berbagai daerah sampai di kecamatan. Diperkirakan dalam lima tahun ke depan, jumlah akses internet meningkat pesat. Ini juga didukung oleh Rencana Induk Indonesia tentang Pengembangan Infrastruktur Internet untuk mempromosikan

² Lihat <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/13/> meski-masih-rendah-partisipasi-perguruan-tinggi-menunjukkan-peningkatan-APK

2. Pendidikan Terbuka dan Keadilan Sosial

Indonesia ke era digital baru pada tahun 2025 (MP3EI, 2014). Pertanyaan penting adalah bagaimana memobilisasi expertise dan sumber daya perguruan tinggi tersebut ke seluruh wilayah Indonesia secara merata untuk menjamin akses perguruan tinggi berkualitas dan meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi secara bersamaan dalam waktu yang tidak lama?

Dalam *road map Making Indonesia 4.0* Indonesia telah menetapkan menjadi 10 besar ekonomi dunia di 2030. Target ini jelas memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, dengan kompetensi yang berbeda dari era Industri 3.0 atau yang sebelumnya (Kementerian Perindustrian, 2018)³. Salah satu strategi peningkatan SDM adalah melalui pendidikan terbuka ditingkat pendidikan tinggi. Badan Pusat Statistik memprediksikan pada tahun 2025 hingga 2045 terdapat kurang lebih 130 juta (70%) penduduk pada usia produktif (BPS 2019).



Gambar 1. Prediksi Jumlah Penduduk Indonesia

Sumber: <https://www.bps.go.id/publication/>

Prediksi demografi ini menunjukkan tantangan tersendiri terkait dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompentensi tinggi. Untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja yang berjumlah kurang lebih 130

³ Lihat https://bsn.go.id/uploads/download/making_indonesia_4.0_kementerian_perindustrian.pdf

juta menjadi tenaga kerja terdidik seperti yang tertuang dalam kerangka RPJP 2005-2025 dan mengurangi disparitas pembangunan pendidikan diperlukan usaha bersama yang terarah dan terprogram. Satu satunya strategi yang dapat mempercepat usaha ini adalah melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh yang baru dipandang penting dalam sepuluh tahun terakhir.

Universitas Terbuka telah mempersiapkan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia baik berupa pendidikan formal maupun non formal untuk dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Program pendidikan formal dan non formal untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja menjadi tenaga kerja terdidik bersifat *skill oriented curriculum* dan *fleksible* yang menyesuaikan kebutuhan pembelajar yang cepat berubah.

Kebutuhan *re-training*, *career matching* dan *advancement* bagi tenaga kerja memerlukan jenis pendidikan yang *flexible* dan *ubiquitous* tanpa harus mengganggu pekerjaan yang mereka lakukan. Pendidikan tinggi kedepan tidak hanya memperhatikan terkait dengan APK perguruan tinggi, lebih jauh diharapkan juga memperhatikan bagaimana mereka tetap produktif dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hanya dengan pendidikan terbuka dan metode belajar jarak jauh, hal ini dapat dilakukan secara lebih efektif.

Sebagai satu-satunya perguruan tinggi terbuka di Indonesia, Universitas Terbuka (UT) telah diberi mandat untuk membuka akses ke pendidikan tinggi dan mengurangi kesenjangan pengetahuan dengan menghasilkan materi pendidikan

yang berkualitas tersedia secara mudah. Sejak didirikan, UT menggunakan sistem pendidikan terbuka dan fleksibel untuk memungkinkan pelajar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada 2012, UT menetapkan kebijakan terbuka untuk materi pendidikan yang diproduksi oleh UT. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses ke sumber daya pendidikan terbuka di Indonesia dan mengurangi kesenjangan pengetahuan materi pembelajaran yang berkualitas sebagai *public good* (Belawati, 2015). Kebijakan *Open Policy* UT menjadi sebuah katalis yang tepat untuk membudayakan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) sekaligus mengurangi kesenjangan ilmu pengetahuan diberbagai daerah yang akan dibahas pada bagian dibawah ini.

UNIVERSITAS TERBUKA *OPEN POLICY*

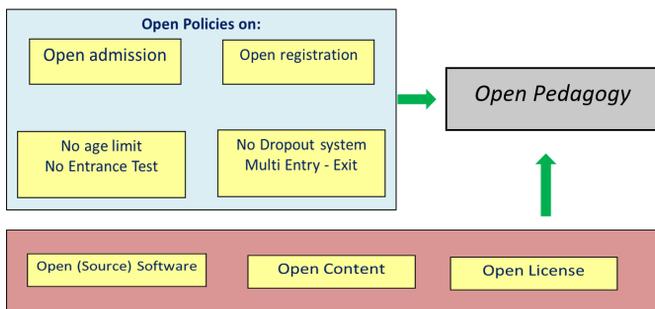
Perubahan paradigma dari perguruan tinggi sebagai *knowledge creation and transmision* dalam lingkungan yang tertutup kepada menjadi sebuah institusi yang mendorong tumbuhnya *re-creation and connecting knowledge* pada lingkungan yang terbuka menjadi suatu keniscayaan di era digital ini (Universitas Terbuka, 2018). Pembatasan akses ilmu pengetahuan dan pendidikan bertentangan dengan budaya berbagi (*knowledge sharing*) dan pendidikan terbuka (*open education*).



Sumber: <https://www.flickr.com/photos/catherinecronin/40471626755/>

Lebih jauh, perguruan tinggi saat ini juga didorong untuk melakukan efisiensi sehingga tidak dapat lagi bertumpu pada keberadaan kelas kelas reguler dan pembelajaran tatap muka, namun diperlukan sistem pembelajaran secara *blended* dengan *online learning* dan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Hal ini dapat memungkinkan *cost effectiveness* untuk menghasilkan output yang lebih optimal. Kondisi ini tentunya juga mendorong terjadinya revolusi peran perguruan tinggi kedepan dan juga para dosen dan mahasiswanya dalam *digital learning ecosystem* (Daryono, 2020).

Menyikapi perubahan revolusioner tersebut diperlukan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan SDM secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Pendidikan tinggi yang berkualitas, flexible, terbuka dan murah harus menjadi pilihan yang memungkinkan pelayanan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. UT secara tradisi telah menetapkan “keterbukaan” sesuai dengan mandatnya kedalam berbagai kebijakan institusionalnya. Secara visioner kebijakan keterbukaan (*Open Policy*) mendorong terwujudnya ekosistem pendidikan terbuka seperti yang diilustrasikan dalam gambar dibawan ini.



Gambar 2. Kebijakan *Open Policy* dan *Open Pedagogy* di UT

Sumber: Diadaptasi dari Belawati (2015)

Pendidikan Terbuka memiliki berbagai instrumen penting yang dinaungi dalam sebuah kebijakan terbuka (*open policy*) antara lain meliputi *Open Access*, *Open Data*, *Open Content*, *Open License*, *Open Admission*, dan *Open Registration*. Hal ini memungkinkan ekosistem pendidikan terbuka dapat berkerja secara lebih optimal meliputi dimensi sebagai berikut (Belawati, 2020).

Open Access merupakan prinsip yang mendasari bahwa pendidikan merupakan milik publik atau *public good* (Belawati, 2014a). Berdasarkan konsepsi ini pendidikan tinggi terbuka memiliki prinsip keterbukaan akses dengan tidak membatasi akses masuk ke perguruan tinggi. Seseorang tidak dapat didiskriminasikan untuk mendapatkan layanan perguruan tinggi demikian juga sumber pembelajaran berdasarkan latar belakang mereka. *Open access* tidak hanya terbatas pada prasyarat masuk perguruan tinggi namun lebih jauh juga terhadap sumber sumber pembelajaran juga data hasil penelitian yang di hasilkan oleh perguruan tinggi.

Akses terbuka atau *open access* (OA) terhadap ilmu pengetahuan yang selaras dengan *Open Educational Resources* (OER)



bertujuan untuk memberikan akses tak terbatas ke hasil penelitian ilmiah dan materi pembelajaran

termasuk yang ada pada jurnal, tesis, monograf ilmiah dan buku teks. *Open access* pertama kali digagas oleh komunike bersama para pendidik dan peneliti pada tahun 2002 melalui *Budapest Open Access Initiative* atau *BOAI* (www.budapestopenaccessinitiative.org/).

Open Content and Textbook. Berangkat dari *Budapest Open Access Initiative (BOAI)* dan semakin meningkatnya harga buku teks ber-hak cipta, advokasi terhadap *open content* dan *open textbook* memiliki justifikasinya. Di Amerika Serikat misalnya, harga buku teks telah meningkat sebesar 1041 persen sejak 1977. Hal ini juga terjadi di berbagai negara lain. Kondisi ini berdampak negatif pada proses pembelajaran. Sebuah survei di Florida US, mendapatkan bahwa dua pertiga dari siswa tidak membeli buku pelajaran yang diperlukan (Florida virtual Campus 2016).

Salah satu contoh inisiatif *open terxtbooks* adalah *BCCampus Open Textbook Project* (<https://open.bccampus.ca>) yang menyediakan berbagai buku teks yang banyak digunakan oleh sekolah maupun perguruan tinggi di Provinsi British Columbia, Kanada. *BCCampus Open Textbook Project* juga menyediakan perangkat yang dapat membantu penulis yang ingin mengembangkan *open textbooks*. Contoh lain adalah *OpenStax* (<https://openstax.org>) yang dikembangkan oleh Rice University di Houston, Texas, Amerika Serikat. Di Indonesia buku buku dan materi pembelajaran untuk sekolah dasar dan menengah tersedia secara gratis yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Buku Sekolah Elektronik (<https://bse.kemdikbud.go.id>) dan Rumah Belajar (<https://belajar.kemdikbud.go.id>).

Open Admission merupakan prinsip yang tidak membatasi seseorang untuk masuk perguruan tinggi begitu juga dengan berapa lama mereka ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai *community of learner* yang memungkinkan mereka untuk bergabung dan berhenti kapan saja. Melalui open admission perguruan tinggi tidak hanya menganut *single entry* bahkan dapat menggunakan prinsip *multiple entry* dan sering disebut sebagai *Multi Entry dan Multi Exit (MEMO)*.

Open Registration merupakan salah satu prinsip dari registrasi dapat dilakukan sepanjang masa. *Open registration* memungkinkan mahasiswa melakukan registrasi sepanjang masa. *Open registration* memungkinkan pembelajaran melalui *self-pace* yang memberikan kesempatan mahasiswa belajar sesuai dengan kemampuan dan preferensi mereka.

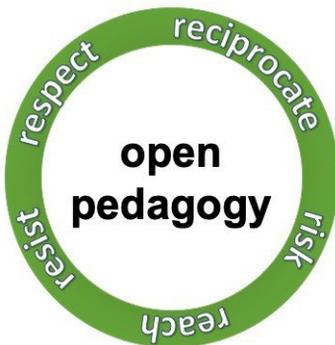
Free and Open Source Software (FOSS). Perangkat Lunak Terbuka FOSS banyak digunakan di dunia digital saat ini. Sebagai contoh, mayoritas situs web (86%) didukung oleh penggunaan perangkat lunak server web yang bersifat terbuka atau open source (Apache dan nginx). Anda mungkin tidak menyadari bahwa sistem operasi Android pada perangkat *mobile*, dengan pangsa pasar 88% (2015), juga didukung oleh Linux yang merupakan sistem operasi *open source*. Jadi, FOSS adalah perangkat lunak yang berlisensi terbuka untuk digunakan, disalin, ataupun didistribusikan/dibagi kembali. Prinsip kunci FOSS terletak pada sumber kodifikasi (source code) program yang diberikan secara terbuka kepada penggunaannya sehingga setiap individu dapat memodifikasi/mengubah perangkat lunak tersebut.

Dengan mengadopsi kebijakan terbuka (*Open Policy*), UT paling sesuai untuk melayani Indonesia dengan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 80% wilayahnya terdiri dari air. Dengan kondisi demografis yang besar dan heterogen lebih dari 245 juta orang pada tahun 2020, dan terdiri dari berbagai budaya etnis dan regional dengan lebih dari 1.000 bahasa lokal dan dialek yang dituturkan di antara berbagai kelompok etnis. UT secara strategis dapat berperan sebagai alat untuk mempromosikan persatuan dan kemakmuran Indonesia serta demokratisasi pendidikan tinggi (Universitas Terbuka, 2017).

Mempertimbangkan kondisi-kondisi ini UT telah dirancang untuk menjadi fleksibel dan dapat dijangkau, dengan berfokus pada melayani mahasiswa potensial yang, karena berbagai kendala, termasuk kurangnya dana, tinggal di daerah terpencil dan pedesaan dan bekerja, tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan tinggi tatap muka secara langsung.

Ekosistem pendidikan terbuka secara konseptual mendorong tumbuhnya belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) secara *inclusive* yaitu tidak adanya pembatasan dalam bentuk apapun. Hal ini sesuai dengan hak konstitusi dari masyarakat yang ada di dalam UUD 1945. Sebagai hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan mewajibkan negara untuk memenuhi hak tersebut. Konsepsi pendidikan terbuka menjadikan tidak hanya relevan dalam konteks pengembangan SDM berkelanjutan namun juga sebagai *instrumental tool* untuk memenuhi hak konstitusi masyarakat (Daryono and Sedyaningasih, 2017).

OPEN PEDAGOGY: MIXED FORMAL DAN INFORMAL LEARNING



Sumber: <https://thatpsychprof.com>

Banyak perguruan tinggi saat ini berada di persimpangan jalan diantara mempertahankan proses bisnisnya yang telah dilakukan selama ini dengan keharusan untuk berubah secara revolusioner tidak hanya dari aspek sistem delivery nya dengan adanya teknologi namun juga pada aspek pedagoginya. Sebagai perguruan tinggi terbuka, prinsip open pedagogy bukan

merupakan hal baru dikarenakan keduanya memiliki “*common interests*” yaitu dengan membuka pendidikan tinggi berangkat dari permasalahan permasalahan masyarakat dan berguna untuk masyarakat. Tidak ada satu definisi yang otoritatif terkait dengan open pedagogy namun prinsip dan konsep terus dikembangkan mengikuti perkembangan pengetahuan.

Secara sederhana prinsip *open pedagogy* berisikan konsepsi sebagai berikut (<http://openpedagogy.org/openpedagogy/>).

... an access-oriented commitment to learner-driven education and as a process of designing architectures and using tools for learning that enable students to shape the public knowledge commons of which they are a part. We might insist on the centrality of the 5 Rs to this work, and we might foreground the investments that Open Pedagogy shares with other learner-centered approaches to education.

Konsepsi *open pedagogy* tidak statis namun berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya konsep *open pedagogy* menghubungkan tiga pilar penting yaitu pendidikan, masyarakat dan industri, yang selama ini berjalan sendiri sendiri, dalam lingkungan yang dinamis. Sehingga pendidikan tinggi tidak lagi beroperasi dalam lingkungan yang vakum namun lebih berfungsi sebagai katalis untuk perubahan masyarakat.

Dalam konsepsi ini jelas bahwa ada perubahan signifikan di sektor pendidikan dan harapan kuat bahwa perguruan tinggi dapat memfasilitasi bergabungnya pendidikan formal dan informal untuk kebutuhan masyarakat yang berubah (Dearing, 1997). Lebih jauh saat yang sama telah tumbuhnya pengakuan

akan pentingnya dan peran pembelajaran informal belajar melalui berbagai *massive open online courses* (MOOCs), sehingga pengakuan kompetensi meliputi berbagai jalur. Sebagai contoh pengakuan terhadap aktivitas apa pun yang melibatkan mengajar pemahaman, pengetahuan, atau keterampilan yang terjadi tanpa kehadiran kriteria kurikuler yang dipaksakan secara eksternal (Livingstone, 2006).

Pembelajaran informal dapat dipicu oleh persyaratan kerja dan melibatkan dukungan dan motivasi dari orang lain dan karena itu dapat berguna untuk mengakomodasi belajar mandiri. Mandiri belajar secara sederhana dipahami sebagai pembelajaran yang dilakukan oleh pembelajar atau pelajar sendiri baik dengan maupun tanpa kurikulum yang telah ditentukan oleh instruktur (Livingstone, 2006). Sehingga salah satu komponen kunci *Open Pedagogy* adalah keberadaan akses sumber sumber pembelajaran, secara luas, untuk proses belajar dan mengajar, dan institusi menjamin dan memperluas akses tersebut.

Konsumsi pengetahuan dan penciptaan pengetahuan sebenarnya bukanlah proses yang terpisah tetapi paralel, karena pengetahuan dikoordinasikan, dikontekstualisasikan, kumulatif, berulang, dan rekursif. Dengan cara ini, *Open Pedagogy* juga menaruh perhatian pada bagaimana kita dapat meningkatkan akses baik formal maupun informal ke pendidikan tinggi demikian juga ke ilmu pengetahuan.

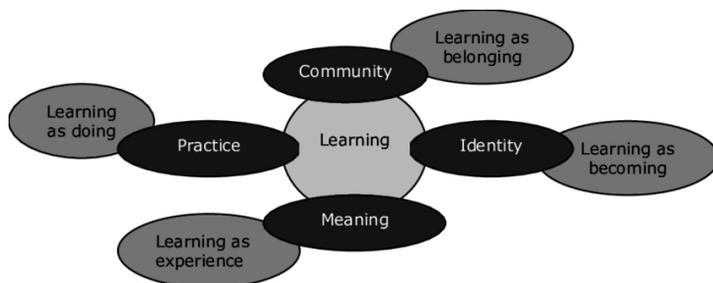
COMMUNITY OF PRACTICES: MEMBUMIKAN PENDIDIKAN TINGGI

Ketidaksesuaian lulusan perguruan tinggi dengan masyarakat dan lingkungan industri bukan merupakan permasalahan baru. Keluhan ini sudah berlangsung lama salah satunya disebabkan oleh pendidikan tinggi yang selama ini lebih

eksklusif dan elitis. Lulusan perguruan tinggi juga banyak yang merasakan gagap pada saat terjun langsung di dalam dunia kerja. Disisi lain cepatnya perubahan kebutuhan kompetensi di masyarakat mengharuskan perguruan tinggi untuk menata ulang pendekatan pedagoginya. Berbagai pendekatan pedagogi dilakukan, salah satu yang sangat populer dilakukan adalah pedagogi *community of practices* (COP).

Community of Practices (COP) pada dasarnya merupakan prinsip pedagogi yang lebih menekankan pada asumsi dasar bahwa pembelajaran bukan merupakan domain individu/ personal maupun sosial namun merupakan praktik dari masyarakat atau *community of practices* (Wenger, 1998). Etienne Wenger (1998) menyebutkan pembelajaran merupakan interaksi konstruktif dari partisipasi seseorang dalam masyarakat (community), cara dan metode seseorang berpartisipasi (practices), memaknai apa yang dipelajari (meaning) dan mengetahui perubahan yang terjadi pada seseorang (identity). Melalui COP pembelajar berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan eksternalnya.

Keempat komponen inilah yang menjadikan COP lebih menekankan pada partisipasi dalam masyarakat. Wenger (1998) memberikan ilustrasi pembelajaran sebagai berikut.



Gambar 3. Wenger's Components of a Social Theory of learning

Pembelajaran menjadi bermanfaat baik bagi mahasiswa maupun masyarakat pada saat keempat komponen dapat diwujudkan. COP ini sangat sesuai dengan pembelajaran di era digital yang memungkinkan mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif baik dalam lingkungan digital maupun lingkungan sosialnya.

PENUTUP

Pendidikan terbuka merupakan sebuah keniscayaan. Pembatasan akses dan sistem *delivery* tatap muka yang selama ini dilakukan perguruan tinggi disangsikan khususnya pada saat pandemic Covid-19 dan setelahnya. Di era digital saat ini batasan pendidikan formal dan informal menjadi kabur, perguruan tinggi harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Teknologi telah mendisrupsi pendidikan tinggi khususnya melalui MOOCs.

Seiring dengan perubahan tersebut, prinsip pedagogi pada perguruan tinggi juga harus disesuaikan. Dengan mengadopsi *open pedagogy* menjadikan pendidikan tidak hanya bersifat *mono facet* namun juga bersifat *multi facet* dan berpartisipasi aktif dalam perubahan masyarakat. *It is not yet too late but it is the best time to start.*

Dalam kondisi saat ini dan kedepan pendidikan terbuka dengan berbagai derivasinya yang diwadahi dalam *Open Policy* memberikan fleksibilitas, aksesibilitas dan aktual yang dapat menjadi barometer keberhasilan Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan SDM yang cerdas, berintegritas dan memiliki akhlak mulia guna menyongsong Indonesia emas 2045. Pendidikan tinggi terbuka secara konseptual juga merupakan ‘alat’ untuk mengimplementasikan amanat UUD 45 dan cita-cita menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

REFERENSI

- Belawati, T (2014) Open education, open education resources, and massive open online courses. *International Journal of Continuing Education and Lifelong Learning Vol 7 (1)*
- Belawati, T (2015) Global open movement. Dalam T. Belawati, N.S. Damajanti, & K.A. Puspitasari (Eds), *Universitas Terbuka di Era Informasi* (hal 21-37). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Belawati, T (2020) Pendidikan Terbuka. Dalam BMP Belajar di Era Digital. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Badan Pusat Statistik (2020) <https://www.bps.go.id/publicatio>
- Badan Pusat Statistik (2019) <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/07/11/1522/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tingga-pt-menurut-provinsi-2015-2016.html>
- Daryono (2020) The New Normal: Literasi Digital merupakan kompetensi utama pendidik abad 21. Dalam Tian Belawati dan Nizam (Ed). *Potret Pendidikan Tinggi di Era Covid 19*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Daryono and Sri Sedyaningsih. (2017). Universitas Terbuka Open Policy: Securing the Rights to Knowledge and Higher Education. Dalam Singh and Stuckelberger (Ed.). *Ethics in Higher Education: Value-driven leaders for the future*. Switzerland: Globethics.net International
- Dearing, R. (1997). *Higher education in the learning society*. National Committee of Inquiry into Higher Education. <http://www.leeds.ac.uk/educol/ncihe/>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/13/>
- <http://openpedagogy.org/open-pedagogy/>
- <https://thatpsychprof.com/5rs-for-open-pedagogy/>
- Kementerian Perindustrian (2018) https://bsn.go.id/uploads/making_indonesia_4.0_kementerian_perindustrian.pdf

- Livingstone, D.W. (2006). Informal learning: Conceptual distinctions and preliminary findings. Dalam Bekerman, Z., Burbules, N. & Silberman-Keller, D. (Eds.), *Learning in places: The informal education reader* (hal 203-228). New York: Peter Lang Publishing
- Bappenas. (2014). *Master plan Percepatan pembangunan ekonomi Indonesia*. Tersedia pada https://www.bappenas.go.id/files/1214/6295/8678/Final_Policy_MP3EI_SEA_Report_Dec_2014.pdf
- Universitas Terbuka. (2018). *34 tahun Universitas Terbuka: Cyber university untuk negeri*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice: learning, meaning, and identity*. New York: Cambridge University Press.

Prof. Daryono, Ph.D.

CREATIVE “KNOWLEDGE” COMMONS: TATA KELOLA ILMU PENGETAHUAN UNTUK SEMUA*

PENDAHULUAN

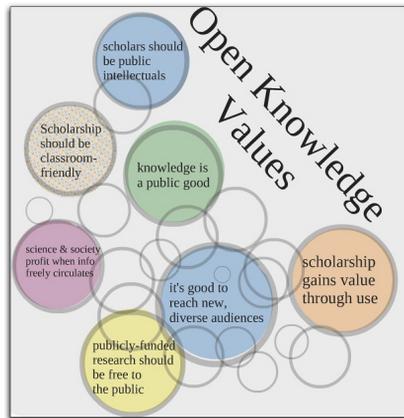
Penambahan kata “*Knowledge*” pada istilah yang sudah sangat populer “Creative Commons” di judul artikel ini tidak dimaksudkan untuk menambahkan konsepsi baru namun lebih pada melihat kembali bagaimana *knowledge common* yang sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat kemudian diinstitusionalisasikan tata kelolanya oleh Lawrence Lessig⁴ sebagai *Creative Commons*. Pemahaman ini penting agar kita memiliki *foreground* untuk mengetahui keterkaitannya.

Analisis ilmu pengetahuan sebagai milik bersama (*Knowledge Commons*) berakar pada studi interdisipliner yang mendalam tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (alam) bersama (*common pool resources*), seperti sumber daya

⁴ Lawrence Lessig merupakan penemu Creative Commons yang mengadvokasi *free culture* terhadap pengaturan *Intellectual Property Rights* (IPR) yang memberikan hak kepada para pengguna di depan (*a priori*), Lessig, <http://www.lessig.org/>, lihat juga <https://creativecommons.org/>

* Tulisan ini merupakan kajian lebih lanjut dari orasi penulis dengan judul “Akses terhadap Ilmu Pengetahuan sebagai Hak Azasi Manusia pada Wisuda UT, 13 September 2014.

air, udara, hutan, perikanan, margasatwa dan sumber daya bersama lainnya. Studi fenomenal terkait hal ini antar lain dilakukan oleh Hardin (1968) dengan tulisannya *'Tragedy of the Commons'*⁵ dan Ostrom (2015) dalam tulisannya *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*.



Sumber: flickr.com/photos/wakingtiger/4097078733/in/photostream/lightbox/

Dari kedua tulisan inilah kemudian istilah *Commons* menjadi sangat populer dan menjadi istilah umum yang merujuk pada sumber daya yang digunakan bersama oleh sekelompok orang. *Commons*, dapat digambarkan sebagai sumber daya yang dapat berskala kecil untuk melayani kelompok kecil (sebagai contoh peralatan dapur, peralatan rumah tangga), namun juga bisa pada skala komunitas (seperti trotoar, taman bermain, perpustakaan, tempat beribadah dan sebagainya), atau bisa lebih luas jangkauannya ke skala internasional dan global (seperti laut dalam, atmosfer, Internet, dan pengetahuan ilmiah).

Pengaturan akses terhadap *knowledge commons* dikonsepsikan sebagai *open access* terhadap *common goods*. Namun dalam perkembangannya terjadi kompleksitas sehingga memerlukan pengaturan agar masyarakat mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan bagi kesejahteraannya dan untuk kemajuan kemanusiaan. Demikian juga masyarakat dapat berkreasi

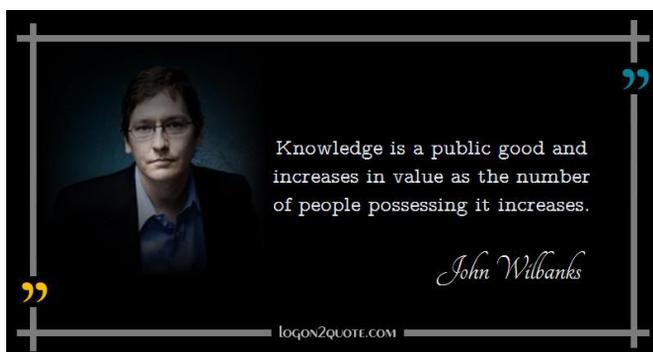
⁵ Hardin menulis artikel yang fenomenal ini seiring dengan kekhawatirannya terhadap menurunnya cadangan sumber daya alam dikarenakan pemanfaatan yang berlebihan akibat dari ledakan jumlah penduduk. Garrett Hardin (1968) *The Tragedy of the Commons*, *Science* 162 (3859) pp. 1243-1248, (DOI: 10.1126/science.162.3859.1243).

dan berbagi ilmu pengetahuan untuk kemajuan dan kemaslahatan manusia.⁶ Ilmu pengetahuan sebagai *common pool resources* dapat dipergunakan oleh siapa saja dan mendorong pertumbuhan ilmu pengetahuan melalui budaya berbagi (*the culture of sharing*) yang merupakan pilar di era informationalism (Manuel Castells and Pekka Himanen (2002). Budaya berbagi ilmu pengetahuan pada era digital menjadi bagian inherent dari sebuah peradaban manusia saat ini dan kedepan.

Artikel ini membahas secara khusus terkait dengan konsepsi *open access*, dan *creative “knowledge” common* sebagai tata kelola *knowledge common* yang mendorong tumbuhnya berbagi ilmu pengetahuan dan secara luas mendorong prinsip keadilan sosial dan perkembangan peradaban dan kemanusiaan.

ILMU PENGETAHUAN SEBAGAI COMMON GOODS

Perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa juga diikuti dengan kontestasi bagaimana akses terhadap ilmu



Sumber: <http://www.logon2quote.com/quote/686045/knowledge-is-a-public-good-and-increases-in-value#>

⁶ Lawrence Lessig merupakan salah satu yang mengadvokasi *free culture* dan pengaturan terhadap IPR. Sebagai salah satu prinsip pengaturan akses terhadap ilmu pengetahuan adalah diketemukannya *Creative Commons License* yang memberikan hak kepada para pengguna di depan (a priori) Lessig, <http://www.lessig.org/blog/>, <https://creativecommons.org/>

pengetahuan tersebut. Kontestasi tersebut sudah berlangsung berabad antara prinsip yang mendorong ilmu pengetahuan sebagai *common goods* dan prinsip *private goods/property* yang mendorong bentuk komersialisasi ilmu pengetahuan. Kedua prinsip tersebut memiliki dasar pemikiran dan justifikasi yang berbeda, sehingga keduanya seakan selalu bertentangan khususnya terkait dengan tata kelola yang efektif (*effective governance*).

Pertentangan terkait dengan Ilmu pengetahuan sebagai *common goods* atau sebagai *private property* telah terjadi sejak ditemukannya institusi *Intellectual Property Right* (IPR) pada abad akhir ke XIX oleh *English Common Law*.⁷

Dalam perkembangannya pada akhir abad ke XIX pertentangan antara kedua regime *intellectual property theory* tersebut sebenarnya terletak tidak pada aspek “*moral* atau *ethical right*” yang terkait dengan *ownership* dan *recognition* terhadap pencipta namun lebih pada *economic right* dari karya cipta tersebut (Adam Mossoff, 2001). Pertentangan ini sebenarnya juga merupakan manifestasi dari perbedaan dua regime *property rights* yang berlangsung hingga saat ini antara “*socialist regime*” dan “*capitalist regime*”. Sehingga apabila dilihat dari dasar kontestasi IPR lebih didasari oleh klaim dari penganut regim *capitalist* atas IPR sebagai salah satu aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penghargaan terhadap pencipta yang berbentuk insentif ekonomi.

Selama hampir dua abad IPR tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran, inovasi dan peradaban manusia. Seiring dengan pertumbuhan IPR, gerakan ilmu

⁷ *Intellectual Property Right* (IPR) berasal dari British Statute of Anne (1710) dan the Statute of Monopolies (1624) yang mengatur tentang bagaimana mengcopi sebuah buku dan siapa yang memiliki hak mengcopi?, 'Article 4 No. 6 of the Constitution of 1867 (German)' Adam Mossoff (2001) *Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History*. 52 *Hastings L.J.* 1255 hal. 1550-1800

pengetahuan sebagai *common goods* juga tumbuh subur. Hal ini didorong oleh salah satunya adalah penemuan teknologi duplikasi seperti mesin foto copi, mesin perekam dan penyimpan data yang memungkinkan seseorang untuk menduplikasi sebuah karya cipta secara mudah yang mendorong redefinisi institusi IPR. Disamping itu juga desakan dari negara-negara berkembang paska kolonialisme untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi termasuk akses terhadap ilmu pengetahuan (Wessels, 2014). Paralel dengan gerakan ini, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) sebagai bagian hak asasi manusia yang telah mendorong tumbuhnya regime ketiga dari IPR yang berlangsung hingga saat ini (Wessels, 2014). Regime ketiga dari IPR mendorong prinsip akses terhadap ilmu pengetahuan sebagai *public rights*. Pada konsiderasi ICESCR secara eksplisit menyatakan bahwa untuk memajukan peradaban manusia merupakan kewajiban dari negara memberikan jaminan akses setiap manusia terhadap ilmu pengetahuan.⁸

The right of everyone to take part in cultural life includes the rights to access to cultural goods, to benefit from the cultural heritage, to be involved in creating the spiritual, material, intellectual and emotional expressions of the community, to seek and develop cultural knowledge and expressions, and to share them with others.

Lebih lanjut akses terhadap ilmu pengetahuan telah diterima tidak hanya sebagai *public rights* namun juga disebutkan sebagai pra-kondisi terwujudnya hak asasi manusia (*indispensable means of realizing other human rights*) (Wessels, (2014).

⁸ Pasal 15 (1) *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) (1976). Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2005 lebih lanjut Indonesia mengadopsi prinsip ini dengan memasukkan pada Amandemen KEDUA dan KEEMPAT Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi dan juga gerakan *open movement* menjadikan tata kelola *open access* terhadap inovasi, (re) kreasi dan diseminasi ilmu pengetahuan menjadi sebuah keniscayaan saat ini.⁹ Tata kelola Ilmu pengetahuan menjadi sebuah “*knowledge common*” tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan *basic assumption* yang berbeda dengan konteks aslinya “*Commons*” pada IPR konvensional yang sudah tidak relevan bahkan bertentangan. Ilmu pengetahuan pada masa IPR konvensional memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan adanya pembatasan akses. Hal ini bertentangan dengan nilai ekonomi ilmu pengetahuan pada masa informasi digital saat ini dimana ilmu pengetahuan menjadi bernilai tinggi/berkualitas apabila mendapatkan *public recognition* yang tentunya harus melalui keterbukaan akses (*open access*). Disamping hal tersebut dalam ilmu pengetahuan tidak terjadi perebutan (*rivalry*) pemanfaatannya sehingga tidak akan terjadi *over used* atau *depletion* seperti yang terjadi ada *common pool resources* sumber daya alam. (Charlotte Hess and Elinor Ostrom ed., 2007)

Menempatkan ilmu pengetahuan sebagai *common/public good* pada era informasi saat ini merupakan keniscayaan. Namun demikian tata kelola terhadap ilmu pengetahuan harus mengedepankan prinsip moralitas, keadilan, kemanfaatan dan keberlanjutannya.

KNOWLEDGE COMMONS DAN CREATIVE “KNOWLEDGE” COMMONS

Sistem sumber daya bersama atau juga sering disebut sebagai *Common Pool Resources* adalah sistem pengelolaan

⁹ Transformasi *industrial society* menuju *information society* hanya dapat terwujud melalui ketersediaan akses ilmu pengetahuan secara bebas melalui transformasi budaya berbagi (*culture of sharing*). Lihat Castle, M (2010) *The Rise of Network Society: Information Age: Economy, Society and Culture*. Lihat juga Belawati T. (2014) *Toward Open Movement*, Universitas Terbuka

barang, yang dilepaskan dari hak kebendaan atau property rights tertentu (Ostrom, 2015). Dalam hal ini meskipun ilmu pengetahuan tersebut merupakan jenis barang ekonomi yang memiliki nilai ekonomi namun tidak dimasukkan dalam lalu lintas perdagangan hak kebendaan (property rights) dibawah prinsip hak kekayaan intelektual. Ilmu pengetahuan sebagai *common pool researches* diletakkan dalam perspective hak Pribadi dan sekaligus sebagai hak publik (Charlotte Hess and Elinor Ostrom ed., 2007).

Penguasaan dan kepemilikan bersama dapat diatur dan dikelola dengan baik secara lokal sebagai contoh taman atau perpustakaan komunitas; secara lintas batas seperti sungai atau laut yang melintasi batas negara, satwa yang bermigrasi, dan tentunya Internet; atau secara tanpa batas yang jelas, seperti ilmu pengetahuan, lapisan ozon, atmosfer dll. Kajian terkait *commons* dalam perkembangannya membedakan antara *commons* sebagai sumber daya atau sistem sumber daya dan *commons* sebagai rezim hak kebendaan (property rights) (Ostrom, 2015).

Kepemilikan atas barang bersama atau *common pool resources* merupakan pengaturan barang ekonomi yang berbeda dengan hak hukum kepemilikan (*private property*) sedangkan *common property* adalah rezim hukum dengan seperangkat hak hukum sebagai miliki bersama. selanjutnya yang akan dibahas dalam artikel ini adalah terkait dengan ilmu pengetahuan sebagai *common pool resources*. Istilah yang lebih umum untuk menggambarkan kompleksitas dan variabilitas tata kelola ilmu pengetahuan dan informasi sebagai sumber daya bersama melalui apa yang disebut sebagai *Knowledge Commons*. *Knowledge Commons* dapat terdiri dari beberapa jenis produk intelektual dan berbagai konsep yang memiliki banyak karakteristik didalam kerangka “commons”.

Permasalahan utama terkait dengan *knowledge commons* adalah terletak pada masalah pemanfaatan, tata kelola, dan keberlanjutan suatu kepemilikan bersama ilmu pengetahuan yang disebabkan oleh beberapa perilaku negatif manusia yang khas yang mengarah pada dilema sosial seperti pencurian karya intelektual, persaingan tidak sehat dalam pemanfaatannya, *free rider*, dan pengambilan serta penyimpanan yang berlebihan. Potensi ancaman umum terhadap *knowledge commons* adalah komodifikasi (merubah menjadi komoditi), penutupan akses, pengambilalihan, kualitas, dan tidak berkelanjutan sehingga diperlukan pengelolaan *Knowledge common* yang efektif (Charlotte Hess and Elinor Ostrom, 2007).

Pada rezim hak kekayaan intelektual terdapat aturan formal nasional maupun internasional serta aturan informal yang digunakan. Sebagian besar penulis dan peneliti telah mengetahui hak-hak dasar dan kewajiban hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan paten. Namun dengan berubahnya lanskap informasi digital keduanya menjadi kompleks dan memunculkan berbagai kontroversi. Sebagai alternatif terhadap batasan-batasan yang dilakukan oleh undang-undang hak cipta, sekelompok sarjana hukum yang di pelopori oleh Lawrence Lessig mengembangkan Creative Commons. Secara sederhana Creative Commons mengisi kekosongan hukum untuk menjadikan barang dibawah Hak Pribadi (*private property*) dijadikan sebagai barang publik (*public/common goods*). *Creative Commons* menyatukan



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_Indonesia_2017/Anggaran/media/berkas:CCID_logo_baru.png

keduanya baik *private rights* maupun *public/common rights* melalui berbagai lapisan atau jenis “hak” yang lebih akomodatif dan fleksibel tergantung pada kemauan penciptanya.

Inisiatif kolektif ini pada dasarnya mengubah aturan operasional untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan bentuk pembatasan pembatasan baru. Tentunya hal ini menjadi mudah dikarenakan proses bisnis diseminasi ilmu pengetahuan yang berubah terkait dengan bagaimana sebuah ilmu pengetahuan mendapatkan *public recognition*. Secara umum, hak kebendaan (property rights) pada *Creative Common* didefinisikan sebagai tindakan yang dapat dilakukan “pengguna” dalam kaitannya dengan “pencipta” terkait beberapa “hak” yang melekat pada lisensinya. Hal ini sesuai dengan asas deklaratif dari IPR bahwa seseorang yang memiliki “hak”, orang lain memiliki kewajiban (duties) yang sepadan untuk mencermati dan mengakui hak tersebut.

Schlager dan Ostrom (1992) menyebutkan terdapat tujuh jenis “hak” yang paling relevan untuk digunakan sehubungan dengan (digital) *knowledge common* meliputi:

- **Akses** merupakan hak untuk memasuki area fisik atau digital yang ditentukan dan dapat menikmati manfaat secara tidak terbatas.
- **Kontribusi** merupakan hak untuk berkontribusi pada konten ilmu pengetahuan.
- **Ekstraksi** merupakan hak untuk mendapatkan unit sumber daya atau produk dari sistem sumber daya ilmu pengetahuan.
- **Penghapusan**, merupakan hak untuk menghapuskan sumber daya pengetahuan dari sebuah repositori digital.
- **Manajemen/Partisipasi**, merupakan hak untuk mengelola sumber daya dan mendorong partisipasi untuk perbaikan berkelanjutan.

- **Pengecualian**, merupakan hak untuk menentukan siapa yang akan memiliki hak akses, kontribusi, ekstraksi, dan penghapusan dan bagaimana hak-hak tersebut dapat dipindahtangankan.
- **Pemindahan Tangan (transfer)** merupakan hak untuk menjual atau menyewakan ekstraks, manajemen/partisipasi, dan pengecualiannya.

Hak-hak di atas sangat berguna untuk pembuatan aturan pada repositori digital. Memahami bahwa hak milik — apakah intelektual atau nyata — adalah kumpulan hak adalah sangat penting.

Adanya berbagai hak inilah yang dalam *property rights* juga disebut sebagai *Bundle of Rights*. Creative Commons menggunakan *Bundle of Rights* ini yang dimanifestasikan dalam enam lisensi utamanya. Pemahaman tentang *Bundle of Rights* dalam *intellectual property rights* terus berkembang karena meningkatnya kebutuhan visibilitas online seiring dengan pesatnya penggunaan Creative Commons dan penyimpanan karya intelektual individu dalam repositori online.

Keenam jenis lisensi *Creative Commons* tersebut meliputi (<https://creativecommons.or.id/lisensi-cc-bahasa-indonesia/>)



CC BY Atribusi

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebaran secara maksimal dan penggunaan materi berlisensi.



CC BY-SA, Atribusi-Berbagi Serupa

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit/pengakuan kepada pencipta dan melisensikan ciptaan turunan di bawah syarat yang serupa. Lisensi ini seringkali disamakan dengan lisensi “copyleft” pada perangkat lunak bebas dan terbuka. Seluruh ciptaan turunan dari ciptaan Anda akan memiliki lisensi yang sama, sehingga setiap ciptaan turunan dapat digunakan untuk kepentingan komersial.



CC BY-ND, Atribusi-TanpaTurunan

Lisensi ini mengizinkan penyebaran ulang, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, selama bentuk ciptaan tidak diubah dan utuh, dengan pemberian kredit/pengakuan kepada Anda.



CC BY-NC Atribusi-NonKomersial

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, dan walaupun mereka harus mencantumkan kredit kepada Anda dan tidak dapat memperoleh keuntungan komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan asli.



CC BY-NC-SA, Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.



CC BY-NC-ND, Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan

Lisensi ini adalah lisensi yang paling ketat dari enam lisensi utama, hanya mengizinkan orang lain untuk mengunduh ciptaan Anda dan membaginya dengan orang lain selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya dengan cara apapun atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.

Semua ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan artefak manusia dengan demikian memiliki unsur budaya yang penting dan juga memiliki aspek intelektual, fungsi ekonomi, dan politik serta keberlangsungan. Dengan demikian, artefak tersebut harus diteruskan dari satu orang ke orang lain maupun dari generasi ke generasi berikutnya sehingga memiliki nilai publik. Berbagai aturan yang terkait dengan diseminasi ilmu pengetahuan, penggunaannya oleh masyarakat, dan teknologi informasi harus terus diadaptasi ketika teknologi dan komunitas tersebut berubah dan tumbuh. Peraturan harus fleksibel dan dapat diadaptasi untuk menciptakan desain kelembagaan yang efektif dan memastikan keberlanjutan sumber daya ilmu pengetahuan (Elinor Ostrom and Charlotte Hess (2007)).

PENUTUP

Akses terhadap ilmu pengetahuan (*knowledge commons*) merupakan pra-kondisi masyarakat menuju masyarakat informasi atau masyarakat digital. Penataan dan pengaturan Ilmu pengetahuan sebagai *common pool resources* menjadikan ilmu pengetahuan secara terus menerus dikembangkan dan diperbaharui oleh para pengguna melalui budaya berbagi ilmu pengetahuan (*the culture of knowledge sharing*). Tumbuhnya budaya berbagi ilmu pengetahuan akan mendorong terbentuknya jejaring pengetahuan yang memungkinkan manusia secara mudah memanfaatkan ilmu pengetahuan.

Sebagai peratifikasi *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), dan juga telah dimasukkannya prinsip-prinsip ICESCR di dalam Amandemen UUD 1945, merupakan kewajiban negara untuk menjamin akses, perlindungan serta mendorong keberlanjutan ilmu pengetahuan sebagai hak publik (*public rights*) khususnya ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari keuangan negara. Adopsi tata kelola *knowledge commons* dalam *Creative Commons* di Indonesia dapat menjamin hak konstitusi (*constitutional rights*) akses terhadap ilmu pengetahuan secara berkeadilan sekaligus membangun budaya berbagi ilmu pengetahuan untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia serta dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

REFERENSI

- Adam Mossoff, (2001) *Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History*. 52 *Hastings L.J.* 1255 hal. 1550-1800.
- Belawati T. (2014) *Towards Open Movement*, Universitas Terbuka.
- Castle, M (2010) *The Rise of Network Society: Information Age: Economy, Society and Culture*.

- Castells Manuel and Pekka Himanen (2002) *Information Society and the Welfare State*. New York: Oxford University Press.
- Charlotte Hess and Elinor Ostrom ed. (2007) *Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practices*, (preface) London: The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Elinor Ostrom (2015) *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, (DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781316423936>).
- Garrett Hardin (1968) The Tragedy of the Commons, *Science* 162 (3859) pp. 1243-1248
<http://www.lessig.org/blog/>,
<https://creativecommons.org/>
<https://creativecommons.or.id/lisensi-cc-bahasa-indonesia/>
<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights <https://www.ohchr.org/EN/professionalinterest/pages/cescr.aspx>,
- Schlager dan Ostrom (1992) di dalam Charlotte Hess and Elinor Ostrom ed. (2007) *Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practices*, (Preface) London: The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Wessels, Ante. (2014) *Copyright law and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, <https://people.ffii.org/~ante/copyright/Wessels-copyright-ICESCR-2014.pdf> diunduh pada 5 Maret 2020

Prof. Tian Belawati, Ph.D.

MODEL PENDIDIKAN TERBUKA: OERs DAN MOOCs

Dua dari banyak dimensi pendidikan terbuka yang paling fenomenal adalah fenomena *open educational resources (OERs)* dan *massive open online courses (MOOCs)*. Kedua dimensi pendidikan terbuka ini telah secara nyata meningkatkan penyebaran ilmu pengetahuan kepada massa secara masif. OERs atau sumber pembelajaran terbuka (SUAKA) merupakan suatu konsep yang membagi ilmu pengetahuan secara terbuka (baca: tanpa biaya) kepada publik dengan menggunakan lisensi terbuka yang memungkinkan pembuatan karya turunan, sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang dan tersebar dengan lebih cepat. MOOCs atau kuliah terbuka merupakan salah satu bentuk *open educational practices (OEPs)* yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk dapat mengikuti perkuliahan *online* tanpa biaya. Melalui MOOCs, para pakar yang biasanya sangat eksklusif dan hanya dapat mengajar bagi sekelompok kecil mahasiswa di kampus tertentu (dan umumnya berbiaya tinggi dengan saringan masuk yang ketat), dapat berbagi ilmu kepada *audience* yang lebih luas.

SUMBER PEMBELAJARAN TERBUKA (OPEN EDUCATIONAL RESOURCES)

Sumber pembelajaran terbuka merupakan terminologi umum yang sekarang digunakan bagi materi-materi/konten pendidikan yang bersifat terbuka. Seperti telah dijelaskan secara singkat di bagian 1.2 dari buku ini, *open content* (konten terbuka) merupakan istilah yang merujuk pada suatu materi (*content*) yang disebarakan oleh penciptanya dengan lisensi terbuka sehingga pengguna bisa menggunakan materi tersebut sesuai dengan kebutuhannya (Wiley, 2011). Kata “terbuka” pada *open content* menurut Wiley (dalam Belawati, 2014), sama seperti dalam kehidupan sehari-hari dimana misalnya ‘pintu’ yang dapat “terbuka lebar”, “setengah terbuka”, atau “agak terbuka”. Dengan demikian, ‘terbuka’ pada konsep *open content* juga merupakan suatu kontinum.

Secara sederhana, hak penggunaan *open content* diekspresikan dalam “Kerangka 5R” yang diambil dari kata-kata Bahasa Inggris untuk *Retain* (memiliki), *Reuse* (penggunaan ulang), *Revise* (penyempurnaan/perbaikan), *Remix* (pemodifikasian/penggabungan dengan materi lain), dan *Redistribute* (penyebaran ulang). Secara rinci, kelima R tersebut adalah (Wiley, 2014 in <https://opencontent.org/blog/archives/3221> retrieved 4 January 2019):

1. *Retain* - pemberian hak untuk menggunakan, memiliki, dan mengontrol duplikatnya (membuat salinan atau mengunduh, menyimpan, dan mengelola *copy* dari materi yang disalin tersebut).
2. *Reuse* - pemberian hak untuk menggunakan baik sesuai asli ataupun dalam format yang telah diubah (misalnya membuat *copy* dari materi tersebut)
3. *Revise* - pemberian hak untuk mengadaptasi, menyelaraskan, memodifikasi, atau mengubah materi sama sekali (misalnya, menerjemahkan secara bebas)

4. *Remix* - pemberian hak untuk mengkombinasikan materi asli ataupun yang telah dimodifikasi dengan materi lain sehingga menjadi materi baru sama sekali
5. *Redistribute* - pemberian hak untuk menyebarkan atau membagi salinan (*copy*) materi baik yang asli maupun yang telah direvisi.

Seluas apa hak yang ingin diberikan oleh penciptanya, itulah yang menentukan seberapa terbuka *open content* tersebut bagi penggunaannya. The Massachusetts Institute of Technology (MIT), pada tahun 2001, adalah institusi pendidikan pertama yang membuka semua bahan perkuliahannya untuk umum melalui Internet dengan nama MIT *OpenCourseWare* (MIT-OCW). Inisiatif MIT telah menginspirasi banyak institusi pendidikan lain sehingga pada Forum “*the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries*” di tahun 2002, UNESCO memperkenalkan istilah *Open Educational Resources* (OERs). UNESCO terus mengkampanyekan OER, melalui pembentukan *Chairs of OER* dan penyelenggaraan *World Open Educational Resources Congress*.

Chairs Programme UNESCO yang disebut UNITWIN (University Twinning)/UNESCO *Programme* dimulai sejak tahun 1992 dan meliputi berbagai inisiatif yang melibatkan berbagai *network*, pakar dan praktisi pada bidangnya masing-masing. Program *Chair* ini disusun sebagai cara untuk memajukan penelitian, pelatihan dan pengembangan program di semua bidang kompetensi UNESCO dengan membangun jejaring antar universitas dan mendorong kerja sama antar universitas melalui transfer pengetahuan lintas batas. Diantara seluruh *Chairs* yang dibentuk UNESCO, setidaknya ada enam yang secara khusus berkecimpung dalam penelitian, pengembangan dan advokasi OER, yaitu Athabasca University di Kanada, The Notre Dame University-Louaize di Lebanon, Fontys University

of Applied Sciences - Eindhoven di Belanda, Open University of the Netherlands di Belanda, Otago Polytechnic di New Zealand, dan The Jožef Stefan Institute di Ljubljana. Upaya promosi OER ini juga dilakukan oleh dua organisasi besar dunia, yaitu the International Council for Open and Distance Education (ICDE) dan The Commonwealth of Learning (COL) yang juga membentuk *Chairs* serupa.

The World Open Educational Resources Congress pertama diadakan di Paris pada 20-22 Juni 2012, sepuluh tahun setelah UNESCO mengadopsi istilah OER. Pada kongres tersebut definisi OER disempurnakan sehingga tidak hanya mencakup *educational materials* dalam format digital dan tersedia di Internet, tetapi juga mencakup materi-materi pada format lainnya. Pengertian OER hasil Kongres OER 2012 adalah (UNESCO, 2012):

*“... teaching, learning and research materials **in any medium, digital or otherwise**, that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no-cost access, use, adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions.”*

Pengertian ini sangat komprehensif karena meliputi materi (baik materi pendidikan maupun penelitian), perangkat pembelajaran (seperti perangkat lunak untuk pendidikan), dan



lisensi terbuka. Hasil Kongres OER pertama ini dirangkum dalam ‘Deklarasi OER Paris’ (*Paris OER Declaration*). Menjelang Kongres 2012 tersebut UNESCO

2. Pendidikan Terbuka dan Keadilan Sosial

juga membuat logo baru OER yang menunjukkan lembaran buku terbuka dengan tangan-tangan yang menggapai merepresentasikan matahari terbit diatas buku dengan sampul terbuka.

OER yang menggunakan lisensi terbuka dipercaya dapat menurunkan biaya untuk mengakses ilmu pengetahuan yang ada. Oleh karena itu, masyarakat global sangat antusias yang diperlihatkan dari semakin banyaknya repositori OER yang ada. UNESCO kemudian menyelenggarakan Kongres kedua pada 18-20 September 2017 di Ljubljana, Slovenia. Demikian pula, jejaring para penggiat OER telah membuat suatu peta yang secara dinamis dapat memperlihatkan data tentang berbagai institusi, aktivitas dan produk terkait OER di seluruh dunia. Peta OER tersebut dapat dilihat pada laman <https://oerworldmap.org/resource/> yang merupakan bagian dari OERHub (<http://oerhub.net/>) yang dikelola oleh the Institute of Educational Technology (IET), The Open University (OU) di Inggris yang merupakan situs komunitas peneliti OER secara global.



Gambar 1. Peta OER Dunia

Pada peta OER kita dapat mencari informasi mengenai siapa dan dimana saja institusi maupun individual yang berkecimpung (membuat dan membagikan materi OER), proyek/kegiatan/program apa yang telah, sedang, dan akan berlangsung terkait OER, kebijakan OER apa saja yang ada dan dimana, dan lain sebagainya. Berdasarkan warna pada peta ini, kita dapat melihat dimana negara yang aktivitas OERnya banyak, sedang, ataupun masih sedikit. Lebih jauh, data dari peta ini menunjukkan bahwa setidaknya (karena ada kemungkinan bahwa masih terdapat aktivitas OER yang datanya belum dimasukkan kedalam peta ini) pada awal 2020 ada 1.147 institusi/organisasi yang memiliki program terkait OER, 620 repositori OER, 448 proyek/program yang sedang berjalan (per 4 Februari 2020), dan 170 kebijakan terkait OER baik yang dikeluarkan oleh institusi maupun oleh suatu negara. Data ini menunjukkan betapa besarnya animo masyarakat global akan OER.

Bukan hanya masyarakat, banyak pemerintahan yang secara formal mengadopsi OER. Provinsi British Columbia di Kanada misalnya, pada tahun 2002 meluncurkan mega program yang disebut '*BC open textbook*' yang mendanai pengadaan buku teks terbuka (baca: gratis) untuk 40 area keilmuan. Program ini terus dikembangkan dan dilaporkan bahwa sejak 2002 hingga 2020 (dibaca 5 Februari 2020), program *BC open textbook* ini telah berhasil menghasilkan 3.572 judul yang dinikmati oleh sekitar 14.7804 mahasiswa di 40 institusi Pendidikan, dan diperkirakan telah membantu mahasiswa menghemat biaya pendidikan hamper sebesar C\$15 juta atau sekitar 154 milyar rupiah. (<https://open.bccampus.ca/open-textbook-stats/>). Inisiatif ini telah diikuti oleh provinsi-provinsi lain di Kanada.

Di Amerika Serikat, pada tahun 2018 *Creative Commons USA* meluncurkan satu pedoman untuk membantu pemerintah menurunkan biaya buku teks di perguruan tinggi. Pedoman yang diberi judul “OER State Legislative Guide,” ini dimaksudkan agar para pengambil kebijakan menyadari dan memahami konsep OER dalam menurunkan biaya Pendidikan (<https://creativecommonsusa.org/index.php/2018/10/30/oer-in-practice/>). Dan sekarang, setidaknya 28 negara bagian telah memiliki kebijakan untuk mengadopsi dan mendukung penggunaan OER secara resmi (<https://sparcopen.org/our-work/list-of-oer-policies-projects/>). Pada tingkat nasional, menyadari tingginya biaya buku teks yang menyebabkan tingginya *student debt* di tingkat pendidikan tinggi, Kongres Amerika Serikat meluncurkan program *open textbook* pada 2018 dengan dana hibah bagi institusi-institusi Pendidikan sebesar US\$5 juta. Program ini terus berlanjut dengan dana yang lebih besar, dan pada tahun 2020 ini anggarannya mencapai US\$7 juta (<https://sparcopen.org/news/2019/congress-renews-open-textbook-pilot-grant-program-with-7-million/>).

Di Eropa, diatas kebijakan dan adopsi OER oleh masing-masing negara, Uni Eropa (European Union atau EU) pada tahun 2013 meluncurkan suatu inisiatif yang disebut ‘*Opening Up Education*’ yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan penggunaan OER di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi di seluruh Eropa. Untuk itu, EU membuat satu situs bernama *Open Education Europa* yang dirancang sebagai *platform* agar para peserta didik, praktisi, dan institusi pendidikan dapat berbagi berbagai sumber pembelajaran. Berbagai program untuk mengisi *platform* didukung pendanaannya oleh program ‘Erasmus+’ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en) dan ‘Horizon 2020’ (<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en>).

Di Asia, selain di negara-negara juga telah banyak institusi pendidikan yang mengadopsi (memproduksi dan memanfaatkan) OER. Namun demikian, selain Cina, India dan Korea yang telah mengeluarkan program yang bersifat nasional, adopsi OER di negara-negara Asia umumnya dilakukan oleh individu-individu (Dhanarajan & Porter, 2013 dalam Belawati, 2014). Salah satu negara Asia yang telah secara substansial berinvestasi untuk pengembangan OER adalah Cina (Tiongkok) melalui *China Open Resource for Education (CORE)* yang dimulai pada tahun 2003. CORE merupakan konsorsium antara 26 perguruan tinggi tatap muka dan 44 *China Radio & TV Universities* (beberapa diantaranya sekarang berganti nama menjadi *open universities*) yang secara bersama-sama memiliki sekitar 5 juta mahasiswa. Dengan CORE mereka bertujuan untuk menerjemahkan MIT *open courseware* serta mengembangkan dan menyediakan OER berbahasa Cina untuk perguruan-perguruan tinggi di Cina. Program CORE didukung secara finansial oleh Kementerian Pendidikan Cina (Belawati, 2014). Secara khusus di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah meluncurkan Program Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) yang diantaranya memberikan hibah kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan OER dan membaginya melalui jejaring SPADA. Jauh sebelum SPADA lahir, banyak perguruan tinggi juga telah mengembangkan dan membagi materi perkuliahan secara Terbuka di *website* mereka walaupun tidak menggunakan istilah OER dan tidak mengadopsi lisensi Terbuka. Universitas Terbuka (UT) merupakan perguruan tinggi pertama yang secara eksplisit mengadopsi konsep OER dan mengeluarkan Keputusan Rektor untuk penggunaan lisensi terbuka (*Creative Commons*) pada produk-produk OER-nya.

Mencari OER yang sesuai dengan kebutuhan di dunia maya memerlukan strategi tersendiri. Namun sekarang telah banyak mesin pencari dan repositori yang dapat membantu, diantaranya OASIS, Mason OER Metafinder, Merlot, Connexions, OER Commons, Curriki, Open Scout, AMSER, Free, Edsitement!, Jorum, OpenCulture, Creative Commons, Khan Academy, OCW Consortium, dan WikiEducator. Curriki dan WikiEducator bahkan telah berkembang menjadi semacam komunitas yang aktif melakukan diskusi-diskusi akademik terkait dengan materi yang sedang menjadi 'hit', dan dapat diikuti juga melalui situs jejaring sosial *facebook* dan *twitter* (Belawati, 2014).

MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOCs)

Salah satu model pendidikan terbuka yang paling fenomenal adalah *massive open online courses* (MOOCs). MOOCs adalah pembelajaran *online* secara terbuka (tidak ada prasyarat) dan masif. Sesuai namanya, MOOCs pada awalnya selalu *online* (*fully online*), namun dalam perkembangannya banyak skema MOOCs yang dikombinasikan dengan metode tatap muka atau jarak jauh yang *off-line*. Salah satu model MOOCs yang *blended* adalah yang dilaksanakan The Commonwealth of Learning (COL) yang mengkombinasikan penyampaian materi secara *off-line* melalui CD dengan interaksi secara *online*. Dasar skema MOOCs *blended* ini adalah karena target pemanfaat MOOCs yang dikembangkan COL merupakan negara-negara kecil anggota Persemakmuran Inggris yang umumnya belum memiliki koneksi Internet yang baik dan handal.

MOOCs yang pertama diselenggarakan pada tahun 2008 oleh dua orang dosen *Manitoba University* di Kanada (George Siemens dan Stephen Downes) untuk matakuliah "*Connectivism and Connective Knowledge*". Matakuliah ini merupakan matakuliah biasa yang awalnya ditujukan untuk

25 orang mahasiswa di kelas mereka. Namun, mengingat matakuliah ini tentang konektivitas dan jejaring pengetahuan, maka George Siemens dan Stephen Downes memutuskan untuk membuka matakuliah mereka secara online dan terbuka kepada siapa saja; dan ternyata, ada 2.200 orang dari seluruh dunia yang tertarik dan mengikuti matakuliah tersebut. Inisiatif ini kemudian banyak diikuti oleh dosen-dosen lain dari berbagai perguruan tinggi di Kanada dan Amerika Serikat, termasuk yang sangat terkenal yaitu MOOC dalam *“Introduction to Artificial Intelligence”* yang diselenggarakan oleh Sebastian Thrun and Peter Norvig dari Stanford University pada tahun 2011. MOOC *“Introduction to Artificial Intelligence”* ini menjadi terkenal karena mampu menarik minat dan diikuti oleh sekitar 160 ribu peserta.

Perkembangan MOOCs dari tahun ke tahun luar biasa. Data terakhir menunjukkan bahwa pada 2019 ada lebih dari 900 universitas di seluruh dunia menyelenggarakan sekitar 13.500 judul MOOCs (Shah, 2019). Selain itu, data Class Central yang dilaporkan Shah (2019) juga menunjukkan bahwa sekarang telah ada sekitar 820 jenis *microcredentials* dan 50 MOOC-based degree yang ditawarkan. Jumlah peserta MOOCs pun dilaporkan telah lebih dari 110 juta orang. Data ini merupakan data global di luar data MOOCs yang diselenggarakan oleh institusi di negara Cina yang juga merupakan salah satu penyelenggara MOOCs yang cukup besar.

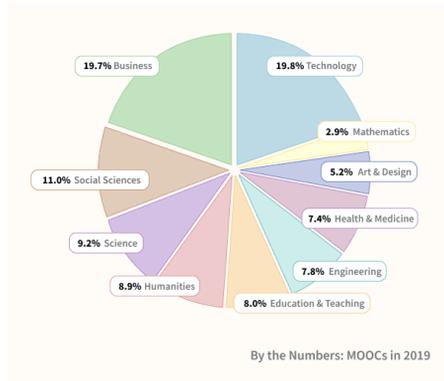
Dari seluruh penyelenggara MOOCs, ada lima Lembaga yang merupakan penyelenggara terbesar, yaitu:

- Coursera (Amerika Serikat) yang menawarkan 3.800 MOOCs, 420 program dengan *microcredential*, dan 16 program bergelar, serta memiliki sekitar 45 juta peserta;

- edX (Amerika Serikat) yang menawarkan 2.640 MOOCs, 292 program dengan *microcredential*, dan 10 program bergelar, serta memiliki sekitar 24 juta peserta;
- Udacity (Amerika Serikat) yang menawarkan 200 MOOCs, 40 program dengan *microcredential*, dan 1 program bergelar, serta memiliki sekitar 11,5 juta peserta;
- FutureLearn (Inggris) yang menawarkan 880 MOOCs, 49 program dengan *microcredential*, dan 23 program bergelar, serta memiliki sekitar 10 juta peserta; dan
- Swayam (India) yang menawarkan 1.000 MOOCs serta memiliki sekitar 10 juta peserta.

Seperti terlihat, tiga dari lima penyelenggara MOOCs terbesar dunia adalah organisasi di Amerika Serikat. Walaupun demikian, peserta MOOCs pada umumnya dari seluruh dunia. Data Class Central juga menunjukkan bahwa MOOCs yang pada awalnya merupakan perkuliahan yang bersifat informal dan tidak menawarkan gelar, telah berkembang ke arah bergelar. Sekarang ini banyak sekali jenis skema penyelenggaraan MOOCs yang berorientasi pada pemberian sertifikasi dan gelar kualifikasi tertentu baik yang bersifat non-formal seperti *microcredential* maupun yang formal seperti *MOOC-based Degree* yang diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi. Generasi MOOCs yang mengarah ke pemberian gelar ini dikenal sebagai '*the second wave of MOOC Hype*' yang puncaknya adalah pada tahun 2018 sehingga disebut '*the year of MOOC-based of degrees*'. *Hype* pertama adalah pada tahun 2012 ketika The New York Times menyebut bahwa tahun 2012 merupakan '*tahun MOOCs*'.

Jika dilihat dari bidang keilmuan yang tersedia dalam berbagai penawaran MOOCs secara global, maka Gambar 2 memperlihatkan bahwa MOOCs paling banyak tersedia untuk bidang teknologi dan bisnis (38,5%).



Gambar 2. MOOCs Berdasarkan Bidang Keilmuan

Secara pedagogi ada dua jenis MOOCs, yaitu cMOOC dan xMOOC. MOOC pertama yang diselenggarakan oleh George Siemens and Steven Downes merupakan MOOC yang dirancang dengan pendekatan cMOOCs, yaitu berdasarkan pendekatan konektivisme yang menekankan kepada keterlibatan pembelajar dalam suatu jejaring/komunitas pembelajaran secara kolaboratif, tidak terlalu terstruktur, dan menekankan pada keaktifan peserta. Sementara itu, xMOOC lebih terstruktur dimana proses pembelajarannya dirancang mengikuti alur materi yang telah diberikan. Sehingga dalam xMOOC, pembelajar lebih bersifat pasif. Inti proses pembelajaran dalam xMOOC adalah interaksi antara pembelajar dengan materi pembelajaran yang diberikan. Tabel 1 memperlihatkan perbedaan cMOOC dan xMOOC secara singkat (Kaplan dan Haenlein, 2016).

Tabel 1. Perbedaan cMOOC dan xMOOC

ASPEK	cMOOC	xMOOC
Pengajar	Fasilitator yang menyemangati proses belajar individual peserta	Instruktur yang merancang matakuliah secara terstandar untuk seluruh peserta
Peserta	Kontributor aktif terhadap proses pembelajaran sehingga menjadi sumber belajar bagi peserta lainnya	Bersifat pasif
Pedagogi	Materi dikembangkan secara kolaboratif tanpa mengikuti kurikulum formal, menggunakan pola seperti seminar dan diskusi, dan tidak ada evaluasi	Materi telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kurikulum formal, menggunakan pola perkuliahan tipe-kelas, dan evaluasi oleh <i>peer</i> (peserta lainnya)
Pola	Tidak terstruktur dan lebih merupakan proses berkelanjutan	Terstruktur dengan jadwal berkala tetap dalam periode waktu tertentu
Platform	Materi terdapat secara terdistribusi di seluruh jejaring perkuliahan	Penempatan materi secara terpusat dalam suatu situs tertentu

Diterjemahkan bebas dari Kaplan dan Haenlein (2016)

Di Indonesia, Universitas yang pertama kali menyelenggarakan MOOCs adalah Universitas Ciputra melalui *The Ciputra Entrepreneurship Online* (CE-O) pada tahun 2013, dan kemudian Universitas Terbuka (UT) pada tahun 2014. Saat ini, ada beberapa institusi pendidikan yang menawarkan MOOCs, baik berupa perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi seperti IndonesiaX, SEAMEO-SEAMOLEC, SPADA, Pustekom-Kemendikbud, KelasKita (<https://kelaskita.com/>), CodeSaya (<https://codesaya.com/>), dan SekolahPintar (<https://sekolahpintar.com/>). Kebanyakan perguruan tinggi menyelenggarakan MOOCs melalui *platform* SPADA yang

dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Diantara para penyelenggara MOOCs di Indonesia, hanya lima yang tampaknya telah menjadi program berkelanjutan, yaitu: Universitas Ciputra, UT, SEAMOLEC-SEAMEO, IndonesiaX, dan SPADA (Belawati, 2019).

- Universitas Ciputra (<https://ciputrauceo.com/>) menawarkan perkuliahan gratis melalui *The Ciputra Entrepreneurship Online* (CE-O) mulai 24 Agustus 2013 dengan fokus bidang studi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Jumlah MOOCs yang ditawarkan sekitar 15 dan dilaporkan bahwa hingga 2017 saja telah diikuti oleh lebih dari 122.000 peserta dari sekitar 100 negara.
- Universitas Terbuka (UT) mulai menawarkan MOOCs pada tahun 2014 sebagai bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (<https://moocs.ut.ac.id/>). Pada awalnya UT hanya menawarkan 8 MOOCs, namun terus bertambah dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2020 ini ada 24 judul MOOCs yang ditawarkan. Menurut data registrasi, jumlah peserta kumulatif MOOCs UT dari tahun 2014 hingga tahun 2019 berjumlah 8.476 orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.
- SEAMEO-SEAMOLEC (<https://seamolec.org/>) merupakan organisasi antar-pemerintahan ASEAN yang membidangi pendidikan jarak jauh dan Terbuka. SEAMEO-SEAMOLEC mulai menyelenggarakan MOOCs pada tahun 2016 dengan menawarkan 27 MOOCs dalam berbagai topik seperti animasi, *edugame*, dan *programming*. Dengan target peserta dari semua negara-negara kawasan ASEAN, dilaporkan bahwa hingga 2017 telah ada sekitar 31.043 peserta yang mengikuti MOOCs mereka.
- IndonesiaX (<https://www.indonesiadx.co.id/>) merupakan *platform* MOOCs (seperti Coursera, edX, dll.) yang dikembangkan oleh sebuah organisasi swasta pada tahun 2015. IndonesiaX kemudian bermitra dengan

beberapa perguruan tinggi dan institusi lain yang menjadi pengembang MOOCs. Saat ini ada 36 judul MOOCs yang ditawarkan pada berbagai bidang, dan hingga tahun 2017 dilaporkan telah mencatat jumlah peserta kumulatif sebesar 154.751 orang.

- SPADA atau Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (<https://spada.ristekdikti.go.id/pages/kuliah-terbuka>) berawal dari suatu proyek Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2015. Dimulai dengan menawarkan MOOCs dari tujuh universitas, kini SPADA menawarkan 202 MOOCs dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta.

PENUTUP

Sumber pembelajaran terbuka atau yang lebih dikenal dengan sebutan OERs merupakan suatu inovasi dalam penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat dengan cara yang sangat egaliter. Gerakan OERs telah mampu mendobrak dinding-dinding perpustakaan dan ruang-ruang kelas sehingga sumber-sumber ilmu pengetahuan (buku, guru, dosen) yang dahulu hanya dapat diakses oleh sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kemampuan khusus (kemampuan ekonomi ataupun intelegensia sehingga mampu masuk dan berkuliah di kampus-kampus baik dan terkenal) menjadi terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas. Demikian pula dengan MOOCs, 'perkuliahan' yang dahulu hanya mampu diikuti sekelompok kecil mahasiswa karena keterbatasan tempat sekarang dapat diikuti oleh jumlah besar mahasiswa dan dari berbagai belahan dunia. Praktik OER dan MOOCs secara nyata menerjemahkan filosofi bahwa 'ilmu pengetahuan merupakan milik publik' dan setiap orang memiliki hak untuk mengakses ilmu pengetahuan, serta mengimplementasikan konsep keterbukaan dalam pendidikan berdasarkan paradigma *sharing*. Dengan kata lain, pendekatan OERs dan MOOCs

merupakan bentuk demokratisasi pendidikan yang berpotensi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan merupakan kunci peningkatan kesejahteraan. Disamping itu, lewat OERs dan MOOCs, ilmu pengetahuan dapat disebarakan dengan lebih cepat dan harapannya juga tentu dapat dikembangkan terus dengan lebih cepat lagi.

Namun demikian, baik OERs maupun MOOCs belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh orang di seluruh dunia. Ada dua faktor yang menyebabkan mengapa OERs dan MOOCs yang sebenarnya bersifat sangat terbuka belum dapat menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah tertentu, yaitu faktor infrastruktur Internet yang belum merata di seluruh dunia dan faktor bahasa yang berbeda-beda.

Dari sisi akses Internet, data InternetStats.com menunjukkan bahwa secara global penetrasi Internet per September 2019 baru mencapai 58,8% dan penetrasi di setiap benua masih bervariasi dari di Amerika Utara yang sudah mencapai hampir 90% hingga di Afrika yang baru mencapai dibawah 40% (Tabel 2).

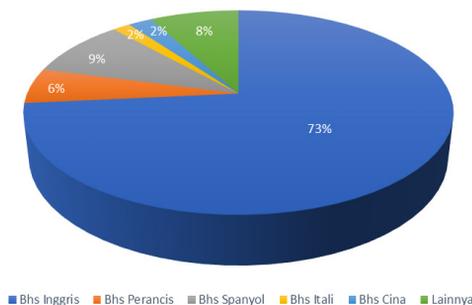
Tabel 2. Penetrasi Internet

WORLD REGIONS	PENETRATION
	RATE (% POP.)
Afrika	39.60%
Asia	54.20%
Eropa	87.70%
Amerika Latin / Caribbean	68.90%
Timur Tengah	67.90%
Amerika Utara	89.40%
Oceania / Australia	68.40%
WORLD TOTAL	58.80%

Sumber: InternetWorldStats.com

2. Pendidikan Terbuka dan Keadilan Sosial

Di tingkat Asia pun penetrasi Internet sangat bervariasi, dari yang terendah Afganistan (19,7%) hingga Korea Selatan (95,5%). Secara khusus, penetrasi internet di Indonesia adalah sekitar 63,5% dengan jumlah total pengguna Internet sebanyak 171.160.000 orang. Walaupun data ini menunjukkan angka yang cukup besar, namun isu *bandwidth* yang menentukan kecepatan koneksi Internet serta harga koneksi yang masih mahal dinilai masih menjadi kendala untuk mengakses situs-situs yang ‘berat’ dari ukuran konten (seperti video yang banyak digunakan dalam OERs dan MOOCs). Demikian pula, harga koneksi Internet di Indonesia masih termasuk tinggi jika dibandingkan dengan daya beli masyarakat secara rata-rata. Di Asia, biaya Internet Indonesia masuk ranking ke-14 termahal dari 35 negara dan lebih mahal dari Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan yang daya beli masyarakatnya lebih tinggi (umbeo.com/cost-of-living/).



Gambar 3. MOOCs Berdasarkan Bahasa

Dari sisi bahasa, mayoritas OERs maupun MOOCs masih dalam bahasa asing. Shah (2015) menyebutkan bahwa Bahasa Inggris, Spanyol, dan Perancis merupakan bahasa yang paling banyak digunakan dalam MOOCs. MOOCs dalam Bahasa Inggris dicatat mencapai 75% dari semua MOOCs yang ada secara global. Tentu ini diluar Bahasa Cina yang

digunakan oleh MOOCs yang dikembangkan oleh institusi dan individu di Cina. Namun demikian, seiring dengan data yang menunjukkan bahwa peserta MOOCs datang dari berbagai penjuru dunia, penyedia MOOCs yang berbasis di negara-negara barat seperti Coursera dan edX mulai menyoal peserta internasional sebagai *target audience* mereka, dan mulai banyak menawarkan MOOCs dalam berbagai bahasa. Data Class Central menunjukkan bahwa pada 2019 setidaknya ada 24 bahasa yang digunakan dalam perkuliahan MOOCs, namun seperti diperlihatkan Gambar 3, persentase terbesar masih tetap dalam Bahasa Inggris (<https://www.classcentral.com/languages>). Hal ini tentu menjadi kendala bagi sebagian besar orang yang tidak berbahasa Inggris.

REFERENSI

- Belawati, T. (2019) Massive open online courses. The state of practice in Indonesia. In K. Zhang, C.J. Bonk, T.C. Reeves, and T.H. Reynolds. *MOOCs and Open Education in The Global South. Challenges, Successes, and Opportunities* (hal. 63-71). New York and London: Routledge.
- Belawati, T. (2014). Open education, open educational resources and massive open online courses. *International Journal of Continuing Education and Lifelong Learning (IJCELL)*, 7(1).
- Dhanarajan, G. and Porter, D. (2013). *Open educational resources: Asian perspective*. Vancouver, B.C., Canada: Commonwealth of Learning.
- Hollands, F. & Tirthali, D. (2014). *MOOCs: Expectations and reality*. Full Report for the Center for Benefit-Cost Studies of Education. Teachers College, Columbia University.
- Shah, D. (2019). *By the numbers: MOOCs in 2019*. Dilihat pada tanggal 6 Februari 2020 dari <https://www.classcentral.com/report/moocs-2019-stats/> pada

- Shah, D. (2015). *By the numbers: MOOCs in 2015*. Dilihat pada tanggal 6 Februari 2020 dari <https://www.classcentral.com/report/moocs-2015-stats/> pada
- Numbeo.com/cost-of-living/. (2009-2020). *Asia: Price rankings by contry of Internet (60 MBPS or more)*. Dilihat pada tanggal 6 Februari 2020 di URL https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_price_rankings?itemId=33
- Wiley, D. (2014). Iterating toward openness. Pragmatism before zeal. The access Compromise and the 5th R. Diunduh pada 4 Februari 2020 dari <https://opencontent.org/blog/archives/3221>
- InternetWorldStat.com. (2020). *Internet usage statistics*. Dilihat pada tanggal 6 Februari 2020 di URL <https://www.internetworldstats.com/stats.htm>

3

PENDIDIKAN
TERBUKA
SEBAGAI
LAYANAN
PUBLIK

Prof. Dr. Chanif Nurcholis

MODEL PELAYANAN PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH SEBAGAI BENTUK PELAYANAN PUBLIK

PENDAHULUAN

Pendidikan terbuka dan jarak jauh sudah diterima oleh seluruh masyarakat dunia. Pendidikan terbuka adalah pendidikan yang memberi kesempatan terbuka kepada semua orang untuk mengikuti pendidikan pada semua jenjang tanpa dibatasi oleh usia, tempat tinggal, tahun ijazah, pendidikan asal, dan batasan-batasan lainnya. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang penyampaian dan pendalaman materinya tidak disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik secara langsung di ruang kelas tapi disampaikan melalui bantuan media: cetak, elektronik, virtual, atau gabungan. Di sini terdapat jarak (*distance*) antara pendidik (*guru/dosen/pelatih*) dengan peserta didik (*murid/mahasiswa/trainee*). Materi pelajaran tidak disampaikan secara oral oleh pendidik di ruang kelas tapi dikemas dalam buku cetak, buku elektronik, CD audio, CD video, file yang disimpan pada jaringan internet, atau lainnya, lalu disampaikan kepada peserta didik melalui

berbagai cara (pos, kurir, email, website, dan lain-lain). Setelah peserta didik menerima materi pelajaran, kegiatan belajarnya dilakukan dengan berbagai modus: belajar sendiri di mana pun dia berada, kuliah daring, tutorial tatap muka, tutorial daring/*online*, seminar daring, pengerjaan tugas secara daring, bimbingan tatap muka dan/atau daring, penilaian baik diawasi langsung maupun diawasi secara daring, dan *remedial teaching* baik secara langsung maupun secara daring. Oleh karena itu, pendidikan terbuka dan jarak jauh dapat diikuti oleh peserta didik di manapun mereka berada. Mereka yang tinggal jauh dari tempat berdirinya bangunan pengelola pendidikan dapat melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa harus meninggalkan tempatnya karena materi pelajarannya diterima di tempat tinggalnya melalui pos, jaringan internet, atau sarana lain dan kegiatan belajarnya bisa dikuti dari rumah, hotel, tempat istirahat, sawah, kebun, dan lain-lain. Dengan demikian, pendidikan terbuka dan jarak jauh memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengikuti pendidikan pada semua jenjang tanpa halangan usia, administratif, tempat, dan waktu.

Di Indonesia pendidikan terbuka dan jarak jauh telah dirintis sejak tahun 1950-an dalam bentuk program pemberantasan buta huruf melalui korespondensi. Akan tetapi, secara terlembaga pada suatu perguruan tinggi dimulai pada 1984 saat diresmikannya Universitas Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi yang secara khusus didesain sebagai perguruan tinggi yang menggunakan model belajar jarak jauh. UT yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 September 1984 mengimplementasikan konsep pendidikan terbuka dan jarak jauh tersebut. Adapun untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pemerintah tidak membentuk lembaga khusus yang didesain sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dengan model terbuka dan jarak jauh tapi hanya menempelkan pada SMP dan SMA Negeri yang sudah ada.

Pendidikan terbuka dan jarak jauh baik pada jenjang menengah maupun perguruan tinggi pada era milenial ini menjadi sangat strategis karena mempunyai daya jangkauan yang luas dan masif sehingga dapat mempercepat pemerataan pendidikan. Dengan makin banyaknya lulusan SD/MI yang tidak tertampung di SMP/MTs reguler dan lulusan SMP/MTs yang tidak semuanya dapat tertampung di SMA/MA/SMK reguler, dan hanya sedikitnya lulusan SMA/MA/SMK yang dapat tertampung di perguruan tinggi konvensional maka model pendidikan terbuka dan jarak jauh menjadi salah satu solusi. Dengan model ini upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi lebih cepat dicapai.

Tulisan ini menjelaskan bagaimana pemerintah dapat mengimplementasikan model pendidikan terbuka dan jarak jauh untuk mempercepat tercapainya misi mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana mandat konstitusi yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

MANDAT KONSTITUSI

Pembukaan UUD 1945 telah memberikan arah yang jelas bahwa tujuan pendirian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan final tersebut dilakukan tujuan antara sebagai prasyaratnya:

- (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- (2) memajukan kesejahteraan umum;
- (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dua tujuan antara yang sangat menentukan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keadilan sosial adalah suatu kondisi masyarakat adil dan makmur lahir batin di bawah ridho Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi ini dapat dicapai jika rakyat sudah mencapai standar hidup sejahtera berdasarkan standar bank dunia (kondisi saat ini) dan semua penduduk sudah lulus pendidikan menengah dan setidaknya 35% mengenyam pendidikan tinggi.

UUD 1945 Pasal 31 menegaskan bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut.

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; dan
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Mandat konstitusi sangat jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah harus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk memenuhi mandat konstitusi tersebut pemerintah perlu mengembangkan berbagai model pembelajaran agar semua warga negara yang tinggal di seluruh pelosok tanah air dapat dijangkau semua. Kalau hanya mengembangkan satu model maka layanan pendidikan tidak bisa menjangkau seluruh warga negara. Misal, dengan model pembelajaran tatap muka di ruang-ruang kelas, maka warga negara yang tinggal di pulau tertentu atau daerah pedalaman yang di sana pemerintah belum membangun gedung sekolah dan mengangkat guru, mereka tidak bisa mengikuti pendidikan; orang yang bekerja yang sifat pekerjaannya selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain tidak bisa melanjutkan pendidikan; orang

yang sudah melewati usia sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terhalang oleh persyaratan umur; orang difabel yang tidak bisa mengikuti pengajaran sebagaimana anak-anak normal di kelas selama jam belajar tidak bisa mengikuti pendidikan; dan seterusnya.

Dengan mengembangkan beragam model pembelajaran maka kendala tempat, waktu, kondisi fisik, dan usia bukan lagi menjadi halangan bagi seseorang untuk mengikuti dan/atau melanjutkan pendidikan. Salah satu model pembelajaran yang bisa mengatasi masalah jarak, tempat, keterbatasan fisik, kesibukan, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan adalah model pendidikan terbuka dan jarak jauh. Model pendidikan terbuka dan jarak jauh adalah model pendidikan yang tidak menggantungkan diri pada kesediaan guru dan ruang kelas tapi mengemas materi pelajaran dalam berbagai format lalu disampaikan kepada peserta didik melalui berbagai cara untuk dipelajari secara mandiri dan dibimbing melalui berbagai media komunikasi (tatap muka terbatas, daring, dan korespondensi via pos). Dengan model ini maka meskipun belum mampu menyediakan guru dan ruang kelas yang cukup, pemerintah tetap dapat melaksanakan mandat konstitusi menyelenggarakan pendidikan kepada semua warga negara.

PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN

Pelayanan publik adalah fungsi negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya untuk dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, Negara harus melakukan pelayanan publik. Bentuk pelayanan publik yang menjadi kewajiban negara adalah sebagai berikut.

- (1) Negara memberikan barang dan/atau jasa publik dalam bentuk kebutuhan dasar warga negara: jalan raya, jembatan, listrik, air minum, pendidikan, kesehatan, gas, transportasi publik, pos, telekomunikasi, siaran radio/televisi, dan lain-lain;

- (2) Negara memberikan barang dan/atau jasa publik dalam bentuk legalitas hukum warga negara.
- a. Legalitas identitas: KTP, KK, dan paspor;
 - b. Legalitas akta: akta lahir, akta perjanjian, dan lain-lain;
 - c. Legalitas linsensi: paten, hak cipta, hak melakukan penambangan, hak guna tanah dan bangunan, dan lain;
 - d. Legalitas properti: sertifikat tanah, BPKB, surat berharga, dan lain-lain;
 - e. Legalitas izin: izin usaha, izin mendirikan rumah (IMB), izin mengemudi (SIM), izin operasional kegiatan perusahaan/organisasi kemasyarakatan/ organisasi publik/perkumpulan, izin pertambangan, izin penangkapan ikan, izin eksplorasi, dan lain-lain;
 - f. Legalitas badan hukum usaha ekonomi berdasarkan gabungan modal: PT, CV, NV, Firma, dan lain-lain;
 - g. Legalitas badan hukum usaha ekonomi berdasarkan gabungan orang: koperasi.
 - h. Legalitas badan hukum perkumpulan orang: partai politik, organisasi kemasyarakatan, asosiasi, dan lain-lan.
 - i. Legalitas badan hukum amal sosial: yayasan.
- (3) Negara memberikan barang dan/atau jasa publik dalam bentuk penyediaan sarana-prasarana ekonomi untuk menumbuhkan ekonomi rakyat: pasar, kompleks pertokoan, kawasan industri, lembaga keuangan, pergudangan, bandar udara, pelabuhan, terminal, waduk, bendungan, irigasi pertanian, pembangkit listrik, kawasan ekonomi khusus, pusat kerajinan rakyat, bursa tenaga kerja, koperasi, bank rakyat desa, tempat parkir, badan usaha milik negara, dan lain-lain.

3. Pendidikan Terbuka sebagai Layanan Publik

- (4) Negara memberikan barang dan/atau jasa publik untuk memberdayakan masyarakat kurang beruntung: penganggur, pemuda putus sekolah, kaum difabel, pekerja yang terkena PHK, suku pedalaman, pemuda tuna keterampilan, perempuan pekerja seks komersial, dan lain-lain;
- (5) Negara memberikan barang dan/atau jasa publik berupa pemeliharaan fakir miskin, anak-anak terlantar, orang gelandangan, orang tuna wisma, anak-anak jalanan, dan lain-lain.
- (6) Negara memberikan barang dan/atau jasa publik berupa perlindungan kepada warga negara dari kerusakan, ketidakteraman, ketidaknyamanan, bahaya kejahatan, bahaya kebakaran, bahaya bencana alam, bahaya wabah penyakit, dan bahaya serangan negara lain.
- (7) Negara memberikan barang dan/atau jasa publik berupa sarana prasarana olah raga dan rekreasi.

Menurut Bank Dunia, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan ekonomi rakyat merupakan pelayanan publik utama yang sangat signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik bidang pendidikan membuat rakyat menguasai sains dan teknologi, terampil mengerjakan pekerjaan teknik, dan meningkat akal budinya sehingga menjadi insan berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Sistem pendidikan yang benar dapat melahirkan manusia dengan kualitas unggul dalam akhlak, sains dan teknologi, dan keterampilannya. Pelayanan publik bidang kesehatan membuat rakyat sehat jasmani dan rohani, sehat emosi, dan sehat mental religi sehingga panjang umur dan bermanfaat bagi diri, keluarga, dan bangsa, dan negara. Manusia yang sehat menjadi produktif dan kreatif sehingga secara agregat meningkatkan produk domestik brutto dan membuat daya saing bangsa menjadi tinggi.

Pelayanan publik bidang pembangunan infrastruktur ekonomi meningkatkan pendapatan rakyat. Ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti pasar, kawasan pertokoan, kawasan industri, lembaga keuangan, bandar udara, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api, kantor pelayanan perizinan investasi, fasilitas ekspor impor, jaringan jalan dan rel kereta api ke kawasan industri, jaringan telepon, jaringan internet, dan waduk/bendungan dengan jaringan irigasinya menggerakkan roda ekonomi rakyat. Dengan ketersediaan infrastruktur ekonomi yang lengkap dan terawat dengan baik ekonomi rakyat bergerak dan terus tumbuh. Rakyat yang berpendidikan tinggi dan sehat jasmani dan rohani dapat terlibat dalam semua sektor ekonomi yang tumbuh tersebut. Keterlibatan rakyat dalam kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya dan secara agregat meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi nasional.

PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DENGAN MODEL TERBUKA DAN JARAK JAUH

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai bentangan wilayah yang sangat luas. Jumlah penduduknya sangat banyak yaitu 267,7 juta jiwa. Ia mempunyai pulau besar, sedang, dan kecil lebih dari 13.000 pulau dan yang berpenghuni sekitar 2.300 buah. Karakteristik wilayahnya sangat beragam: perkotaan metropolitan, perkotaan sedang, perkotaan kecil, perdesaan setengah kota, perdesaan biasa, perdesaan pedalaman, dan pedalaman yang belum memiliki pemerintahan formal. Jarak ibu kota Jakarta ke kota tertimur yaitu Merauke adalah 5.500 km sedangkan ke kota terjauh di barat laut adalah 2.500 km. Jumlah pemerintah provinsinya 34 buah, pemerintah kabupaten 416 buah, pemerintah kota 98 buah, kecamatan 7.094 buah, kelurahan 8.490 buah, dan desa 74.517 buah. Jarak antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota mulai dari beberapa kilometer sampai

3. Pendidikan Terbuka sebagai Layanan Publik

ratusan kilometer. Begitu juga jarak antara ibu kota kabupaten/kota dengan kecamatan, kecamatan dengan kelurahan/desa. Ketersediaan lembaga pendidikan juga beragam. Pada ibu kota provinsi rata-rata terdapat lembaga pendidikan yang lengkap mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Pada kabupaten/kota terdapat lembaga pendidikan mulai TK sampai SLTA. Beberapa kabupaten/kota terdapat perguruan tinggi. Pada tingkat kecamatan terdapat lembaga pendidikan TK sampai SLTP. Beberapa kecamatan terdapat lembaga pendidikan SLTA. Adapun di desa hanya terdapat TK dan SD bahkan banyak desa yang tidak mempunyai lembaga pendidikan sama sekali.

Berdasarkan data BPS 2018 jumlah peserta didik tingkat SD berjumlah 25,5 juta, tingkat SLTP berjumlah 10,1 juta, tingkat SMA berjumlah 4,8 juta, dan SMK berjumlah 4,9 juta. Berdasarkan data ini maka siswa yang siap memasuki perguruan tinggi adalah 9,7 juta. Besarnya jumlah siswa per tingkat memerlukan sarana-prasarana pendidikan yang besar pula. Pemerintah harus membangun puluhan ribu ruang kelas dan gedung sekolah untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi; harus mengangkat jutaan guru, ratusan ribu tenaga kependidikan, dan puluh ribu dosen; dan harus menyediakan sarana-prasarana pendidikan yang sangat besar.

Berdasarkan kondisi demikian, jika pemerintah tidak melakukan terobosan maka selalu terjadi kesenjangan antara besarnya jumlah peserta didik yang harus dilayani dengan sarana-prasarana yang bisa disediakan dan kemampuan keuangan negara. Salah satu terobosannya adalah mengembangkan model pembelajaran terbuka dan jarak jauh untuk rakyat. Dengan mengembangkan model pendidikan terbuka dan jarak jauh, pemerintah (pusat dan daerah) dapat mengatasi kendala dan keterbatasan yang dimilikinya.

1. **Kendala dan Keterbatasan Penyediaan Ruang Kelas**

Dengan jumlah peserta didik yang sangat besar yang tersebar di seluruh pelosok negeri, pemerintah menghadapi kendala dan keterbatasan menyediakan ruang kelas pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan perguruan tinggi. Sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan ruang kelas pada semua tingkat pendidikan tersebut sesuai dengan jumlah peserta didik yang harus ditampung pada tingkat-tingkat pendidikan tersebut. Semua lulusan SD/MI belum bisa tertampung di SMP/MTs yang disediakan pemerintah. Berikutnya semua lulusan SMP/MTs belum bisa tertampung di SMA/MA/SMK yang disediakan pemerintah. Begitu juga semua lulusan SMA/MA/SMK belum bisa tertampung di perguruan tinggi yang disediakan pemerintah. Dengan demikian, angka partisipasi sekolah makin naik ke tingkat lebih atas makin mengecil.

Kendala dan keterbatasan ini bisa diatasi dengan model pendidikan terbuka dan jarak jauh. Model ini tidak memerlukan ruang kelas karena kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan di ruang kelas tapi di manapun peserta didik berada: di rumah, di kebun, di jalan, di ruang terbuka, dan di mana-mana.

2. **Kendala dan Keterbatasan Penyediaan Guru dan Dosen**

Pemerintah menghadapi kendala dan keterbatasan menyediakan guru dan dosen untuk semua warga negara yang memerlukan pelayanan pendidikan. Untuk bisa melayani semua anak usia SD/MI pemerintah perlu menyediakan jutaan guru. Untuk bisa melayani semua anak usia SLTA yang sudah lulus SLTP pemerintah perlu menyediakan ratusan ribu guru. Untuk bisa melayani semua anak usia dewasa yang sudah lulus SLTA pemerintah

perlu menyediakan puluhan ribu dosen. Pemerintah tidak mampu menyediakan guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan karena keterbatasan dana yang dimiliki. Penerimaan negara ditambah dengan hutang per tahun tetap tidak memungkinkan untuk memenuhi semua kebutuhan guru dan dosen tersebut. APBN harus dialokasikan untuk semua sektor agar semuanya berjalan untuk menjaga keberlangsungan NKRI.

Kendala dan keterbatasan ini bisa diatasi dengan model pendidikan terbuka dan jarak jauh. Model ini tidak memerlukan guru dan dosen yang banyak karena kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka di ruang kelas tapi dilakukan dengan cara mengirimkan materi pelajaran/kuliah kepada peserta didik di tempat tinggalnya. Materi pelajaran/kuliah tidak disampaikan dalam bentuk ceramah/kuliah langsung dari dosen di depan kelas. Materi pelajaran/kuliah ditulis atau direkam lalu dikemas dalam bentuk cetak dan/atau digital kemudian disampaikan kepada peserta didik. Peserta didik dapat mempelajarinya secara mandiri dan terbimbing melalui kegiatan tutorial.

3. **Kendala dan Keterbatasan Penyediaan Alat Peraga Pendidikan**

Salah satu penunjang kegiatan belajar mengajar adalah alat peraga pendidikan. Kegiatan belajar mengajar tanpa alat peraga pendidikan hanya membawa peserta didik ke dunia verbalisme yang abstrak. Peserta didik dibawa ke fakta, konsep, teori, dan hukum alam di dunia fantasi yang bisa *misleading* dengan materi konkritnya. Seringkali akibatnya fatal, peserta didik hafal konsep, teori, dan hukum alamnya tapi sama sekali tidak tahu fakta konkritnya. Oleh karena itu, penyelenggara pendidikan

yang bermutu harus menyediakan alat peraga pendidikan yang lengkap.

Masalahnya untuk bisa memenuhi alat peraga pendidikan secara lengkap untuk setiap mata pelajaran/mata kuliah pada semua satuan pendidikan semua tingkat memerlukan biaya besar. Dalam kondisi keterbatasan anggaran pendidikan, pemerintah lebih mengutamakan biaya operasional daripada memenuhi alat peraga pendidikan. Akibatnya ketersediaan alat peraga pendidikan pada tiap satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi selalu tidak memadai.

Kendala dan keterbatasan ini bisa diatasi dengan model pendidikan terbuka dan jarak jauh. Model ini dapat menggunakan alat peraga pendidikan virtual sebagai pengganti alat peraga pendidikan yang bersifat fisik. Memang tidak sama persis tapi alat peraga virtual cukup membantu memberikan pemahaman atas materi pelajaran yang bersifat abstrak dan kompleks. Bahkan untuk materi pelajaran tertentu dapat memberikan gambaran yang lebih mendekati kenyataannya. Misalnya materi pelajaran peredaran darah dalam tubuh manusia lebih bisa dipahami dengan baik bila menggunakan alat peraga animasi audio visual daripada hanya berupa gambar peredaran darah. Begitu juga alat peraga animasi audio visual gerakan planet sistem tata surya, pemecahan sel, konstruksi hukum Archimedes, dan lain-lain.

4. Kendala dan Keterbasanan Penyediaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

Pengadaan laboratorium untuk ilmu pengetahuan alam (fisika, kimia, dan biologi) adalah mutlak. Belajar ilmu pengetahuan alam tanpa laboratorium hanya belajar

menghafal konsep dan hukum alam yang abstrak. Karakteristik alam fisik dan hukum-hukum yang bekerja di sini tidak bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Begitu juga pengadaan bengkel kerja untuk pelajaran vokasi juga mutlak. Peserta didik yang belajar vokasi tanpa berlatih dalam bengkel kerja tidak akan bisa terampil pada materi vokasi yang dipelajari.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka pemerintah harus menyediakan laboratorium dan bengkel kerja yang memadai sebagai tempat belajar murid/mahasiswa yang mempelajari ilmu pengetahuan alam dan vokasi. Masalahnya untuk mengadakan laboratorium dan bengkel kerja diperlukan biaya yang sangat besar. APBN selalu tidak mampu menyediakan dana untuk membangun laboratorium dan bengkel kerja sesuai dengan kebutuhan. Kendala dan keterbatasan ini bisa diatasi dengan model pendidikan terbuka dan jarak jauh. Melalui model ini pemerintah dapat mengatasi dengan dua cara. Pertama, pemerintah dapat memanfaatkan laboratorium dan bengkel kerja yang sudah ada tanpa harus membangun laboratorium dan bengkel kerja baru. Laboratorium-laboratorium dan bengkel kerja-bengkel kerja yang sudah dimiliki pemerintah baik yang dikelola oleh lembaga pendidikan maupun oleh kementerian/lembaga yang tersebar di berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk praktikum dan latihan keterampilan. Di samping itu, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta yang mempunyai laboratorium dan bengkel kerja. Pemerintah tinggal membuat kebijakan disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Kedua, penyelenggara pendidikan dengan model terbuka dan jarak jauh dapat mengembangkan laboratorium dan bengkel kerja virtual. Meskipun tidak bisa menggantikan

secara identik, ada kegiatan praktikum dan eksperimen yang bisa diganti dengan praktikum dan eksperimen melalui aplikasi virtual. Oleh karena itu lembaga penyelenggara pendidikan terbuka dan jarak jauh dapat membuat aplikasi laboratorium virtual ini. Sebagai ganti bengkel kerja penyelenggara pendidikan terbuka dan jarak jauh bisa mengganti dengan aplikasi simulator.

5. Kendala dan Keterbasanan Biaya Pendidikan

Meskipun konstitusi telah menetapkan bahwa negara harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% APBN untuk pendidikan tapi tetap saja anggaran pendidikan tidak pernah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Ketidakcukupan ini makin besar jika penyelenggaraan pendidikan menggunakan model konvensional karena untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dijelaskan pada angka 1 sampai 4 di atas memerlukan biaya yang sangat besar. Sebaliknya dengan dana pendidikan yang tersedia pemerintah dapat memperluas dan meningkatkan angka partisipasi sekolah jika menggunakan model pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sebagaimana dijelaskan pada angka 1 sampai dengan 4 di atas bahwa kendala dan keterbatasan yang dimiliki pemerintah bisa diatasi dengan menggunakan model pendidikan terbuka dan jarak jauh.

IMPLEMENTASI MODEL PENDIDIKAN TERBUKA JARAK JAUH UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA BANGSA YANG CERDAS

UUD NRI 1945 sudah dengan jelas memberi mandat kepada Negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan berakhir dengan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pendidikan Terbuka sebagai Layanan Publik

Dalam hal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah harus mencari berbagai cara agar semua anak bangsa menjadi cerdas lebih cepat. Salah satu cara adalah dengan menggunakan model pendidikan terbuka dan jarak jauh.

UUD NRI 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B mengatur bahwa sistem pemerintahan kita berasas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Dengan demikian, pemerintahan tidak diselenggarakan dengan cara sentralisasi tapi dengan cara desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal urusan pemerintahan bidang pendidikan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah pusat mengatur dan mengurus pendidikan tinggi, pemerintah provinsi mengatur dan mengurus pendidikan tingkat menengah atas (SMA dan SMK), dan pemerintah kabupaten/kota mengatur dan mengurus pendidikan dasar (SD dan SMP).

Pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurusnya. Dibawah UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi *juncto* PP No. 4/2014 *juncto* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7/2020 pemerintah dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan dengan berbagai model yang salah satunya adalah dengan model terbuka dan jarak jauh.

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan dengan model terbuka dan jarak jauh pada awalnya pemerintah mendirikan Universitas Terbuka (UT) sebagai satu-satunya penyelenggara pendidikan tinggi dengan model terbuka dan jarak jauh. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah juga memberi izin kepada perguruan tinggi di luar UT untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan model terbuka dan jarak jauh sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.

Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah memfasilitasi semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Fasilitas yang diberikan pemerintah dalam dua bentuk. Pertama, untuk perguruan tinggi yang sudah menyelenggarakan misalnya UT pemerintah melakukan penguatan kapasitas sehingga makin solid dan kredibel sebagai penyelenggara pendidikan terbuka dan jarak jauh yang berkualitas dunia. Kedua, untuk perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan model terbuka dan jarak jauh pemerintah memberikan kemudahan perizinan, pelatihan manajemen dan teknis, bantuan dana, dan konsultasi.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tanggung jawabnya terletak pada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Pemerintah daerah belum mempunyai lembaga pendidikan yang secara khusus menyelenggarakan model terbuka dan jarak jauh untuk pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah daerah hanya mempunyai lembaga pendidikan konvensional yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. Akan tetapi, dengan adanya pandemi Covid 19, semua sekolah di bawah pemerintah daerah dipaksa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara *online* (daring) umumnya menggunakan *platform zoom*. Pengalaman ini bisa menjadi momentum pemerintah daerah untuk mengembangkan lebih lanjut pendidikan terbuka dan jarak jauh tingkat dasar dan menengah.

Kegiatan belajar mengajar secara daring dengan menggunakan aplikasi *zoom* hanyalah pengganti kegiatan belajar mengajar biasa yang tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh yang bisa memberikan pelayanan pendidikan dasar dan menengah sampai ke wilayah pedalaman, terpencil, dan terjauh pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai modus pembelajaran. Untuk kepentingan ini, pemerintah

daerah perlu mengembangkan lembaganya dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk Unit Pelaksana Teknis Belajar Jarak Jauh (UPTBJJ) Pendidikan Dasar sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi membentuk UPTBJJ Pendidikan Menengah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan terbuka dan jarak jauh untuk pendidikan menengah;
2. UPTBJJ Kabupaten/Kota dan UPTBJJ Provinsi bekerja sama dengan Kominfo mengembangkan jaringan internet sampai ke pelosok desa dan wilayah-wilayah terpencil dan terjauh;
3. UPTBJJ Kabupaten/Kota bekerja sama dengan kepala dan guru SD/MI/ /MTs dan UPTBJJ Provinsi bekerja sama dengan kepala dan guru SMA/MA/SMK mengembangkan materi pelajaran untuk dikemas dalam bahan ajar cetak dan non cetak yang bersifat *self-learning*, materi tutorial, dan instrumen penilaian.
4. UPTBJJ Provinsi dan Kabupaten/Kota mengembangkan infra struktur pendidikan terbuka dan jarak jauh untuk kepentingan:
 - a. Registrasi peserta didik;
 - b. Pengiriman materi pelajaran secara daring dan melalui melalui daring, pos, atau kurir sesuai dengan kondisi lapangan.
 - c. Tutorial secara daring, tatap muka, atau melalui pemanfaatan radio komunitas.
 - d. Penilaian hasil belajar.
5. UPTBJJ Provinsi dan Kabupaten/Kota bekerja sama dengan guru SD/MI/, guru SMP/MTs, guru SMA/MA/SMK, dan pendidikan lain untuk membantu kegiatan tutorial, penilaian tugas, dan pengawasan ujian.

PENUTUP

Penyelenggaraan pendidikan dengan model terbuka dan jarak jauh sudah diterima oleh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia juga sudah tidak asing lagi dengan model pendidikan ini. Saat ini model pendidikan terbuka dan jarak jauh yang sudah berjalan dan terkelola dengan baik baru pada tingkat perguruan tinggi. Adapun pada tingkat pendidikan dasar dan menengah model ini hanya bersifat proyek yang ditempelkan pada SMP dan SMA Negeri yang ditunjuk. Untuk itu, demi meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua tingkat pendidikan pemerintah perlu mengembangkan model ini pada tingkat perguruan tinggi dengan mengoptimalkan kapasitas Universitas Terbuka dan mensinergikan UT dengan semua perguruan tinggi yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan tingkat perguruan tinggi secara masif dan merata kepada semua anak bangsa. Adapun untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mengembangkan pusat belajar jarak jauh (UPTBJJ) pada provinsi dan kabupaten/kota.

Model pendidikan terbuka dan jarak jauh memberi peluang kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan pelayanan bidang pendidikan kepada seluruh anak bangsa secara merata dan menjangkau ke seluruh pelosok negeri. Semua warga negara dapat mengikuti pendidikan model ini karena biaya terjangkau bahkan pemerintah dapat membebaskan biaya pendidikan bagi murid dan mahasiswa yang kurang mampu karena tidak terlalu membebani keuangan negara. Dengan masifnya warga negara yang terpelajar maka menjadi modal utama bagi bangsa untuk meningkatkan kesejahteraannya. Akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud.

REFERENSI

- Moore, Michael G. (2012). *Distance education: A system view of Online Learning*. Canada: Nelson Education
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia W.
- Nurcholis, Hanif. (2019). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Tangerang Selatan: Pusat Penerbit Universitas Terbuka
- Simonson, Michael, et al. (2012). *Teaching and Learning at a Distance. Foundations of Distance Education*. Boston: Pearson Education.
- UUD 1945
- UUD NRI 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Prof. Ojat Darajat, Ph.D

UNIVERSITAS TERBUKA SEBAGAI LAYANAN PUBLIK UNTUK PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI

PENDAHULUAN

Salah seorang tokoh pendidikan jarak jauh, Borje Hólmberg pada tahun 1989 pernah menyampaikan bahwa pendidikan jarak jauh (*distance education*) merupakan agenda strategis di banyak bangsa untuk memberikan kesempatan belajar “*for those who cannot – or do not want to – take part in classroom teaching*” (Holmberg, 1989, p. 1). Sejak British Open University (BOU) didirikan tahun 1969 dan menerima mahasiswa tahun 1971, sejak saat itu, pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan tinggi menjadi alternatif baru yang kemudian menyebar ke belahan dunia lainnya termasuk Asia. Sebagai contoh Korea National Open University (1972), Allama Iqbal Open University, Pakistan (1974), Sukhothai Thammathirat Open University (1978) dan Universitas Terbuka, Indonesia (1984).

3. Pendidikan Terbuka sebagai Layanan Publik

Wedemeyer (1981) menegaskan bahwa pengembangan pendidikan jarak jauh tersebut didorong oleh perubahan kebutuhan dan konteks orang dalam belajar. **Pertama**, Pendidikan, sebagai salah satu layanan publik, harus tersedia dimana pun masyarakat berada. Memperoleh layanan pendidikan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap orang sebagaimana telah ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Right* (1948). Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan identitas apapun. Penyelenggaraan pendidikan harus dapat dilaksanakan dimanapun; bukan hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tinggal di perkotaan, tetapi juga harus memiliki keberpihakan pada warga masyarakat yang berdomisili di daerah pinggiran, kepulauan, dan perbatasan. **Kedua**, sistem pendidikan harus memungkinkan setiap mahasiswa untuk memulai kuliah, cuti akademik, dan berhenti menjadi mahasiswa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan tujuannya, situasinya, dan karakteristik serta kondisi mahasiswa. Konsep dasar pemikiran Wedemeyer tersebut memiliki kemiripan/sejalan dengan jargon baru yang saat ini banyak diperbincangkan di media sosial Indonesia yaitu program merdeka belajar. Pemikiran Charles A. Wedemeyer (1981) tentang pentingnya Pendidikan jarak jauh dalam rangka penyediaan dan pemerataan akses pendidikan tersebut dapat digali lebih lanjut dalam buku beliau yang berjudul *'Learning at the backdoor: Reflections on non-traditional learning in the lifespans.*

Pentingnya pendidikan jarak jauh dalam rangka pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga masyarakat bukan hanya disarakan oleh negara-negara maju tetapi juga telah lama menjadi perhatian dan program penting di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Komitmen Pemerintah

Indonesia dalam menyediakan layanan akses pendidikan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1. Pembangunan pendidikan dilaksanakan melalui beragam jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Khusus terkait dengan jenjang pendidikan tinggi, sejumlah perguruan tinggi telah banyak didirikan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Semuanya ikut mengambil peran secara aktif menyediakan layanan pendidikan secara konvensional. Dalam perkembangannya, model pendidikan konvensional tersebut tidak mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat yang terkait langsung dengan aspek-aspek strategis seperti masalah daya tampung, biaya pendidikan, mobilitas, fleksibilitas serta aspek penting lainnya. Atas dasar itulah, Pemerintah mendirikan Universitas Terbuka (UT) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984, pada tanggal 4 September 1984. UT telah ditempatkan sebagai instrumen layanan publik yang sangat strategis bagi Pemerintah dan bangsa Indonesia yang tercermin dari tiga misi utamanya. Pada sesi ini akan dibahas peran dan fungsi strategis UT dalam menyediakan pemerataan layanan pendidikan tinggi, memelihara persatuan dan konektivitas bangsa serta secara bersama-sama berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat. Untuk kepentingan diatas, pembahasan tentang peran dan fungsi UT tersebut akan dilihat dari dua sisi yang saling berkaitan. **Pertama** dari sisi misi pendirian universitas; terutama misi awal didirikan UT oleh Pemerintah sejak UT didirikan 35 tahun yang lalu. **Kedua** dari sisi organisasi dan tata kelola yang diberi arah dan digerakan oleh organisasi dan tata kerja (OTK) dan statuta UT. Dua sisi tersebut merupakan ciri (karakteristik) utama yang membuat UT menjadi perguruan tinggi yang didesain dan dikelola secara berbeda dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya terutama perguruan tinggi negeri (PTN).

MISI PENDIRIAN UT UNTUK KEADILAN DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI

Misi pertama, UT didesain secara khusus oleh Pemerintah untuk menyediakan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 1. Detik-Detik Peresmian Universitas Terbuka

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=Xk6wUZcPf3Y&t=209s>

Berbeda dengan 44 perguruan tinggi negeri lainnya yang ada sampai dengan tahun 1984, UT didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses layanan pendidikan tinggi yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan misi strategis tersebut, manajemen, pengelolaan, serta kebijakan penyelenggaraan UT dirancang secara khusus yang dibingkai dalam wadah pengelolaan sistem pendidikan jarak jauh atau terkadang sering disebut juga dengan sistem belajar jarak jauh. Kedua istilah tersebut sering dipakai saling menggantikan untuk melukiskan proses pembelajaran (*teaching and learning*) yang dilaksanakan.

Pernyataan misi pertama tersebut disatu sisi merepresentasikan upaya Pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia dalam hal mendapatkan layanan pendidikan tinggi, di sisi yang lain, misi tersebut juga dapat dipandang sebagai upaya untuk membangun konektivitas bangsa (persatuan Indonesia) yang terajut dan dibangun melalui pembangunan pendidikan di Universitas Terbuka.

a. UT sebagai instrumen Pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia dalam hal mendapatkan layanan pendidikan tinggi

Secara umum kesempatan untuk mengikuti pendidikan tinggi merupakan harapan setiap keluarga. Namun demikian tidak setiap anggota keluarga mempunyai kapasitas untuk menempuh pendidikan tinggi terutama karena alasan ekonomi. Disamping itu ada juga faktor-faktor lain seperti alasan tempat tinggal, pekerjaan, dan beragam komitmen sosial lainnya. Atas dasar itulah, sejak didirikan sampai dengan saat ini, UT secara konsisten menerapkan besaran biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang terjangkau. Bila dibandingkan dengan UKT yang dibebankan oleh perguruan tinggi tatap muka (konvensional) biaya UKT jauh berbeda terutama biaya studi untuk jenjang diploma dan sarjana. Dengan menerapkan biaya yang sangat terjangkau tersebut diharapkan semua warga masyarakat memiliki kesempatan mengikuti pendidikan tinggi. Melalui kebijakan UKT yang terjangkau tersebut diharapkan UT dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka merealisasikan keadilan sosial bagi masyarakat dalam bidang pendidikan. Untuk semakin memperkokoh implementasi misi strategis tersebut, UT menerapkan beragam skema pembiayaan dan diversifikasi layanan sehingga masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

b. UT sebagai instrumen Pemerintah untuk membangun konektivitas bangsa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

Secara geografis dan demografis, tanah air dan bangsa Indonesia berbeda dengan negara bangsa-bangsa

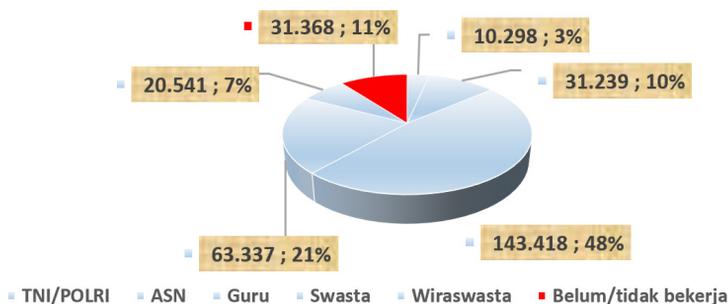
3. Pendidikan Terbuka sebagai Layanan Publik

lainnya. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Secara alamiah, Indonesia terdiri atas gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hamparan pulau-pulau tersebut diekspresikan oleh sebagai sebuah untaian Jamrud khatulistiwa yang melukiskan bentangan alam Indonesia, keragaman hayati, serta suku bangsa yang hidup di pulau-pulau tersebut. Sebagian dari mereka berdomisili di pulau-pulau terpencil, daerah perbatasan, terluar, dan tertinggal. Dalam konteks inilah, UT hadir dalam rangka membangun konektivitas bangsa melalui layanan pendidikan tinggi. Melalui UT, layanan pendidikan tinggi dapat diselenggarakan di seluruh pelosok tanah air, menjangkau yang tidak terjangkau, *'reaching the unreached'* (Paliwal, 2019).

Misi Kedua, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sudah bekerja untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi jenjang pendidikannya.

Salah satu *competitive advantages* sistem belajar jarak jauh yang diselenggarakan UT adalah memiliki kapasitas untuk memberikan kesempatan yang lebih terbuka kepada anggota masyarakat yang sudah bekerja dan ingin meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kesempatan ini sangat sulit diperoleh dan kurang memungkinkan ditempuh melalui sistem pendidikan konvensional. UT hadir dalam rangka mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat dalam hal mendapatkan layanan pendidikan bagi segment warga masyarakat kalangan pekerja termasuk mereka masyarakat pekerja yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

Penyediaan layanan pendidikan bagi warga masyarakat yang sudah bekerja saat ini dapat dipandang sebagai program strategis. Perubahan yang terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat, dinamika, tuntutan kebutuhan, perubahan budaya, serta cara-cara orang dalam menangani pekerjaan, menuntut kompetensi dan cara-cara baru pula yang tidak mungkin dipenuhi tanpa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Revolusi industry 4.0 telah mendisrupsi tatanan kehidupan yang menuntut keahlian dan cara-cara kreatif dan inovatif; penerapan otomatisasi (*artificial intelligence*) di berbagai sektor. Terakhir, konektivitas 5G telah membuka lembaran baru yang memungkinkan beragam perangkat teknologi saling terhubung. Orang-orang yang sedang bekerja (*working people*) harus berupaya menyesuaikan dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tantangan pekerjaan melalui cara-cara baru yang terus berubah. Dalam konteks inilah PJJ diharapkan mampu membuka kesempatan dan memberikan layanan bagi segmen calon mahasiswa, orang-orang yang telah bekerja.



Sumber: BAKP 13 Maret 2020 (diolah)

Gambar 2. Kategori Mahasiswa UT (Bekerja dan Tidak Bekerja)

3. Pendidikan Terbuka sebagai Layanan Publik

Dari gambar 1 di atas diketahui bahwa secara umum mahasiswa UT adalah orang-orang yang sudah bekerja. Dari data tersebut terungkap bahwa sebanyak 89% mahasiswa UT adalah *working people* dan sisanya sebanyak 11% adalah mereka yang belum/ tidak bekerja. Bila dikonsultasikan dengan data tahun-tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa persentase mahasiswa UT yang sudah bekerja menunjukkan jumlah yang lebih besar.

Misi Ketiga, menampung lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang tidak tertampung di perguruan tinggi negeri (PTN) tatap muka

Salah seorang tokoh klasik pendidikan jarak jauh yang lain, Otto Peters (2003) pernah menyampaikan bahwa salah satu kelebihan sistem pendidikan jarak jauh adalah kemampuannya untuk menampung jumlah mahasiswa yang besar. Jumlah mahasiswa yang besar menuntut cara-cara pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan seperti yang dilakukan di dunia industri. Cara pandang Peters tersebut selanjutnya dituangkan dalam teorinya '*industrialized of teaching*'. Peters (2007) lebih lanjut menegaskan bahwa *open universities* bisa *survive* hanya jika jumlah mahasiswanya banyak. Inilah salah satu karakteristik dan sekaligus juga kelebihan UT sebagai satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang mengimplementasikan sistem pendidikan jarak jauh.

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada persoalan penting dimana jumlah lulusan sekolah lanjutan menengah atas (SLTA) selalu meningkat dari tahun ke tahun. Seperti disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode (Kabinet Pembangunan IV: 1983 - 1985) Nugroho Notosusanto (1984) bahwa salah satu tujuan pendirian UT adalah untuk meningkatkan daya tampung perguruan tinggi. Notosusanto (1984) lebih lanjut menyampaikan bahwa melalui UT

lulusan SLTA baik yang baru lulus maupun yang sudah bekerja dapat melanjutkan pendidikan dan meningkatkan ilmu pengetahuannya. Dari pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut jelas sekali bahwa pendirian UT mengemban amanah mulia dalam rangka merealisasikan keadilan sosial bagi masyarakat khususnya para lulusan SLTA yang tidak tertampung di PTN lokal, mendapatkan kesempatan yang lebih luas masuk ke PTN – UT dengan biaya yang terjangkau, cara belajar dan waktu tempuh yang disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Sartono (2019) menyampaikan bahwa setiap tahun lulusan SMA/SMK sekitar 3.5 juta tidak sebanding dengan daya tampung perguruan tinggi sekitar 1,8 juta orang per tahun.

ORGANISASI DAN TATA KERJA UT UNTUK Mendukung TERWUJUDNYA Keadilan Sosial dalam Akses LAYANAN Pendidikan Tinggi

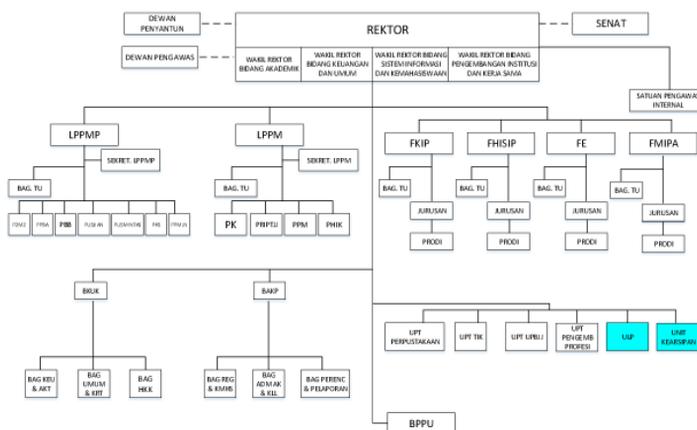
Dalam melaksanakan mandat Pemerintah seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya, misi pendirian UT menjadi pilar yang sangat solid dan memandu kemana UT harus diarahkan, sumber daya seperti apa yang harus disiapkan, serta organisasi dan manajemen penyelenggaraan seperti apa yang harus dibangun dan diimplementasikan. Mandat dan misi utama tersebut memberikan warna yang sangat kental terhadap sistem dan operasional bagaimana UT dikembangkan serta dikelola selama 35 tahun. Sistem dan operasional UT didesain sebagai sebuah perguruan tinggi jarak jauh (PTJJ) yang mampu menawarkan program-program pendidikan yang dapat diakses secara luwes, menjangkau tanpa batas, dan inklusif. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang hal ini, maka pada sesi selanjutnya, tulisan ini akan difokuskan pada manajemen dan tata kelola UT ditinjau dari Struktur dan kelengkapan organisasi yang memungkinkan UT beroperasi sebagai sebuah sistem pendidikan jarak jauh.

Struktur Organisasi Universitas Terbuka

Suktur organisasi (*organizational structure*) merupakan bagian yang paling crucial dalam strategic management (Hill & John, 2016). Dengan desain struktur organisasi yang tepat, suatu organisasi dapat secara efektif dan efisien mengeksekusi rencana strategi bisnis (RSB) serta setiap rencana operasional (Renop). Pengembangan desain struktur organisasi UT sejak awal pendiriannya sampai dengan saat ini terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah di satu sisi dan tuntutan kebutuhan dari dalam serta dinamika perubahan kebutuhan masyarakat di sisi lain. Dalam pengembangan desain struktur organisasi tersebut biasanya melibatkan dua kegiatan penting yaitu pengembangan struktur organisasi serta pemetaan *control system*. Mencari pola kombinasi yang tepat antara kedua hal tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap operasional manajemen dalam mengeksekusi setiap rencana kerja tahunan yang telah dicanangkan. Mengimplementasikan sebuah rencana kerja dan strategi membutuhkan ruang peran dan tanggung jawab bagi setiap pimpinan unit dan subunit dalam organisasi. Struktur organisasi akan memetakan peran dan tanggung jawab itu. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa strategi diimplementasikan melalui struktur organisasi. Sementara, *control system* berkaitan dengan bagaimana mengendalikan berbagai kegiatan yang dilakukan setiap unit organisasi dalam mengimplementasikan strategi.

Secara historis, struktur organisasi UT telah mengalami empat kali perubahan yang diformulasikan dan diformalkan melalui keputusan Kementerian. Yang pertama diatur dalam Keputusan Presiden No. 41 Th. 1984; kedua Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0168 Th. 1995. Perubahan yang ketiga diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 123 tahun 2004. Pada saat ini,

struktur organisasi yang berlaku di UT dituangkan dalam surat keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B.357/M.PAN-RB/10/2016 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka beserta turunannya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 16 Th 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka. Berdasarkan OTK tersebut, struktur organisasi UT tampak seperti dalam gambar berikut ini.



Struktur Organisasi Universitas Terbuka
(Permenristekdikti No 16 Tahun 2017 dan Permenristekdikti No 84 Tahun 2017)

Sumber: OTK UT No. 16 Th. 2017

Gambar 3. Struktur Organisasi UT

Struktur organisasi UT diatas memberikan gambaran tentang dua hal: pertama terkait koordinasi dan hubungan aktivitas proses bisnis antar unit di seluruh level manajemen; bagaimana orang-orang bekerja dalam suatu sistem yang terhubung dari suatu bagian dengan bagian lainnya sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kedua, struktur organisasi tersebut juga

memberikan penjelasan tentang ruang birokrasi dan *span of control* bagaimana UT dioperasikan dalam mengimplementasikan dan merealisasikan program dan strategi yang telah ditetapkan. Dengan menganut dan menerapkan struktur organisasi inilah maka *organizational behaviour* UT akan dibangun, sikap dan perilaku kerja karyawan akan dikembangkan, serta bagaimana peran dan fungsi setiap staf akan dijalankan untuk mencapai visi dan misi UT.

Berbeda dengan struktur organisasi perguruan tinggi negeri lainnya yang menerapkan sistem pembelajaran tatap muka (konvensional), struktur organisasi UT dilengkapi dengan beberapa unit kerja yang menjadi penciri dan keunikan yang memungkinkan UT beroperasi sebagai perguruan tinggi negeri jarak jauh. Karena keterbatasan jumlah halaman, maka pada kesempatan ini hanya akan dibahas dua ciri umum yang berfungsi sebagai *basic building block* yang terkait langsung dengan penanda utama UT sebagai sebuah PTJJ.

b. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) dan Pusat-pusat Operasional Penyangga Pendidikan Jarak Jauh

Sejak UT didirikan 35 tahun yang lalu sampai dengan saat ini, struktur OTK UT telah dilengkapi dengan suatu unit kerja yang saat ini disebut sebagai LPPMP. Seiring perkembangan yang terus berlangsung, nama unit ini pun mengalami perubahan serta sub-unit pendukung yang ada dibawah LPPMP pun beberapa kali berubah termasuk adanya penambahan sub-unit baru untuk semakin meningkatkan kualitas layanan UT.

LPPMP sebagai penyangga utama layanan PJJ, dalam *organizational structure* UT terkait dengan dua hal

penting yang dalam konsep *strategic management* oleh Hill, Schiling, dan Jones (2016) disebut dengan diferensiasi (*differentiation*) dan integrasi (*integration*). Diferensiasi adalah terkait dengan cara bagaimana UT mengalokasikan orang-orang serta keunggulan sumber daya lainnya agar tugas pokok LPPMP dapat dijalankan dengan baik serta menciptakan nilai (*creating value*) bagi UT secara keseluruhan. Sementara itu, integrasi adalah terkait dengan cara yang ditempuh UT untuk mengkoordinasikan fungsi-fungsi sub-unit yang ada dibawah LPPMP serta orang-orang yang ada didalamnya dalam rangka mendukung tugas pokok LPPMP tersebut. Pada saat ini terdapat lima sub-unit di LPPMP yaitu: Pusat Pengembangan Multi Media (P2M2), Pusat Layanan Bahan Ajar (Puslaba), Pusat Bantuan Belajar (PBB), Pusat Pengujian (Pusjian), dan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP).

Pusat-pusat dibawah koordininasi LPPMP diatas berperan sangat penting dalam mendukung misi strategis UT serta merealisasikan UT sebagai sebuah PTJJ. Peran dan tugas dari masing-masing pusat tersebut secara lengkap dapat dipelajari lebih lanjut dalam OTK UT No. 16 Th. 2017. P2M2 merupakan *supporting unit* yang berperan penting dalam pengembangan bahan ajar UT. Puslaba adalah unit strategis yang bertanggung jawab penuh dalam penggandaan, perakitan dan pendistribusian bahan ajar ke seluruh mahasiswa. Demikian juga unit-unit pendukung lainnya seperti PBB dan Pusjian, keduanya merupakan organ strategis yang mendukung layanan operasional UT.

Sebagai institusi PJJ milik Pemerintah, UT telah menempatkan 'kualitas pendidikan' sebagai satu-satunya pilihan hidup dalam memberikan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Untuk kepentingan tersebut,

UT telah dilengkapi dengan salah satu sub-unit dibawah LPPMP yang saat ini disebut PPMP. PPMP memiliki peran penting dalam mengawal program penjaminan kualitas UT. Sistem penjaminan kualitas mencakup berbagai komponen dan program pendidikan yang ditawarkan UT. Di bawah koordinasi PPMP instrumen sistem penjaminan kualitas dikembangkan dan program-program internal dan external *quality audit* atau *quality review* dilaksanakan.

c. Unit Program Belajar Jarak jauh yang Tersebar di Tanah Air

Untuk melaksanakan mandatnya sebagai sebuah PTJJ dan merealisasikan misinya, menyediakan pemerataan akses pendidikan tinggi, sebagai wujud keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia di bidang pendidikan, UT telah dilengkapi dengan suatu unit kerja yang disebut Unit Program Belajar jarak Jauh (UPBJJ).

Keberadaan UPBJJ-UT sebagai salah satu kelengkapan organisasi UT tidak terlepas dari *grand design* dan *nature* UT sebagai PTJJ yang memungkinkan memberikan akses layanan pendidikan tinggi sampai pelosok tanah air. Pada saat ini, 2020, UT didukung oleh 39 UPBJJ yang tersebar di 34 provinsi dan ditambah 1 unit Pusat Pelayanan Mahasiswa Luar Negeri (PPMLN). UPBJJ-UT memiliki peran penting sebagai unit pelayanan teknis (UPT) yang ada di daerah yang tugas pokoknya diantaranya terkait dengan layanan bahan ajar, registrasi, tutorial (layanan bantuan belajar), dan ujian. Disamping itu, masih ada beberapa layanan dan program yang dilaksanakan di UPBJJ-UT seperti program-program pemasaran (baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar), beragam program layanan yang sifatnya mendukung kesuksesan belajar mahasiswa seperti *distance learning skill workshop*, *assignment workshop*, dan *exam clinic*. UPBJJ-UT juga memberikan layanan upacara peny-

arahan ijazah (UPI) bagi calon wisudwan yang tidak mendapat kesempatan wisuda di kantor UT Pusat (*in absentia*).

Berbeda dengan perguruan tinggi konvensional yang secara umum memiliki 1 kampus induk, UT dengan dilengkapi UPT-UPBJJ mampu beroperasi dengan layanan tanpa batas wilayah, memberikan layanan pendidikan dengan biaya yang lebih terjangkau, serta memungkinkan menyediakan pendidikan secara lebih luwes sesuai dengan kapasitas masing-masing mahasiswa. Keberadaan UPBJJ-UT juga menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang dengan infrastruktur teknologi dan jaringan yang masih lemah. UPBJJ UT mejadi tempat yang paling strategis dan berfungsi sebagai salah satu kanal komunikasi UT jika mahasiswa ingin menyampaikan permasalahan, keluhan, dan atau menginginkan informasi lebih lanjut tentang UT.

UT sebagai sebuah entitas PTJJ dengan OTK yang dirancang secara berbeda dengan perguruan tinggi lainnya telah memungkinkan UT beroperasi dengan *competitive advantages* tersendiri yang berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Sebagai sebuah instansi pendidikan jarak jauh, UT adalah sebuah sistem yang melibatkan proses pengelolaan (manajemen) yang sangat kompleks, didukung oleh beragam sub-sistem yang bekerja bersama, berkontribusi menuju pencapaian visi dan misi UT. Merujuk Luchsinger dan Dock (1982), sebagai sebuah sistem, UT dibina oleh 5 komponen utama: 1) memiliki tujuan (*it has a purpose*), 2) setiap sub-sistem dilengkapi dengan tata kelola dan memiliki tujuan turunan yang mendukung tujuan utama (*the elements (subsystems) have an established arrangement, and each element has its own sub-objectives*), 3) terciptanya sinergi antar sub-sistem (*a synergetic interrelationship must exist among subsystems*), 4) transformasi lebih penting dari seni tata kelola (*the process of input to output is*

more important than the arts of the system), dan 5) Tujuan utama (visi dan misi bersama) lebih penting daripada tujuan-tujuan turunannya/unit & sub-unit (*the objective of the whole outweighs the subordinate objectives of the subsystems*). Bermakna bahwa visi institusi harus dijadikan sebagai *fulcrum* diatas semua kepentingan.

Mencermati pendapat Luchsinger dan Dock (1982) tersebut, sangat penting bagi kita untuk memiliki pemahaman tentang UT sebagai sebuah sistem. Struktur organisasi yang dijelaskan diatas merupakan bekal awal sebelum kita memahami lebih lanjut tentang tata telola UT sebagai sebuah sistem tersebut; dengan memiliki pengetahuan UT sebagai sebuah sistem akan membantu kita dalam memahami pendidikan jarak jauh sebagai '*a field of study*' (Moore & Kearsley, 1996). Pemikiran dan pembahasan UT sebagai sebuah sistem akan disajikan pada sesi berikutnya dengan agenda utama membahas 'tinjauan sistem dan manajemen pendidikan terbuka'.

Memiliki pemahaman yang baik tentang struktur organisasi, tata Kelola, dan sistem UT sebagai sebuah institusi PTJJ akan menjadi modal penting bagi kita dalam membuat kebijakan, mengambil sebuah keputusan, dan mengembangkan beragam praktek baik dalam berbagai sisi layanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PJJ. Sejumlah pertanyaan mungkin muncul, bagaimana struktur organisasi dan tata kelola UT sebagai sebuah sistem '*correspond well*' dengan *existing practices* yang terjadi di setiap unit dan sub-unit serta hubungan lintas unit tersebut? Sampai seberapa jauh implementasi ketentuan dalam SOTK UT memberikan warna dalam *best practices* UT saat ini? Bagaimana SOTK UT yang berlaku saat ini dapat membantu membimbing manajemen mengembangkan sistem penjaminan kualitas yang akan diterapkan? Kaidah, norma, dan etika akademik seperti apa

yang harus dibina agar UT terus berkembang dan melakukan pengabdian terbaik untuk bangsa? Tidak kalah pentingnya, nilai-nilai budaya organisasi seperti apa yang harus dibangun dalam sistem dan manajemen pendidikan terbuka agar UT benar-benar berperan optimal merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat bermanfaat untuk dibahas lebih lanjut dalam sesi tentang sistem dan manajemen pendidikan Universitas Terbuka.

REFERENSI

- Bozkurt, A. (2019). From Distance Education to Open and Distance Learning: A Holistic Evaluation of History, Definitions, and Theories. In S. Sisman-Ugur, & G. Kurubacak (Eds.), *Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism* (pp. 252-273). Hershey, PA: IGI Global.
- Hill, C.W.L., Schilling, M.A. & Jones, G.R. (2016). *Strategic Management: An Integrated Approach*. USA: Cengage Publishers
- Holmberg, B. (2007). A theory of teaching-learning conversations. In M. G. Moore (Ed.), *Handbook of distance education*, (pp. 69-75). Marwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Holmberg, B. (2008). *The evolution, principles, and practices of distance education*. Oldenburg, Germany: BIS-Verlag der.
- Luchsinger, V.P. & Dock, T. (1982) *The system approach: An Introduction*. Kendal/Hunt Publishing.
- Moore, M. G. & Kearsley, G. (1996). *Distance education: A systems view*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
- Notosusanto, N. (1984). *Video detik-detik peresmian Universitas Terbuka*. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=Xk6wUzcPf3Y&t=209s>

- Paliwal, D. (2019). Reaching the unreached through open and distance learning in India with special reference to Kumaun region of Uttarakhand. *Asian Association of Open Universities Journal*, 14 (1).
- Peters, O. (2003). Models of open and flexible learning in distance education. In S. Panda (Ed.), *Planning and management in distance education*, (pp. 15-27). London: Kogan Page.
- Peters, O. (2007). The most industrialized form of education. In M.G. Moore (Ed.), *Handbook of distance education*, (pp. 57-68). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publisher.
- Sartono, A (2019). *Kemenko PMK: Lulusan SMA & SMK banyak, daya serap PT sedikit*. Available: <https://tirto.id/dDBv>.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Universal Declaration of Human Right* (1948). https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf.
- Wedemeyer, C. A. (1981). *Learning at the back door. Reflections on non-traditional learning in the lifespan*. Madison: University of Wisconsin.

4

PENDIDIKAN
TERBUKA DAN
DEMOKRATISASI
PENDIDIKAN

Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring

TINJAUAN SISTEM DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TERBUKA SECARA MAKRO

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari unsur utama pergeseran paradigma dalam tatanan kehidupan saat ini merambah ke banyak sisi kehidupan manusia. Dengan segala konsekuensinya, baik berupa peluang maupun tantangan, masuk pula ke sektor pembangunan, terutama pembangunan pendidikan. Sektor pendidikan harus ikut menyesuaikan diri dengan irama pergeseran perkembangan, apalagi dengan adanya konsekuensi Revolusi Industri 4.0. Ditambah pula bahwa di akhir 2019, sampai saat tulisan ini disusun, pergeseran percepatan perubahan di bidang pendidikan menjadi lebih signifikan karena adanya pandemi Covid-19 dimana skema dan sistem penyelenggaraan pendidikan menjadi berbeda dengan yang ada dan berjalan sebelumnya.

Konsekuensi langsung mengapa pendidikan termasuk elemen yang terkena dampak pergeseran dimaksud semata karena

tatanan penyelenggaraan dan operasionalisasi pendidikan harus mampu merespon dan beradaptasi dengan semua dinamika yang muncul sebagai akibat dari globalisasi, revolusi industri, dan pandemi Covid-19. Dari sekian banyak alternatif orientasi yang harus diadopsi merespon turbulensi yang sedang dan sepertinya akan terus berlangsung, dalam konteks pembangunan, persisnya terkait pembangunan bangsa Indonesia adalah **demokratisasi pendidikan!**

Ada beragam pendekatan mengupayakan pendidikan sehingga secara konseptual dan faktual menjadi lebih terbuka dengan restriksi akses sangat minimal. Artinya, dalam rangka mengupayakan layanan pendidikan menjadi lebih terbuka, lebih demokratis, perlu menemukan pendekatan unik dan terpadu. Unik dan terpadu dalam pengertian sistem atau orientasi pendidikan dimaksud tetap memenuhi kaidah dan standar kualitas yang berlaku dan diterima universal. Dalam batasan ini, pendidikan terbuka merupakan pilihan yang sesuai dengan asa mendemokratisasikan pendidikan. Dengan kata lain, pendekatan **pendidikan terbuka** merupakan wahana mewujudkan **demokratisasi pendidikan**.

Pendidikan Terbuka pada dasarnya digerakkan kesadaran bahwa setiap insan adalah pembelajar dan perlu belajar. Pembelajar dalam konteks ini adalah mereka yang berkeinginan agar dapat belajar sepanjang hayat tanpa terkendala ruang dan waktu. Belajar sepanjang hayat dimaksudkan agar mampu memberi makna di dalam kehidupan melalui proses mengisi diri secara positif secara berkesinambungan. Proses berkelanjutan ini didapatkan dari menjalani suatu rangkaian yang dalam konteks ini kita sebut dengan istilah belajar (*study*). Secara khusus, insan yang terlibat dalam proses pembelajaran ini ingin melakukan pencaharian terkait dengan topik-topik studi tertentu yang dianggap perlu dan bermanfaat

menunjang hidup dan kehidupan. Gunanya, agar memiliki pengalaman pendidikan langsung melalui berbagai cara agar berkemampuan dan bertanggung jawab atas keputusan untuk kepentingan pendidikan bagi diri sendiri.

Pembelajar, dalam konteks pendidikan terbuka, melakukan beragam hal yang terkait antara satu dengan lainnya. Belajar dapat terjadi secara mandiri yang tidak selalu berarti harus seorang diri. Artinya, belajar mandiri dapat juga terjadi dalam lingkungan kelompok yang pada gilirannya berkontribusi positif bagi setiap pembelajar. Kerja kelompok dalam pendidikan terbuka dalam kerangka dan tinjauan sistem memiliki manfaat besar, paling tidak dianggap dapat meningkatkan partisipasi anggota kelompok yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tujuannya, sesuai dengan tuntutan pedagogik, untuk menanamkan pemahaman dan retensi materi agar menjadi lebih baik. Juga, dianggap sebagai cara memantapkan penguasaan keterampilan, dan meningkatkan antusiasme yang kemudian dapat mendorong pembelajar agar terbiasa dan akhirnya memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam belajar mandiri. Filsafat pendidikan terbuka berpusat pada pembelajar dan melihat pendidik menjadi fasilitator (guru dan/atau dosen). Oleh sebab itu, dalam pendidikan terbuka, guru/dosen sebagai fasilitator harus memiliki kemampuan mengamati, membimbing, dan menyediakan materi. Artinya, guru/dosen harus memfasilitasi, bukan mendominasi, proses pembelajaran. Pendidikan terbuka optimis dengan keyakinan bahwa kebebasan memilih arah menentukan pendidikan bagi dirinya sendiri akan meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran menjadi lebih baik.

Frasa pendidikan terbuka mencakup sejumlah kegiatan berbeda dalam konteks pendidikan. Perbedaan tersebut sangat ditentukan dan tergantung kepada siapa dan saat

apa konteks tersebut (pendidikan terbuka) diperbincangkan. Dalam konteks berbeda dan dengan orang yang berbeda, pendidikan terbuka dapat memiliki arti yang berbeda dan tak mustahil juga beragam. Untuk kepentingan penyederhanaan dan kesamaan dasar pandangan agar relevan dengan konteks kekinian, dalam pembahasan ini pendidikan terbuka kita beri makna sebagai kumpulan praktik baik dan sesuai keadaan yang memanfaatkan teknologi tepat guna, termasuk teknologi pembelajaran daring, agar memiliki pendidikan terbuka sebagai suatu sistem kelenturan yang tinggi dalam rangka membagi dan berbagi pengetahuan.

Dalam diskursus pendidikan terbuka, khususnya dalam tataran pendidikan tinggi, terdapat sejumlah pendekatan tertentu agar sehubungan dengan “berbagi pengetahuan” tersebut dapat dan tetap berlangsung sesuai dengan kaidah dan norma akademik yang diterima secara universal. Ragam praktik tersebut, sejalan dengan pemahaman tentang pendidikan terbuka yang digunakan dalam pembahasan ini, meliputi beberapa bentuk mendasar, antara lain:

1. kebijakan terkait akses dan sistem penerimaan yang fleksibel (penerimaan/pendaftaran terbuka);
2. saling berbagi dan menggunakan kembali bahan pembelajaran (sumber daya pendidikan terbuka);
3. berbagi sumber daya terkait praktik baik pembelajaran dan penelitian (bantuan belajar terbuka);
4. mempublikasikan hasil penelitian yang menunjang keberhasilan pendidikan terbuka dalam jurnal terbuka (publikasi dengan akses terbuka);
5. menggunakan, berbagi, dan secara kolaboratif membuat perangkat lunak untuk mendukung sistem pendidikan terbuka (perangkat penunjang pemanfaatan beragam sumber pembelajaran terbuka);

6. merilis data untuk digunakan kembali oleh pihak terkait menunjang kelancaran pendidikan terbuka (data terbuka); dan
7. menyebarluaskan pemanfaatan sistem utama dan sistem penunjang untuk dimanfaatkan secara optimal melalui jaringan yang disediakan (pembelajaran/pedagogik terbuka).

Meski ketujuh butir di atas belum dan bukan merupakan daftar lengkap, setidaknya gambaran di atas sudah dapat memberi landasan terkait jenis kegiatan yang tercakup dalam frasa pendidikan terbuka.

TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TERBUKA

Teknologi yang tersedia untuk pendidikan terbuka penting dalam mencapai efisiensi dan efektivitas keseluruhan program dalam pendidikan terbuka. Keberadaan dan kemajuan teknologi terutama di bidang komunikasi dan informasi, memberi dasar sedemikian rupa keterbukaan dapat dicapai secara “absolut” dalam penyebaran pengetahuan melalui pendidikan. Paling tidak sudah dapat menghilangkan (mengurangi tepatnya) hambatan termasuk, tetapi tidak terbatas hanya pada, biaya dan akses ke sumber daya terkait dan tanpa perlu biaya. Setelah teknologi yang tersedia ditemukan, maka diperlukan aplikasi yang sesuai pada teknologi untuk program pendidikan tertentu yang dewasa ini tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran daring (yang sangat sarat dengan pemanfaatan teknologi tepatguna yang mutakhir).

Karena pendidikan terbuka biasanya terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda untuk sebagian besar individu di seluruh dunia, teknologi tertentu yang tepat guna perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas keberadaan suatu program dalam sistem pendidikan terbuka. Teknologi ini terutama

terkait dengan teknologi daring yang dapat melayani berbagai keperluan, termasuk mengurangi kendala akses. Keberadaan situs jaringan dan pedekatan lain (yang berbasis komputer) dapat digunakan guna menyampaikan materi pembelajaran atau kuliah (bahan dan catatan tertentu), penilaian, dan materi terkait lainnya dalam berbagai media dan modus. Dalam media video, misalnya, disediakan fitur pembicara, agenda, diskusi terkait topik bahasan, dan tanya jawab oleh fasilitator. Salah satu bentuk, YouTube misalnya, sering digunakan untuk tujuan ini. Pembelajar juga dapat berinteraksi melalui beragam media sosial yang sudah tersedia dengan mudah dan murah saat ini. Sementara materi atau konten lainnya dapat disediakan melalui proses digitasi.

Banyak institusi Pemerintah, termasuk lembaga lain, dan juga masyarakat secara umum semakin menyadari pentingnya pendidikan. Pengetahuan manusia sangat penting untuk menghasilkan pemimpin, inovator, dan pendidik yang kompeten. Sistem pendidikan harus memberikan setiap individu kesempatan untuk membangun kehidupan yang baik dan bahkan lebih baik. Dan, teknologi telah membuat perluasan peluang peyebaran pendidikan lebih terbuka lebar dan juga lebih mudah. Melalui Internet, siapa saja (pembelajar) dapat dengan mudah menemukan informasi secara praktis tentang topik apa pun sementara pendidik (tepatnya fasilitator) mampu berbagi keahlian mereka dengan pembelajar mana pun dalam hitungan detik. Materi pendidikan disebarluaskan ke audiens secara umum tanpa perlu biaya tambahan. Teknologi yang berkembang saat ini sudah sangat memadai dan memungkinkan pembelajar berinteraksi dengan komunitas global sesuai dengan keleluasaan (kenyamanan) yang mereka miliki.

Dalam pendidikan terbuka, yang tak jarang selalu berhimpitan dengan pendidikan jarak jauh (ada juga dan biasa disebut dengan pembelajaran daring), perguruan tinggi dapat memperluas kontribusi mereka melalui penyebaran materi dengan lebih terbuka dan dapat pula diakses oleh siapa saja dari belahan dunia mana saja.

Meski bersifat terbuka, pendidikan terbuka tak dapat dipisahkan dengan sumber daya seperti media untuk keperluan praktik/praktikum dan alat lain yang tidak terhambat oleh kendala keuangan, teknis, dan aspek legal. Sumber daya ini digunakan dan dibagikan dengan mudah di era yang sudah serba digital. Teknologi merevolusi teknik mengirim informasi yang diterima setiap hari termasuk dan terutama dalam pendidikan. Ketersediaan sumber daya semacam jaringan telah mengubah arsitektur sistem (pendidikan). Dalam perjalanannya, pendidikan terbuka juga sering dikaitkan dengan sumber pembelajaran terbuka (*Open Educational Resource*, OER). Dalam tahap dan konteks ini, biaya yang bisa melonjak lebih dari tiga kali tingkat inflasi selama bertahun-tahun terakhir tidak boleh dan tidak akan menjadi unsur penghambat pendidikan.

Sumber pembelajaran terbuka jelas dapat mengatasi masalah ini karena bahan-bahannya bisa didapatkan secara gratis, juga secara daring. Ini bisa mengeliminasi kendala teknis dan juga ekonomis karena tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk tercetak. Sumber daya yang dimaksudkan untuk membeli buku teks misalnya, akhirnya dapat diarahkan ke pengadaan teknologi, meningkatkan kualitas dan ragam media instruksional, dan menurunkan pengeluaran (investasi) untuk infrastruktur yang mahal.

Riset menunjukkan bahwa masyarakat (khususnya para pembelajar) lebih banyak mendapatkan keuntungan karena akses mereka ke bahan berkualitas tanpa dibebani pembiayaan yang tinggi melalui teknologi yang sudah tersedia. Teknologi juga memiliki potensi tak terbatas dalam meningkatkan proses pembelajaran sampai ke tingkat yang paling tinggi (mulai dari pendidikan di tingkat dasar, menengah dan sampai ke tingkat pendidikan tinggi). Keluaran pendidikan dengan sistem terbuka bisa sama baiknya dengan sistem pendidikan yang biasa.

KEWASPADAAN

Terdapat sejumlah kekhawatiran terkait penerapan sistem pendidikan terbuka. Terutama jika akan diterapkan di negara berkembang; dan Indonesia termasuk dalam kategori ini. Kekurangan umumnya terkait dengan potensi terbatasnya kemampuan melakukan pengawasan teknis dan administrasi serta sistem jaminan kualitas untuk penyedia (pendidik) dan/ atau bahan dalam beberapa program. Selain itu, kekhawatiran terhadap keterbatasan daya dukung infrastruktur, kurangnya akses yang sama terhadap teknologi yang diperlukan agar mampu berpartisipasi secara penuh (dilihat dari sisi pembelajar) dalam inisiatif pendidikan online, dan pertanyaan mengenai penggunaan materi berhak cipta.

Jika kewaspadaan terhadap potensi kekurangan tersebut tidak diantisipasi dan diatasi secara konseptual dan operasional, hasil akhir dari pendidikan terbuka bisa jadi kontra produktif. Pendidikan terbuka pada dasarnya sama saja dengan pendidikan yang “tidak” terbuka. Prinsip dasar pendidikan terbuka, di satu sisi, pada dasarnya tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi kepentingan individual pembelajar sehingga akhirnya memiliki tanggung jawab secara personal untuk kesuksesan diri mereka sendiri; termasuk tanggung jawab kepada komunitasnya. Di sisi lain, pendidikan terbuka

juga memastikan proses pembelajaran sepanjang hayat secara kolaboratif tetap terpelihara.

Untuk memastikan bahwa dua sisi prinsip pendidikan terbuka tersebut terjaga dan terjamin secara utuh maka pengawasan secara teknis administratif dan penjaminan kualitas secara sistem harus sama-sama terintegrasi dan saling mununjang.

Dewasa ini, pendidikan terbuka sudah harus memalingkan perhatian ke masa depan dengan teknologi yang ditandai dengan pemanfaatan *mobile device* dan *virtual laboratory*. Pergeseran ini merupakan lompatan perubahan yang cepat dari masa sebelumnya. Melihat ke 25 tahun sebelumnya, pendidikan terbuka memanfaatkan teknologi berupa bahan berbasis cetak dengan modus deliveri melalui radio, televisi dan satelit. Dalam perjalannya, saat ini pendidikan terbuka, yang tak mudah dipisahkan dengan sistem pendidikan jarak jauh, yang juga sering secara bergantian disebut sebagai pembelajaran daring, sudah berbasis internet. Ke depan, seperti dikemukakan sebelumnya, harus sudah memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh keberadaan dan dukungan “mobile device” dan “virtual lab.”

MAKRO MANAJEMEN PENDIDIKAN TERBUKA

Pendidikan terbuka, baik pada saat beririsan dengan pendidikan jarak jauh dan/atau berdiri sendiri secara tersendiri, memiliki lima sifat keterbukaan yang harus dikelola dengan seksama. Karakteristik pertama dan utama adalah terbuka terhadap kebutuhan pembelajar. Artinya, meski di satu sisi pendidikan terbuka secara manajemen harus mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pembelajar secara massal dan masif, tetapi di saat yang bersamaan harus pula mengutamakan kepentingan (kebutuhan, harapan) pembelajar. Makro manajerial pendidikan terbuka tidak bisa menghindar

dari paradoks seperti ini. Justru pendidikan terbuka harus mampu mengadopsi paradoks seperti ini, melayani secara massal tetapi tetap memperhatikan keunikan dan kebutuhan pembelajar sebagai individu.

Kemudian, pendidikan terbuka harus mengacu ke sistem sedemikian rupa terbuka dalam hal mengadakan layanan semua unsur pembelajaran. Terbuka dalam konteks ini adalah memperhatikan keterbatasan pembelajaran dalam menyediakan waktu “belajar” baik waktu kronologis maupun waktu dalam pengertian frekuensi. Jika tatanan makro sistem layanan pembelajaran membuat pembelajar menjadi terikat dan tidak memiliki fleksibilitas dalam mengakses dan mengikuti proses serta prosedural pembelajaran, besar kemungkinan pembelajar tidak akan mendapatkan manfaat maksimal dari sistem yang ditawarkan pendekatan terbuka.

Dari sisi institusional, pendidikan terbuka juga perlu memastikan keterbukaan dalam hal mengupayakan “sistem pengajaran” ketika mahasiswa memerlukan akses untuk mendapatkan bantuan akademik tambahan. Lebih spesifik, gaya belajar pembelajar pada dasarnya heterogen. Langkah antisipatif untuk menghindari ketidakefektifan proses pembelajaran karena abai terhadap gaya dan ragam belajar pembelajar penting diantisipasi.

Karakteristik selanjutnya, sekaligus mengatasi kemungkinan hambatan proses dan capaian pembelajaran karena heterogenitas dalam konteks gaya belajar, sistem pendidikan terbuka harus pula terbuka terhadap sumber pembelajaran terbuka secara terpadu. Artinya, makro manajerial pendidikan terbuka tidak memiliki hambatan menyediakan sumber pembelajaran terbuka tanpa batas. Format deliveri sumber pembelajaran terbuka juga harus beragam. Dengan demikian

hambatan yang terjadi karena kebutuhan khusus dari sisi pembelajar dapat dieliminasi (dikurangi) dengan penyediaan sumber belajar terbuka secara terbuka.

Bagian akhir yang meski di akhir tetapi justru mutlak adalah terkait dengan pendidikan terbuka yang harus secara terbuka mengupayakan pengembangan diri terkait dengan kapabilitas yang ingin diperoleh dan hubungannya dengan manfaat nyata di dunia nyata (kebutuhan dunia kerja yang menunjang kebermaknaan hidup). Penyelarasan pengelolaan pendidikan terbuka dengan lingkungan strategis merupakan esensi dari perlunya selamat berselancar di era digital yang ditandai dengan cepatnya perubahan di seluruh sendi kehidupan. Seperti juga yang diakibatkan baik karena Revolusi Industri 4.0 maupun tuntutan keterampilan abad 21 - apalagi akibat langsung dari pandemi Covid19 dewasa ini.

SEPULUH DIMENSI ESENSIAL PENDIDIKAN TERBUKA

Secara keseluruhan, makro manajemen pendidikan terbuka akan mampu memenuhi tuntutan baik secara saintifik maupun secara pragmatik. Syaratnya, memenuhi sepuluh dimensi yang terdiri atas enam dimensi intrinsik dan empat dimensi ekstrinsik.

Secara intrinsik, terdapat enam dimensi yang mendasari kehandalan program melalui sistem pendidikan terbuka. Keenam elemen tersebut terkait dengan: konten, pedagogi, rekognisi, kolaborasi, riset dan pengembangan, dan keterbukaan akses. Keenam elemen ini adalah makro manajerial penjaminan kualitas program melalui sistem pendidikan terbuka sehingga keluaran dan dampak pendidikan terbuka tidak akan mencederai hasil yang dipersyaratkan secara saintifik.

Sejalan dengan keenam unsur intrinsik di atas, untuk mengupayakan penjaminan kualitas, terdapat empat unsur ekstrinsik lainnya untuk penjaminan sistem pengawasan teknis dan administrasi. Keempat unsur ekstrinsik tersebut, dalam tataran makro manajerial pendidikan terbuka, terkait dengan unsur: kualitas, teknologi, strategi, dan kepemimpinan. Keempat dimensi ini, meski merupakan bagian ekstrinsik namun mendasar dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan pendidikan terbuka, terutama untuk konteks negara berkembang.

Dalam konteks pendidikan terbuka ditilik sebagai suatu sistem dan pengelolanya, upaya menyatupadukan kesepuluh dimensi intrinsik dan ekstrinsik di atas menjadi mutlak. Pendidikan terbuka sebagai suatu sistem pastilah tidak berbeda dengan sistem pendidikan (tidak terbuka) lain agar tidak mencederai kaidah yang sudah berlaku universal. Tujuannya, agar keluaran yang diharapkan, tidak berbeda secara kualitas.

PEDAGOGI TERBUKA DALAM PENDIDIKAN TERBUKA

Unsur pedagogi bukan merupakan satu-satunya elemen utama dalam pendidikan terbuka. Namun unsur pedagogik, khususnya pedagogi yang sejalan dengan nuansa pendidikan terbuka, menjadi sentral. Tujuannya adalah semata untuk menghindari ketidakefektivan keluaran dan dampak dari pendidikan terbuka sebagai suatu sistem.

Paling tidak, terdapat delapan atribut pedagogi terbuka untuk pendidikan terbuka. Kedelapan pengelompokan atribut tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) keterbukaan dan keyakinan dari sisi pembelajar, (2) inovasi dan kreativitas, (3) berbagi gagasan dan sumber daya pembelajaran, (4) keterhubungan dengan masyarakat, (5) hal penting yang dapat dihasilkan pembelajar, (6) latihan bersifat reflektif, (7) ulasan

atau telaah sejawat, dan (8) keterkaitan teknologi untuk efektivitas pembelajaran terbuka.

Sejalan dengan itu, pedagogi terbuka untuk pendidikan terbuka senantiasa fokus dan mengutamakan pada kualitas pembelajaran, pembelajar dan fasilitator dalam dimensi sama-sama belajar, dan mendialogkan/mendiskusikan kemungkinan perubahan untuk perbaikan secara terus menerus.

Untuk memastikan pedagogi terbuka sesuai dengan pendidikan terbuka, lima siklus berikut perlu diperhatikan. Sekali kita sudah siap menyediakan materi atau konten, misalnya, harus melakukan antisipasi. Lalu diikuti dengan refleksi baru kemudian dieksekusi. Setelah itu baru dievaluasi. Dengan menjalankan siklus seperti ini, maka secara perlahan dan berkesinambungan pedagogi terbuka untuk pendidikan terbuka akhirnya akan menemukan kesesuaiannya.

Pendidikan terbuka sebagai suatu sistem, akhirnya harus dikelola sesuai dengan kaidah umum yang berlaku secara manajemen. Kedelapan basis atribut pedagogik ditambah dengan lima siklus penatakelolaan seperti diuraikan sebelumnya merupakan kombinasi elemen dasar yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya mengupayakan pendidikan terbuka sebagai satu sistem dapat dijalankan dengan keluaran dan dampak yang tetap memenuhi standar kualitas yang diharuskan.

PENUTUP

Efektivitas pendidikan terbuka akan ditentukan, ditinjau dari perspektif manajemen makro, tiga kerangka dasar. Ketiga kerangka tersebut terkait dengan visi di level strategis, operasional di level taktis, dan aspek regulasi di level eksekusi. Pada level strategis, pendidikan terbuka harus bervisi terbuka

terhadap inovasi, rekognisi, dan orientasi. Di level taktis, pendidikan terbuka secara operasional terbuka terhadap standar, sumberdaya, dan teknologi yang diadopsi. Di level eksekusi, pendidikan terbuka secara regulasi terbuka juga terhadap lisensi, akses, dan ketersediaan layanan secara keseluruhan.

Pada akhirnya, pendidikan terbuka harus berujung pada pembelajaran fleksibel dan mengakomodasi, sejauh mungkin, keunikan para pembelajar. Pembelajaran fleksibel hanya terjadi, di lihat dari sisi pembelajar, jika memberi kesempatan dan kemampuan kepada pembelajar mengikuti siklus pencaharian dalam proses pembelajaran.

Secara umum, siklus pencarian tersebut meliputi tujuh langkah siklik berikut, yaitu pembelajar pada akhirnya secara baik akan mampu:

1. memotret lingkungan sekitarnya sampai dengan mengajukan pertanyaan dan memformulasikan masalah;
2. melakukan investigasi mulai dari membuat perencanaan, mencari sumber literatur sampai dengan melakukan riset ke lapangan;
3. merekam data mulai dari cara mengorganisasikan, mengklasifikasikan sampai dengan menggambarkan dalam berbagai bentuk diagram;
4. mengungkapkan temuan mulai dari kegiatan observasi, menguji sampai dengan menginterpretasikan;
5. membangun konsepsi berpikir mulai dari membahas, menganalisis sampai dengan menyampaikan alternatif solusi secara jelas;
6. melakukan eksperimen mulai dari mengajukan gagasan, membuat model sampai dengan melakukan replikasi; dan
7. menyediakan waktu refleksi mulai dari melakukan revisi, improvisasi sampai dengan menyimpulkan secara terpadu.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti diuraikan sebelumnya, dapat diharapkan (dipastikan) bahwa secara makro pendidikan terbuka akan menjadi jawaban mencerdaskan kehidupan bangsa (dalam konteks Indonesia). Dengan pendidikan terbuka sebagai sebuah sistem, kita tetap berharap menjadikannya sebagai cara yang sama baiknya dengan sistem yang sudah ada membangun modal insani Indonesia. Dan, teringat kembali dengan ungkapan bahwa *the aim of education is to replace an empty mind with an open one*. Dan, *change is the ultimate of all true learning*. Jadi, sekali lagi, *be open to it!* Jadi, terbuka lah!

REFERENSI

- Belawati, T. (2019). *Pembelajaran Online*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Darojat, O. (2017). *Meningkatkan kewibawaan akademik menuju perguruan tinggi terbuka jarak jauh berkualitas*. Kertas Kerja, disajikan pada Acara Pemilihan Bakal Calon Rektor Universitas Terbuka 2017-2021, di depan Sidang Senat Universitas Terbuka, 3 Mei 2017.
- Kompas* (2019). *Kemerdekaan belajar*. Terbitan 20 Desember 2019
- Latif, Y. (2019). *Membangun manusia merdeka*. *Kompas*, 16 Agustus 2019.
- Liao, Y., Loures, E.R., Deschamps, F., Brezinski, G. and Venancio, A. (2017). *The impact of the fourth industrial revolution: a cross-country/region comparison*. *Production*, **28**, 2-28. DOI: 10.1590/0103-6513.20180061. Tersedia di: <http://www.scielo.br/pdf/prod/v28/0103-6513-prod-28-e20180061.pdf> (Diakses 27 April 2019).
- Lie, A. (2020). *Merdeka belajar untuk kebahagiaan*. *Kompas*, 1 Februari 2020.

- Sembiring, M.G. (2017). *Universitas Terbuka Menyongsong 2020/2021 menuju 2025*. Kertas Kerja, disajikan pada Acara Pemilihan Bakal Calon Rektor Universitas Terbuka 2017-2021 di depan Sidang Senat Universitas Terbuka, 3 Mei 2017.
- Sembiring, M.G. (2018). Validating student satisfaction with a blended learning scheme in Universitas Terbuka setting. *International Journal of Mobile Learning and Organisation*, 12(4), 394-413.
- Suparman, A. (2001). *Rencana operasional universitas Terbuka* (Naskah Awal, Juni-Juli 2001). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. (2017). *Rencana Strategi Bisnis Universitas Terbuka 2017-2020*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. (2018). *Laporan kerja tahunan rektor 2017*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. (2019). *Laporan kerja tahunan rektor 2018*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring

MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI TERBUKA: MODEL UNIVERSITAS TERBUKA

PENDAHULUAN

Pendidikan Terbuka, dalam pembahasan ini, secara kontekstual dimaknai sebagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja dengan berbagai ragam latar belakang berbeda dengan pembatasan persyaratan yang sangat lentur. Secara lebih khusus pendidikan terbuka dalam pembahasan ini sering pula secara bergantian dinyatakan dengan istilah pembelajaran terbuka. Pendidikan terbuka, secara lebih spesifik, menggambarkan situasi belajar di mana peserta didik memiliki fleksibilitas untuk memilih dari berbagai pilihan dalam kaitannya dengan waktu, tempat, metode pengajaran, moda akses, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan proses belajar mereka.

Dapat dipahami bahwa dari perspektif ini situasi atau proses pembelajaran harus terbuka untuk semua orang, dalam keadaan apa pun, di mana pun, dan kapan pun.

Dalam banyak situasi, istilah pendidikan terbuka, sekali lagi, acap digunakan secara bergantian dengan pembelajaran terbuka. Istilah pendidikan terbuka dalam keadaan tertentu juga sulit dipisahkan dengan yang acap merujuk pada istilah yang kita kenal dengan sebutan pembelajaran jarak jauh. Harus disadari pula bahwa pendidikan terbuka tidak selalu memanfaatkan sistem pendidikan jarak jauh. Istilah keterbukaan dalam konteks ini lebih cenderung mengacu pada organisasi atau lembaga pendidikan yang menawarkan berbagai pilihan kepada peserta didik dengan memberi kesempatan belajar dan cara belajar dengan beragam pilihan dan tidak selalu sepenuhnya tergantung pada batasan atau kendala ruang dan waktu.

Pendekatan pendidikan terbuka saat ini menjadi bersenyawa dengan pembelajaran jarak jauh seiring perkembangan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang saling melengkapi dalam praktik dan operasionalnya. Apalagi, dengan menggejalanya kemajuan serta pemanfaatan *e-learning* dan *online learning* yang memberi keleluasaan kepada peserta didik dengan kemungkinan belajar yang lebih memperhitungkan keterbatasan dan preferensi dilihat dari sisi peserta didik. Belajar dalam perspektif pendidikan terbuka harus dianggap sebagai proses pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat dimana peserta didik merasakan dan mengalami berbagai fleksibilitas, terutama di luar pengaturan dan kelaziman yang terjadi dan berlangsung dalam pembelajaran formal (klasikal atau tatap muka).

Dengan pemahaman dan pembatasan seperti ini, sesungguhnya manajemen pendidikan terbuka merupakan tata cara dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi kaidah manajemen secara umum. Tiga unsur mendasar dari manajemen tidak dapat diabaikan, yang terdiri

mulai dari unsur perencanaan, pengorganisasian sampai dengan evaluasi. Artinya, manajemen pendidikan terbuka sesungguhnya tidak berbeda dengan pengelolaan pendidikan yang sudah kita kenal dalam sistem pendidikan yang bukan dikategorisasikan dalam istilah pendidikan terbuka.

MODEL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TERBUKA

Secara klasik, dikenal berbagai model penyelenggaraan pendidikan terbuka yang menggejala di seantero dunia. Pendidikan terbuka menjadi fenomenal seiring pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Akibatnya, terjadi pergeseran bersifat revolusioner secara sistematis, terstruktur dan masif dalam konteks pengelolaan pendidikan. Sejalan dengan itu, revolusi industri yang sebelumnya dipicu gelombang globalisasi memaksa kertebukaan secara cepat dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat, termasuk dan terutama di bidang pendidikan. Artinya, proses dan prosedural pembelajaran bergeser (digeser) ke pendekatan berbeda dengan yang sudah dikenal sebelumnya secara fundamental dan signifikan. Pergeseran ini, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, menggerakkan tiap pemangku kepentingan pendidikan menjadi masuk di dalam pusaran perubahan mendasar dimaksud. Perubahan tersebut menuju ke arah pendidikan terbuka yang dalam banyak hal tak dapat dipisahkan dengan sistem pendidikan jarak jauh.

Sebelum masuk pada pembahasan model penyelenggaraan pendidikan terbuka yang secara praktis sudah berlangsung selama ini di Universitas Terbuka, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu **model-model** yang sudah ada dan sampai sekarang masih relevan dan digunakan banyak institusi di berbagai negara. Istilah yang akrab di telinga kita, mengacu pada konteks yang relatif luas, antara lain apa yang disebut sebagai pembelajaran daring, pembelajaran elektronik,

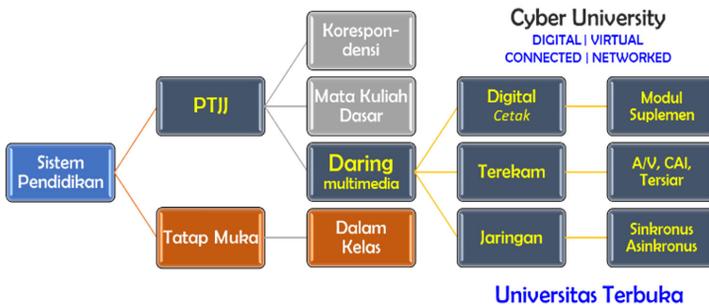
pembelajaran virtual, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran fleksibel, pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran interaktif. Dalam skala relatif lebih sempit, kita juga akrab dan kenal dengan istilah yang disebut pembelajaran individual, pembelajaran berbasis sumber, dan pembelajaran yang digerakkan oleh diri sendiri. Tiap model ini memiliki definisi masing-masing dan batasan tersendiri pula yang bisa digunakan sesuai dengan konteks yang relevan di dalam implementasi dan operasionalnya.

MODEL PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS TERBUKA

Sistem dasar model penyelenggaraan pendidikan secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu sistem pendidikan tatap muka dan sistem pendidikan jarak jauh. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih jauh terkait dengan sistem pendidikan jarak jauh dalam perspektif pendidikan terbuka. Pembahasan selanjutnya akan lebih difokuskan lagi dalam tataran tata kelola, yaitu manajemen pendidikan terbuka dan model penyelenggaraan yang diejawantahkan dalam 35 tahun ini di dan oleh Universitas Terbuka (UT).

Dalam operasionalnya, UT menganut manajemen dan pengelolaan yang dibingkai dalam satu kesatuan, yang disebut sebagai sistem pendidikan tinggi terbuka jarak jauh (PTTJJ). Sejauh ini, sistem PTTJJ dianggap sebagai terobosan yang pas karena mampu menembus kendala ruang dan waktu dalam konteks Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan sebagian besar penduduknya justru mengalami keterbatasan dalam hal akses ke sistem pendidikan yang sudah ada (klasikal atau tatap muka). Secara diagramatis, penyelenggaraan Universitas Terbuka, dalam konteks PTTJJ, dapat dilustrasikan sebagaimana diuraikan dalam Gambar 1 berikut ini.

4. Pendidikan Terbuka dan Demokratisasi Pendidikan



Gambar 1. Model Dasar Penyelenggaraan Universitas Terbuka

PTJJ yang mampu menembus kendala ruang dan waktu dimaksud mengambil manfaat maksimal dari keberadaan teknologi yang dikenal dengan sebutan multimedia. Artinya, sistem PTJJ berbasis multimedia menyediakan layanan dan akses dalam bentuk tertulis, terekam, dan terkoneksi. Bahan ajar dalam bentuk modul dan suplemen merupakan contoh bahan yang disediakan dalam bentuk tertulis. Produk dalam kemasan program audio/video dan bahan pembelajaran berbantuan komputer merupakan contoh yang dikembangkan dan disediakan dalam bentuk terekam. Interaksi interaktif yang disampaikan melalui internet dan termasuk telekonferensi merupakan contoh dalam kategori pemanfaatan akses terkoneksi; baik dalam moda sinkronus maupun asinkronus.

Secara lebih khusus, model penyelenggaraan Universitas Terbuka, dalam kerangka operasionalisasi layanan sistem PTJJ, dapat pula disederhanakan seperti diilustrasikan di dalam Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Operasionalisasi Layanan Sistem PTTJJ

Ketiga komponen utama dalam sistem PTTJJ dan ikutannya dikelompokkan menjadi tiga bentuk dasar layanan utama, yaitu layanan: (1) akademik, (2) administratif, dan (3) manajerial. Layanan akademik terkait dengan bahan ajar (cetak dan non-cetak), bantuan belajar (tatap muka/klasikal dan media elektronik), dan evaluasi hasil belajar (dalam bentuk dan ragam latihan mandiri, tugas terstruktur, ujian akhir semester, tugas akhir program, dan penulisan karya ilmiah). Layanan administratif terkait dengan urusan untuk dukungan registrasi mahasiswa (data pribadi dan mata kuliah), logistik (pendistribusian bahan ajar berupa modul dan kit), dan ujian akhir semester (dalam moda tertulis dan daring). Selain itu, termasuk pula unsur manajerial meliputi urusan personil, finansial, fasilitas, jaminan kualitas, jaringan, dan daya jangkauan untuk menunjang pemenuhan angka partisipasi mahasiswa.

Sistem dasar ini, pada gilirannya, akan mampu mengakomodasi turbulensi akibat perubahan lingkungan strategis sebagai bagian yang meski bersifat eksternal tetapi tidak bisa diabaikan

oleh UT. Untuk merespons potensi turbulensi tersebut, dalam beberapa waktu terakhir ini menggejala istilah *cyber University* – seperti yang beberapa kali disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir saat memberi sambutan/pembicara kunci di beberapa acara UT dan/atau rapat koordinasi di lingkungan perguruan tinggi (sepanjang kurun waktu 2017-2019).

Pengenalan istilah ini dimaknai sebagai ikhtiar membuka akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas. Untuk UT misalnya, dianggap mampu melayani sampai dengan satu juta mahasiswa namun, sekali lagi, tetap meletakkan kualitas sebagai pilar utama dengan pendekatan baru. Guna menjamin kualitas dalam konteks *cyber*, harus memadukan prinsip tentang *connected-networked* di satu sisi dan *digital-virtual* di sisi lain.

Keperluan menggenapi karakter *cyber* (*connected-networked* dan *digital-virtual*) adalah untuk memastikan kualitas, kualitas produk dan kualitas layanan. Kualitas dalam konteks ini mengacu kepada tuntutan pengguna semua pemangku kepentingan (mahasiswa/lulusan/masyarakat) dan kebutuhan pembangunan menuju Indonesia Emas. Kualitas dalam konteks ini utamanya mengacu kepada kinerja mahasiswa (pada akhirnya tentu saja untuk kualitas lulusan).

Perhatian dan tuntutan pemangku kepentingan sejauh ini terutama terdiri atas lima hal utama. Pengguna layanan UT, sebagai bagian penting dari pemangku kepentingan, membutuhkan kepastian terutama terait dengan kualitas semua produk akademik sebagai keluaran dari sistem PTTJ (Universitas Terbuka). Pengguna mendefinisi-operasionalkan kualitas dengan urutan sebagai berikut: (1) memperoleh indeks prestasi yang baik, (2) memastikan masa studi yang terkendali,

(3) dilayani dengan prima, (4) mendapat pengakuan (semua program studi dan institusi terakreditasi), dan (5) mendukung karir para lulusan (diakui dalam semua bidang pekerjaan, di lingkungan instansi Pemerintah dan swasta).

Kelima tuntutan ini akan terpenuhi dan membuat mahasiswa/lulusan memenuhi standar yang diinginkan (mengacu pada karakteristik generasi emas: cerdas, berkarakter, dan inovatif). Cerdas, sebagai modal utama insan Indonesia menuju 2045, bagi yang menuntut ilmu dan lulus dari sistem PTTJ, harus sama baiknya dengan lulusan dari sistem lain (yaitu cerdas: spiritual, emosional, intelektual, dan fisik). Selain itu, dengan sistem PTTJ yang terpadu, lulusan akan memiliki karakter dengan nilai keindonesiaan yang tinggi (religius, sadar hak asasi manusia, cinta tanah air, berjiwa demokratis, dan menjunjung tinggi asas kebersamaan).

Apakah dengan tatanan dasar pengelolaan dan model penyelenggaraan seperti yang diuraikan tersebut sudah memiliki dasar keyakinan kita akan menghasilkan keluaran yang berkualitas? Jawaban terhadap pertanyaan reflektif di atas akan lebih mengena dan berdasar jika sejumlah asumsi dapat dipenuhi. Asumsi- asumsi dimaksud memang mutlak ada dan saling menopang satu dengan yang lain agar tidak ada keraguan bahwa keluaran sistem PTTJ tidak dapat disetarakan dengan sistem tatap muka (klasikal). Untuk sederhananya, diperlukan sejumlah unsur lain, agar secara sistem, PTTJ saling menopang dan menguatkan dalam mendukung upaya pengembangan dan peningkatan modal insani Indonesia.

EKOSISTEM PTTJ UNTUK INDONESIA EMAS

Dalam satu-dua dasawarsa terakhir, kecenderungan pemanfaatansistem PTTJ semakin menggejala. Pada konferensi *International Council for Open and Distance Education (ICDE)*

di Dublin pada tahun 2019 misalnya, sudah dinyatakan bahwa sistem pendidikan jarak jauh sudah disebut sebagai *the new normal*. Sistem PTTJ juga sudah bertransformasi dari satu model ke model lainnya. Seiring berjalannya waktu, sistem PTTJ senantiasa semakin canggih dan semakin mudah serta semakin terbuka secara akses dilihat dari sisi pengguna layanan. Kemudahan akses antara lain menurunnya kendala dari sisi penyelenggara dan pengguna. Dalam perjalanannya, telah terjadi pergeseran generasi sistem pendidikan jarak jauh dari waktu ke waktu. Saat ini, sistem PTTJ sudah berada dalam Generasi Kelima, yang disebut dengan “The Intelligent Flexible Learning Model.” Model-model generasi sebelumnya secara berturut-turut adalah: (1) *Correspondence Model*, (2) *Multimedia Model*, (3) *Telelearning Model*, (4) *Flexible Learning Model*. Karakteristik dari Model Generasi Kelima ini dianggap sudah menjawab keurgan keluaran sistem PTTJ.

Dalam sistem PTTJ penguasaan terhadap kompetensi tetap menjadi prioritas. Apalagi sejak gencarnya pengenalan istilah merdeka belajar dan kampus merdeka di penghujung 2019 lalu. Kompetensi, termasuk dalam kaitannya dengan daya tahan bangsa, tergantung dari apa dan bagaimana semua disiapkan, mulai dari materi dan model pembelajaran sampai dengan moda sistem pendidikan, dalam hal ini termasuk sistem PTTJ yang dianut.

Kompetensi dalam konteks keluaran dari sistem PTTJ tentu saja mempertimbangkan keterampilan apa yang dituntut di abad 21 dan ke depan. Pengembangan dan penyediaan materi melalui sistem PTTJ juga mengacu ke tuntutan keterampilan abad 21. Dan, semua harus disediakan dalam beragam jenis (program akademik, vokasional, dan penguatan kecakapan hidup) seperti inspirasi yang dimuat dalam video Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem A. Makarim tentang Kampus Merdeka (29 Januari 2020).

Moda untuk menyampaikan, meski melalui sistem PTTJ, bukan hanya dalam bentuk daring (online) saja tetapi juga dalam bentuk bauran. Untuk sistem bauran dalam sistem PTTJ harus dilakukan dimana dianggap perlu. Artinya, dalam sistem PTTJ yang dianut dan diejawantahkan melalui Universitas Terbuka tidak semua disampaikan melalui sistem daring secara penuh. Ada juga bagian layanan yang disiapkan serta diselenggarakan secara luring.

Dari segi model, mengacu ke sistem pembelajaran terbuka (SUAKA), misalnya disiapkan dan disampaikan dalam bentuk *massive open online courses* (MOOCs) dan/atau *open educational resources* (OER). Bersamaan dengan keberadaan MOOCs dan OER, dari sisi efektivitas, sistem PTTJ juga bernas jika disiapkan sesuai kaidah pembelajaran agar menunjang capaian kinerja akademik. Tujuannya, untuk memastikan persistensi dan loyalitas mahasiswa karena didukung kualitas produk (bahan ajar, bantuan belajar, dan evaluasi), dan manajemen sumber daya manusia dilihat dari sisi institusional. Hal ini penting ditilik mengingat kondisi abad ini yang ditandai dengan VUCA (*volatile, uncertain, complex, dan ambigue*). Dalam situasi seperti ini, yang pasti adalah ketidakpastian. Oleh sebab itu, kita, Universitas Terbuka dalam sistem PTTJ, harus mampu mencermati kondisi saat ini dengan cara pandang yang berbeda (Catatan: *if nothing is certain, everything is then possible*).

Kilas balik perjalanan Universitas Terbuka dalam konteks sistem PTTJ dapat dipartisi dan dilihat dari periodisasi waktu secara kronologis. Periode 1984-1992, Universitas Terbuka misalnya, masuk pada fase pendirian. Periode 1992-2000 ada dalam fase pengembangan. Periode 2001-2009 ada dalam fase pematangan. Periode 2009-2017 masuk dalam fase rekonsolidasi, karena pergeseran dan perubahan lingkungan

strategis. Dan, periode 2017-2025 merupakan fase Universitas Terbuka untuk berkibar.

Agar di fase ini sistem PTTJ sungguh berkibar, VUCA yang awalnya singkatan dari *volatile, uncertain, complex, dan ambiguous* mutlak ditransformasikan menjadi *vision, understanding, clarity, dan agility*. Di fase ini, secara teoretis-filosofis dan kelembagaan, keluaran sistem PTTJ bergeser dari *better, newer, cheaper, simpler, dan faster* ditransformasi menjadi *faster, simpler, cheaper, newer, dan better*; dibalik orientasi dan acuannya. Terjadi pergeseran mendasar. Kecepatan menjadi penting karena yang lamban akan dimangsa yang cepat (Inspirasi dari tayangan video Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem A. Makarim tentang Merdeka Belajar di penghujung 2019).

Titik keberangkatan akibat revolusi industri 4, tatanan di berbagai sendi kehidupan berubah sehingga seperti tidak berpola. Bahkan, pergeseran paradigma terjadi secara cepat dan frontal. Bentuk seperti ini tidak pernah dibayangkan sebelumnya, termasuk dalam konteks PTTJ. Terjadi banyak pergeseran, perubahan, atau turbulensi yang dahsyat, cepat, dan masif. Suasana bisnis, industri, perdagangan, dan ekonomi serta sisi lain bersifat interaktif yang melanda dunia berubah cepat. Fenomena ini berimbas juga ke dunia pendidikan, termasuk institusi pendidikan, yakni perguruan tinggi. Universitas Terbuka pun ikut di dalamnya sehingga penyesuaian diri karena faktor eksternal mutlak dan segera.

ISU KRITIS DAN UNIVERSITAS TERBUKA

Masuk ke abad 21 (utamanya pasca 2010), turbulensi semakin meningkat, melebar, dan mendalam. Apalagi menjelang 2025, tingkat ketidakpastian malah sudah pasti. Menilik lingkungan eksternal menjelang 2025, keadaan di banyak sendi kehidupan

memunculkan beragam ketidakpastian. Para futuris, pegiat di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri sering menyebut bahwa tahun 2020-an merupakan era dimana ketidakpastian menjadi kepastian, bahkan fenomena *chaotic* menjadi realita keseharian. Dalam kondisi ini, dinamika perubahan menjadi keseharian, tidak mudah menduga apa yang akan terjadi di depan. Kata kunci mengadopsi tubulensi akhirnya ditentukan kemampuan mengelola mimpi. Mimpi? Ya, mimpi ketika bangun; bukan bermimpi di saat tidur. Jawaban keluar dari pusaran ketidakpastian: inovasi dan kreativitas! Imajinasi menjadi penting. Artinya, modal insani Indonesia jadi jauh lebih memegang peran penting.

Sampai di tahap ini, paling tidak terdapat tiga isu kritis menonjol ketika membahas sistem PTTJJ dikaitkan dengan Universitas Terbuka dengan tagline: *making higher education open to all*. Apalagi dikaitkan dengan amanah Universitas Terbuka sebagai salah satu komponen yang dapat dan mampu berkontribusi mengembangkan modal insani Indonesia yang mumpuni. Dalam batas tertentu, isu kritis dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam aspek: (1) kualitas akademik, (2) tata kelola, dan (3) daya jangkau.

Dalam tataran akademis, unsur menonjol meliputi kualitas produk (produk akademik dan lulusan), riset dan pengabdiaan masyarakat, diversifikasi layanan/produk, bantuan belajar, dan sistem evaluasi. Di bidang tata kelola, unsur menonjol meliputi kebijakan terkait fleksibilitas organisasional, pengembangan sumber daya manusia, budaya organisasi, organisasi dan tata kerja, dan sistem jaminan kualitas. Dalam cakupan daya jangkau, unsur menonjol meliputi perluasan akses, pengakuan masyarakat, jaringan kemitraan, penguatan citra, dan partisipasi masyarakat.

Guna menjamin efektivitas mengadopsi ketiga isu kritis tersebut, tuntutan *end-users* (pengguna keluaran) dan *second end-users* (mahasiswa/lulusan) penting disimak. Tuntutan dari *end-users* dan *second end-users* akan terkendali baik jika model bisnis Universitas Terbuka tidak saling asing dengan kementerian/lembaga terkait dan lembaga pendidikan, baik di tingkat Nasional apa lagi di tingkat Global.

Mengapa? Secara konseptual dan empiris, sistem PTTJJ hanya optimal mengelola semua sumber daya yang ada jika bersinergi secara integratif. Kemitraan simbiosis mutualisme menjadi keharusan. Simbiosis dalam konteks ini dimaksudkan semata untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien dengan tingkat kinerja dan produktivitas berkualitas tinggi

Untuk itu, Universitas Terbuka wajib mempertimbangkan ekosistem secara terpadu sedemikian rupa sehingga mampu memiliki program berkualitas, ekspertis mumpuni, jaringan menyatu-selaraskan, dan fasilitas lengkap-memadai. Ini penting diupayakan agar sistem PTTJJ tidak mengingkari prinsip dasar menghasilkan keluaran yang cerdas dan berkarakter. Muatan keunggulan di luar STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics*) sebagaimana yang dituntut dalam PISA tetap perlu diintegrasikan agar memenuhi tuntutan bercirikan karakter keindonesiaan. Muatan utama yang harus diintegrasikan terkait dengan bidang seni, budaya, dan utamanya kental dengan unsur kerohanian sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan yang utuh.

Ekosistem seperti ini, yang terus menerus ditingkatkan dan dilengkapi, menuntut Universitas Terbuka senantiasa melakukan reposisi dalam kancah sistem pendidikan tinggi Indonesia. Reposisi Universitas Terbuka dengan tetap dalam kerangka sistem PTTJJ secara berkala dan berkesinambungan

harus dilakukan dengan tujuan memastikan pembangunan dan pengembangan modal insani Indonesia menyongsong 2045 berada dalam jalur yang pas.

Secara teknis, reorientasi organisasional juga menjadi keharusan untuk terus dilakukan mengingat kompetensi yang harus dimiliki modal insani Indonesia sebagai generasi emas menyongsong 100 tahun NKRI selalu mendapat distorsi. Pada titik ini, Universitas Terbuka harus masuk dalam bingkai *shared economy*, memiliki otonomi cukup sehingga dapat menggali sumber pendapatan memadai secara mandiri melalui program berkualitas yang dibutuhkan pembangunan untuk berperanserta mewujudkan *knowledge-based society*. Semua ini untuk membangun modal insani yang mumpuni melalui sistem PTTJ yang sudah dan akan terus berjalan melalui Universitas Terbuka.

TEROBOSAN

Apa fokus dan prioritas Universitas Terbuka agar mampu mengemban amanah dimaksud dalam rangka membangun modal insani untuk Indonesia maju? Tiga hal mendasar perlu menjadi fokus agar model penyelenggaraan UT optimal menunjang penyiapan modal insani menuju Indonesia Maju dengan tetap memegang teguh sistem PTTJ secara kontekstual.

1. Optimalisasi ekosistem PTTJ mutlak dilakukan secara terus menerus. Tujuannya untuk memelihara dan mengutamakan fokus perhatian ke serangkaian orientasi baru dan memetik manfaat dari inovasi dan kreasi melalui keberadaan: (i) *super apps*, (ii) *internet of thing*, (iii) *artificial intelligence*, (iv) *machine learning*, dan (v) *data science* (*big data* dan *data technology*)

2. Fokus manajerial dalam bingkai kepemimpinan menjadi prioritas Universitas Terbuka dengan secara terus menerus memantaskan diri sesuai kaidah manajemen modern. Caranya? Keluar dari rutinisme yang mengacu pada pola pikir *self-sufficient*. Orientasi ini dieliminasi dengan langkah *get rid of the box*. Lalu, palingkan pandangan dan memetik manfaat dengan pendekatan dan penahapan sistematis sebagai berikut, melakukan: (i) mobilisasi, (ii) partisipasi, (iii) kontribusi, (iv) kolaborasi, dan (v) orkestrasi.
3. Orientasi melakukan terobosan berdasarkan kedua fokus dan prioritas di atas mewajibkan kita berselancar *within the new wave*. Yakni, Digital WOT (*way of thinking*) dan Digital WOW (*way of working*). Digital WOT dan Digital WOW merupakan pola pikir dan cara kerja dengan pendekatan revolusioner menghasilkan keluaran dengan tingkat produktivitas eksponensial dengan penjaminan kualitas berkelanjutan sesuai standar dalam sistem PTTJJ.

PENUTUP

Memperhatikan uraian sebelumnya, dapat digaribawahi bahwa Universitas Terbuka dalam bingkai sistem PTTJJ mendapat *new niche*. Hal ini sejalan dengan penyesuaian visi Universitas Terbuka menjadi institusi PTTJJ berkualitas dunia dengan *tagline: making higher education open to all* dengan keunikan menembus kendala ruang dan waktu. Artinya, bersama seluruh pemangku kepentingan secara simbiosis mutualime, Universitas Terbuka adalah pilar strategis membangun dan mengembangkan modal insani Indonesia sesuai dan bersenyawa dengan tuntutan peradaban.

Memastikan keberhasilan UT dan semua pemangku kepentingan berkontribusi mengembangkan modal insani Indonesia melalui sistem PTTJJ akan terasa baiknya jika memperhatikan wejangan Presiden Joko Widodo pada Rapat

Koordinasi Nasional, Integrasi Riset dan Inovasi, 30 Januari 2020. Presiden menantang dunia riset, sekaligus mendorong kegiatan riset tidak sekedar membuat laporan. Riset harus solutif dan aplikatif agar mampu menyelesaikan persoalan bangsa agar bangsa yang besar ini selamat berselancar di abad 21 (Kompas, 31 Januari 2020).

Akhirnya, UT juga harus selalu membuat terobosan berbasis riset untuk memastikan sistem PTTJ yang sudah dianut dan dijalankan sampai dengan sejauh ini (menjelang 36 tahun) tetap eksis. Tetap eksis berkontribusi membangun Indonesia dengan sistem yang juga selalu adaptif terhadap setiap guncangan. Sejauh ini, tatanan dasar sistem PTTJ sebagaimana diuraikan sebelumnya, masih dianggap relevan dan positif sebagai upaya menghasilkan lulusan yang berkarakter dan memiliki daya saing global.

Upaya dan kontribusi UT yang sejak awal didirikan sampai dengan memasuki usia ke-36 pada 4 September 2020 merupakan ikhtiar tanpa henti membuka akses layanan pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan insan Indonesia dimanapun berada. Sesuai dengan apa yang telah dijalankan dan sebagaimana dicapai per saat ini, merupakan upaya berkelanjutan melakukan **demokratisasi pendidikan** melalui pendekatan **pendidikan terbuka**. Dalam konteks ini, UT yang menggunakan sistem PTTJ merupakan langkah nyata dan tepat menunjang pembangunan dan pengembangan modal insani kita sesuai kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman dan peradaban.

Upaya dan pendekatan pendidikan terbuka dalam bingkai demokratisasi pendidikan hendak menggenapi satu dari empat tujuan luhur kita dalam berbangsa dan bernegara: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa!

REFERENSI

- Baskoro, H. (2019). *Beban kebudayaan di bahu Nadiem*. Kompas, 20 Desember 2019.
- Belawati, T. (2019a). *Pembelajaran online dan pendidikan karakter*. Makalah sebagai Pembicara Kunci pada Seminar Nasional Wisuda Universitas Terbuka. UTCC, April 2019.
- Belawati, T. (2019b). *Pembelajaran Online*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Bennett, N. and Lemoine, G.J. (2014). What VUCA Really Means for You. *Harvard Business Review*, January-February 2014 Issue.
- Darojat, O. (2020). *Arah dan kebijakan Universitas Terbuka 2020*. Kertas Kerja dalam bentuk Pengarahan disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen Akademik 2020. UTCC, Tangerang Selatan, 27-31 Januari 2020.
- Giles, S. (2018). How VUCA is reshaping the business environment, and what it means for innovation. *Forbes*, May 9, 2018.
- Irianto, S. (2019). *Pendidikan tinggi tersenyembunyi*. Kompas, 23 November 2019.
- Kalla, M.J. (2019). *Pendidikan dan PISA*. Kompas, 20 Desember 2019.
- Kompas. (2019). *Fokus Indonesia pada 2020-2024: Pembangunan SDM*. 8 Desember 2019.
- Nagy, J., Olah, J., Erdei, E. Mate, D. dan Popp, J. (2018). The role and impact of industry 4.0 and the IOT on business strategy of the value chain: the case of Hungary. *Sustainability*, 10 (3491), 1-25. DOI:10.3390/su10103491 - www.mdpi.com/journal/sustainability
- Sembiring, M.G. (2017c). *Peningkatan kewibawaan akademik: Pilar dan orientasi menuju PTJJ berkualitas*. Kertas Kerja, disajikan pada Acara Pemilihan Bakal Calon Wakil Rektor bidang Akademik Universitas Terbuka 2017-2021, di depan Sidang Senat Universitas Terbuka, 16 Agustus 2017.

- Sembiring, M.G. (2017). An explanatory inquiry on service quality and satisfaction: Motivation, retention, persistence, and expectation. In Singh, D and Makhanya, M., in *Essay in Online Education: a Global Perspectives*, World Conference on Online Learning, ICDE 2017. Pretoria, South Africa: UNISA Press.
- Sembiring, M.G. (2019). *Cyber University untuk negeri*. Paper disajikan pada Seminar Nasional Upacara Penyerahan Ijasah, UPBJJ-UT Makassar, 10 April 2019.
- Sembiring, M.G. (2020). *Improviasi Ekosistem PTTJJ: Membangun Generasi Emas Indonesia*. Naskah Orasi Ilmiah (*in Press*).
- Taylor, J.C. (2001). *Fifth Generation Distance Education*. Higher Education Series, Report No. 40, June 2001. Australia: University of Southern Queensland. Tersedia di <http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/media/readings/taylor01.pdf> (Diakses 31 Januari 2020).
- Universitas Terbuka. (2017). *Rencana Strategi Bisnis Universitas Terbuka 2017-2020*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. (2018). *Laporan Kerja Tahunan Rektor 2017*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. (2019). *Laporan Kerja Tahunan Rektor 2018*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Wahyudi, M.Z. (2019). *Jelang puncak bonus demografi*. Kompas, 20 Desember 2019.
- Winata, A. (2020). *Kebijakan operasional program TIK dan kemahasiswaan*. Materi Presentasi pada Rapat Tinjauan Manajemen Akademik 2020. UTCC, 27-31 Januari 2020.
- Yunus, M. (2020). *Arah dan fokus kebijakan Universitas Terbuka 2020-2021: Mengokohkan jati diri layanan pendidikan di tengah 'badai' perubahan*. Materi Presentasi pada Rapat Tinjauan Manajemen Akademik 2020. UTCC, 27-31 Januari 2020.

5

PENDIDIKAN
TERBUKA DAN
KEADILAN
EKONOMI

Prof. Tian Belawati, Ph.D.

TINJAUAN EKONOMI PENDIDIKAN TERBUKA JARAK JAUH

Tinjauan aspek ekonomi pada bidang pendidikan selalu menarik karena terkait langsung dengan isu efektifitas biaya. Hal ini bukan saja karena akan membantu pengambil keputusan untuk memilih sistem dan strategi alternatif untuk pendidikan, tetapi dalam beberapa kasus, ini juga merupakan alat untuk mengukur akuntabilitas keputusan politik. Di negara-negara seperti Indonesia, keputusan untuk mengadopsi sistem pendidikan jarak jauh (SPJJ) sangat politis karena merupakan jawaban untuk memecahkan masalah sosial tentang kesetaraan akses warga negara Indonesia pada pendidikan berkualitas tinggi.

Secara umum, aspek ekonomi pendidikan sebagai suatu kajian baru mulai berkembang di awal tahun 1960an (Rumble, 2004). Awalnya, fokus kajian ekonomi pendidikan bertujuan untuk mengkuantifikasi manfaat ekonomi dari investasi individual dan negara dalam pendidikan, serta untuk melihat efisiensi penggunaan dana masyarakat. Artinya, pada tatanan makro, isu ekonomi pendidikan selalu dikaitkan dengan seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh dari pembiayaan

pendidikan tersebut. Hal ini terkait dengan teori Human Capital yang mengukur pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang digunakan untuk menghasilkan berbagai produk, layanan, dan ide di pasaran (OECD, 2007), serta mempengaruhi kapasitas dan potensi dirinya untuk produktif dan mendapatkan penghasilan (Pettinger, 2019). Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas biaya pendidikan jarak jauh pada awalnya selalu dalam konteks perbandingan dengan biaya pendidikan konvensional yang tatap muka. Pertanyaan utama pada umumnya berkaitan dengan pertanyaan ‘benarkah sistem pendidikan jarak jauh lebih murah?’ (Perraton dalam Rumble, 2004)

Seiring dengan peningkatan pemanfaatan teknologi (selain teknologi cetak), isu ekonomi pada pendidikan jarak jauh kemudian berkembang kearah kajian yang membandingkan efektivitas-biaya alternatif media yang digunakan. Hal ini secara khusus dipicu oleh *The British Open University* yang sejak awal didirikan di akhir 1960 menggunakan media siaran televisi yang memiliki biaya *overhead* yang sangat tinggi. Banyak riset dan kajian kebijakan yang kemudian mencoba membandingkan efektivitas biaya penggunaan media dan teknologi satu dengan lainnya.

Pada akhirnya, kajian efektivitas biaya pendidikan jarak jauh menjadi sangat kompleks karena dinamika perkembangan praktik penyelenggaraan dan teknologi yang digunakannya. Demikian pula, skema penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pun menjadi sangat beragam dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi yang merevolusi pendidikan jarak jauh secara signifikan. Seperti digambarkan oleh Bates (2019), spektrum penyelenggaraan pendidikan telah menjadi suatu *continuum* dari mulai yang sepenuhnya sistem tatap muka hingga yang sepenuhnya diselenggarakan secara *online*.

Pada penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pun, skema penyelenggaraan sangat bervariasi mulai dari yang masih sepenuhnya berbasis bahan ajar tercetak dengan bantuan tutorial tatap muka (semacam *blended*) dengan kadar yang juga berbeda-beda, hingga yang sepenuhnya *online*. Oleh karena itu, kajian ekonomi sistem pendidikan jarak jauh menjadi lebih kontekstual dan tidak lagi *concern* dengan memperbandingkan antara pendidikan tatap muka dan jarak jauh maupun antara media yang digunakan. Tujuan analisis biaya manfaat lebih ditekankan kepada analisis untuk upaya efisiensi dalam penyelenggaraan.

EFEKTIVITAS BIAYA SPJJ VS SISTEM PENDIDIKAN TATAP MUKA

Biaya pendidikan biasanya diukur dalam satuan biaya total per tahun per peserta didik, biaya per jam belajar (baca: *learning*), atau biaya per lulusan. Perhitungan biaya total meliputi biaya tetap dan biaya variabel yang dipengaruhi oleh jumlah peserta didik. Oleh karena itu, banyak negara mengadopsi sistem pendidikan jarak jauh dengan asumsi bahwa sistem ini akan dapat menampung peserta didik dalam jumlah yang besar sehingga biaya per peserta didik menjadi rendah atau lebih rendah dari biaya pendidikan sistem tatap muka yang kapasitas daya tampungnya lebih terbatas. Keputusan adopsi sistem pendidikan jarak jauh dengan alasan biaya ini juga berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk suatu negara yang harus diberi layanan pendidikan. Sehingga, alasan suatu negara mengadopsi sistem pendidikan jarak jauh pada umumnya adalah untuk meningkatkan akses warga negaranya pada layanan sistem pendidikan yang mereka sediakan, dan tentu dengan biaya per peserta didik yang lebih terjangkau.

Ada beberapa pendekatan yang sering digunakan untuk melakukan analisis biaya program pendidikan. Tsang (1988)

misalnya, mengelompokkan biaya menjadi biaya pribadi (*household costs*) dan biaya institusional (*institutional costs*). Biaya pribadi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik yang biasanya dapat dibagi lagi menjadi biaya pribadi langsung dan tidak langsung. Biaya pribadi langsung adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan siswa, sedangkan biaya pribadi tidak langsung adalah biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan tetapi merupakan kerugian/kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Biaya institusional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara program PJJ yang biasanya dibagi menjadi biaya tetap dan variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada jumlah peserta didik (seperti gaji dan upah, pemeliharaan, dsb.). Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada jumlah peserta didik (seperti biaya produksi bahan belajar, dsb.). Dari komponen biaya ini saja sudah dapat dilihat bahwa penghitungan besaran biaya pendidikan sangat kompleks dan tergantung pada berbagai faktor. Oleh karena itu, upaya membandingkan biaya dua sistem pendidikan yang berbeda (jarak jauh dan tatap muka) harus dilakukan dengan cermat agar konteks menjadi *comparable*, dan hasilnya harus dibaca dengan cermat pula agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan dan kebijakan.

Walaupun demikian, banyak studi yang melakukan analisis biaya dan membandingkan biaya pendidikan jarak jauh dan tatap muka. Seperti dikutip Rumble (2004), studi-studi yang dilakukan oleh Garrison tahun 1993, Wagner tahun 1972 dan 1977, dan Reddy pada 1993, menemukan bahwa pendidikan jarak jauh memang memiliki efektivitas-biaya yang tinggi karena memiliki skala operasi yang cukup besar dan mencapai tingkat *economy of scale*. Secara umum, Daniel (1996), Jung & Rha (2000), Perraton (dalam Rumble, 2004), dan Belawati (2006) menyimpulkan bahwa:

- sistem pendidikan jarak jauh seperti yang diterapkan oleh *mega universities* (berdasarkan 11 universitas terbuka di berbagai negara yang memiliki jumlah mahasiswa diatas 100 ribu orang) terbukti dapat meningkatkan kapasitas universitas secara dramatis dengan biaya yang jauh lebih rendah;
- secara umum literatur menunjukkan bahwa sistem pendidikan jarak jauh lebih efisien (efektivitas biaya lebih tinggi) dibandingkan dengan sistem pendidikan tatap muka;
- sistem pendidikan jarak jauh tampaknya memang lebih menarik dari aspek ekonomi dibandingkan dengan sistem pendidikan konvensional yang tatap muka; dan
- sistem pendidikan jarak jauh dapat menjadi lebih efisien jika sudah mencapai *economy of scale* (jumlah peserta didik yang cukup besar).

Sebagai ilustrasi, Daniel (1996, 1998) menyebutkan bahwa biaya rata-rata per mahasiswa per tahun di 11 *mega-universities* (dihitung dari anggaran keseluruhan kesebelas universitas tersebut dibagi dengan 2,8 juta mahasiswa yang dilayani oleh kesebelas universitas tersebut) adalah USD350. Biaya ini jauh lebih kecil (2,8%) dari biaya rata-rata per mahasiswa per tahun 3,500 universitas di Amerika yang hanya melayani 14 juta mahasiswa sebesar USD12,500, dan lebih kecil (3,5%) dari biaya rata-rata per mahasiswa per tahun 182 universitas di Inggris yang hanya melayani 1,6 juta mahasiswa sebesar USD10,000. Walaupun perbandingan biaya ini sangat kasar karena hanya menggabungkan besaran anggaran dibagi dengan jumlah total mahasiswa, serta tidak mempertimbangkan berbagai perbedaan konteks dan desain pembelajaran yang dilakukan, namun data ini dapat menginspirasi banyak negara untuk melihat potensi sistem pendidikan jarak jauh sebagai strategi pemberian layanan pendidikan kepada warganegaranya secara lebih efisien.

Di Indonesia, jika kita ingin membandingkan secara sederhana sebagaimana dilakukan Daniel (1996), maka kita dapat melihat bahwa berdasarkan data anggaran dan jumlah mahasiswa total UT tahun 2018 (Universitas Terbuka, 2019), biaya rata-rata per mahasiswa per tahun di Universitas Terbuka (UT) yang sekitar 4,3 juta juga jauh lebih rendah jika dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan universitas tatap muka seperti, misalnya, Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Riau (UNRI). Di UI, biaya rata-rata per mahasiswa di tahun 2018 adalah sekitar 61,4 juta¹. Di UGM, walaupun lebih rendah dari UI, biaya rata-rata per mahasiswa pada tahun 2018 juga jauh lebih tinggi dari UT yaitu sekitar 34,3 juta per mahasiswa². Dan di UNRI, biaya rata-rata per mahasiswa pada tahun 2018 tercatat lebih rendah lagi dari UGM yaitu sekitar 14,2 juta³. Dari perbandingan dengan ketiga universitas tatap muka ini, biaya pendidikan di UT hanya 7% dari biaya rata-rata UI, 12,5% dari UGM, 30% dari UNRI, atau tidak sampai 12% dari biaya di ketiga universitas tersebut secara rata-rata. Perbandingan biaya ini tidak terlalu jauh berubah dari tahun 2006 dimana ditemukan bahwa biaya rata-rata UT per mahasiswa berkisar antara 9-25% dari biaya rata-rata per mahasiswa universitas tatap muka (Belawati, 2006).

Memang besaran biaya UI, UGM, dan UNRI ini harus dibaca dengan lebih cermat karena didalamnya termasuk biaya untuk melayani mahasiswa pada fakultas-fakultas yang sarat dengan praktik dan praktikum yang cukup mahal seperti pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik yang tidak diselenggarakan

-
- 1 Dihitung dari total rencana pengeluaran yang dianggarkan untuk tahun 2018 (Universitas Indonesia, 2018) dibagi dengan jumlah total mahasiswa yang dilayani UI pada tahun yang sama (Pangkalan Data PT, Kemenristekdikti).
 - 2 Dihitung dari total rencana pengeluaran yang dianggarkan untuk tahun 2018 (Universitas Gajah Mada, 2017) dibagi dengan jumlah total mahasiswa yang dilayani UGM pada tahun yang sama (Pangkalan Data PT, Kemenristekdikti).
 - 3 Dihitung dari total realisasi pengeluaran tahun 2018 (Universitas Riau, 2018) dibagi dengan jumlah total mahasiswa yang dilayani UNRI pada tahun yang sama (Pangkalan Data PT, Kemenristekdikti).

oleh UT. Namun demikian, walaupun bersifat agregat dan kasar, perbandingan biaya rata-rata mahasiswa per tahun antara UT yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh dengan UI, UGM, dan UNRI yang menggunakan sistem pendidikan tatap muka dengan rasio dosen:mahasiswa sekitar 1:20 dapat memberikan gambaran kebutuhan pembiayaan yang cukup berbeda.

Penghitungan biaya dalam contoh Daniel maupun Indonesia memang hanya berdasarkan biaya institusional dan belum memperhitungkan biaya personal (termasuk *opportunity cost*) yang ditanggung mahasiswa. Namun demikian, secara logika mahasiswa pada sistem pendidikan jarak jauh tentu tidak harus menanggung biaya akomodasi (kost, dsb.) dan transportasi seperti yang harus ditanggung oleh mahasiswa yang berkuliah di kampus. *Opportunity cost* yang ditanggung mahasiswa sistem pendidikan jarak jauh bisa lebih besar karena umumnya mereka sudah bekerja, namun demikian mahasiswa umumnya tetap bekerja sambil kuliah sehingga secara logika seharusnya tidak mengurangi penghasilan utama mereka secara signifikan.

Walaupun banyak studi yang mengindikasikan bahwa sistem pendidikan jarak jauh lebih efisien dalam hal biaya, UNESCO (2002) menekankan bahwa kekuatan pendidikan jarak jauh bukan pada efisiensi biaya yang diperlukan tetapi pada kemampuannya membuka akses pendidikan kepada masyarakat yang ditargetkan.

EFEKTIVITAS BIAYA MEDIA DALAM SPJJ

Seiring dengan perkembangan pemanfaatan teknologi, arah analisis biaya manfaat juga berkembang ke arah pencarian teknologi yang paling efektif namun efisien. Seperti disebutkan, isu efektivitas-biaya penggunaan media tertentu

dalam sistem pendidikan jarak jauh mulai menjadi perhatian setelah *The Open University* di Inggris menggunakan media siaran televisi menjadi media utama pembelajarannya. Biaya investasi pemanfaatan teknologi siaran saat itu sangat tinggi sehingga banyak yang kemudian mempertanyakan apakah efektivitas penggunaan siaran televisi terhadap pembelajaran sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Konsep analisis efektivitas-biaya (*cost-effectiveness analysis* atau CEA) dianggap lebih sesuai dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas program pendidikan, termasuk program PJJ, karena dalam CEA, manfaat tidak perlu diterjemahkan kedalam nilai uang, dan dirancang untuk membandingkan biaya dan manfaat dari dua atau lebih alternatif program yang bertujuan serupa (Levin & McEwan, 2003; McEwan, 2012).

Bates (2019) menyebutkan bahwa pemilihan media untuk pendidikan harus memperhatikan faktor SECTIONS, yaitu: (1) *Student* – siapa, bagaimana aksesibilitasnya, dan bagaimana cara belajarnya (2) *Ease of Use* – seberapa mudah penggunaannya, (3) *Cost* – berapa biaya pengembangan, penyampaian, dan pemeliharannya, (4) *Teaching functions (pedagogical affordances)* – seberapa baik fungsinya untuk memfasilitasi desain pembelajaran yang akan dilakukan, (5) *Interactions* – seberapa baik fungsinya untuk memfasilitasi interaksi antara peserta didik dengan pengajar, peserta didik dengan konten, dan antar-peserta didik itu sendiri, (6) *Organizational issues* – apa yang harus dilakukan organisasi untuk mendukung penggunaan media tersebut, (6) *Networking* – seberapa baik fungsinya untuk memfasilitasi peserta didik untuk melakukan *networking* dengan sumber belajar di luar lingkungan belajar utamanya (kelas, kampus), dan (7) *Security and Privacy* – seberapa baik fungsinya dalam menjaga keamanan dan privasi peserta didik. Faktor-faktor

ini secara langsung akan mempengaruhi jenis media yang digunakan, dan selanjutnya media yang dipilih juga akan berbeda-beda biayanya tergantung 'kemampuan'nya dalam memenuhi pertimbangan SECTION tersebut.

Sebagai ilustrasi, berdasarkan meta analisis atas beberapa studi sebelumnya, Melmed (1995) menyimpulkan bahwa *computer-based instruction (CBI)* terbukti menjadi katalis untuk meningkatkan hasil belajar dan efektivitas-biaya. Kemudian, suatu studi eksperimen untuk membandingkan efektivitas biaya pelatihan *self-care* pada pasien stoma dengan menggunakan multimedia dan tatap muka yang dilakukan oleh Lo dkk. (2010) juga menunjukkan bahwa penggunaan multimedia menurunkan biaya dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku akan *self-care* dari pasien-pasien stoma. Artinya, efektivitas-biaya pelatihan dengan menggunakan multimedia lebih tinggi dari pelatihan secara tatap muka.

Dalam perkembangan 20 tahun terakhir, perhatian mengenai efektivitas-biaya media ini terutama dikaitkan dengan semakin intensifnya penggunaan media *online*. Dua pertanyaan pokok yang sering didiskusikan, yaitu: (1) apakah pendidikan dengan menggunakan teknologi baru lebih efisien dari pendidikan di dalam kelas, dan (2) apakah pendidikan dengan menggunakan teknologi baru lebih efisien dari penggunaan teknologi generasi sebelumnya (yaitu teknologi cetak, siaran, dan multimedia non-komputer seperti video yang umumnya merupakan medium utama pendidikan jarak jauh sebelum era teknologi informasi dan komunikasi).

Terkait dengan ini, Jung (2003) mereview beberapa studi (termasuk studi Bartolic-Zlomislic & Bates, 1999; Bartolic-Zlomislic & Brett, 1999; Jung & Leem, 2001; Jung, 2003; Whalen

& Wright, 1999) dan menyimpulkan bahwa memang ada keterbatasan metodologi untuk membandingkan efektivitas biaya pendidikan *online* dengan sistem pendidikan lainnya. Walaupun demikian, Jung menyebutkan bahwa secara umum pembelajaran yang dilakukan secara *online* memiliki efektivitas-biaya yang lebih tinggi dari pembelajaran di dalam kelas, dan hal ini utamanya disebabkan oleh lebih besarnya jumlah peserta didik serta lebih rendahnya *opportunity cost* peserta didik dalam pembelajaran *online*. Lebih jauh, Tiffin and Rajasingham (1995 dalam Rumble, 2004) menyatakan bahwa skema pembelajaran kelas maya memungkinkan dilayaninya peserta didik dengan jumlah yang hampir tidak terbatas tanpa biaya tambahan untuk gedung dan pemeliharannya, utilitas (listrik, air), hanya perlu biaya untuk membuat *interface* dimana pengajar dan peserta didik dapat mengakses kelas maya tersebut yang biaya rata-ratanya akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah peserta didik yang memanfaatkannya. Dengan demikian, kelas maya lebih efisien jika peserta didiknya banyak.

PENUTUP

Upaya untuk membandingkan sistem pendidikan jarak jauh dan tatap muka bersifat kompleks. Untuk penghitungan efektivitas-biaya perlu dilakukan dengan terperinci dan cermat. Apalagi jika hasilnya akan digunakan untuk membuat kebijakan, khususnya apabila akan memilih jenis media dan teknologi tertentu. Perbandingan biaya atas manfaat yang diukur yang bersifat agregat memang dapat digunakan sebagai indikasi, namun perlu dibaca secara *cautious* mengingat efektivitas-biaya dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait skala operasi dan jenis teknologi yang digunakan.

Secara lebih spesifik, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pada sistem pendidikan jarak jauh diantaranya adalah:

jumlah peserta didik yang dilayani, jumlah matakuliah yang ditawarkan, masa pakai bahan ajar, frekuensi revisi bahan ajar, teknologi yang digunakan, cara penggunaan teknologi, desain pembelajaran dan desain interaksi, intensitas layanan kepada mahasiswa oleh staf, struktur organisasi, mekanisme kerja, struktur penggajian, serta proporsi staf inti dan staf tambahan yang ada di institusi pendidikan tersebut (Rumble, 2004; Bates, 2019). Walaupun demikian, secara umum hasil-hasil riset menunjukkan secara konsisten bahwa sistem pendidikan jarak jauh tampaknya memang lebih menarik dari aspek ekonomi dibandingkan dengan sistem pendidikan konvensional yang tatap muka (Perraton dalam Rumble, 2014). Dengan kata lain, studi yang mempelajari efektivitas-biaya sistem pendidikan jarak jauh, baik pada tatanan institusi maupun media, menyimpulkan bahwa sistem pendidikan jarak jauh memiliki efektivitas biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pendidikan tatap muka. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan dana masyarakat untuk pendidikan jarak jauh berpotensi memberikan keadilan ekonomi yang lebih tinggi karena layanan/manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih banyak orang.

REFERENSI

- Bates, T. (1995). *Technology, open learning and distance education*. New York: Roulledge.
- Bates, A.W. T. (2019). *Teaching in a digital age. Guidelines for designing teaching and learning*. Diunduh pada 26 Februari 2020 dari <https://teachonline.ca/teaching-in-a-digital-age/teaching-in-a-digital-age-second-edition>.
- Belawati, T. (1997). *The anatomy of Universitas Terbuka's cost structure*. Unpublished article for internal seminar. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Belawati, T. (2006). Financial management system in open and distance learning: An example at Universitas Terbuka. *Educom Asia*, 12(1), September 2006.

- Cellini, S.R., Kee, J.E., Newcomer, K.E., Hatry, H.P., and Wholey, J.S. (2015). Cost-effectiveness and cost-benefit analysis. Dalam K.E. Newcomer, H. P. Hatry, J.S. Wholey, *Handbook of Practical Program Evaluation*. Fourth Edition. New Jersey: Jossey-Bass.
- Jung, I. S. & Rha, I. (2000). Effectiveness and cost-effectiveness of online education: A review of literature. *Education Technology, 40* (4), hal 57-61.
- Jung, I. (2003). *Cost-effectiveness of online education*. Dalam M.G. Moore & W.G. Anderson, *Handbook of Distance Education* (hal 717-726). Mahwah, NY: Erlbaum.
- Levin H.M., McEwan P.J. (2003) Cost-Effectiveness Analysis as an Evaluation Tool. In: Kellaghan T., Stufflebeam D.L. (eds) *International Handbook of Educational Evaluation. Kluwer International Handbooks of Education, Vol 9*. Springer, Dordrecht
- Lo, S., Wang, Y., Wu, L., Hsu, M., Chang, S., & Hayter, M. (2010). A cost-effectiveness analysis of a multimedia learning education program for stoma patients. *Journal of Clinical Nursing, 19*, hal 1844-1854. Dapat dilihat pada <https://www.academia.edu/3204455/>
- McEwan, P. J. (2012). Cost-effectiveness analysis of education and health interventions in developing countries. *Journal of Development Effectiveness, 4*(2), June 2012, hal 189–213.
- Melmed, A. (1995). *The costs and effectiveness of educational technology: Proceedings of a workshop*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Diunduh pada 23 Februari 2020 dari <https://www.academia.edu/27370292/>
- OECD. (2007). *Human capital: How what you know shapes your life*. OECD.
- Peterson, R.D. (1986). The anatomy of cost-effectiveness analysis. *Evaluation Review, 10*(1), pp. 29-44.

- Rumble, Greville (Ed.). (2004). *Papers and Debates on the Economics and Costs of Distance and Online Learning*. Bibliotheks und Informations system der Universität Oldenburg. Di unduh pada 22 Februari 2020 dari <http://citeseerx.ist.psu.edu/>
- Tsang, M.C. (1988). Cost analysis of the cost-effectiveness of CAI and factors associated with its successful implementation in higher education. *AEDS Journal*, 15(1), pp. 10-22.
- UNESCO. (1977). *The economics of new educational media. Educational methods and techniques*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2002). *Open and distance learning: Trends, policy and strategy consideration*. Paris: UNESCO.
- Universitas Gajah Mada. (2017). *Usulan rencana kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2018*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Diunduh pada 24 Februari 2019 dari <https://ugm.ac.id/id/informasi-publik/>
- Universitas Indonesia. (2018). *Rencana kerja dan anggaran 2018*. Direktorat Perencanaan dan Anggaran, Universitas Indonesia. Diunduh pada 24 Februari 2019 dari <https://www.ui.ac.id/download.html/>
- Universitas Riau. (2018). *Laporan keuangan tahun anggaran 2018*. Diunduh pada 24 Februari 2019 dari <https://unri.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/>
- Universitas Terbuka. (2019). *Laporan kerja rektor Universitas Terbuka 2018*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Wagner, L. (1982). *The economics of educational media*. London: The MacMillan Press Ltd.
- Bajracharya, J.R. (2017). Cost-effectiveness analysis of "ICT in education" in developing countries. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 8(1), hal 1546-1562.

Prof. Dr. Ali Muktiyanto

ANGGARAN PUBLIK UNTUK PENDIDIKAN TINGGI

PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan tinggi saat ini sangat pesat. Sejak akhir abad 20, di beberapa negara seperti di AS, Inggris, Australia, dan bahkan Malaysia, pendidikan tinggi menjadi komoditi komersial pada tingkat global, dengan *tuition fees* sangat tinggi bagi mahasiswa internasional, dan sangat rendah bagi mahasiswa lokal. Kondisi di tingkat nasional juga tidak jauh berbeda. Perkembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang semakin kuat dan berperan di Indonesia, dengan biaya kuliah yang relatif lebih mahal dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Semakin besarnya peran dana privat disamping dana publik dalam pendidikan tinggi seringkali menimbulkan paradoks esensi tujuan pendidikan tinggi itu sendiri. Pada satu sisi, peran dana privat pasti melibatkan pertimbangan keuntungan dan efisiensi biaya, dengan implikasi sosial eksklusivisme pendidikan tinggi hanya untuk yang memiliki daya beli. Pada sisi lain, sebagai quasi jasa publik, pendidikan tinggi tidak bisa lepas dari sifat barang/jasa publik, yaitu inklusivisme, ketika

daya beli tidak menjadi pertimbangan utama dan semua orang berhak menikmatinya.

Dalam paradigma baru tentang pendidikan tinggi sebagai quasi jasa publik, peran anggaran publik menjadi penting. Anggaran publik pendidikan dapat menjadi instrumen peningkatan pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing. Alokasi anggaran pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, upaya untuk memenuhi amanat konstitusi, dan upaya penerapan prinsip keadilan dalam kesetaraan atas semua elemen pemangku kepentingan. Prinsip keadilan harus mampu memberikan kepastian terpenuhinya hak-hak sipil atas pendidikan dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang disusun pemerintah berlaku adil bagi setiap orang tanpa mempertimbangkan perbedaan status, etnis, agama, maupun gender (Rosser dan Joshi, 2018).

Permasalahan muncul ketika liberalisasi dan privatisasi pendidikan semakin meluas, pemerolehan pendanaan publik harus melalui kompetisi, dan peran pendanaan privat semakin besar. Hal tersebut sebagai akibat meluasnya praktik *new public management* (NPM) ke seluruh dunia. Ciri utama NPM yang menerapkan praktik bisnis yang baik sektor privat pada sektor publik menuntut adanya *cost effectiveness* dan efisiensi pembiayaan pendidikan tinggi. Hal ini berimplikasi anggaran publik pendidikan secara *mainstream* disalurkan melalui *grant* dan kontrak kerja dalam bentuk *performance budgeting*. Oleh karena itu peran anggaran publik pendidikan tinggi harus dikembalikan sebagai instrumen ekonomi, politik, sosial dan administratif untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan tinggi.

PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI JASA QUASI PUBLIK

UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemerintah diamanahkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (*Pasal 31 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen*). Hal tersebut berarti setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang. Akan tetapi dengan berbagai diskresi yang dimiliki Negara, baru pada pendidikan dasar setiap warga negara wajib mengikuti dan Negara wajib membiayainya, sementara untuk pendidikan tinggi belum diwajibkan.

Hal itulah yang menjadikan pendidikan tinggi tidak dapat serta merta dikategorikan *public goods* namun juga tidak dapat disebut begitu saja sebagai *private goods* hanya karena tidak semua warga negara dapat menemukannya. *Public goods* adalah barang yang bersifat *non-excludable* dan *non-rivalry* dalam mengonsumsinya, sementara *private goods* adalah barang yang bersifat *excludable* dan *rivalry* dalam mengonsumsinya.

Muktiyanto (2016) menyebutkan, pendidikan tinggi bukan merupakan jasa “*nonrival*” karena kapasitas perguruan tinggi tidak sebanding dengan peminatnya. Semua calon mahasiswa bersaing untuk mendapatkan perguruan tinggi yang diidamkan. PTN yang memiliki program *non-excludable* (misalnya yang mendapat mandat menampung mahasiswa dengan beasiswa penuh) bahkan hanya memiliki kapasitas kursi yang sangat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas *excludable*-nya. Hingga sekarang, pemerintah belum mampu membiayai seluruh mahasiswa untuk mengikuti pendidikan tinggi. Sementara itu, di sisi lain tiap institusi PTN tetap harus mampu beroperasi dan menutup seluruh biaya

dan mengumpulkan dana untuk kelangsungan dan kemajuan institusinya. Sekalipun demikian, di belahan dunia manapun, institusi PTN kemudian tetap diselenggarakan dengan sedapat mungkin mengurangi sifat *rivalry* dan *excludable* tersebut antara lain dengan memperbanyak jumlah institusi PTN atau meningkatkan kapasitas PTN (sehingga menjadi *non-rivalry*) atau dengan sedapat mungkin menekan biaya kuliah yang harus ditanggung masyarakat (sehingga menjadi *non-excludable*).

Pada akhirnya negara dihadapkan pada permasalahan *cost effectiveness* dan efisiensi biaya dalam penyelenggaraan pendidikan yang mendorong pemerintah melibatkan sektor swasta dalam penyelenggaraannya. Untuk menarik minat sektor swasta, sekolah-sekolah swasta diperkenankan untuk menerapkan *rivalry* dan *excludable consumption* untuk menjamin efisiensi penyelenggaraannya. Perguruan tinggi swasta “dibolehkan” menarik iuran dari masyarakat dengan harga yang lebih mahal.

Sekali lagi, sesuai amanah undang-undang, setiap orang harus memiliki kesempatan atau akses yang sama terhadap pendidikan tinggi. Satu-satunya faktor yang membuat mereka harus berkompetisi dengan orang lain untuk memperoleh tempat di suatu perguruan tinggi adalah kapasitas intelektual, pribadi dan atau potensi dirinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan tinggi, adalah *public goods* yang harus bersifat *non-excludable*, akan tetapi karena keterbatasan dan hal-hal lain yang memaksa memiliki sifat *rivalry in consumption*, dengan kata lain merupakan quasi jasa publik.

PTN harus menjadi institusi yang menegakkan prinsip *non-excludable* dengan menjamin akses dan menyelenggarakan kompetisi yang sehat hanya dalam hal akademis dan kapasitas pribadi untuk menyeleksi mereka yang ingin menikmati jasanya. Hal inilah yang mencitrakan PTN sebagai institusi yang harus secara ekonomis mampu terjangkau oleh seluruh masyarakat dan memiliki iklim kompetisi akademik yang sehat. Pada PTS, karena syarat berjalannya sektor swasta adalah efisiensi, kemudian mendapat kebebasan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraannya dengan sedapat mungkin mengurangi sifat *non-excludable* tadi. Inilah yang mendasari konsep bahwa PTS “berhak” mengecualikan mereka yang menikmati jasanya melalui faktor-faktor lain di luar faktor akademis, yaitu faktor ekonomi. Inilah sebabnya mengapa SPP atau kontribusi yang ditarik dari masyarakat dalam suatu PTS relatif lebih mahal dibanding PTN. Pada konteks PTN dan PTS itulah, anggaran publik memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan bagi setiap warga negara yang menginginkan pendidikan tinggi (Muktiyanto, 2016).

PROSES PENGANGGARAN PUBLIK

Anggaran adalah rencana keuangan dalam rangka mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada belanja untuk mencapai tujuan. Anggaran adalah pernyataan rencana, prioritas, sasaran, dan tujuan, yang dinyatakan dalam istilah keuangan, untuk periode waktu tertentu (M. Gibson, 2009). Anggaran mengikat dan mendukung rencana strategis organisasi. Dengan demikian, anggaran publik adalah rancangan tindakan komprehensif untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan pemerintah untuk satu tahun mendatang (Khan dan Hildreth, 2002). Anggaran yang merupakan rencana dan dokumen anggaran adalah cerminan dari harapan pemerintah untuk dapat dilakukan di masa mendatang.

Pada dekade terakhir, anggaran menjadi sangat kompleks dan rumit. Kekhawatiran penyusun anggaran tidak hanya persoalan finansial, namun juga adanya keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan; hal ini lebih mengarah kepada sifat anggaran sebagai instrumen kebijakan administratif, sosial, politik, dan ekonomi. Anggaran sebagai instrumen administratif merupakan wujud pelaksanaan sistem administrasi perencanaan nasional yang berkesinambungan, tertib, dan mengikuti prinsip penganggaran yang baik dan benar. Terdiri atas sistem, prosedur, dan dokumen anggaran yang komprehensif. Anggaran sebagai instrumen sosial menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan semenjak perencanaan hingga pengawasannya. Secara sosial, penganggaran harus mampu menyerap dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan melalui partisipasi aktif masyarakat pada pembangunan. Anggaran sebagai instrumen politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangannya sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu sebagai suatu konsensus bersama.

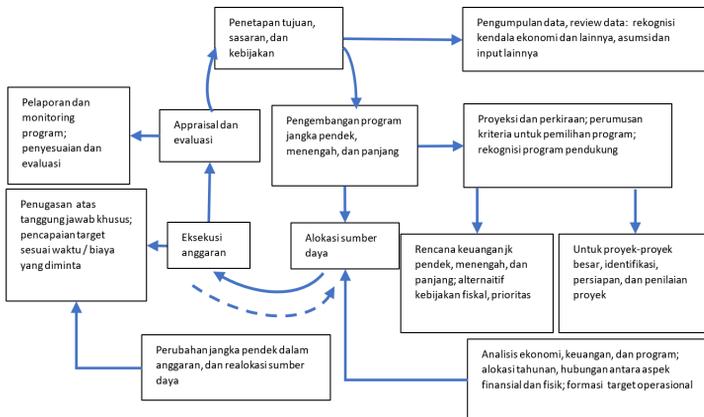
Penganggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi memiliki fungsi yang lebih beragam. Pertama, dalam hal kebijakan, anggaran menunjukkan arah ekonomi dan menyatakan niat mengenai pemanfaatan sumber daya masyarakat. Hal ini mengarah pada penentuan pertumbuhan nasional dan tujuan investasi. Kedua, fungsi utama anggaran adalah untuk menjaga keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian. Penganggaran harus memperhatikan sisi pendapatan, pengeluaran, dan kebijakan moneter. Pendapatan yang tersedia harus dialokasikan untuk memaksimalkan manfaat yang diterima. Ketiga, anggaran menjadi sarana untuk mengurangi ketidaksetaraan. Keempat, anggaran harus diatur

sedemikian rupa sehingga dapat diukur dengan cepat dan berdampak pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Fungsi-fungsi di atas dikonversi menjadi kebijakan yang lebih nyata dalam proses penganggaran. Proses penyusunan anggaran melibatkan seluruh lapisan pemangku kepentingan-anggaran partisipatif (Ipek, 2012). Proses tersebut mengharuskan penyusun anggaran memperkirakan pendapatan dan pengeluaran untuk periode 12 bulan mendatang. Terkadang pendapatan tidak cukup untuk menutupi pengeluaran yang diinginkan, sehingga anggaran perlu diseimbangkan kembali. Menggunakan proses anggaran partisipatif sangat ideal dalam pembuatan anggaran, termasuk untuk pengurangan anggaran, jika diperlukan.

Perlu kehati-hatian dalam menggambarkan proses anggaran. Premchand (1989) menguraikan proses penyusunan anggaran semenjak penetapan tujuan hingga appraisal dan evaluasi anggaran sebagai berikut. *Pertama-tama ada penetapan tujuan* berdasarkan data yang tersedia dan pengakuan terhadap kendala ekonomi, politik, dan administrasi. *Tahap selanjutnya terdiri dari pengembangan rencana dan program untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.* Tahap ini melihat berbagai masalah dan alternatif ke depan. Hal ini melibatkan persiapan proyek dengan pengeluaran yang cukup besar. Pengalaman menunjukkan bahwa rerata, identifikasi, persiapan, dan pemilihan proyek, serta penentuan pembiayaannya, membutuhkan waktu hingga satu dekade. Perumusan rencana pembangunan diikuti oleh penganggaran tahunan atau *alokasi sumber daya*. *Implementasi anggaran* melibatkan pengakuan berkelanjutan atas isu-isu baru dan realokasi sumber daya. *Tahap terakhir adalah penilaian dan evaluasi anggaran* yang diterapkan untuk akuntabilitas dan sebagai umpan balik untuk perumusan tujuan baru. Setiap tahap mengarah ke tahap

berikutnya, memfasilitasi pengambilan keputusan tentang aspek kebijakan, akuntabilitas, dan manajemen anggaran. Secara skematis proses penganggaran publik dapat dilihat pada Gambar 1.

Memiliki perencanaan keuangan yang memandu perguruan tinggi mencapai profitabilitas keuangan sangatlah penting. Tanpa profitabilitas, suatu perguruan tinggi tidak dapat memelihara sustainabilitas yang dibutuhkan untuk fokus pada pembangunan dan pertumbuhan institusi. Sekalipun semua perguruan tinggi harus sadar sebagai bagian dari misi pendidikan nasional, akan tetapi perguruan tinggi juga harus tetap dalam visi bisnis pendidikannya, dengan memanfaatkan sumber dayanya dengan cara yang paling bijaksana. Penganggaran yang cermat memberikan pertumbuhan keuangan yang sehat bagi perguruan tinggi. Pertumbuhan keuangan seperti itu merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pencapaian misi.



Gambar 1. Proses Penganggaran Publik

Sumber: A. Premchand (1989)

PERAN ANGGARAN PUBLIK UNTUK Keadilan Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi sangat terkait dengan perubahan lingkungan ekonomi dan politik tempat ia berada (Muktiyanto, 2016). Seiring dengan globalisasi khususnya ekonomi dan politik, serta mobilitas mahasiswa, terjadi reformasi pendidikan tinggi hampir di seluruh dunia antara lain melalui penerapan NPM. Secara singkat NPM adalah penerapan praktik baik sektor privat pada sektor publik berupa peningkatan *cost-effectiveness*, efisiensi, akuntabilitas, dan anggaran berbasis kinerja (Santosa, 2014).

Akan tetapi reformasi pendidikan tinggi berupa penerapan NPM menjadi rumit karena penurunan dukungan finansial pemerintah. Implikasi lain NPM adalah akomodasi atas liberalisasi pasar yang menguntungkan sektor privat, dengan masuk dalam bisnis pendidikan melalui berbagai inovasi. Melalui liberalisasi pasar, sektor privat agresif mencari ruang kebijakan dan pangsa pasar dengan mendirikan sekolah-sekolah swasta, menggencarkan pendidikan virtual, mengembangkan pendidikan non formal, dan alternatif lainnya untuk mengisi celah akibat menurunnya pendanaan publik. Namun demikian, keadilan dalam pendidikan tinggi harus terus didengungkan agar terpenuhinya hak-hak sipil dalam pendidikan tinggi. Rosser dan Joshi (2018) menyebutkan bahwa hak sipil atas pendidikan adalah akses pendidikan yang memenuhi karakteristik:

- 1) *Universalitas*, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan gender, disabilitas, suku, dan agama;
- 2) *Akses fisik*, bahwa hambatan fisik seperti hambatan geografi, transportasi, dan waktu tidak menghalangi setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan;

- 3) *Biaya pendidikan*, bahwa layanan pendidikan harus terjangkau bagi setiap warga, termasuk warga yang miskin diberikan akses pendidikan gratis;
- 4) *Dapat diterima*, bahwa layanan pendidikan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; dan
- 5) *Kualitas*, bahwa layanan pendidikan memiliki standar minimal yang memenuhi kebutuhan konsumen dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

Pembangunan pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing kepada seluruh lapisan masyarakat agar terpenuhi hak-hak sipil tersebut melalui optimalisasi fungsi penganggaran publik. Alokasi anggaran pendidikan sebagai pelaksanaan penganggaran publik mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara (www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1007). Semenjak 2010 setidaknya pemerintah telah berusaha memenuhi amanah konstitusi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan anggaran pendidikan dan total belanja negara yang disajikan pada Grafik 1.

Perkembangan anggaran pendidikan sejak tahun 2010 hingga saat ini, yang disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dan Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan menampilkan tren yang positif. Angka-angka yang disajikan menunjukkan komitmen dan konsistensi negara dalam meningkatkan kesejahteraan melalui Pendidikan. Pemerintah secara konsisten tiap tahun memenuhi amanah undang-undang berupa 20% anggaran pendidikan dari total anggaran belanja negara. Sementara itu porsi anggaran Kemristekdikti dari total anggaran

pendidikan berada pada kisaran 8,16% sampai dengan 9.97% dari pertumbuhan perbandingan anggaran Kemristekdikti/ Kemdikbud dengan anggaran Pendidikan dapat dilihat pada Grafik 2. berikut.

Anggaran pendidikan tinggi disalurkan kepada perguruan tinggi dan juga kepada mahasiswa melalui berbagai bentuk. Pada PTN sebagian besar anggaran pendidikan tinggi disalurkan melalui Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) yang digunakan untuk menutup biaya operasional rutin PTN. Selain itu, Pemerintah juga menyalurkan beasiswa dalam berbagai ragam seperti beasiswa bidikmisi yang diterimakan langsung ke institusi perguruan tinggi dan mahasiswa. Bidikmisi adalah program bantuan biaya pendidikan yang diberikan Pemerintah kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi melalui perguruan tinggi di bawah Kemdikbud dan Kemenag. Bidikmisi yang merupakan program afirmatif Kemdikbud secara konstitusional dibawah payung hukum Undang-Undang No. 12/2012 yang mewajibkan alokasi anggaran minimal 20 persen untuk penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Legalitas program ini awalnya hanya berupa keputusan menteri lalu naik menjadi PP No. 66/2011 dan akhirnya melalui UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Beasiswa Bidikmisi pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 dengan penerima 18.209 mahasiswa dan hanya berasal dari PTN. Dari tahun ke tahun jumlah penerima bidikmisi terus meningkat, baik dari jumlah mahasiswa maupun perguruan tinggi. Tahun 2011 disalurkan beasiswa kepada 30.000 mahasiswa dari 117 PTN, tahun 2012 disalurkan beasiswa kepada 30.000 mahasiswa dari 261 PTN/PTS, dan 2013 disalurkan beasiswa kepada 149.180 mahasiswa.

Tiga tahun terakhir ini penyaluran beasiswa bidikmisi konsisten menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 telah disalurkan sejumlah 72.800 paket beasiswa, tahun 2019 sejumlah 130.000 paket beasiswa, dan tahun 2020 sejumlah 818.000 paket beasiswa untuk mahasiswa baru dan *on going* melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)-Kuliah dan KIP Kuliah Afirmasi sebagai pengalihan beasiswa bidikmisi yang telah dihapus. Kedua Kartu tersebut juga mencakup dukungan bagi penyandang disabilitas, peserta program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk Orang Asli Papua di wilayah Papua dan Papua Barat, wilayah 3T (terdepan, terluar, atau tertinggal), serta wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial. Melalui Kementerian Keuangan juga disalurkan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), khusus untuk bagi yang akan melanjutkan S2 dan S3 di lebih dari 200 perguruan tinggi terbaik di dunia.

Selain beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, PTS sesuai UU No. 12/2012 mendapat dana pendidikan yang bersumber dari APBN/D sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dalam bentuk antara lain hibah, bantuan program kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain bantuan pendanaan tersebut, PTS dapat memperoleh bantuan tenaga dosen yang diangkat oleh pemerintah.

Sekalipun tidak mencukupi kebutuhan seluruh perguruan tinggi dan mahasiswa (tahun 2019 terdapat 4.649 perguruan tinggi, dan 6.348.842 mahasiswa), namun dari paparan di atas nampak bahwa pemerintah berusaha untuk menciptakan keadilan pendidikan tinggi melalui penganggaran publik. Dengan serangkaian kebijakan anggaran, diharapkan lulusan SMA/ sederajat, lebih khusus yang memiliki keterbatasan ekonomi, fisik, dari daerah 3T, serta terdampak bencana,

sama-sama berkesempatan menempuh pendidikan tinggi. Diharapkan alasan tidak melanjutkan pendidikan tinggi bukan lagi semata pada pendanaan namun memang karena kapasitas diri atau komitmen sosial yang ada pada masing-masing calon mahasiswa. Pemerintah juga menghadirkan Universitas Terbuka, PTN dengan sistem terbuka dan jarak jauh, untuk menampung calon mahasiswa yang karena sesuatu dan lain hal memang tidak dapat menempuh pendidikan tinggi secara tatap muka. Dengan daya tampungnya yang tidak terbatas karena tidak dibatasi oleh kapasitas ruang, dengan fleksibilitas dalam pembelajarannya karena menggunakan media, dan biaya yang terjangkau karena *economic of scale* jumlah mahasiswa yang ratusan ribu, Universitas Terbuka menjadi alternatif bagi lulusan SMA/ sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu, Universitas Terbuka juga menjadi bagian dari PTN yang menyalurkan beasiswa bagi yang membutuhkan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun mitra strategis.

PENUTUP

Ke depan, diperlukan kebijakan anggaran yang dapat menciptakan kerangka kerja pendidikan tinggi secara berkelanjutan, selain kewajiban alokasi anggaran 20% untuk pendidikan. Bagaimanapun, kebijakan anggaran pendidikan harus tepat sasaran dan mampu mencegah kerugian yang tidak proporsional terhadap pendanaan pendidikan tinggi, dibandingkan anggaran untuk, misalnya kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu kebijakan anggaran pendidikan tinggi harus mampu memberikan insentif untuk inovasi agar dapat memanfaatkan tiap rupiah dana publik secara efektif dan efisien (Finney, 2014). Guna mendukung target kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi, Negara harus tetap konsisten memprioritaskan dukungan pendanaan kepada siswa yang baru lulus SMA/ sederajat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, terutama yang

berasal dari kalangan yang mengalami keterbatasan ekonomi, fisik, dari daerah 3T, dan terdampak bencana. Penganggaran tersebut disertai *block grant* kepada perguruan-perguruan tinggi yang melayani mahasiswa secara efektif dan efisien. Pada akhirnya kebijakan anggaran pendidikan tinggi harus selalu dikaitkan dengan dinamika kesejahteraan warga negara.

REFERENSI

- Premchand, A. (1989). *Chapter two: Purposes of budget and setermnants of public expenditures*. Dalam A. Premchand, *Government Budgeting and Expenditure Control* (pp. 1–7). USA: INTERNATIONAL MONETARY FUND. Diunduh dari <https://doi.org/10.5089/9780939934256.071>
- Muktiyanto, Ali. (2016). *Good university governance dan kinerja program studi: Pengaruh penerapan akuntansi manajemen, teknik manajemen, dan pilihan prioritas strategi sebagai model media Fit*. Depok: Universitas Indonesia.
- Rosser, Andrew & Joshi, Anuradha. (2018). *Using courts to realize education rights. Reflections from India and Indonesia*. Open Knowledge Repository. Dapat di akses pada <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29858>
- Finney, J. E. (2014). Why the finance model for public higher education is broken and must be fixed. *Public Policy Initiative*, 2(6). <https://www.census.gov/prod/2013pubs/p60-245.pdf>.
- Ipek, E. A. S. (2012). New approaches in public budgeting. *Intech, Vol. i* (Issue tourism, pp. 1–19). <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2011.12.014>
- Khan, A., & Hildreth, W. B. (2002). Budget Theory in the Public. In *Quorum Books, Greenwood Publishing Group*. http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/BUDGET Budget theory in the public sector.pdf

- M. Gibson, A. (2009). Budgeting in Higer Education. *Management Accounting*, Vol. 2, Issue January, p. 2009.
- Santosa, A. B. (2014). Sistem Penganggaran Pendidikan Tinggi Dari Old Public Management Menuju New Public Management. *Jurnal Kependidikan*, 2(2), 127–142. <https://doi.org/10.24090/jk.v2i2.556>

6

TEKNOLOGI
PENDIDIKAN
DALAM
PENDIDIKAN
TERBUKA

Prof. Suciati, Ph.D.

PARADIGMA PENDIDIKAN TINGGI MENUJU PEDAGOGI TERBUKA

PENDAHULUAN

Kebetulan saja bahwa ketika bab ini ditulis, dunia pendidikan sedang mengalami gonjang-ganjing yang dipicu pandemi Corona. Pembelajaran tatap muka mempunyai resiko penularan penyakit sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnya harus dilakukan dalam sistem jarak jauh. Dosen, dosen dengan cepat harus mentransformasikan program kuliah dan pembelajaran kedalam bentuk online yang dapat diakses menggunakan gadget tertentu dilengkapi pertemuan tatap muka menggunakan aplikasi konferensi video melalui internet, seperti *Teams*, *Google Meets*, dan *Zoom*.

Kondisi ini menjadi pemicu disrupsi paradigma pendidikan tradisional, dan membawa dampak pengaruh *long-lasting* pada praktek pendidikan, mengakibatkan perlunya tatanan baru (*new normal*) dengan tantangan dan peluang yang akan hadir dalam cakrawala pendidikan pasca Covid 19. Mungkin suatu kebetulan atau keberuntungan bahwa pada saat kontak fisik antar manusia harus dibatasi, bahkan dihindari, teknologi informasi dan komunikasi luas tersedia dan dapat digunakan

menggunakan berbagai gadget dan aplikasi untuk komunikasi dan bersosialisasi.

Sejatinya perpindahan mendadak ke penggunaan TIK secara intensif untuk pendidikan bukan semata-mata dipicu oleh pandemi Corona, meskipun tidak terbantahkan bahwa kondisi karena Corona menjadi daya pendorong luar biasa perubahan lanskap pendidikan, yang dengan tergesa-gesa dan masif beralih menjadi pendidikan jarak jauh, *remote learning*, *remote teaching* dan sejenisnya. Dunia pendidikan secara dinamis selalu bergerak dan berkembang sesuai kondisi dan tuntutan jaman, dapat berupa perubahan tahap bertahap (inkrimental) ataupun drastis transformatif. Pemicu perubahan berasal dari bermacam sumber. Sebagaimana dapat diamati saat ini, perubahan pola ekonomi yang disebabkan pergeseran dari masyarakat agraris (tradisional) menjadi masyarakat informasi berimbas pada berbagai sektor kehidupan seperti industri, bisnis, dan kesehatan. Dunia pendidikan juga tidak luput dari perubahan yang harus diperhitungkan dalam praktek pendidikan agar tidak terjebak pada pendekatan usang yang tidak lagi relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman.

Dalam mengantisipasi dan mempersiapkan generasi “Indonesia Emas 2045” pendidik perlu berpikir ulang mencari pendekatan pedagogis yang mampu membangun kapasitas dan karakter generasi emas tersebut. Keberhasilan untuk mewujudkan kapital insasi Indonesia emas yang kompeten, berakhlak, dan mampu berkiprah pada jamannya dipertaruhkan pada sistem pendidikan dan pendekatan pedagogi yang saat ini dilakukan. Dunia pendidikan telah melalui beberapa paradigma pendidikan, masing-masing dengan seperangkat perspektif pedagogis dan pendekatan yang dianut sebagai norma. Dewasa ini seiring dengan diterimanya sistem pendidikan

jarak jauh oleh masyarakat sebagai arus utama (*mainstream*) pendidikan, para praktisi sering membahas tentang pedagogi terbuka (*open pedagogy*) sebagai alternatif praktek pendidikan untuk mempersiapkan generasi masa depan. Pendekatan ini juga dinilai relevan untuk mengakomodasi kebutuhan *re-skill* dan *skill-up* generasi masa kini supaya kapanpun diperlukan akan memiliki kemampuan yang relevan dengan jamannya.

Bab ini akan membahas tentang pergeseran dan perubahan paradigma pedagogi, mulai dari pedagogi berlandaskan teori klasik sampai dengan pedagogi terbuka (*open pedagogy*), serta bagaimana relevansi dan terapannya dalam pendidikan di Indonesia. Kajian dilandasi dengan tata pikir teknologi pendidikan yang merupakan bidang ilmu utama dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan/pelatihan.

PARADIGMA PEDAGOGI DARI MASA KE MASA

Sebelum lebih jauh membahas topik ini, perlu terlebih dulu dipahami istilah paradigma dan pedagogi yang digunakan dalam uraian ini. Paradigma dimaknai sebagai suatu perspektif atau cara pandang tertentu berlandaskan pada teori atau prinsip-prinsip yang diyakini. Secara teoretik, Turkan (2016) menjelaskan paradigma sebagai disiplin ilmiah atau orientasi teoretis berlandaskan epistemologi dan metodologi tertentu, yang muncul atau berkembang dari hasil refleksi komunitas ilmiah terhadap paradigma sebelumnya. Disiplin ilmiah ini dijelaskan lebih lanjut oleh Thomas Kuhn (1970) mencakup teori, aplikasi dan instrumentasi yang secara integratif menghasilkan model atau tradisi tertentu dalam penelitian dan praktek ilmiah, termasuk pendidikan. Paradigma tidak bersifat kekal atau stagnan tetapi berkembang dan berubah sesuai jamannya mengikuti perubahan masyarakat.

Secara konseptual *pedagogi* dimaknai sebagai strategi mengajar dan pembelajaran yang digunakan pendidik untuk menyampaikan substansi kurikulum dengan berlandaskan teori tertentu, Ketika merancang pembelajaran pendidik akan mempertimbangkan berbagai pendekatan pembelajaran berdasarkan preferensi, pengalaman dan konteks yang dihadapi. Pada pelaksanaan pedagogi terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam suatu ekosistem pembelajaran yang dibangun.

Perubahan paradigma pedagogi dapat dirunut berdasarkan pegeseran paradigma yang menekankan pada ‘mengajar’ dan ‘belajar’ (*teacher* atau *learner-based*) menjadi paradigma yang lebih fokus pada “pembelajaran” (*learning*). Perubahan paradigma pedagogi juga tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mentransformasi lanskap pendidikan dan kehidupan masyarakat.

PARADIGMA PEDAGOGI BERDASARKAN TEORI

Dunia pendidikan mengenal beberapa teori utama yang memberi ciri paradigma pedagogi tertentu, seperti behaviorisme, kognitivisme, pemrosesan informasi, konstruktivisme dan konektivisme. Masing masing teori ini mempunyai filsafat tersendiri yang menjadi pedoman dalam logika penerapannya pada pendidikan dan pembelajaran. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa teori behaviorisme bertumpu pada prinsip stimulus dan respon, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang esensinya merupakan respon atau tanggapan terhadap suatu stimulus atau rangsangan dari luar. Sebagai contoh, peserta didik ketika diminta dosen untuk mengerjakan suatu tugas (stimulus) dia berusaha mengerjakan tugas dengan baik (respon). Kepuasan yang diperoleh karena hasil pekerjaan dinilai baik akan menjadi penguat (*reinforcer*

atau reward) untuk mengulang respon yang sama, tetapi sebaliknya, bila mendapat nilai buruk, mahasiswa cenderung menghindari atau malas mengerjakan penugasan dosen. Menurut teori kognitivisme yang muncul kemudian, teori behaviorisme dianggap mekanistik dan tidak menjelaskan proses psikologis internal yang terjadi dalam diri seseorang, yang melibatkan pengalaman, nilai (*values*) yang dimiliki seseorang. Kritik terhadap behaviorisme ini didasarkan pada pengamatan bahwa tidak semua orang berperilaku sama dalam merespon stimulus tertentu, karena dalam diri seseorang terdapat nilai (*values*), pengalaman, kebutuhan dan harapan, yang memoderasi perilaku. Kondisi internal ini disebut teori kognitivisme sebagai komponen '*black box*' yang tidak dijelaskan oleh teori behaviorisme. Sampai saat ini kedua teori tersebut masih diterapkan dalam praktek pendidikan, tergantung konteks, jejang dan kompetensi dan substansi yang dibahas.

Teori pemrosesan informasi (*information processing*) membahas tentang bagaimana informasi diterima oleh panca indera dan diproses untuk disimpan dalam ingatan jangka pendek (*short-term memory*) maupun ingatan jangka panjang (*long-term memory*), untuk diakses kembali pada saat diperlukan. Informasi atau gagasan yang diolah dan tersimpan dalam *long-term memory* cenderung lebih lama diingat, dibandingkan dengan yang tersimpan dalam memori jangka pendek. Penerapan teori ini misalnya pada penggunaan beragam bentuk media (text, audio, visual) supaya secara kognitif informasi dapat diproses dan dipahami dengan baik, dan mudah diingat kembali.

Konstruktivisme mempunyai asumsi bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang lebih merupakan hasil olah pikir mandiri, dalam kolaborasi dan interaksi dengan orang lain dan dengan

berbagai sumber pengetahuan. Teori pembelajaran sosial yang memberi penekanan pada pemberian contoh (*modelling*) mempunyai relevansi dengan teori konstruktivisme ini, karena dalam interaksi dan kolaborasi peserta didik akan mengamati dan merefleksi model-model perilaku (dari dosen maupun teman) dikaitkan dengan pilihan perilaku untuk diri sendiri. Oleh sebab itu dalam proses pembelajaran perlu dirancang interaksi intensif dalam kegiatan belajar kolaborasi, di samping itu peserta didik perlu didorong dan difasilitasi untuk mengeksplorasi berbagai sumber pengetahuan dan diberi kebebasan untuk memilih strategi dalam belajar.

Konektivisme berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Dengan menggunakan TIK pengetahuan disebarkan melalui jaringan informasi dan disimpan dalam bentuk digital, berupa teks, audio dan video. Siemens (2005) menjelaskan bahwa proses ‘belajar’ terjadi saat seseorang terhubung dengan orang lain, dan memberi kontribusi gagasan kepada suatu komunitas yang mempunyai minat sama untuk berbagi informasi, berdiskusi dan berpikir bersama. Lebih lanjut disebutkan bahwa esensi dari belajar dan pengetahuan bukanlah pada persamaan dan penyamaan pendapat, tetapi justru bertumpu pada perbedaan pandangan (*diversity of opinion*) (Siemens, 2008).

Dalam praktek pendidikan dikenal beberapa paradigma pedagogi yang dibedakan dari titik sentral perhatian pelaksanaannya sebagai berikut.

- **Pedagogi Berbasis Pengajaran dan Pembelajaran**

Pedagogi pendidikan sering dibedakan sebagai pedagogi yang “berpusat pada dosen” (*teacher –centered*) dan yang “berpusat pada mahasiswa” (*learner centered*). Terkadang kedua perpektif ini dipandang sebagai pilihan, *learner centered* dinilai lebih sesuai dan efektif dalam

pembelajaran dibandingkan yang *teacher centered*. Tetapi sebenarnya keduanya dapat digunakan tergantung tujuan yang ingin dicapai. Ketika memperkenalkan topik baru yang sama sekali belum dikenali mahasiswa dapat saja dosen melakukan *direct teaching*, memberi penjelasan. Selanjutnya untuk pendalaman dan pengayaan, mahasiswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi sendiri topik tersebut melalui berbagai cara dan media.

Perspektif lain yang sekarang ini banyak dibahas adalah pedagogi "*learning centered*" berpusat pada belajar dan pembelajaran. Dalam pendekatan ini baik pedagogi yang berpusat pada dosen maupun yang berpusat pada mahasiswa terintegrasi dalam suatu ekosistem pembelajaran yang efektif. Dosen mempunyai peran strategis sebagai desainer pembelajaran, merancang konten, strategi dan evaluasi sebagai suatu sistem dimana mahasiswa secara aktif dapat melakukan proses pembelajaran untuk mencapai capaian belajar. Peran dosen berubah, lebih sebagai "*guide on the side*" (mendampingi sebagai pembimbing) daripada sebagai "*sage on the stage*" (orang bijak sumber ilmu). Dosen bukan sebagai aktor utama sumber pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator, motivator bagi mahasiswa untuk mengkonstruksi pemahaman dan pengetahuannya sendiri.

- **Pedagogi Berbasis Materi dan Berbasis Kompetensi**

Pedagogi berbasis materi atau substansi memandang penting pemahaman dan penguasaan terhadap struktur dan substansi bidang ilmu pengetahuan. Capaian pembelajaran lebih bersifat kognitif, dengan demikian pedagogi yang diterapkan lebih kepada penguasaan pengetahuan dan pemahaman terhadap struktur

pengetahuan tersebut. Sedangkan pedagogi berbasis kompetensi menitikberatkan pada apa yang dapat dilakukan seseorang ketika menguasai suatu ilmu. Kompetensi merupakan capaian belajar yang integratif, mencakup kognitif, ketrampilan (skill), dan sikap (afektif) yang juga melibatkan tata nilai (values). Perspektif pedagogi berbasis kompetensi ini juga akan terlihat dari fokus hasil belajar pada *evidence* (bukti nyata), berupa misalnya prototipa produk, atau portofolio yang menggambarkan proses dan tahapan hasil, dihasilkan sebagai hasil kerja individual atau kelompok.

- **Pedagogi berbasis ICT**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengguncang dan mengubah proses pembelajaran menjadi *digital, virtual, networked* dan *mobile*. Meskipun pembelajaran konvensional masih tetap berlangsung dalam sistem pendidikan di berbagai dunia, tetapi pada saat yang sama terjadi *a shift of paradigm* (pergeseran paradigma) ke arah cara pandang dan cara kerja baru. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mempunyai dua jenis pengaruh, bersifat *sustaining*, dalam arti meningkatkan efektivitas sistem yang sudah ada, tetapi juga bersifat *disruptive*, merombak sistem yang sudah ada (Christensen, 2013). Penggunaan teknologi dalam pendidikan akan membuat perubahan pada komponen-komponen tertentu, di antaranya: penggunaan teknologi untuk mentransformasi metode dan tingkat interaktivitas dalam pembelajaran, mendefinisikan ulang struktur dan tampilan substansi, termasuk penggunaan media dalam pembelajaran, pola komunikasi mahasiswa dengan dosen dan antara mahasiswa dengan mahasiswa lain, serta struktur pembiayaan dan mekanisme kerja institusi (Pavlik, 2015).

Pendekatan yang saat ini banyak dilakukan adalah dengan memanfaatkan ICT pendidik menggabungkan pembelajaran tatap muka dan berbasis ICT dalam pembelajaran *blended* atau *hybrid* (gabungan) untuk melibatkan mahasiswa dalam pembelajaran yang efektif, dengan biaya yang lebih efisien. Berbagai penyedia layanan program pendidikan bahkan menawarkan program dalam bentuk sepenuhnya *online*, menyediakan berbagai program yang dapat diakses gratis oleh peminatnya, dan disertifikasi dengan biaya tertentu, seperti Coursera, Udacity and edX, dan Khan Academy. Salah satu kelemahan program ini adalah terbatasnya layanan akses interaktif langsung dengan dosen/instruktur. Ketika mengikuti MOOCs pada program Coursera, peserta 'tidak dianjurkan' bahkan terkadang dilarang untuk mengirimkan email atau 'berteman' dengan professor program tersebut melalui facebook (Jacobs, 2013) karena membebani waktu pengajar. Singkat kata, peserta akan *sink or swim* sendiri ketika mengikuti program pembelajaran ini.

MENUJU PEDAGOGI TERBUKA – PEDAGOGI ABAD 21

Ketersediaan teknologi memungkinkan terjadinya perubahan paradigma yang bersifat terobosan, strategis, dan visioner, disebut sebagai pedagogi terbuka (*Open Pedagogy*). Pendekatan pedagogi ini memperhitungkan skenario nyata dalam masyarakat serta perbedaan kultural. Mahasiswa diperkenalkan dengan "*new ways of knowing*" untuk mencari, mengkonstruksi dan memetakan belajarnya sendiri. Fokus pedagogi ini bukan lagi pada pengetahuan berdasarkan hafalan atau melakukan prosedur sederhana, tetapi mengarah kepada kemampuan berfikir tinggi, mencakup berpikir kritis, komunikasi efektif dan otonomi belajar yang lebih besar (Persaud, C., 2019). Paradigma Pendidikan terbuka ini juga mempunyai makna bahwa Pendidikan tidak lagi dibatasi

oleh asumsi-asumsi fundamental dalam Pendidikan berupa keterbatasan yang disebabkan oleh lokasi, waktu dan substansi ilmu, tetapi pendidikan tersedia kapan saja, dimana saja, dan bebas memilih substansi dan ketrampilan apa yang ingin dipelajari.

- **Pengertian dan Karakteristik Konseptual *Open Pedagogy***

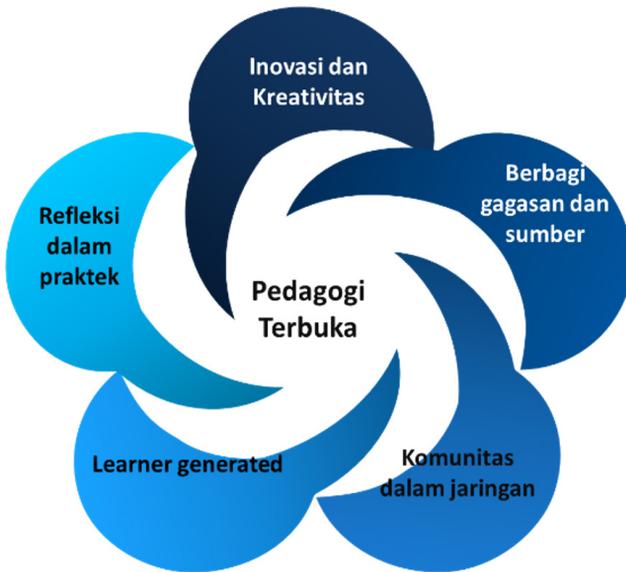
Istilah ‘pedagogi terbuka’ sejatinya bukan konsep yang sama sekali baru. Dalam artikel yang ditulis Paquette (1979) disebutkan bahwa sejak tahun 1970-an istilah *Open Pedagogy* telah digunakan untuk menjelaskan paradigma ‘baru’ di lingkungan pendidikan di Quebec, Kanada pada waktu itu. Menurut Paquette *Open pedagogy* mempunyai 3 ciri utama yakni: otonomi mahasiswa dan interdependensi, kebebasan dan tanggungjawab, serta demokrasi dan partisipasi. Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa *open pedagogy* tidak semata menekankan pada hasil, tetapi perlu memperhatikan proses dalam pembelajaran. “*Open pedagogy is process-based, incurring natural learning of the internal students’ dynamics*” (terjemahan bebas), dengan demikian dosen perlu menyusun dan mengembangkan lingkungan belajar yang “kaya” dengan keragaman, sehingga mahasiswa dapat menggunakan beragam talenta atau kemampuan yang dimiliki serta berinteraksi dengan lingkungan belajar tersebut. Beberapa konsep yang dikemukakan nampaknya dapat ditemukan padanannya dalam pedagogi masa kini, seperti *individualized learning*, *self-direction*, *self-regulated learning*, berdasarkan penjelasan bahwa “kegiatan pembelajaran harus terbuka, mendorong ragam hasil belajar, memberi kemungkinan mahasiswa memulai dari tingkat pemahaman dan kemampuannya sendiri”, dsb. Bahkan dijelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan belajar perlu mengusahakan integrasi berbagai disiplin ilmu, atau bersifat multidisiplin.

Setelah 40 tahun berlalu, dalam berbagai kajian tentang *open pedagogy*, berbagai prinsip dasar yang dijelaskan Paquette seperti kolaborasi, keragaman dan partisipatif, tetap relevan, bahkan menjadi “*guiding praxis*” (perwujudan penerapan teori) untuk menafsirkan bentuk dan ciri *open pedagogy* masa kini. Esensi *Open Pedagogy* adalah *constructive*, *connected* dan *critical* (Tanya, 2018), dan hal ini sangat berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi masa kini, bahkan mungkin dapat disebut sebagai “pedagogi berbasis teknologi” yang berpusat pada peserta didik, konstruktivistik, dan interaktif.

Pedagogi terbuka juga dimaknai sebagai praktek pembelajaran yang terjadi karena akses bebas sumber pendidikan (Open Educational Resources – OER) (Wiley, 2013; DeRosa and Jhangiani, 2017). Esensi open pedagogy dimaknai sebagai praktek pendidikan yang lebih menekankan pelibatan mahasiswa sebagai penggagas dan pencipta informasi daripada sebagai pengguna informasi. Produk informasi hasil kreasi mahasiswa tersebut kemudian diberi lisensi terbuka sehingga dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat luas, sebagai OER dalam berbagai bentuk, misalnya buku, video, audio berisi kajian mikro, dan produk mahasiswa ini mempunyai karakteristik 5R, *reused*, *retained*, *redistribute*, *revised*, dan *remixed*. Setiap orang bebas untuk menggunakan, mengubah, menggabungkan dan membagikan ulang konten OER kepada masyarakat luas. Pada satu sisi mahasiswa akan mempunyai repositori portofolio yang terkumpul selama mengikuti pendidikan dan dapat diakses orang lain, tetapi pada sisi lain kualitas produk yang *shareable* tersebut dipertanyakan validitasnya. Dalam hal ini pendidik atau pengajar perlu mempunyai mekanisme tertentu untuk

mengusahakan mutu portofolio ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk pendidikan di Indonesia, sangat sedikit konten pendidikan dalam bahasa Indonesia yang tersedia. Di YouTube misalnya, banyak ditemukan konten berbahasa Indonesia buatan *youtubers*, berisi hiburan, *how-to*, dsb., tetapi konten hasil produksi mahasiswa maupun dosen dan dosen, jumlahnya masih sedikit. Menarik untuk melihat perkembangan konten yang dibuat pendidik dan peserta didik di sosial media, untuk mendukung pembelajaran digital.

Hegarty (2015) menjelaskan ciri lain *open pedagogy*, di antaranya adalah (1) penggunaan teknologi untuk berbagi informasi dalam bentuk media/forum yang dibentuk sebagai suatu komunitas sosial, seperti *facebook*, *whatsapp*, *linkedin*, atau melalui LMS seperti Moodle. Komunitas ini membentuk komunitas maya yang lebih luas dan saling terhubung (*connected*); (2) komunitas yang terhubung melalui teknologi ini memiliki rasa saling percaya dan keterbukaan, kesediaan untuk mengemukakan pendapat tanpa kekuatiran untuk mendapat kritik; (3) komunitas ini kreatif mengeksplorasi inovasi dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, berupa model, sumber belajar, evaluasi belajar; serta (4) sesuai dengan perspektif pendidikan yang berpusat pada mahasiswa, memberi peluang peserta didik untuk mengatasi masalah sendiri serta menghasilkan pengetahuan atau bentuk produktif lainnya yang berguna bagi masyarakat.



Gambar 1. Atribut Pedagogi Terbuka

(Sumber: Hegarty, 2015)

Membahas tentang *open pedagogy* tidak dapat dilepaskan dari *digital pedagogy*, karena dua mazhab ini erat berkaitan dengan teknologi. Dalam *open pedagogy* pendidikan menjadi digital, online (dalam jaringan) maupun *off-line*, interaktif dan konstruktivis.

- **Pedagogi Digital (*Digital Pedagogy*)**

Esensi pedagogi digital adalah “*the use of electronic elements to enhance or to change experience of education*” (Croxall, B. & Koh, A. (2013). Kata kuncinya adalah *enhance* (memperkuat) dan *change* (mengubah). Pedagogi digital tidak semata-mata tentang menggunakan teknologi, tetapi didasarkan pada telaah kritis dan pemahaman bagaimana teknologi digunakan serta apa manfaat atau mudarat penggunaan suatu teknologi dalam

pembelajaran tertentu. Bentuknya beragam, mulai dari penggunaan powerpoint dalam pembelajaran, MOOCs, penugasan untuk membuat blog atau menggunakan media sosial dalam pembelajaran, seperti yang terjadi pada masa covid 19 ini. Dalam keterpaksaan dan keterbatasan, WhatsApp dan Facebook digunakan dosen untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, memberi tugas dan penjelasan kepada mahasiswa. Melalui beragam aplikasi teknologi proses dan bentuk pembelajaran berubah. Porsi pertemuan tatap muka berkurang, bahkan hilang. Dampak proses seperti ini pada kemudahan dan kenyamanan peserta didik dalam belajar perlu menjadi perhatian pendidik, karena ada komponen lingkungan dan suasana belajar yang hilang. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam menyusun skenario pembelajaran selanjutnya.

- ***Personalized Learning***

Dalam praktek pendidikan konvensional tatap muka, biasanya seorang pengajar menggunakan model dan scenario pembelajaran yang sama untuk peserta didik dalam satu kelas. Seluruh peserta mengikuti tahapan yang sesuai dengan desain rancangan pengajar. Menurut Feldstein dan Hill (2016) apa yang terjadi dalam kelas seperti itu adalah *depersonalized learning*, di mana kondisi, kepentingan dan minat pribadi peserta didik tidak selalu diperhatikan, istilahnya *one size fit all*. Dalam pembelajaran kelas memang sulit memberikan perhatian kepada setiap individu peserta didik, bahkan dalam kelompok kecil juga terjadi variasi di antara anggota kelompok tersebut.

Dalam lingkup pedagogi terbuka, dipicu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif, konsep pendekatan *personalized learning* dikaji ulang dan dicermati dalam kaitan dengan potensi ekosistem pendidikan masa kini. Teknologi memungkinkan dilakukannya pembelajaran dengan desain skenario yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kondisi dan membantu individu peserta didik dengan lebih baik. Tidak mudah mencari padanan istilah *personalized learning* dalam Bahasa Indonesia, esensinya adalah sebagai pendekatan pendidikan yang mengupayakan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan, kondisi, kemampuan yang dimiliki dan minat peserta didik. Dalam proses pembelajaran tidak semua mahasiswa melalui tahapan dan konten yang sama, lebih bersifat individual dan adaptif terhadap kemajuan mahasiswa. Dosen/pendidik lebih fokus pada memberikan bantuan belajar secara individual. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan terjadinya bantuan lebih bagi setiap peserta didik. Dengan menggunakan *flipping classroom* (gabungan pembelajaran dalam jaringan dan tatap muka) misalnya, pendidik dapat memindahkan penyajian materi kuliah ke dalam media, misalnya video atau audio dalam bentuk *podcast*, untuk dipelajari secara mandiri. Dengan demikian pendidik mempunyai waktu lebih banyak untuk memberi perhatian dan bantuan kepada individu mahasiswa dalam pertemuan tatap muka. Sedangkan dalam sesi online, ketika mahasiswa mengerjakan penugasan mandiri, pendidik dapat saja memonitor hasil kerja mahasiswa secara individual dan memberi masukan atau bantuan lain yang diperlukan.

Terlebih lagi, apabila nanti pemahaman terhadap potensi *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan) dan kemampuan untuk menggunakannya dalam pendidikan dikuasai dengan baik, maka dengan menerapkan *learning analytics* pembelajaran dapat dirancang menjadi beberapa lajur/jalur/tahapan sesuai dengan kecepatan dan kesulitan yang ditemui mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai sasaran capaian belajar yang sama.

Personalized learning diwujudkan dalam berbagai scenario pembelajaran. Yang paling sederhana adalah menggunakan piranti lunak (*software*) adaptif tertentu untuk menyesuaikan tingkat kesulitan belajar dengan kemampuan dan kesulitan yang dihadapi mahasiswa, misalnya dengan mengatur urutan penyajian materi yang bervariasi (*differentiated instruction and feedback*). Mekanisme lainnya adalah menggunakan data informasi yang terkumpul atau tersimpan dalam sistem untuk membentuk kelompok, dan memberi treatment berbeda antar kelompok. Misalnya, dalam LMS Moodle, pendidik dapat membuat sub-group menggunakan indikator tertentu seperti partisipasi dalam diskusi, kualitas substansi yang dikemukakan dalam diskusi, dsb. untuk membentuk sub group dengan pemberian perlakuan yang spesifik, misalnya pendalaman substansi yang masih membingungkan peserta didik. *Personalized learning* dapat juga dilakukan dengan memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan sendiri projek sebagai tugas akhir matapelajaran. Saat ini, karena pandemic corona, ditemukan praktek pembelajaran di mana dosen menggunakan aplikasi pada Microsoft atau Google, dan sosial media seperti Whatsapp dan *google classroom*, untuk kolaborasi kelompok dan pemberian bantuan personal kepada mahasiswa.

- **Privasi Dan Keamanan Data**

Penerapan *personalized learning* dengan menggunakan instrument teknologi memungkinkan pengumpulan data pribadi dan keaktifan mahasiswa ke dalam sistem informasi organisasi. Dalam organisasi pendidikan dengan jumlah mahasiswa yang banyak akan terjadi pengumpulan data yang masif, mencakup data pribadi, email, nomor handphone, alamat ip computer yang digunakan, keaktifan, pendapat pribadi yang diunggah dalam diskusi, dsb. Data yang tersimpan dalam sistem tersebut dapat saja digunakan untuk tujuan yang tidak selayaknya, bahkan dibocorkan ke pihak lain, atau diserang *hacker* untuk keuntungan pribadi. Terlebih lagi data yang disimpan dalam “gudang data” bukan server milik institusi, tetapi dalam jaringan perusahaan internasional, seperti Microsoft, google, Facebook, Zooms, WhatsApp dsb., mengandung resiko pembajakan data dan penyalahgunaan, meskipun mereka juga tidak akan tinggal diam bila terjadi kebocoran data, mengingat hal ini akan menurunkan kredibilitas perusahaan, bahkan konsekuensi finansial.

Akibat lain yang dipermasalahkan oleh publik sehubungan dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan, adalah frekuensi dan intensitas mahasiswa berada di depan layar computer yang dkuatirkan membawa dampak buruk. Mahasiswa juga akan lebih banyak bekerja sendiri, terlepas dari interaksi dan komunikasi langsung dengan orang lain. Akibat jangka panjang perilaku ini belum diketahui dengan pasti, oleh sebab itu perlu dicermati melalui observasi dan penelitian yang sistematis. Yang paling dkuatirkan beberapa pendidik adalah bahwa teknologi dan perusahaan pengembang teknologi dalam pendidikan akan mempunyai pengaruh besar pada praktek pendidikan dalam masyarakat, tetapi terlepas dari prinsip-prinsip pendidikan yang baik dan teruji.

Pembelajaran personal mempunyai potensi untuk mengembangkan pribadi mahasiswa dengan efektif dan optimal, tetapi perlu dilakukan dengan pertimbangan cermat, khususnya dalam menentukan strategi skenario dan elemen pembelajaran. Perlu dilakukan eksperimen dalam lingkup mikro untuk menakar keefektifan dan validitas skenario pembelajaran personal yang dilakukan, dan upaya ini perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga semakin banyak bukti (*evidence*) yang diperoleh untuk memberlakukannya secara lebih luas.

PENUTUP

Kemungkinan bahwa pendidikan akan menapaki paradigma baru yang dipicu oleh pengerahan penggunaan teknologi untuk pendidikan adalah keniscayaan yang tidak terbantahkan. Khususnya karena pandemik Covid 19 saat ini. Dalam masyarakat dapat saja timbul keraguan bahkan resistensi terhadap paradigma pendidikan terbuka yang intensif menggunakan TIK. Hal ini dapat dipahami, karena perubahan selalu mensyaratkan pemahaman dan pembiasaan terhadap pola pikir dan perilaku baru. Tetapi sebagaimana dungkapkan oleh Rahm Emanuel, *“Never let a serious crisis go to waste. It’s an opportunity to do things you think you could not do before,”* intinya, jangan biarkan krisis yang terjadi sia-sia tanpa perubahan, krisis merupakan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak terpikir dapat dikerjakan. Krisis dengan segala implikasinya membuka arah pendidikan yang baru, dan terlalu mahal biaya yang telah dibayar bila tanpa diikuti persepsi dan semangat baru untuk terus berinovasi.

REFERENSI

- Croxall, B. & Koh, A. (2013). Digital Pedagogy? 2013 MLA *Digital Pedagogy Unconference*. Diambil dari <http://www.briancroxall.net/digitalpedagogy/what-is-digital-pedagogy/>.
- Christensen, C.M.; Mc Donald, R.; Altman, E.J.; & Palmer, J.E. (2018). *Disruptive Innovation: An Intellectual History and Directions for Future Research*. *Journal of Management Studies* 55:7 November 2018, doi: 10.1111/joms.12349.
- DeRosa, R. and Robison, S. (2017) From OER to Open Pedagogy: Harnessing the Power of Open, in Jhangiani, R S. and Biswas-Diener, R. (2017) *Open: The Philosophy and Practices that are Revolutionizing Education and Science*. London: Ubiquity Press.
- Feldstein, M. & Hill, Phil. (2016). Personalized Learning: What It Really Is and Why It Really Matters. *EDUCAUSE review*, 25 – 35.
- Hegarty, B. (2015) Attributes of open pedagogy: a model for using open educational resource. *Educational Technology*, July-August.
- Jacobs, A.J. (2013). Two cheers for Web U. Diambil dari http://www.nytimes.com/2013/04/21/opinion/sunday/grading-the-mooc-university.html?src=recg&_r=0
- Kuhn, T.S. (1970). *The structure of scientific revolutions*. Chicago, London: University of Chicago Press Ltd.
- Paquette, C. (1979). Quelques fondements d'une pédagogie ouverte. *Québec français*, (36), 20–21.
- Persaud, C. (2019). Pedagogy: What Educators Need to Know. Diambil dari <https://tophat.com/blog/pedagogy/>
- Siemens, G. (2008). *Learning and knowing in networks: Changing roles for educators and designers*. Paper 105: University of Georgia IT Forum. <http://it.coe.uga.edu/itforum/Paper105/Siemens.pdf>

- Siemens, G. (2005, August 10). Connectivism: Learning as Network Creation. *e-Learning Space.org website*. <http://www.elearnspace.org/Articles/networks.htm>
- Pavlik, J.V. (2015). Fueling a Third Paradigm of Education: The Pedagogical Implications of Digital, Social and Mobile Media. *Contemporary Educational Technology*, 6(2), 113-125.
- Tanya Dorey-Elias, T., Morgan, T, and Rolfe, V. (2018). Digging into the past – Historical branches of open. Presentation at the 9th annual Conference for Open Education research, practice and policy, 18 – 19 April 2018, Bristol, UK
- Turkan Firinci Orman (2016). “Paradigm” as a Central Concept in Thomas Kuhn’s Thought”, *International Journal of Humanities and Social Science Vol. 6, No. 10, p 51*.
- Wiley, D. 2017. Iterating Toward Openness: Lessons Learned on a Personal Journey. In: Jhangiani, R S and Biswas-Diener, R. (eds.) *Open: The Philosophy and Practices that are Revolutionizing Education and Science*. Pp. 195–207. London: Ubiquity Press. DOI: <https://doi.org/10.5334/bbc.o>. License: CC-BY 4.0

Prof. Suciati, Ph.D.

TREN MENUJU KURIKULUM TERBUKA

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang pedagogi terbuka (*open pedagogy*) sering dihubungkan dengan kurikulum terbuka (*open curriculum*). Memang tidak otomatis berarti kurikulum terbuka merupakan konsekuensi pedagogi terbuka, karena pedagogi terbuka dapat saja dalam kerangka kurikulum standar yang selama ini dikenal dalam dunia pendidikan. Tetapi kurikulum terbuka dapat menjadi alternatif logis dengan mempertimbangkan potensi dan kebermanfaatannya bagi upaya menghasilkan lulusan dengan tingkat kesiapan tinggi pada abad 21. Pendidikan bergerak dinamis mencari bentuk baru untuk memenuhi misi dan fungsinya mengembangkan manusia seutuhnya, dan pendidikan tinggi dituntut untuk mewujudkan ekuitas pendidikan berkualitas bagi siapa saja, mengembangkan kemandirian dan kemampuan personal dan sosial mahasiswa supaya efektif berperan pada jamannya.

Dalam mempersiapkan mahasiswa untuk profesinya kelak, kurikulum tradisional yang berlaku dapat menghambat *career pathway* calon lulusan, karena mengadopsi pendekatan ‘satu ukuran untuk semua’ *one size fits all*. Di samping itu

dalam praktek pendidikan mahasiswa lebih berperan sebagai pengguna pengetahuan atau informasi (*knowledge users*) ketimbang “pencipta” pengetahuan. Oleh sebab itu kurikulum pendidikan tinggi perlu menjadikan mahasiswa bukan hanya sebagai konsumen pengetahuan tetapi sebagai *co-creator* pengetahuan. Bahkan tidak terbatas pada pengetahuan berdasarkan kurikulum, tetapi juga dalam menentukan sosok kurikulum dengan memberi peluang kepada mahasiswa untuk menyusun sendiri kurikulumnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena akan lebih relevan dengan latar belakang, minat dan ekspektasi pribadi pekerjaan atau profesi yang akan digeluti pada masa datang (Kehdinga, 2019).

Gagasan tentang *open curriculum* pernah dikemukakan pada tahun 1974 dalam kaitan dengan layanan pendidikan bagi tenaga medis yang sudah bekerja di lapangan (Kelly, 1974). Dia mengemukakan gagasan bahwa diperlukan kurikulum yang fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan populasi peserta program yang heterogen, dari segi usia, pengalaman kerja, atau untuk mempersiapkan diri memasuki karier baru. Pada waktu itu fokus *open curriculum* lebih kepada transfer kredit dan pengakuan pengalaman atau istilahnya sekarang rekognisi pengalaman lampau (RPL). Dalam perkembangannya pendekatan *open curriculum* ini tidak terbatas pada RPL atau transfer kredit, tetapi secara esensial mengubah struktur kurikulum menjadi lebih longgar dan fleksibel, dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan sendiri konsentrasi -konsentrasi bidang ilmu yang ingin dipelajari. Sebutan lain kurikulum terbuka adalah *flexible curriculum*, dicirikan dengan peluang bagi mahasiswa untuk mengambil matakuliah di luar bidang ilmu.

Pendekatan kurikulum terbuka merupakan paradigma kurikulum yang berbeda, yang tidak selalu dipahami dan diterima oleh perguruan tinggi konvensional, yang berpendapat bahwa perlu ada struktur kurikulum yang jelas bagi pendidikan mahasiswa. Struktur kurikulum biasanya terdiri dari *core curriculum*, merupakan pengelompokan matakuliah sebagai matakuliah inti, dan matakuliah elektif yang masih dalam lingkup atau berkaitan dengan program studi/bidang ilmu. Mahasiswa harus mengambil matakuliah inti yang ditetapkan fakultas, dan mungkin beberapa elektif yang disediakan untuk suatu konsentrasi. Mahasiswa tidak bebas mengambil matakuliah di luar bidang studinya meskipun secara pribadi mempunyai minat dan menganggap perlu untuk mempelajarinya.

Perguruan tinggi yang menggunakan *Open curriculum* cukup banyak ditemukan. Di Amerika Serikat misalnya, 30 perguruan tinggi sudah menerapkan kurikulum terbuka, seperti Amherst College, Vassar, Grinnel College, dan Hamilton College (*Open curriculum Colleges*, 2020). Brown University, salah satu *Ivy League university* di Amerika Serikat yang juga *major research university*, telah melaksanakan open curriculum selama 50 tahun. Perguruan tinggi ini meskipun mempunyai program S2 dan S3 yang dianggap mumpuni, tetapi justru memberi perhatian lebih kepada program sarjana (Wicaksono, 2012). Di benua Eropa, West Kent College di Inggris dan Maastricht University di Belanda telah menggunakan *open curriculum* dengan menawarkan 150 matakuliah (courses).

Akhir-akhir ini *open curriculum* kembali mendapat perhatian dunia pendidikan, dibahas dalam berbagai forum sebagai "*curriculum of the 21 century*." Bab ini akan membahas landasan filsafat *open curriculum* dan karakteristiknya, serta membahas kemungkinannya untuk diterapkan dalam pendidikan di Indonesia.

LANDASAN TEORETIS KURIKULUM TERBUKA

Pada dasarnya kurikulum terbuka merupakan sistem pengaturan kurikulum yang memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih dan menentukan sendiri matakuliah yang diambil dalam proses perkuliahan, tanpa dibatasi adanya matakuliah yang dipersyaratkan. Pendekatan kurikulum ini berakar pada filsafat pendidikan progresif (*Dewey's progressive education*) yang memandang pendidikan sebagai pengalaman yang melibatkan perkembangan pribadi dan sosial, dan berfokus pada kebutuhan individual siswa (Naglaa, 2018). Hal tersebut dilakukan dengan cara menyediakan pilihan matakuliah bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan menemukan apa sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswa. Di samping itu kurikulum terbuka dapat pula dirunut dari perspektif *liberal education* (pendidikan liberal) yang menekankan pentingnya sistem pendidikan berorientasi pada sikap dan hubungan antar manusia dan pengembangan integritas pribadi dan sosial (Rowe, 2017). Pendidikan liberal juga menekankan pentingnya mengembangkan wawasan multidisiplin yang mendorong penguasaan model dan paradigma berpikir dari berbagai disiplin ilmu, dengan demikian mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai bidang pengetahuan dan menggunakannya untuk memecahkan permasalahan masa kini dan pada skenario dunia nyata kelak. Pendidikan liberal bertujuan menyediakan pengalaman akademis untuk mengembangkan keingintahuan intelektual melalui proses berpikir kritis dan refleksi diri, membangun ketrampilan kepemimpinan dan kerjasama dalam kelompok, komitmen dan profesionalisme, serta kepekaan terhadap lingkungan kultur sosial dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan liberal merupakan sistem pendidikan untuk menumbuhkan jiwa merdeka, yang diberdayakan melalui pengetahuan yang luas, kemampuan yang dapat diaplikasikan

dalam berbagai konteks, penghayatan yang kuat terhadap sistem nilai kemanusiaan, etika dan keterlibatan sosial.

Kurikulum terbuka mempunyai landasan filosofi dan keyakinan terhadap kekuatan kemandirian mahasiswa untuk menentukan pilihan dalam proses pendidikan, meskipun pada prakteknya tetap memerlukan bimbingan dosen (Teagle Foundation, 2006). Mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan yang diambil, tetapi juga mempunyai tuntutan tanggungjawab yang besar. Keterlibatan dosen untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada mahasiswa, inspirasi dan pencerahan ketika mahasiswa mengalami keraguan dan kesulitan dalam memilih dan melaksanakan pilihannya merupakan faktor strategis dalam kurikulum terbuka. Diperlukan ada keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab, dan antara kemandirian mahasiswa dengan kolaborasi dosen dalam proses pendidikan.

PENGERTIAN KURIKULUM TERBUKA

Kurikulum terbuka mempunyai ciri pemberian peranan kepada mahasiswa untuk merencanakan dan merancang sendiri cetak biru akademiknya, dan bertanggungjawab untuk menentukan isi dan konsentrasi studi bidang ilmu yang diambil. Pendekatan ini didasari pemikiran tentang pentingnya mahasiswa terkoneksi dan terbiasa dalam suatu kultur pendidikan yang mengutamakan kemandirian dalam pengembangan dan penguasaan kemampuan dan ketrampilan daripada penguasaan pengetahuan semata. Pelaksanaannya dapat bervariasi dalam suatu kontinum. Kemungkinan mahasiswa masih harus mengambil matakuliah prasyarat atau matakuliah inti, tetapi jumlahnya tidak banyak dibandingkan yang dapat dipilih sendiri. Mahasiswa boleh menentukan sendiri matakuliah konsentrasi tertentu yang disediakan perguruan tinggi, dan semua diperhitungkan atau berkontribusi pada

pencapaian gelar tertentu. Sebagai contoh, seorang mahasiswa dapat saja mengambil konsentrasi manajemen bisnis dan pemrograman, atau konsentrasi pengelolaan lingkungan hidup dan pendidikan. Dengan diversifikasi konsentrasi ini mahasiswa akan memperoleh perspektif interdisiplin dan multidisiplin yang akan membantu dalam berinteraksi dengan perspektif, tatapikir dan referensi (hasil pengembangan dan penelitian) dari berbagai disiplin ilmu.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya pelaksanaan *open curriculum* ini bervariasi antar institusi. *Brown University* tidak menetapkan *majors* (bidang studi) tetapi menawarkan matakuliah dalam 80 konsentrasi atau fokus studi dalam sains dan teknologi. *University College Maastricht* masih menggunakan kurikulum inti (terdiri dari 4 matakuliah) yang menjadi syarat, tetapi mahasiswa dapat memilih berbagai konsentrasi yang ditawarkan. Dengan demikian tujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan *'academic preference and talents'* atau minat akademik dan keahlian yang merupakan pilihan mahasiswa sendiri dapat terwujud.

Karena karakteristiknya yang sangat terbuka, kurikulum terbuka dapat saja membuat gamang mahasiswa yang terbiasa dengan sistem tradisional, di mana mereka tinggal memilih program studi yang telah ditentukan struktur kurikulum dan matakuliahnya. Dalam kurikulum terbuka, mahasiswa berada dalam kondisi berbeda karena harus merancang sendiri "struktur" matakuliah yang ingin diambil. Ketika merancang kurikulum mahasiswa perlu melakukan refleksi terhadap diri sendiri, menyadari makna suatu matakuliah bagi perkembangan diri dan minat, serta berkemauan untuk mendalami pengetahuan (Gaunt, 2008). Proses belajar lebih diarahkan pada *design thinking*, berupa proses yang mencakup

identifikasi, *define* atau merumuskan, ideasi (*ideate*) yang berarti memunculkan, melahirkan gagasan atau ide, membuat prototipa, menguji, dan diseminasi atau menyebarkan gagasan tersebut. Hasil yang diharapkan dari kurikulum terbuka adalah lulusan yang memiliki wawasan umum yang memadai mencakup pengetahuan tentang sains, budaya dan masyarakat, di samping pemahaman mendalam tentang suatu bidang ilmu yang spesifik.

Manfaat kurikulum terbuka yang lain adalah memberi kontribusi pada pengembangan kemandirian, kreativitas dan keterbukaan dalam berpikir dalam diri mahasiswa, membuat mereka lebih aktif dan bertanggungjawab untuk mengarahkan diri mencapai tujuan belajar. Di samping itu mereka akan menyadari bahwa pengetahuan dan kemampuan yang dipelajari merupakan investasi pribadi yang mempengaruhi jalan hidup. Kurikulum terbuka diharapkan dapat membentuk pribadi yang mampu mengelola kompleksitas hidup dan perubahan yang terjadi, memiliki tanggungjawab sosial dan mampu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah (Ritchie, 2018). Perlu dipahami bahwa esensi pembelajaran bukanlah pada transmisi pengetahuan tetapi lebih pada proses pengembangan pribadi. Dengan demikian kemampuan dan kesadaran yang dihasilkan berdampak positif pada mahasiswa untuk menjadi *life-long learners* yang memiliki kelincahan intelektual (*intellectual agility*). Kurikulum dapat dinarasikan sebagai suatu *journey* (perjalanan) hidup yang akan dilalui mahasiswa sebagai bagian perjalanan hidup menuju kedewasaan dan keutuhan.

TANTANGAN KURIKULUM TERBUKA

Keputusan untuk menerapkan kurikulum terbuka kemungkinan mempunyai masalah sebagai dampak negatif. Sebagai contoh, bahwa dalam memilih konsentrasi mahasiswa tidak sepenuhnya secara mendalam dan utuh mendasarkannya pada minat dan prospek ke depan, tetapi sekedar menghindari matakuliah yang tidak disukai dan memilih matakuliah atau konsentrasi yang “mudah dan nyaman” dipelajari. Bila demikian halnya, mereka menjadi tidak tertantang dan bersungguh hati dalam proses pendidikan.

Perguruan tinggi yang menerapkan kurikulum tradisional berpendapat bahwa struktur kurikulum penting karena memberikan kejelasan kepada mahasiswa. Penerapan kurikulum terbuka akan menyulitkan mahasiswa yang baru memasuki pendidikan tinggi, karena lulusan sekolah menengah pada umumnya kurang percaya diri, masih memerlukan bimbingan untuk memilih bidang apa yang akan ditekuni karena belum punya bayangan profesi yang kelak akan ditekuni. Pendapat ini ada benarnya juga, oleh sebab itu perguruan tinggi yang menerapkan kurikulum terbuka harus memiliki dosen konselor atau pembimbing akademik yang berpengalaman dan berwawasan luas. Bimbingan individual yang intensif juga dapat “menyita” waktu kerja dosen di samping mengerjakan tugas kedosenan prioritas lainnya. Oleh sebab itu ada yang mengatakan *open curriculum* ini lebih cocok bagi mahasiswa baru yang mempunyai semangat meraih prestasi tinggi, istilahnya *self-starter*, dan antusias untuk mempersiapkan kariernya ke depan.

Pemberi kerja sering tidak paham dengan sistem *open curriculum*, dan ketika merekrut atau menilai pegawai baru akan menggunakan program studi sebagai dasar seleksi. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi lulusan perguruan tinggi yang

menerapkan *open curriculum* untuk menjelaskan kemampuan dan 'nilai' dirinya kepada pemberi kerja, bagaimana dapat meyakinkan pewawancara pemberi kerja bahwa dirinya mempunyai kemampuan yang dicari perusahaan.

PROSPEK KURIKULUM TERBUKA DI INDONESIA DAN UNIVERSITAS TERBUKA

Menarik untuk dikaji apakah kurikulum terbuka akan dapat diterapkan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Pada saat ini pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya berada pada titik awal kurikulum terbuka melalui sistem Kampus Terbuka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terjadi pergeseran tata pikir tentang struktur kompetensi lulusan dengan memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengambil matakuliah dari perguruan tinggi lain (maksimal setara 40 sks), dan matakuliah dari program studi yang berbeda (setara 20 sks). Sistem ini mempunyai tujuan membangun kondisi belajar yang lebih fleksibel bagi mahasiswa untuk dapat mengalami 'budaya kampus' yang berbeda ketika mengambil perkuliahan di perguruan tinggi lain. Demikian pula melalui peluang untuk mengambil matakuliah di luar program studi yang diambil, mahasiswa diharapkan akan terasah perspektif multi dan interdisiplinnya sehingga dapat memahami cara pandang dan cara berpikir beragam bidang keilmuan. Hal ini pasti bermanfaat bagi pengembangan diri mahasiswa. Oleh sebab itu mungkin dapat disimpulkan bahwa sebenarnya **Kampus Merdeka telah menginisiasi kurikulum terbuka di Indonesia**. Tidak terbatas pada matakuliah, Kampus Merdeka juga 'membuka' bentuk dan jenis pengalaman belajar yang lain dari 'sekedar' kuliah, misalnya dalam bentuk praktek kerja, pertukaran mahasiswa, proyek desa, dan wirausaha.

Pada tahap awal dapat diperkirakan bahwa pelaksanaannya akan bertahap, bahkan mungkin antar perguruan tinggi juga akan bervariasi. Penerapan kebijakan fleksibilitas kurikulum jelas memerlukan pembahasan awal secara konseptual, persiapan yang melibatkan sistem, dosen dan sarana prasarana. Bentuk terapan kurikulum yang fleksibel (terbuka) juga akan bervariasi, mengikuti kontinum dari yang paling moderat (minimal) sampai dengan yang sepenuhnya terbuka.

KESIMPULAN

Sebagaimana pedagogi terbuka, kurikulum terbuka dapat dikatakan sebagai inovasi yang sebenarnya merupakan ‘revisit’ atau perenungan ulang sistem yang sudah pernah eksis dalam pendidikan, untuk diterapkan dalam kondisi jaman yang sudah berubah. Meskipun mungkin dianggap pendekatan atau paradigma yang radikal, yang dapat membuat kacau sistem yang sudah tertata dengan baik, namun kurikulum terbuka layak dicermati dan dipertimbangkan. Pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan klasik seperti kesejangan ekonomi dan infra struktur, dan hal ini mempengaruhi kesiapan masyarakat untuk keluar dari ‘zona aman’ pendidikan konvensional. Tetapi kemajuan dan perubahan masyarakat secara global tidak dapat dibendung, sehingga pendidikan tinggi perlu membuka diri, mencermati, mencerna dan bila dianggap tepat, menerima paradigma baru serta membuat lompatan dan terobosan untuk membangun manusia Indonesia tangguh seutuhnya. Apakah perubahan paradigma yang pada awalnya eksperimentatif ini mengandung resiko? Pasti. Tetapi seperti kata bijak, *the real risk isn't in experimentation, it's in maintaining the status quo*. Wallahualam. Jaman yang akan membuktikan.

REFERENSI

- Cowan, J. (2006). *On becoming an innovative university teacher: Reflection in action*. London: McGraw-Hill Education.
- Education Connection. (2020). *Open curriculum colleges*. Diunduh 22 Juli 2020 dari <https://www.educationconnection.com/resources/open-curriculum-colleges/>
- Gaunt, H. (2008). One-to-one tuition in a conservatoire: The perceptions of instrumental and vocal teachers. *Psychology of Music*, 36(2), 215–45. <https://doi.org/10.1177/0305735607080827>
- Kehdinga, G.F. (2019). *Theorising the Open curriculum as pathway to Responsiveness to in South African higher education*. ICNA Education. International Conference on New Approach of Education. Amsterdam, Netherland, 2019.
- Kelly, L.Y. (1974). Open Curriculum: What and Why. *The American Journal of Nursing*. Vol. 74, No. 12, pp. 2232-2238, DOI: 10.2307/3423133.
- Naglaa, M. (2018). The Debate between Traditional and Progressive Education in the Light of Special Education. *Institut of Education Sciences*. ERIC Number: ED583181
- Rowe, S.C. (2017). Liberal Education: Cornerstone of Democracy. *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 76, No. 3, hal. 579 – 617.
- Ritchie, L. (2018). Opening the Curriculum through Open Educational Practices: International experience. *Open Praxis*, vol. 10 issue 2, April–June 2018, pp. 201–208 (ISSN 2304-070X)

- Teagle Foundation. (2006). *The values of the open curriculum: An alternative tradition in liberal education*. A Teagle Foundation “Working Group” White Paper June 2006
- Wicaksono, S. (2012). *Open curriculum di Brown: Membuka pikiran dan mendewasakan*. Diunduh pada 20 Juli dari Yayasan Indonesia Mengglobal : <http://indonesiamengglobal.com/2012/12/open-curriculum-di-brown-membuka-pikiran-dan-mendewasakan/>

7 **PENUTUP:** PENDIDIKAN TERBUKA UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Prof. Tian Belawati, Ph.D.

SISTEM PENDIDIKAN TINGGI TERBUKA TERPADU: SUATU GAGASAN

TANTANGAN PENINGKATAN MODAL INSANI INDONESIA

Indonesia kini tengah menikmati bonus demografi dimana 68,7% dari penduduk berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun). Pada tahun 2019 jumlah ini diperkirakan mencapai sekitar 183,36 juta jiwa (Survei penduduk antar sensus atau Supas, 2015). Jumlah penduduk produktif ini diperkirakan akan mencapai di atas 200 juta jiwa (65,2% dari perkiraan 318,96 juta jiwa) ketika kemerdekaan Indonesia genap berusia 100 tahun (databoks.katadata.co.id, 2018). Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2045 angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Indonesia akan mencapai 53,4%. Hal ini tentu harus diwaspadai apabila kita ingin Indonesia menjadi negara yang maju pada era ulang tahun emas (100 tahun) di 2045. Oleh karena itu, mempersiapkan dan memberdayakan penduduk usia produktif agar dapat menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa menjadi sangat penting. Artinya, Pemerintah harus dapat menciptakan suatu sistem yang dapat menjangkau keseluruhan 200 juta

lebih jiwa tersebut agar mereka memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan dan sumber belajar untuk meningkatkan kompetensi dirinya.

Disisi lain, fakta menunjukkan bahwa Pemerintah belum dapat memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh masyarakat usia produktif tersebut. Data angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi yang menunjukkan persentase penduduk usia 19-23 tahun yang seyogyanya menikmati pendidikan tinggi hingga sekarang masih berada di seputaran angka 34,58%. Padahal Pemerintah telah menganggarkan tidak kurang dari 4,9 trilyun rupiah untuk beasiswa Bidikmisi. Hal ini mengindikasikan bahwa ada lebih dari 12 juta anak yang seharusnya menikmati pendidikan tinggi namun saat ini belum terjangkau oleh sistem pendidikan tinggi nasional yang ada. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) periode 2014-2019, M. Nasir, mengakui bahwa Indonesia belum memberikan kesempatan adil bagi pemuda yang hidup di kota atau kabupaten yang jauh dari PT, sehingga Kemenristekdikti ketika itu mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan Program Studi Jarak Jauh (Kompas, 2019) seperti yang dilakukan Universitas Terbuka (UT). Upaya ini didasari kesadaran bahwa sistem pendidikan tinggi konvensional yang bersifat tatap muka memang akan sulit menjangkau seluruh wilayah nusantara karena keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (dosen) maupun sumberdaya fisik (kampus dll.).

Sistem Pendidikan jarak jauh (SPJJ) memang dapat mengatasi kendala jarak, baik dari jarak fisik seperti domisili, jarak demografi seperti usia, maupun jarak sosial seperti daya beli. SPJJ seperti yang dilakukan oleh UT telah terbukti mampu meningkatkan daya tampung perguruan tinggi hingga puluhan kali daya tampung universitas dengan sistem tatap muka.

Data mahasiswa UT tahun 2019 sebesar 312.656 mahasiswa mengindikasikan bahwa SPJJ mampu meningkatkan daya tampung lebih dari 10 kali lipat sistem tatap muka yang rata-rata hanya mampu menampung sekitar 30 ribu mahasiswa. Namun demikian, SPJJ yang dilakukan UT tetap belum mampu memberikan layanan pendidikan yang merata kepada seluruh warga negara yang berhak atas layanan pendidikan dari Pemerintah. Disamping itu, SPJJ belum menjamin dan memfasilitasi penggunaan ilmu pengetahuan dan informasi secara terbuka sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa harus menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi yang menghasilkannya. Dengan kata lain, SPJJ belum sepenuhnya dapat memfasilitasi implementasi filosofi bahwa *'knowledge and education are public good'* dan *'everyone has the right to knowledge and education'*.

Gagasan global akan keterbukaan akses terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan telah mulai masuk ke Indonesia. Sejak fenomena *MIT opencourseware* pada awal tahun 2000-an, banyak institusi pendidikan khususnya perguruan-perguruan tinggi besar mulai mengembangkan berbagai materi pembelajaran dan mengunggahnya ke *website* mereka. Materi-materi pembelajaran tersebut menjadi terbuka bagi siapa saja. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di awal tahun 2000-an juga meluncurkan program hibah kepada dosen-dosen untuk mengembangkan materi digital dan hasilnya di-*share* sebagai milik bersama. Namun, walaupun diunggah secara terbuka, materi-materi tersebut tidak secara eksplisit disebutkan sebagai *open content* dengan lisensi terbuka. Pada praktiknya, inilah awal *open movement* pada dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Kemudian, seiring dengan semakin populernya *e-learning* serta *massive open online learning* (MOOCs), beberapa perguruan

tinggi dan institusi lain juga mulai mengembangkan *e-learning* dan MOOCs. Walaupun masih dalam tahap awal, saat ini setidaknya ada tujuh penyelenggara MOOCs di Indonesia, yaitu UT, Universitas Ciputra, Universitas Gajah Mada (*FOCUS project*), SEAMOLEC, PUSTEKKOM, SPADA (miliki DIKTI), dan IndonesiaX (Belawati, 2019). Berbeda dengan SPJJ atau *e-learning* biasa, MOOCs merupakan penyelenggaraan kuliah online yang berbasis keterbukaan, dan materi yang digunakan dalam MOOCs juga banyak yang merupakan *open content*.

Gerakan awal keterbukaan akses terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan awal ini disambut dan tampaknya ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode sekarang (2019-2024) yang kemudian meluncurkan kebijakan ‘Merdeka Belajar’ dan ‘Kampus Merdeka’. Konsep ‘Kampus Merdeka’ sangat menarik untuk dipahami, khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud 3/2020 ini antara lain mewajibkan Perguruan Tinggi (PT) memberikan hak kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti pembelajaran dari luar Program Studi (Prodi) yang diikutinya, baik dari PT yang sama ataupun berbeda. Secara spesifik, Pasal 15 dan 18 mengatur hal-hal sebagai berikut.

- Pasal 15: pembelajaran dapat dilakukan di dalam dan di luar Prodi, dari PT yang sama ataupun PT lain, bahkan dapat dari lembaga non-PT; dan
- Pasal 18: PT wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: pembelajaran dalam Prodi minimal empat (4) semester, pembelajaran di luar Prodi pada PT yang sama minimal satu (1) semester atau setara 20 sks, dan pembelajaran pada Prodi di luar PT termasuk dari lembaga non PT.

Kebijakan yang diatur dalam kedua pasal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa sistem pendidikan tinggi nasional telah mengadopsi konsep keterbukaan dalam pendidikan tinggi formal, dimana mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah yang diselenggarakan oleh lembaga lain (tentunya termasuk lembaga penyelenggara MOOCs) dan PT serta Prodi wajib mengakui capaian hasil belajarnya dan menyetarakannya dengan sks dalam kurikulum Prodi yang diikutinya.

Kebijakan Kampus Merdeka sangat menjanjikan dan merupakan langkah awal yang bijaksana dari Pemerintah saat ini. Namun demikian, kebijakan ini belum mampu menjawab tantangan yang dihadapi serta pemenuhan hak seluruh warga negara untuk mendapatkan akses kepada pendidikan dan ilmu pengetahuan, khususnya yang didanai oleh dana pajak masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan Kampus Merdeka belum menjadikan Sistem Pendidikan Nasional sebagai suatu sistem yang berkeadilan sesuai amanat UUD 45 serta Pancasila. Tidak lama setelah Pemerintah melahirkan kebijakan Kampus Merdeka, dunia dikejutkan oleh merebaknya penyebaran virus Corona yang menyebabkan pandemik Covid-19. Situasi pandemik ini memaksa Pemerintah untuk menutup sekolah dan perguruan tinggi, serta meminta pengelola pendidikan agar memberikan layanan pendidikan secara jarak jauh. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS pada Pasal 43 yang mengukuhkan kembali legalitas PJJ sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Tinggi Nasional, menjadi sangat strategik. Dalam waktu kurang dari satu bulan sejak kasus penderita Covid-19 pertama diumumkan Pemerintah, hampir seluruh perguruan tinggi telah memindahkan perkuliahan tatap muka mereka ke pembelajaran daring. Secara otomatis, walaupun terbata-bata karena tanpa persiapan yang matang, literasi

komunitas pendidikan khususnya dosen dan mahasiswa tentang pendidikan dan pembelajaran jarak jauh, khususnya secara daring, meningkat dengan pesat. Berbagai webinar diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan asosiasi-asosiasi keilmuan tentang berbagai aspek pendidikan jarak jauh, namun memang belum menyentuh aspek keterbukaannya kecuali untuk diskusi model MOOCs.

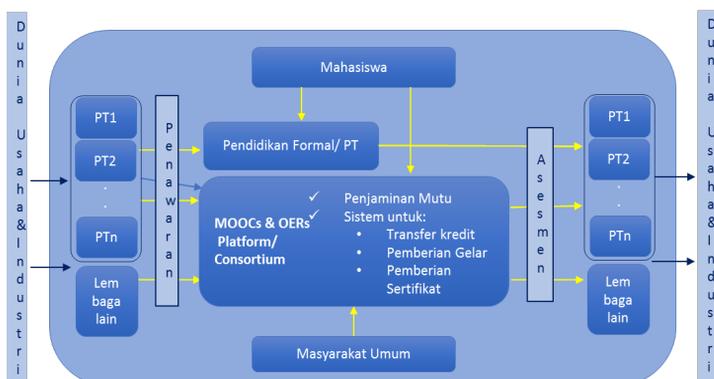
Walaupun demikian, fenomena disrupsi pendidikan tinggi oleh Covid-19 ini telah meningkatkan pengenalan dan pemahaman sivitas akademika dan masyarakat tentang potensi sistem pendidikan jarak jauh dan pendidikan terbuka untuk menimba ilmu dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Momentum ini sangat baik dan jangan sampai terlewat untuk dikapitalisasikan menjadi sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat untuk keadilan pendidikan tinggi bagi semua.

Sistem Pendidikan Tinggi Terbuka yang Berkeadilan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka upaya pemenuhan amanat UUD 45 dan sila kelima Pancasila harus dilakukan secara lebih makro dan substansial dari kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka perlu dipertajam dengan filosofi dan konsep Pendidikan Terbuka yang, selaras dengan UUD 45, meyakini bahwa pendidikan dan pengetahuan adalah milik publik dan hak setiap orang.

Saat ini DIKTI telah memiliki SPADA (Sistem Pembelajaran Daring). SPADA diresmikan sebagai suatu lembaga agregator dan penghubung (hub) kegiatan administrasi dan akademik PT yang bekerja dengan modus pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, konsep SPADA ini tampaknya belum sepenuhnya mengadopsi paradigma pendidikan terbuka. Belum semua perkuliahan daring yang diselenggarakan oleh PT-PT dalam SPADA dibuka kepada masyarakat umum sebagai suatu

mata kuliah terbuka (MOOCs) yang kemudian dapat diakui kreditnya (sks-nya) oleh PT (baik PT penyelenggara matakuliah tersebut maupun PT lainnya); dan jika diinginkan dan telah mencukupi juga dapat diajukan sebagai bagian dari pemenuhan kurikulum suatu program utuh. Demikian juga, berbagai materi pembelajaran dalam SPADA dibagikan kepada masyarakat sebagai suatu *open content* dengan mengadopsi lisensi terbuka *Creative Commons*. Secara ringkas Gambar 1 berikut menunjukkan alur pikiran ini. Peningkatan SPADA seperti ini secara langsung akan merupakan peningkatan kebijakan Kampus Merdeka.



Gambar 1. Sistem Pendidikan Tinggi Terbuka Terpadu

Seperti terlihat dalam Gambar 1 di atas, sistem Pendidikan Tinggi Terbuka menyatukan konsep pendidikan formal dan non-formal (dalam bentuk MOOCs). Sistem ini membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil matakuliah dari luar program studi maupun perguruan tingginya, baik dari perguruan tinggi lain maupun dari para penyelenggara MOOCs sesuai dengan Permendikbud 3/2020. Matakuliah dari luar tersebut kemudian mendapat pengakuan dan diberi kesetaraan bobot sks untuk memenuhi persyaratan program

studi yang diikutinya. Di samping itu, masyarakat umum yang tidak berada dalam lingkungan perguruan tinggi juga diberi kesempatan untuk “belajar” dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi karena di-*release* sebagai *open educational resources* (OERs) ataupun sebagai MOOCs. Dengan demikian, investasi dana publik yang dilakukan melalui pendanaan perguruan tinggi akan memberi manfaat pula kepada masyarakat luas.

Dalam Sistem Pendidikan Tinggi Terbuka (SPTT) tersebut, Pemerintah tetap menjamin kualitas pendidikan yang diselenggarakan melalui suatu lembaga semacam konsorsium, yang dapat merupakan peningkatan SPADA yang telah ada sekarang. Lembaga ini tentu dapat pula berupa lembaga independen baru seperti *Institute Cyber Education* (ICE) yang dibentuk Kemenristekdikti pada 2019 yang lalu, atau suatu lembaga baru sama sekali. Seluruh PT yang ada akan mengisi kebutuhan akses pendidikan dalam suatu SPTT yang terpadu. SPTT Terpadu sekaligus akan menjangkau masyarakat umum (di samping yang berstatus sebagai mahasiswa) untuk mendapatkan layanan pendidikan tinggi. Hal ini secara langsung merupakan penunaian amanat UUD 1945 dan sila ke lima Pancasila. Jika sistem pendidikan yang terbuka terpadu seperti ini dapat diimplementasikan, maka kita dapat merealisasikan ungkapan bijak Ki Hadjar Dewantara, Bapak pendidikan di Indonesia, tentang pendidikan yang seharusnya:

*“Setiap orang menjadi guru,
setiap rumah menjadi sekolah”*

Referensi

- Belawati, T. (2019). Massive open online courses. The state of practice in Indonesia. Dalam K. Zhang, C.J. Bonk, T.C. Reeves, T.H. Reynolds, *MOOCS and Open Education in The Global South. Challenges, Successes, and Opportunities* (hal 63-71). New York: Routledge.
- Databoks.katadata. (2018). *100 tahun Indonesia merdeka jumlah penduduk mencapai 319 juta jiwa*. Diunduh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/03/100-tahun-indonesia-merdeka-jumlah-penduduk-mencapai-319-juta-jiwa>.
- Kompas.com. (2019). *Menyiasati naiknya angka partisipasi kuliah dengan kuliah online*. Dibaca pada <https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/18/20564831/menyiasati-naiknya-angka-partisipasi-kuliah-dengan-kuliah-online>.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Turan, Selahattin. (2011). Plato's concept of education in 'Republic' and Aristotle's concept of education in 'Politics'. *Education and Science*, 36(162), pp. 31-38
- UNESCO. (2018). *One in five children, adolescents and youth is out of school*. UIS/GEM Report Fact Sheet 48, p.5. Diunduh pada tanggal 29 Januari 2020 dari <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf>
- UNESCO. (2019). *UNESCO recommendation on open educational resources*. Diunduh pada tanggal 29 Januari 2020 dari <https://en.unesco.org/news/unesco-recommendation-open-educational-resources-oeer>

PROFIL EDITOR DAN KONTRIBUTOR

Profil Editor



Prof. Tian Belawati, Ph.D.

Prof. Tian Belawati adalah Guru Besar pada FKIP Universitas Terbuka (UT) dan Rektor UT selama dua periode (2009-2013 dan 2013-2017). Dia aktif dalam berbagai inisiatif dan kerjasama internasional dan menjadi Sekretaris Jenderal (2007-2009) dan kemudian Presiden (2009-2010) dari *The Asian Association of Open University (AAOU)*; *Executive Committee* (2009-2012), *President* (2012 – 2015), dan *Board of Trustee* (2017-sekarang) dari *The International Council for Open and Distance Education (ICDE)*, sebagai anggota *Board of Directors* (2017-2019) dari *The Open Education Consortium (OEC)*, serta menjadi anggota Majelis - Pendidikan Dewan Pendidikan Tinggi (2017-2019). Saat ini dia adalah Ketua Dewan Guru Besar UT. Dia juga merupakan penerima *The Meritorious Service Award* dari AAOU pada tahun 2012 dan *Individual Promotor Award* dari *The African Council for Distance Education (ACDE)* pada 2014.

Profil Kontributor



Prof. Dr. Ali Muktiyanto

Ali Muktiyanto; biasa dipanggil Gus Ali oleh para sahabatnya, adalah Profesor Akuntansi Keuangan Publik FE UT. Beliau yang lahir di Demak, 24 Agustus 1972, adalah bungsu tiga belas bersaudara dari Kyai Lurah H. Abu Ambar (alm) dan Hj. Siti Fadhillah (Alm). Dua puluh satu tahun bahtera

rumah tangga Gus Ali dijalani bersama Hj. Een Sueni dan telah diberkahi 2 putri dan 2 putra. Gus Ali menyelesaikan Pendidikan SD di Demak, SMPN1 dan SMAN1 di Kudus, S1 Akuntansi STIE Tridharma dan S2 Ilmu Ekonomi & Akuntansi UNPAD di Bandung, serta S3 Ilmu Akuntansi FEB UI di Depok. Kepakaran Beliau adalah Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Publik kekhususan University Governance. Pemegang ResearcherID: A-9467-2018 dan Scopus Author ID: 57191993122 ini, selain aktif sebagai dosen dan Dekan FE UT 2018-2022, juga aktif pada berbagai lembaga sosial dan keagamaan. Falsafah hidup Gus Ali adalah senantiasa bermanfaat untuk umat, hidup dalam kebersahajaan, serta bernilai di hadapan Yang Mahakuasa.



Prof. Dr. Chanif Nurcholis

Hanif menyelesaikan Sarjana Administrasi Negara pada FISIP Universitas Terbuka, Magister Administrasi Publik di Universitas Indonesia, dan Doktor Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Padjadjaran. Pada 2015, pemerintah mengangkatnya sebagai guru besar tetap pada FHSIP UT bidang ilmu administrasi pemerintahan daerah. Di FHSIP dan PPS UT, ia mengampu mata kuliah Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Filsafat Pemerintahan, serta Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota. Tugas tambahan yang dia emban adalah ketua Program Studi Administrasi Negara, ketua Persiapan Program Magister Administrasi Publik (S2) FISIP, dan ketua Senat Akademik (2018-2022). Dia menjadi ahli pada RUU Desa, RUU Pemerintahan Daerah, dan RUU Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dia aktif pada organisasi profesi yaitu Ketua Umum Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (2016-2019), Ketua Dewan Pakar Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (2019-2022), Ketua Dewan Pakar Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (2020-2024). Dia menulis buku tentang pemerintahan daerah, pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa dan kota, perencanaan pembangunan partisipatif pemerintah daerah. Dia juga menulis artikel tentang pemerintahan lokal yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Dia juga aktif mempresentasikan hasil penelitiannya tentang *local government* pada seminar nasional dan seminar internasional.



Prof. Daryono, Ph.D.

Daryono menyelesaikan PhD in Law dari the Australian National University, Australia tahun 2018 dan mendapatkan MA dari University of Victoria, Canada. Sejak 2014 menjadi profesor tetap di bidang Ilmu Hukum di Universitas Terbuka. Pada tahun 2010-2018 mendapatkan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UT dan saat ini sebagai Kepala Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh UT. Minat penelitian meliputi hukum properti, hukum dan pembangunan dan pendidikan terbuka. Pada 2010-2013 sebagai anggota penelitian tentang *Open Educational Resources* (OER) yang didanai oleh *International Development Research Center* (IDRC), Canada. Pada tahun 2014 bergabung dengan penelitian tentang *Research on OER for Development* (ROER4D) didanai oleh IDRC (2014-2017). Saat ini dia adalah anggota kelompok *working research group* tentang kontrak investasi lahan pertanian yang berkelanjutan didanai oleh *International Institute for Unification of Private Law* (UNIDROIT) (2017-2020). Pada tahun 2019-2022 sebagai management team BUKA project didanai oleh Erasmus+ European Union.



Prof. Dr. Ginta Ginting, M.B.A.

Lahir di Malang, Jawa Timur pada tahun 1960, Guru Besar Pada FE-UT Jurusan Manajemen. Penulis menamatkan pendidikan S1 di FE-Universitas Brawijaya, melanjutkan pendidikan S2 (*Master Business Administration*) di Edith Cowan University-Australia. Studi Doktor Ilmu Manajemen diselesaikan di FEB Universitas Padjadjaran-Bandung lulus pada tahun 2014. Pekerjaan tetap sebagai dosen FE dan dosen Pasca Sarjana UT. Aktif menulis di berbagai jurnal (terindex Scopus), diantaranya *Modelling business responsibility of SME's: A study based on the stakeholder Approach. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 24. 2016* dan *Open innovation Model: empowering entrepreneurial orientation and utilizing network resources as determinant for internationalization performance of Small Medium Agroindustry. Procedia-Elsevier, 3, 2015*. Penulis telah menghasilkan Karya tulis dalam bentuk buku dan *book chapter* diantaranya: *Wirausaha di Era digital, Pemasaran Jasa Pariwisata, The importance of improving UT's service quality for sustaining in the Era Revolution 4.0 (book chapter)*; *Menelusuri praktek entrepreneurship pada institusi pendidikan tinggi: Corporate Entrepreneurship Based Model (book chapter)*.



Prof. Dr. Karnedi

Sejak 2016 menjadi Guru Besar bidang Ilmu Linguistik pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dan mendapat Tugas Tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UT (2018-2022). Pendidikan S1 bidang Ilmu Linguistik diperoleh dari Universitas Indonesia (1990) sebelum kemudian menempuh S2 bidang *Media Technology for Teaching English as a Foreign Language (TEFL)* dari Newcastle University, Inggris (1995). Menerima penghargaan dari DRPM-DIKTI (2006) sebagai penulis buku bahan ajar Perguruan Tinggi (Buku Materi Pokok/Bahan Ajar Cetak dan Non Cetak UT). Pendidikan S3 bidang Ilmu Linguistik diperoleh dari Universitas Indonesia (2011) melalui Program *Sandwich/Visiting Scholar* DIKTI di University of Manchester, Inggris (2008). Terpilih sebagai Dosen Berprestasi Pertama UT (2012) dan sebagai Finalis Dosen Berprestasi Tingkat Nasional DIKTI (2012). Selain menulis belasan buku bahan ajar matakuliah dan penyusun kamus dwibahasa dan glosarium Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (*Lexicography*), dalam beberapa tahun terakhir fokus pada riset dan publikasi bidang *Translation Studies*, *Cognitive Linguistics*, dan *Corpus Linguistics*.



Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring

Maximus Gorky Sembiring adalah Guru Besar pada FKIP Universitas Terbuka. Menyelesaikan studi S1 Matematika (FMIPA-USU, Medan, 1983), S2 *in Pure Mathematics* (UNE, Armidale, Australia, 1993) dan S3 Pendidikan (UNJ, Jakarta, 2013). Minat riset dan publikasi fokus di bidang manajemen pendidikan jarak jauh, terutama terkait “student support services”. Dalam tujuh tahun terakhir, menghasilkan 31 karya ilmiah sudah disajikan/dipublikasikan di konferensi/jurnal internasional bereputasi. Sebelas diantara karya tersebut dianugrahi penghargaan “best paper awards” (ICDE, AAOU, ICOIE, dan ETWC); termasuk pemegang 23 sertifikat hak kekayaan intelektual yang dikeluarkan Kemenkumham, RI. Selain itu, berkesempatan pula memiliki pengalaman panjang di di manajemen, antara lain pernah menjadi Sekretaris Jurusan, Pembantu Dekan, Ketua LPM, dan Pembantu Rektor; selain sebagai Sekretaris/merangkap Anggota Senat di tingkat Universitas Terbuka dan Fakultas.



Prof. Ojat Darajat, Ph.D.

Ojat Darajat adalah guru besar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Terbuka dan telah berpengalaman lebih dari 30 tahun bekerja di pendidikan jarak jauh. Background pendidikan: lulus sarjana pendidikan dunia usaha IKIP Bandung, Graduate diploma bidang Management dan Master of Business Management di LaTrobe University. Menempuh Ph.D bidang Curriculum Theory and Implementation di SFU – Canada. Beliau memiliki pengalaman menjabat sebagai ketua Prodi. Pendidikan Ekonomi dan Ketua Jurusan PIPS pada FKIP-UT; beliau juga pernah menjabat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kepala UPBJJ-UT Bogor, Kepala Pusat Jaminan Kualitas, dan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Ajar, Bahan Ujian, dan Sistem Informasi. Sejak Juli 2017 diberi amanah sebagai Rektor UT Periode 2017-2021. Diluar UT, beliau sebagai Ketua Bidang TIK di Majelis Rektor Peruguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dan di Forum Rektor Indonesia (FRI). Sejak 2019 beliau sebagai Presiden the Asian Association of Open University (AAOU) dan sebagai Perwakilan dari International Council for Open and Distance Education (ICDE) untuk Quality Assurance Network wilayah Asia. Disamping itu, beliau juga menjabat sebagai Dewan Pakar di Persatuan Guru-Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) sejak tahun 2015 sampai sekarang.



Prof. Suciati, Ph.D.

Suciati menyelesaikan studi sarjana Bahasa Inggris di Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1980, program master dan doktor dalam bidang Teknologi Pendidikan di Syracuse University, New York State, Amerika Serikat pada tahun 1986 sd 1990. Sebelum bekerja di Universitas Terbuka pada tahun 1984, tahun 1982 – 1984 bekerja sebagai sekretaris Program Belajar Jarak Jauh - P3DK pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Saat ini dia sebagai guru Guru Besar dan dosen Program Magister Pendidikan Dasar pada FKIP Universitas Terbuka. Pernah menjabat sebagai Direktur Pascasarjana UT 2 periode dari 2010 – 2017. Saat ini juga sebagai *chief editor* Jurnal Pendidikan – UT. Sering diminta menguji program doktor di Universitas Negeri Jakarta dan master di Universitas Pelita Harapan. Minat penelitian mencakup perkembangan dan terapan *new technology dalam pembelajaran* untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pendidik pada era abad 21.

PENDIDIKAN TERBUKA UNTUK INDONESIA EMAS

Tujuan kemerdekaan tidak hanya untuk berdaulat secara politik, tetapi utamanya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan harus diciptakan untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk membangun kehidupannya, serta menjadikan mereka warganegara yang produktif dan kontributif terhadap upaya kemajuan masyarakat dan bangsa. Dengan kata lain, sistem pendidikan tersebut harus menerapkan konsep pendidikan terbuka agar inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Buku ini menyajikan tulisan tentang konsep, model, dan implementasi sistem pendidikan tinggi terbuka ditinjau dari berbagai perspektif, khususnya pendidikan terbuka sebagai alat untuk membangun sumberdaya insani, untuk menghadirkan keadilan sosial, untuk memberikan pelayanan publik, untuk mendemokratisasikan pendidikan, dan untuk menciptakan keadilan ekonomi; yang pada akhirnya adalah untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Penerbit Universitas Terbuka

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,

Tangerang Selatan - 15437, Banten - Indonesia

Telp. 021-7490941, Faks. 021-7490147, Website. www.ut.ac.id